



**MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI**

# **KEPENTINGAN NASIONAL DAN AGENDA PEMBANGUNAN**

**EDISI KE-2**

**Kiprah Tahun Ke-2  
Wakil Ketua DPR RI/Korinbang  
DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL**

Editor: **Herman Effendi**

MENYERAP ASPIRASI  
MENCIPTAKAN SOLUSI

**KEPENTINGAN  
NASIONAL  
DAN AGENDA  
PEMBANGUNAN**

**EDISI KE-2**



KIPRAH TAHUN KEDUA  
WAKIL KETUA DPR/KORINBANG  
**DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL**

**Menyerap Aspirasi  
Menciptakan Solusi**

## **Kepentingan Nasional dan Agenda Pembangunan Edisi Ke-2**

**Kiprah Tahun Kedua Wakil Ketua DPR RI/  
Korinbang DR. (H.C.) Rachmat Gobel**

Diterbitkan oleh:

**BAGIAN PENERBITAN  
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN  
SETJEN DPR RI**

Gedung Nusantara II Lt.3  
Jl. Jend. Gatot Subroto-Senayan  
Jakarta-10270  
Tel.021-571 5687 Fax 021-571 5421  
Email: bag\_penerbitan@dpr.go.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit. *All rights reserved.*

ix + 417 hlm, 17X24 cm  
ISBN: 978-623-5898-01-8  
Cetakan Pertama, Juli 2022

**Penulis:**

Nining Indra Shaleh (Koordinator)  
Nasihin Masha  
Budi Jatnika  
Himawan Basuki  
Rini Koentarti  
Andreas Ambesa  
Mulyadin Permana  
Hafizur Rahman  
Ajeng Kusumaning Ayu  
Muh. Ardiansah Laitte

**Editor:**

Herman Effendi

**Korektor Naskah:**

Nining Indra Shaleh

**Foto:**

Rifqy M. Irsyad

**Desain Sampul dan Isi:**

Rianto Karman

MENYERAP ASPIRASI  
MENCIPTAKAN SOLUSI

**KEPENTINGAN  
NASIONAL  
DAN AGENDA  
PEMBANGUNAN  
EDISI KE-2**

KIPRAH TAHUN KEDUA  
WAKIL KETUA DPR/KORINBANG  
**DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL**

# Kata Pengantar

**B**uku “Kepentingan Nasional dan Agenda Pembangunan” ini adalah bagian dari laporan pelaksanaan agenda kegiatan Rachmat Gobel sebagai anggota DPRI-RI Fraksi Partai NasDem dan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang sepanjang masa sidang periode Oktober 2020-September 2021. Buku ini merupakan lanjutan dari laporan masa sidang tahun sebelumnya (2019-2020) yang diberi judul “Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi”.

Tetap dalam tema Menyerap Aspirasi Mencari Solusi yang selalu menjadi semangat Rachmat Gobel, buku Kepentingan Nasional dan Agenda Pembangunan ini berisi tentang langkahnya sebagai anggota parlemen dalam menjaga kepentingan nasional dalam pelaksanaan agenda pembangunan.

Frasa “Kepentingan Nasional dan Agenda Pembangunan” dipilih tim penulis karena inilah yang selalu menjadi perhatian utama Rachmat Gobel. Sebagai Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang), ia selalu menekankan, setiap agenda pembangunan ekonomi harus mengacu pada pelaksanaan pasal 33 UUD 1945. Pasal ini adalah roh sistem perekonomian nasional, dan harus terwujud dalam setiap dinamika kebijakan pembangunan ekonomi dan inilah kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel berjuang untuk terus mengawal pelaksanaan agenda pembangunan yang dirancang mitra kerjanya di pemerintah agar selalu

sejalan dengan pasal 33 tersebut. Memperkokoh sistem perekonomian dan memberi kemaslahatan dan keadilan bagi segenap anak bangsa.

Isu besar yang masih membayangi perekonomian nasional sampai saat ini, menurut Rachmat Gobel, adalah tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi hasil pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik. Tanpa ada perbaikan secara signifikan, isu ini akan menjadi beban berat bagi struktur perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan ke depan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia 2045 sebagai Negara Industri Maju.

Fakta di lapangan menunjukkan, potret kemiskinan dan ketimpangan ini masih sangat nyata. Isu inilah yang menjadi salah satu fokus utama Rachmat Gobel dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dan pimpinan DPR, baik dalam bidang legislasi, anggaran, pengawasan maupun diplomasi ke sejumlah negara.

Ia optimis, dengan pendekatan yang lebih holistik dan kesadaran untuk bersinergi yang lebih kuat, baik di pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, potret yang membebani harkat dan martabat bangsa ini bisa diatasi.

Kuncinya adalah bagaimana memberi fokus yang lebih besar kepada sektor-sektor ekonomi yang selama ini menjadi pendukung perekonomian rakyat yaitu pertanian dan UMKM. Lebih dari 97% angkatan kerja Indonesia dan kantong-kantong kemiskinan serta potret ketimpangan sangat jelas tergambar di sektor ini.

Berbagai upaya menyerap aspirasi dan membangun inspirasi dalam rangka menghapus potret kemiskinan dan ketimpangan itu telah dilakukan Rachmat Gobel melalui sejumlah program kerjanya. Program yang ia usung ini telah mendatangkan optimisme seperti terlihat semakin besarnya dukungan dari berbagai instansi dan lembaga.

Dalam semangat restorasi yang diusung Partai NasDem yang menjadi inspirasinya, Rachmat Gobel melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Berdialog dengan rakyat dan berbagai kalangan, mendiskusikan dan mencari solusi atas masalah di bidang industri dan pembangunan.

Melalui buku ini, masyarakat diharapkan bisa memahami latar belakang dan motivasi yang menjiwai kegiatan Rachmat Gobel dan juga visi Partai NasDem dalam menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan bagi Restorasi Indonesia. Mengembalikan semangat kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang



berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkeperibadian secara kebudayaan.

Solusi dan gagasan telah diperjuangkan dengan berbagai inisiatif dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, sumber daya manusia, warisan budaya bangsa. Ini terlihat nyata dalam berbagai kunjungannya selama reses ke sejumlah daerah.

Dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel juga turut aktif memperkuat diplomasi kerjasama ekonomi dengan berbagai negara dan lembaga internasional. Tujuannya adalah untuk menggalang kerjasama dan sinergi yang lebih kuat untuk meningkatkan nilai tambah potensi perekonomian nasional, terutama di bidang pertanian dan industri.

Dengan selalu memohon petunjuk dan ridha Allah Yang Maha Kuasa, serta dukungan dari partai, Rachmat Gobel yakin, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa seperti tertuang dalam pasal 33 UU 1945 bisa tercapai.

*Tim Penulis*



## Pengantar Edisi Ke-2

**A**tas saran dan masukan dari sejumlah pihak, termasuk dari konstituen dan kader Partai Nasdem, penerbit dan tim penulis melakukan sejumlah revisi pada isi dan tata letak cetakan pertama.

Pada edisi ke-2 ini, selain mengubah bentuk penyajian isi buku atau masalah dengan mengelompokkan dalam jumlah bab yang lebih ringkas, juga terdapat penambahan isi yang berisi sejumlah gagasan Rachmat Gobel yang disampaikan dalam sejumlah forum dan melalui media massa. Yang kami tempatkan pada Bab IV.

Edisi ke-2 ini diharapkan bisa lebih menggambarkan kiprah Rachmat Gobel dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengemban amanat sebagai anggota legislatif dan sekaligus Pimpinan DPR RI.

***Tim Penulis***





# Ucapan Terima Kasih

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam sejahtera buat kita semua

**D**engan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, marilah kita sama-sama meminta bimbinganNya agar selalu mendapat petunjuk dan pertolongan dalam setiap langkah kita menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anak bangsa.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung dan mempercayakan aspirasinya, serta memberi inspirasi bagi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR RI, pada tahun sidang 2020-2021.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Kader Partai NasDem se-Provinsi Gorontalo. Terima kasih kepada dan rekan-rekan sejawat di DPR RI, atas semua kerjasamanya dalam mengemban dan melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota legislatif.

Salam hormat dan terima kasih kepada tokoh masyarakat, agama, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan adat serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo serta Forkompinda Se-Provinsi Gorontalo.

Tidak lupa terima kasih atas dukungan keluarga besar, isteri dan anak-anak, serta teman-teman dan sahabat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penulis, staf di DPR RI, sehingga laporan kegiatan selama satu tahun sidang 2020-2021 bisa diterbitkan dalam bentuk buku “National Interest dan Agenda Pembangunan”.

Kami menyadari, pelaksanaan tanggung jawab sebagai anggota DPR RI masih jauh dari sempurna, namun kami bertekad untuk terus berupaya keras meningkatkan pengabdian, demi terwujudnya Indonesia Yang Makmur, Sejahtera dan Bermartabat.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana, selalu membimbing langkah-langkah kita dalam membangun Indonesia Yang Lebih Baik.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

***Salam Hormat  
Rachmat Gobel***



**Dalam kedudukannya sebagai anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel berjuang untuk terus mengawal pelaksanaan agenda pembangunan yang dirancang mitra kerjanya di pemerintah.**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar **(iv)**  
Pengantar Edisi Ke-2 **(vii)**  
Ucapan Terima Kasih **(x)**

## **Pendahuluan**

Terasah di Dunia Bisnis, Terampil di Panggung Politik **(2)**

## **1. Mengawal Agenda Pembangunan dalam Roh Konstitusi**

Selalu Berupaya Mengedepankan Kepentingan Nasional **(16)**

## **2. Parlemen Untuk Kesejahteraan dan Keadilan**

Optimalisasi Pasar Nasional Untuk Produk Dalam Negeri **(34)**

Mendorong Semangat Kemitraan Untuk Memperkuat Pembangunan Daerah **(44)**

Legislasi Untuk Fondasi Kebijakan Yang Lebih Responsif **(54)**



APBN 2022: Anggaran Transisi di Tengah Ketidakpastian **(70)**

Memperkuat Daya Saing Melalui Agenda Diplomasi Parlemen **(80)**

Bantuan Program Kerja Untuk Pembangunan Daerah **(134)**

Inisiasi Mengurai Benang Kusut Pupuk Subsidi dan Upaya Membudayakan Pupuk Nonsubsidi **(142)**

Menggerakkan Agribisnis Melalui Kebijakan Yang Berorientasi Nilai Tambah **(154)**

Mempertahankan Kepentingan Nasional Dalam Proyek Kereta Cepat dan Garuda Indonesia **(168)**

Membangun Indonesia Dari Pinggiran **(182)**

Membangun Semangat Restorasi Dalam Keragaman **(194)**

### 3. Langkah Gorontalo Mewujudkan Visi 2051

Misi Besar di Balik Pengembangan Pelabuhan Anggrek dan Rencana Kawasan Produk Halal **(216)**  
*Demplot* Berkembang, Kelompok Tani dan Koperasi Jadi Ujung Tombak **(226)**  
Penataan Lingkungan Untuk Membangun Hidup Yang Lebih Berkualitas **(238)**  
Peningkatan Kualitas SDM: Dari Bantuan Pendidikan Sampai Pencegahan *Stunting* dan Ventilator **(248)**  
Menyulap Wajah Pariwisata: Dari Benteng Tua sampai Kampung Mural **(258)**  
Meraih Kemenangan Pemilu Untuk Kesejahteraan Rakyat **(268)**

### 4. Ide dan Gagasan Untuk Kepentingan Nasional

Catatan Untuk Agenda Road to G20 Indonesia 2022 **(292)**  
Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Penyerapan Dana PEN, Belanja K/L dan Daerah **(296)**  
Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19 **(298)**  
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel Minta Agar OJK Lakukan Moratorium Pinjol **(301)**  
Mengenang HOS Tjokroaminoto **(303)**  
Tantangan dan Peluang Mendorong Generasi Milenial ke Sektor Pertanian **(308)**  
Peran Parlemen Indonesia Mendorong Pencapaian Target SDGs **(311)**

Untuk Capai Target Pembangunan, APBN 2022 Harus Didukung Kebijakan Non-Fiskal Yang Lebih Efektif **(315)**

Wakil Ketua DPR Korinbang Rachmat Gobel:  
Rencana Kerja Pemerintah 2022 Harus Bisa Efektif Meningkatkan Produktivitas UMKM **(318)**

## **5. Melayani Aspirasi Masyarakat**

Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 (16-24 Oktober 2020) **(326)**

Kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 (20-28 Desember 2020) **(336)**

Kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 (14 Februari-18 Februari) **(352)**

Kegiatan Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 (28 April-5 Mei 2021) **(268)**

Kegiatan Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 (23 Juli-31 Juli 2021) **(378)**

Lampiran **(406)**

Tentang Penulis **(410)**



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang  
Rachmat Gobel tengah  
berbincang dengan Presiden  
Joko Widodo.

**Dalam menjalankan fungsi nya sebagai lembaga legislator, DPR adalah mitra strategis pemerintah. Membangun komunikasi yang efektif dari lembaga ini menjadi sangat penting agar aspirasi rakyat bisa terwakili oleh Pimpinan dan anggota DPR dalam berbagai rapat ataupun pembahasan baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan.**

# PENDAHULUAN





Melihat langsung ke lapangan tentang berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adalah agenda kerja prioritas Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

# Terasah di Dunia Bisnis, Piawai di Panggung Politik

Tulisan ini sepenuhnya merupakan impresi personal saya dalam melihat sosok Rachmat Gobel, pebisnis murni yang tiba-tiba berani memutuskan terjun ke dunia politik. Dari hitungan waktu, sebetulnya saya belum lama mengenal Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dari Partai NasDem ini. Namun begitu, banyak hal yang membuat saya terkesan secara mendalam, kesan yang kemudian saya jadikan judul tulisan ini yaitu “Terasah di Dunia Bisnis dan Piawai di Panggung Politik”

Pertama bertemu dengan Rachmat Gobel ketika akan dikukuhkan sebagai pengurus pusat Partai NasDem saat Kongres Kedua berlangsung pada 2019 lalu. Kemudian berlanjut diskusi lumayan serius ketika Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem menyelenggarakan Sekolah Legislatif untuk kader yang terpilih sebagai anggota DPR. Saat itu kami sempat shalat Jum'at berjamaah di Kampus ABN, dan ini sebagai penanda bagi saya bahwa Rachmat Gobel memiliki laku spiritual yang baik terhadap agamanya.

Setelah Rachmat Gobel diberi amanah oleh pak Surya Paloh sebagai Wakil Ketua DPR RI, boleh dikatakan kami tidak pernah lagi bertemu. Mungkin ada campur tangan Allah, kami kembali bertemu ketika beliau ingin membuat pelatihan kader untuk pengurus partai NasDem di Gorontalo, satu keinginan yang menurut saya sebagai sebuah kesadaran besar.

Sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPP Partai NasDem, saya bersama teman-teman dari ABN mendiskusikan konsep pelatihan ini dengan Rachmat Gobel. Kami menawarkan konsep *profiling and in-house training* (PIHT), model yang didesain Tim ABN untuk mengevaluasi kapasitas pengurus dan menganalisis potensi daerah.

Diskusi berlangsung intens, dan sama sekali saya tidak melihat Rachmat Gobel sebagai sosok yang baru terjun ke kancah politik. Padahal,



Rachmat Gobel kecil dalam dekapan kasih sayang sang ayah Drs. H. Thayeb Mohammad Gobel.

sepengetahuan saya, beliau baru bergabung dengan Partai NasDem pada 2016, dan sebelumnya tidak ada jejaknya di panggung politik. Dari diskusi itu, saya mempunyai kesan kuat bahwa Rachmat Gobel adalah sosok yang mempunyai kemampuan belajar dengan cepat, mudah beradaptasi dengan dunia yang relatif baru bagi dirinya.

Meski tergolong muka baru di ranah politik praktis, beliau sangat paham tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan ideologi partai. Apa yang harus dilakukan agar partai tidak mengalami regresi atau de-institusionalisasi atau gagal mempertahankan diri, baik itu karena oleh faktor internal (seperti karena salah urus) ataupun faktor eksternal (seperti penurunan atau kehilangan pemilih).

Rachmat Gobel sangat menyadari bahwa kualitas kader sangat penting bagi keberlangsungan suatu partai. Ia sangat paham arti penting meningkatkan kapasitas dan kualitas kader agar fungsi *intermediary* partai berjalan sesuai dengan harapan konstituen.

**Meski tergolong muka baru di ranah politik praktis, beliau sangat paham tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan ideologi partai.**

### **Konsep Profiling dan Kesadaran Politik Rachmat Gobel**

*Profiling and in-house training* (PIHT) yang kami diskusi dengan Rachmat Gobel adalah konsep yang didisain ABN sebagai langkah penguatan kelembagaan pada Partai NasDem. Konsep ini sebagai langkah mengimplementasikan agenda politik yang telah disepakati Kongres II Partai NasDem pada 2019 yaitu Partai NasDem “berupaya” menyediakan ruang kekuasaan kepada publik untuk turut berpartisipasi dalam

menentukan kebijakan publik. Ketika demokrasi elektoral menyeret institusi politik formal, termasuk parpol ke dalam praktik transaksional maka NasDem harus berikhtiar memperkuat posisinya sebagai alat kontrol publik.

Untuk merealisasikan agenda tersebut, Forum Kongres menilai perlu untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola partai. Belum semua program partai selama ini dapat berjalan efektif karena adanya persoalan struktural dalam tata kelola organisasi partai.

Beberapa permasalahan krusial yang muncul seperti: (1) pembentukan struktur partai yang tidak didasarkan pada kebutuhan daerah, (2) mekanisme



Rachmat Gobel menyambut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam kunjungan ke Provinsi Gorontalo.

pemilihan pengurus di tingkat daerah yang tidak transparan, (3) struktur cabang dan ranting belum terbentuk 100%, (4) program *monitoring* dan evaluasi terhadap kinerja struktur tidak dilakukan secara serius, (5) konflik antar-pengurus masih sering terjadi, dan (6) koordinasi antara struktur dan eksekutif-legislatif belum berjalan optimal.

Permasalahan-permasalahan itu tentu sangat mendistorsi kinerja struktur partai, dan disinyalir dapat mengganggu fokus partai dalam memproduksi kebijakan publik yang adaptif (Neo & Chen, 2007).

Disinilah saya melihat Rachmat Gobel mempunyai kesadaran politik yang tajam dengan mengambil langkah cepat melakukan pelatihan kader bagi pengurus Partai NasDem Gorontalo yang merupakan daerah pemilihannya. Mengambil langkah cepat untuk mewujudkan agenda politik partai seperti yang diamanahkan Kongres II.

Persoalan terpenting dari demokrasi adalah menjamin agar publik dapat mengontrol pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik, termasuk juga mengontrol otoritas pembuat keputusan (Pascarina, dkk., 2015). Berangkat dari kesadaran ini maka Partai NasDem terus berupaya mendorong seluruh kadernya agar terlibat aktif mendesain kebijakan yang berkeadilan dan pro pada publik.

Melihat dari perjalanan hidupnya, saya yakin Rachmat Gobel belum pernah mengeyam pendidikan teori politik. Namun saya melihat, dalam pemikiran yang beliau lontarkan pada beberapa kesempatan diskusi kami, Rachmat Gobel sangat paham dan sadar pelebagaan partai sangat tergantung pada kaderisasi dan rekrutmen yang berkualitas. Seperti ditulis oleh Harmel and Svåsand (2019) dalam sebuah partai politik adalah bagian yang sangat penting pada proses institusionalisasi atau pelebagaan partai.

Bahkan menurut Huntington (1968-2006), keberhasilan melakukan pelebagaan adalah prasyarat mutlak bagi adaptabilitas—daya hidup partai dalam berbagai situasi dan kondisi kontekstual di mana ia berada. Dalam bahasa lain ilmuwan politik Panebianco (1988), menyatakan bahwa pelebagaan partai adalah proses solidifikasi—menghidupkan partai hidup dengan didukung oleh struktur dan anggota yang percaya pada nilai-nilai partai.

Tentu dari pemahaman itulah yang melahirkan inisiatif Rachmat Gobel untuk melakukan pelatihan dan pendidikan kader penggerak Partai NasDem, di mana seluruh pesertanya berasal seluruh pengurus partai dan konstituen muda yang masih visioner dan mau mengerti arah pembangunan. Kesadaran yang tentu juga datang dari pengalaman manajerialnya dalam menghadapi berbagai risiko dalam menjalani dunia bisnis dari sejak usia

muda, sehingga usaha yang diwariskan ayahnya Thayeb Mohammad Gobel terus berkembang sampai sekarang.

Secara umum, program kaderisasi dan pendidikan politik yang dilakukan di Gorontalo difokuskan pada tiga kegiatan dasar yakni (1) strategi pemenangan pemilu/pilkada melalui belanja gagasan dan pengalaman, (2) mengenalkan sistem pelembagaan partai melalui desain strategi kaderisasi dasar, dan (3) menyampaikan gagasan restorasi NasDem dalam konteks budaya lokal.

Tiga kegiatan itu kemudian dikembangkan dalam sebuah buku saku yang juga digunakan sebagai modul pelatihan dan pendidikan kader penggerak. Tujuannya adalah untuk menciptakan kader penggerak yang dapat memahami garis ideologis partai secara baik yang bertumpu pada strategi pelembagaan partai berbasis kearifan lokal.

Saya menangkap kesan yang kuat, antusias Rachmat Gobel menyambut konsep PIHT yang ditawarkan ABN didasari realitas saat ini, yang dikaitkan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi bangsa ke depan. Kesadaran bahwa beragam krisis yang menerpa kehidupan masyarakat ternyata tidak bisa diatasi dengan hanya menjadi pengusaha, tetapi juga dibutuhkan pemahaman akan proses politik yang mencerdaskan.

Seorang Rachmat Gobel seolah ingin menegaskan, apapun masalah yang kita miliki, harus diselesaikan dengan kerja keras sekaligus cerdas dan ini akan dicapai melalui penguatan pelembagaan dan struktur partai.

Studi perbandingan yang dilakukan National Democratic Institute (NDI) tentang *Political Party Statue* (2019) di sejumlah negara—seperti Afrika Selatan, Australia, Kanada dan Swedia—menegaskan bahwa sebuah partai modern, jika ingin maju, perlu melakukan penguatan struktur partai melalui program kaderisasi berjenjang. Organisasi partai harus rapi baik dari aspek pengelolaan maupun program-program yang ditawarkan. Dalam temuan NDI, kesalahan mengelola dan mengembangkan struktur partai biasanya berdampak fatal pada proses implementasi kebijakan dan eksekusi program.

**Rachmat Gobel adalah tipe pemimpin yang tidak hanya menghargai kesetiakawanan, ia juga memiliki kesadaran yang tinggi dalam pengembangan sumberdaya manusia.**

Rachmat Gobel juga memercayai bahwa sistem politik Indonesia menempatkan partai politik (parpol) sebagai salah satu pilar penting dalam tradisi demokrasi. Secara substansial, sistem demokrasi semestinya menyediakan dan menjamin hak-hak dasar kewargaan sehingga relasi kuasa yang diskriminatif dan marginal dapat dihindari. Pada titik inilah parpol diletakkan sebagai *agency intermediary* terpenting dalam menyambungkan ekspresi politik kewargaan melalui kebijakan publik.

Pendidikan politik dibutuhkan oleh pengurus partai karena struktur partai NasDem saat ini memiliki nomenklatur yang berorientasi pada penanganan isu-isu publik yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Konsep *profiling and in-house training* adalah sebagai cara atau sarana membangun kader partai yang mempunyai adaptabilitas partai dan solidifikasi yang kuat dalam menangani berbagai isu yang berkembang di ranah publik.

### **Pengabdian dan Kesederhanaan Berpikir**

Kesederhanaan berpikir Rachmat Gobel menuntunnya untuk menjalani kehidupan sosial-politiknya yang *straight-forward* dalam melihat ketidakadilan sosial yang menimbulkan ekses tingginya angka kemiskinan dan kebodohan di Propinsi Gorontalo. Konsistensi kesederhanaan berpikir Rachmat Gobel akan terus diuji dalam menangani isu-isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial dan terus berlanjut ke bidang politik.

Kemampuan manajerial Rachmat Gobel yang terasah sejak usia muda dalam menggeluti dunia bisnis menunjukkan, beliau tak hanya paham tentang segala sesuatu yang besar-besar, tapi ia juga mengerti hal-hal yang kecil dan detail. Rachmat Gobel tak meremehkan hal-hal kecil dan sepele, tapi ia juga tak menganggap berat hal-hal yang besar.

Sebagaimana sering disampaikan dalam setiap reses dan kundapil, masalah-masalah kecil kalau dibiarkan, suatu saat akan menjadi besar. Tapi masalah-masalah besar kalau segera dikerjakan, suatu saat akan menjadi kecil.

Rachmat Gobel adalah tipe pemimpin yang tidak hanya menghargai kesetiakawanan, ia juga memiliki kesadaran yang tinggi dalam pengembangan sumberdaya manusia. Itulah mengapa beliau sangat gencar untuk meminta ABN mengimplementasikan gagasan *profiling* struktur sebagai bagian dari proses kaderisasi dan pendidikan politik. Karena kaderisasi tanpa dibarengi dengan pendidikan politik yang baik akan menciptakan kesia-siaan.

Partai NasDem telah mengeluarkan Peraturan Partai No. 1/2020 yang intinya meminta seluruh jajaran pengurus untuk membentuk struktur organisasi partai berdasarkan kebutuhan wilayah, melakukan penguatan

kapasitas struktur yang dinilai masih potensial, dan mengelola struktur secara lebih profesional. Peraturan ini merupakan bukti keseriusan NasDem mengelola struktur partai. Dengan menggunakan sudut pandang Hofmeister dan Grabow (2011), ini juga menjadi bukti konkret bahwa Partai NasDem sedang berproses menjadi salah satu partai modern yang mengedepankan tata kelola organisasi partai yang permanen dan stabil.

Mengacu pada peraturan tersebut, DPW Gorontalo kemudian menyusun struktur pengurus yang baru dari tingkat wilayah sampai ranting. Proses pembentukan struktur telah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal mendasar seperti aspek kesediaan, militansi, tanggung jawab, lama mengabdikan di partai, dan lain sebagainya.

Di satu sisi, aspek-aspek ini diperlukan untuk memastikan komitmen kader saat bertugas sebagai pengurus, namun di lain sisi masih kurang karena belum menyentuh aspek kapasitas kader dan persesuaiannya dengan potensi daerah. Seorang pengurus NasDem, harus memiliki “kemampuan lebih” dalam memahami kebutuhan daerah dan menerjemahkannya ke dalam program-program konkret.

Saat ini struktur DPW dan DPD se-Gorontalo telah selesai di-*profiling* atas kehendak dan keinginan kuat Rachmat Gobel demi mewujudkan NasDem sebagai partai modern yang pro pada kebijakan publik. Hasil dari profiling memperlihatkan kemajuan yang signifikan dari para kader di semua lini struktur untuk bekerja secara cerdas dan berkesinambungan. Laporan bulanan menjadi lebih mudah didapatkan, bahkan pola pelaporan kegiatan berpartai menjadi lebih terbuka dan transparan untuk diketahui oleh masyarakat.

*Labuan Bajo, 11 Desember 2021.*

**Ahmad Baidhowi AR**

Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik  
DPP Partai NasDem





Wakil Ketua DPR RI/  
Korinbang Rachmat  
Gobel memimpin Sidang  
Paripurna DPR

**(1)**

**KEPENTINGAN  
NASIONAL**

**“Pembangunan  
seutuhnya bagi  
bangsa Indonesia  
hanya akan terwujud  
bila semangat UUD  
1945 bisa terus  
dijaga”**



Derap langkah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel unntuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di pelosok negeri.



# Selalu Berupaya Menedepankan Kepentingan Nasional

**N**ational interest atau kepentingan nasional adalah frasa atau terminologi yang paling sering mengemuka dalam pembicaraan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Dr. (H.C.) Rachmat Gobel. Ini tentu tidak mengherankan, topik kepentingan nasional selalu menjadi yang terdepan dalam setiap pemikirannya. Jauh sebelum terjun ke politik yaitu saat aktif sebagai pelaku usaha dan berbagai organisasi, aspek kepentingan nasional telah menjadi inti dalam setiap kiprahnya.

Semua itu adalah buah dari nilai-nilai yang telah tertanam sejak usia dini. Sebagai putera tertua, sedari kecil Rachmat Gobel diharapkan untuk jadi pengayom keluarga besar dan penerus usaha ayahnya yaitu Alm Drs H. Thayeb Mohammad Gobel, pelopor industri elektronika nasional di bawah bendera PT National Gobel. Perusahaan itu kini telah berganti nama menjadi PT Panasonic Manufacturing Indonesia.

Kepada anak-anaknya, Thayeb Mohammad Gobel menanamkan semangat untuk selalu mengedepankan kemaslahatan, berpikir positif menghadapi setiap persoalan dan dalam menjalankan tanggung jawab. Ini yang juga membuat Rachmat Gobel piawai dalam menyerap berbagai aspirasi dan menggalang sinergi dengan berbagai pihak. Ia selalu berpandangan, keberhasilan tidak bisa dicapai sendiri.

Semangat, keyakinan dan dedikasi yang kuat terhadap kemaslahatan telah mengantarkan Rachmat Gobel menuju berbagai prestasi. Tidak hanya mampu menjaga warisan sang ayah, Rachmat Gobel berhasil mengembangkan jaringan usaha keluarga besar Gobel. Ia juga mendapat kepercayaan untuk memimpin berbagai organisasi sosial dan dunia usaha seperti Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ketua Umum Persatuan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ).

Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Rachmat Gobel dipercaya menjadi anggota Komite Inovasi Nasional dan sebagai Ketua Pelaksana SEA Games 2011. Di era Presiden Jokowi, ia dipercaya menjadi Menteri Perdagangan 2014-2015 dan pada 17 Januari 2017 diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Jepang. Pada Pemilihan Legislatif 2019, melalui Partai Nasdem ia berhasil memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan Gorontalo dan menjadi anggota DPR RI dan kemudian dipercaya untuk duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang).

Rachmat Gobel juga banyak mendapat penghargaan, antara lain *Honorary Doctorate Degree* (Dr. H.C.) dari Tokushoku University pada 2002, kemudian pada 2014 menerima anugerah yang sama (Dr. H.C.) dari perguruan tertinggi tertua Jepang yaitu Chou University. Sebelumnya, pada 2009 Rachmat Gobel mendapat penghargaan sebagai Perekayasa Utama Kehormatan dalam Bidang Teknologi Manufaktur dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

### **Martabat Bangsa**

Dalam menentukan kepentingan nasional di bidang ekonomi, bagi Rachmat Gobel, panduannya sudah sangat terang yaitu pasal 33 UUD 1945. Pasal ini merupakan fondasi sistem pembangunan ekonomi Indonesia. Pasal ini mengamanatkan, perekonomian disusun berdasarkan prinsip kerakyatan. Sistem perekonomian harus menjamin terselenggaranya demokrasi ekonomi, keadilan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, serta mampu menjaga keseimbangan kemajuan dalam bingkai kesatuan nasional.

“Kepentingan nasional kita adalah bagaimana mewujudkan semangat yang tertuang pada pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian yang berkeadilan dan mengedepankan kepentingan seluas-seluasnya bagi kemakmuran rakyat,” kata Rachmat Gobel.

Setiap kebijakan atau gerak agenda pembangunan harus bisa mewujudkan prinsip partisipasi dengan memberi hak yang seadilnya kepada setiap orang atau kelompok masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi masing-masing. Setiap kemajuan yang diperoleh dari hasil pembangunan haruslah dirasakan semua lapisan masyarakat dan mereka ikut serta di dalamnya. Dengan kata lain, kemajuan ekonomi rakyat haruslah melekat atau inheren dengan kemajuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Rachmat Gobel selalu menegaskan, fokus pembangunan adalah manusia atau rakyat itu sendiri. Sasarannya adalah meningkatkan harkat dan

martabat bangsa yaitu memungkinkan atau memandirikan rakyat dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Ini mensyaratkan, pengelolaan kebijakan pembangunan harus selalu mengedepankan prinsip kesejahteraan dan kemakmuran bersama bagi setiap elemen bangsa.

“Mempertahankan dan menjaga kepentingan nasional seperti yang diamanatkan konstitusi menjadi tanggung jawab bersama, apalagi bagi yang diberi amanah memegang kekuasaan, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” kata Rachmat Gobel.

Sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam pembangunan selama ini, namun sejumlah persoalan besar masih membelit dalam bentuk berbagai ketimpangan di tengah masyarakat. Kesenjangan yang tinggi dalam penguasaan asset fisik maupun non-fisik.

Kondisi itu terlihat nyata, dan jika tidak teratasi maka akan menjadi beban yang semakin berat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Beban ini akan semakin terasa bila dikaitkan dengan upaya mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maju di dunia. Berbagai kesenjangan yang ada juga sangat mempengaruhi martabat dan kemandirian bangsa.

Rachmat Gobel menjelaskan, pekerjaan terbesar saat ini ialah bagaimana menyusun dan menerapkan agenda pembangunan yang betul-betul efektif untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang ada. Memberi akses kepada setiap elemen bangsa agar mempunyai peluang yang setara dalam proses distribusi hasil pembangunan, fisik maupun non-fisik.

Oleh karena itu, masalah yang harus diperhatikan dalam agenda pembangunan bukan hanya pada cara memacu pertumbuhan ekonomi, tapi juga bagaimana menata distribusi hasil pembangunan itu sendiri.

“Masalah kita bukan hanya memacu pertumbuhan dengan melakukan investasi sebesar-sebesarnya, tapi juga bagaimana investasi itu berkontribusi mengatasi berbagai ketimpangan yang masih sangat dirasakan. Ini hanya bisa dilakukan jika tersedia agenda pembangunan yang berkualitas, mampu memperbaiki struktur kesejahteraan masyarakat agar semuanya siap menghadapi tantangan kedepan. Inilah yang harus menjadi perjuangan kita bersama,” kata Rachmat Gobel.

Dalam kaitan itu, persoalan pokok yang selalu mendapat sorotan Rachmat Gobel antara lain adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengatasi kesenjangan di sektor pendidikan dan perbaikan struktur ekonomi untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan.

## Kesenjangan Pendidikan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih mengalami banyak tantangan, antara lain masih besarnya jumlah masyarakat yang belum mampu berperan aktif dalam dunia pendidikan. Secara umum tingkat pendidikan memang telah membaik, namun data juga menunjukkan bahwa kemajuan itu belum menjangkau seluruh penduduk.

Berbagai langkah yang dilakukan selama ini, belum sepenuhnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menumbuhkan kecakapan. Tanpa perbaikan signifikan, kondisi ini akan menjadi kendala bagi Indonesia untuk bisa keluar dari *middle income trap*, apalagi untuk menggapai masuk kedalam kelompok negara maju. Bonus demografi yang menjadi comparative advantage saat ini, bisa berubah menjadi bencana karena sebagian besar SDM tidak terdidik sehingga produktifitas dan skill mereka rendah.

Menurut data Potret Pendidikan 2020 yang dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi murni (APM) pada tingkat pendidikan dasar memang sudah mendekati 100%, namun untuk tingkat menengah dan tinggi masih jauh dari memadai. APM tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat baru 80,12%, dan ini berarti ada sekitar 20% anak di usia SMP putus sekolah. APM yang lebih rendah terlihat pada APM SMA/ Sederajat yaitu hanya 61,25% yang artinya sekitar 38,75% anak usia ini tidak bersekolah. Bahkan untuk tingkat perguruan tinggi, APM-nya tercatat hanya 19,32%.

Potret pendidikan itu memberi sinyal yang memprihatinkan karena menurut survei Bank Dunia, untuk bisa terbebas dari *middle income trap*, minimal 76% sumber daya manusia telah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas. Kondisi semakin tidak mendukung karena Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia saat ini masih berada pada ranking 107 dari 189 negara, kalah jauh dibandingkan Malaysia dan Thailand di posisi 62 dan 79.

Keberhasilan pendidikan merupakan hal pokok pada kemajuan suatu bangsa. Membangun SDM unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi untuk melahirkan generasi yang mampu menjadi penggerak atau lokomotif pembangunan. Di sinilah peran penting dunia pendidikan, terutama pada penduduk usia sekolah yang berumur 7-24 tahun. Mereka inilah yang akan memanfaatkan berbagai peluang yang ada di masa depan. Semakin besar komposisi penduduk pada rentang usia ini yang aktif dalam dunia pendidikan, kian besar peluang untuk menjadikan mereka untuk tampil penggerak pembangunan.

Menurut data Potret Pendidikan 2020 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), masih banyak penduduk usia pendidikan 7-24 tahun yang putus pendidikan. Meski program Wajib Belajar 12 tahun sudah dimulai sejak 2016, persentase partisipasi sekolah masih tergolong belum memadai. Berbagai data yang ada menggambarkan, pendidikan belum bisa menggapai seluruh lapisan masyarakat dan akan berdampak pada akses terhadap kegiatan produktif.

Persoalannya tidak hanya sebatas ketersediaan infrastruktur, ketimpangan pendidikan juga sangat dipengaruhi ketimpangan pendapatan atau tingkat kesejahteraan. Keberhasilan upaya memperbaiki kualitas pendidikan tidak hanya bisa disandarkan pada langkah memperbaiki infrastruktur--baik fisik maupun non-fisik--tapi juga harus diikuti perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat.

“Meluaskan dan memperbaiki akses pendidikan bagi penduduk yang kurang mampu adalah persoalan besar yang perlu segera diselesaikan. Redistribusi kekayaan non-fisik inilah yang masih menjadi salah satu pertanyaan mendasar dalam proses pembangunan kita,” kata Rachmat Gobel.

### **Tingkat Kemiskinan dan Struktur Usaha**

Sangat perlu disadari, konsekuensi dari keadaan kesejahteraan yang buruk menimbulkan ancaman bagi pembangunan manusia, peningkatan produktivitas, stabilitas sosial dan politik. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada proses pembangunan secara keseluruhan. Data menunjukkan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, angka kemiskinan masih tergolong tinggi.

Menurut data Profil Kemiskinan 2021 yang dipublikasi BPS, persentase penduduk miskin per Maret 2021 masih sekitar 10,14% atau sekitar 27,5 juta orang. Artinya, 1 dari 10 dari orang Indonesia tergolong miskin. Angka ini didasarkan pada garis kemiskinan yaitu pengeluaran per kapita Rp 458.947. Bahkan, dari 27,5 juta orang penduduk miskin itu, 10,9 juta orang diantaranya tergolong miskin ekstrim dengan pengeluaran per kapita berdasarkan konsep *purchasing power parity* (PPP) hanya setara dengan Rp 12.000 per hari.

Angka-angka itu juga menggambarkan masih besarnya ketimpangan kesejahteraan di tengah masyarakat. Kondisi ini semakin terasa jika dilihat dari penguasaan kekayaan. Sebagai gambaran, berdasarkan survei Credit Suisse International beberapa waktu lalu, 10% penduduk terkaya di

## Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Per Maret 2021

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		
	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
Sumatera	8,77	11,6	10,15	2.324,87	3.739,43	6.064,30
Jawa	8,06	12,91	9,67	8.313,12	6.540,31	14.753,43
Bali Nusa Tenggara	8,95	18,12	13,84	640,22	1.477,71	2.117,93
Kalimantan	4,67	7,44	6,09	375,73	634,95	1.010,68
Sulawesi	5,88	13,34	10,29	477,95	1.570,00	2.047,95
Maluku-Papua	5,63	28,50	20,66	144,69	1.403,79	1.548,48
<b>Indonesia</b>	<b>7,89</b>	<b>13,10</b>	<b>10,14</b>	<b>12.176,58</b>	<b>15.366,15</b>	<b>27.542,77</b>

Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia 2021, BPS

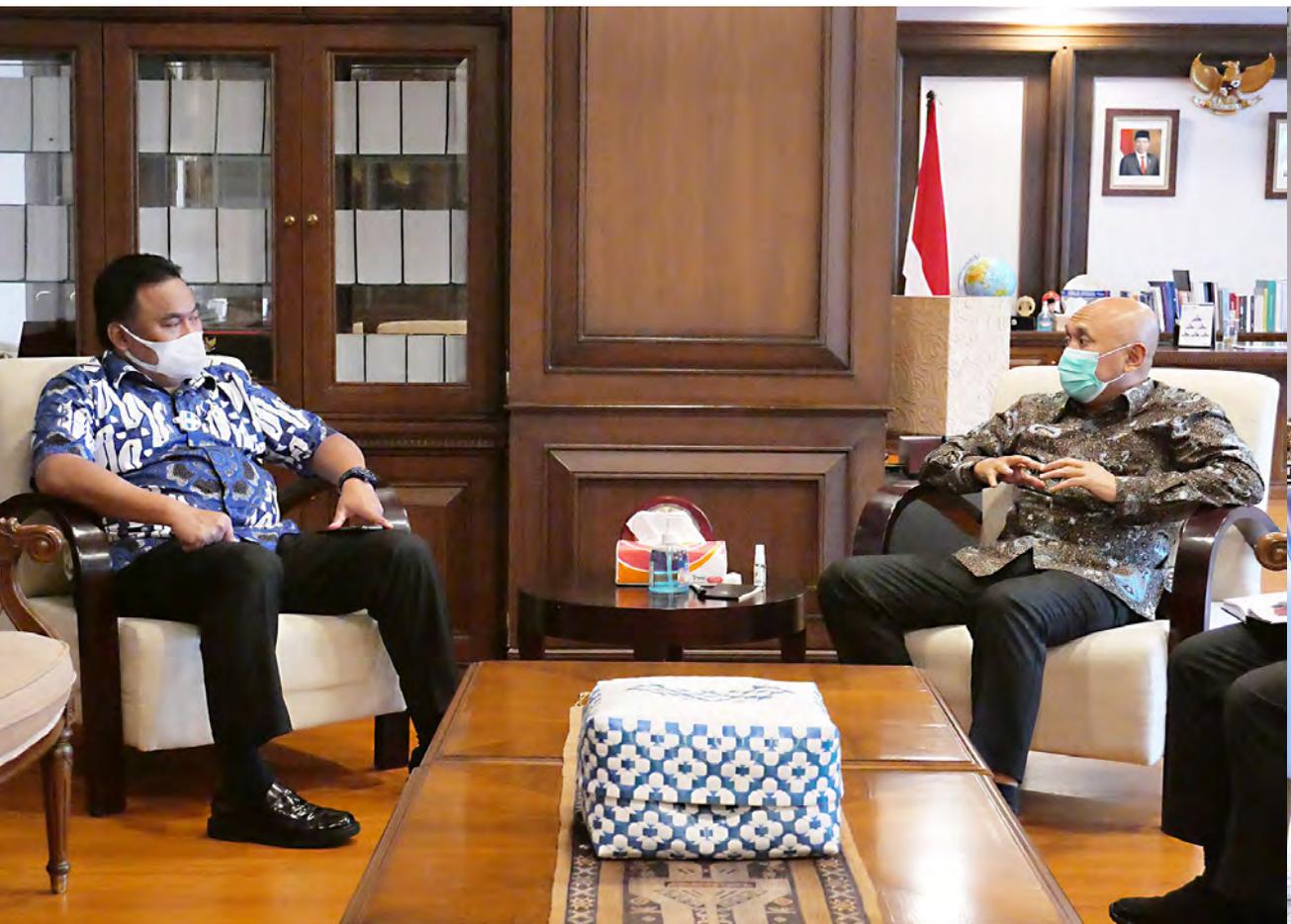
Indonesia menguasai lebih dari 75% total kekayaan penduduk. Bahkan, 1% orang terkaya menguasai 45,6% total kekayaan penduduk.

Angka ini jauh berbeda dengan negara lain seperti Jepang, dimana 10% penduduk terkaya di negara ini hanya menguasai 48,8% total kekayaan penduduk dan untuk 1% orang terkaya hanya menguasai 18,6% total kekayaan penduduk.

Hal itu terjadi antara lain karena adanya ketimpangan dalam struktur ekonomi. Dalam hal ini, menurut Rachmat Gobel, ada beberapa masalah besar yang harus mendapat perhatian secara sangat serius, terutama ketimpangan pada penguasaan kegiatan produksi antara kelompok usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan pengusaha besar.

Meski diakui sebagai sektor yang strategis, upaya mendorong peningkatan kinerja KUMKM masih jauh dari maksimal. Kesenjangan antara pelaku di sektor ini dengan korporasi besar tidak pernah terselesaikan, bahkan dirasakan kian jauh. Baik dari sisi beban yang harus dipikul maupun kemampuan meningkatkan nilai tambah, ketimpangannya masih sangat mencolok.

Kondisi ini tidak hanya membuat pelaku KUMKM kian tertinggal, bebannya juga semakin berat. Secara total, kontribusi nilai tambah yang dihasilkan KUMKM terhadap PDB memang mencapai sekitar 63%, atau lebih besar dibandingkan korporasi besar yaitu 37%. Namun beban yang ditanggung KUMKM jauh lebih besar yaitu sekitar 97% tenaga kerja atau sekitar 119,5 juta orang. Kondisi inilah yang antara lain membuat



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berdiskusi dan membahas upaya meningkatkan efektivitas kebijakan untuk mendorong kemajuan dan memperkuat posisi daya saing pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam kancah perekonomian nasional dan internasional.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan Kepala Bulog Budi Waseso berdiskusi mengenai berbagai tantangan dan solusi dalam memperkuat ketahanan logistik pangan nasional untuk sejumlah komoditi yang dikelola oleh badan ini.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membahas berbagai hal terkait agenda pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan konektivitas bagi pencapaian target pembangunan nasional.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tengah bertukar pikiran mengenai berbagai agenda pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan penataan lingkungan pemukiman untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kualitas hidup bangsa.

produktivitas KUMKM kalah jauh dibandingkan usaha besar. Ini membuat pendapatan sektor ini—terutama usaha mikro—menjadi tertinggal sehingga sulit meningkatkan kesejahteraan, apalagi untuk naik kelas.

Berdasarkan data 2019, menurut perhitungan UMKM Indonesia, meski secara keseluruhan total pendapatan usaha mikro mencapai Rp 4.727 triliun (34,12% PDB), namun rata-rata pendapatan usaha mikro jauh tertinggal dibandingkan kelompok usaha lainnya. Dengan jumlah unit usaha 62,1 juta, rata-rata pendapatan per unit usaha mikro hanya sekitar Rp 76,126 juta per tahun, sementara beban yang harus dipikul sangat besar yaitu menampung 109,8 juta orang tenaga kerja atau 89% dari total tenaga kerja.

Kondisi tersebut jauh berbeda dengan kelompok usaha lainnya. Kelompok usaha besar misalnya, dengan jumlahnya hanya 5.469 unit mereka mampu menghasilkan total pendapatan RP 5.136 triliun (37,07% PDB), sehingga rata-rata pendapatan usaha per unit Rp 940.689 miliar per tahun. Sementara beban yang ditanggung kecil, hanya sekitar 3,8 juta pekerja atau 3,07% total tenaga kerja.

## Pendapatan Berdasarkan Kelompok Usaha

Kelompok Usaha	Unit Usaha		Pendapatan Usaha		
	Jumlah (unit)	Persentase	Total (Rp triliun)	Persentase PDB	Rata-Rata (Rp juta)
Usaha Mikro	62.106.900	98,70	4.727	34,12	76,126
Usaha Kecil	757.090	1,20	1.234	8,91	1.639,202
Usaha Menengah	58.627	0,11	1.742	12,57	29.720,777
Usaha Besar	5.460	0,01	5.136	37,07	940.699,633

Sumber: UMKM Indonesia, 2020

Untuk usaha kecil, jumlahnya mencapai 757.090 unit, menampung 5,93 juta tenaga kerja atau 4,81% dari total tenaga kerja. Total pendapatan usaha Rp 1.234 triliun (8,91% PDB) atau rata-rata per unit Rp 1,630 miliar per tahun. Sedangkan kelompok usaha menengah, jumlahnya 58.627 unit, menampung 3,79 juta tenaga kerja atau 3,07% total tenaga kerja. Total pendapatan usaha per unit Rp 1.742 triliun (12,57% PDB), sehingga rata-rata pendapatan usahanya Rp 29,720 miliar per tahun.

Angka-angka tersebut menggambarkan, produktifitas usaha besar 12.394 kali lipat lebih besar dibandingkan usaha mikro, 583 kali lipat daripada usaha kecil dan 32 kali lipat dibandingkan usaha menengah. Ini menyiratkan, produktivitas usaha mikro dan usaha kecil kalah jauh dan membuat mereka secara umum lebih rapuh dan mudah tergilas oleh tekanan persaingan dan berbagai gejolak ekonomi.

Tidak hanya sampai di situ, kondisi itu telah membuat kesenjangan kesejahteraan antara kelompok masyarakat juga kian tajam, terutama dirasakan pada mereka yang berada di dalam kelompok usaha mikro. Sebagian besar kantong-kantong kemiskinan ada pada kelompok ini dan ini telah melahirkan ironi dalam kehidupan berbangsa.

Di satu sisi ada orang yang hidup penuh keleluasaan, di sisi lain masih puluhan juta orang dari bagian bangsa ini hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, dari 27,5 juta orang penduduk miskin saat ini, menurut data BPS, sekitar 10,9 juta orang diantaranya tergolong miskin ekstrim dengan pengeluaran per kapita berdasarkan konsep *purchasing power parity* (PPP) hanya setara dengan Rp 12.000 per hari.

“Ironi ini harus segera teratasi, tidak boleh berlarut-larut. Bukan hanya terkait soal tingkat kesejahteraan, tapi juga martabat kita sebagai bagian bangsa ini karena membiarkan terjadinya ketimpangan yang sangat mencolok. Memperbaiki kondisi harus menjadi agenda semua kalangan, dan menjadi fokus utama agenda pembangunan nasional,” kata Rachmat Gobel.

Secara politik, keinginan untuk mengatasi ketimpangan tersebut sudah cukup memadai. Persoalannya adalah efektivitas di tingkat kebijakan masih belum memadai. Perkembangan sektor KUMKM masih sangat terbatas, dan ini makin dirasakan saat Pandemi Covid-19 sekarang ini. Mayoritas KUMKM yaitu 82,9% sangat merasakan dampak negatif dari pandemi ini sehingga kinerja mereka anjlok, hanya sebagian kecil yaitu 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif.

Melalui program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) pemerintah menyalurkan dana insentif. Untuk 2021, pada tahap I (Juli 2021) telah terealisasi bantuan untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran Rp 11,76 triliun. Kemudian untuk tahap II, pada September telah tersalurkan anggaran Rp 3,4 triliun untuk 2,9 juta pelaku usaha mikro.

Namun bantuan tersebut dirasakan belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan KUMKM. Ini terbukti dari hasil survei United Nations Development Programme/UNDP terhadap 3.011 UMKM di Indonesia pada Agustus 2021 yang menunjukkan, masih ada 24% KUMKM tidak beroperasi

selama pandemi Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak 35,2% responden beralasan kekurangan uang untuk membiayai produksi.

Data lainnya, sebanyak 30,2% responden menutup usaha karena permintaan atas barang yang mereka jual menurun drastis. Kemudian, 27,5% menutup usahanya karena regulasi pemerintah, seperti terdampak kebijakan PPKM. Ada pula 4,9% responden menutup usahanya karena kesulitan mengakses keuangan internal. Lalu, 2,2% responden beralasan kesulitan mengakses bahan baku.

Catatan penting lain dari struktur KUMKM yang harus menjadi perhatian, menurut Rachmat Gobel, kenyataan bahwa sebagian besar usaha perorangan atau mikor ini ada di sektor pertanian atau agrikultur, baik sebagai petani dan nelayan ataupun peternak. Berdasarkan proporsi tenaga kerja, sekitar 30% ada di sektor ini. Menjadi sangat penting untuk memperhatikan kemajuan dari sektor agrikultur ini. Upaya meningkatkan kemajuan di bidang usaha ini tidak hanya mampu berkontribusi mengatasi ketimpangan, sekaligus juga akan memperkuat ketahanan pangan.

Atas realitas itulah, Rachmat Gobel selalu menyuarakan agar sektor KUMKM dan agrikultur lebih mendapat perhatian dari kebijakan pemerintah. Keduanya adalah kunci bagi Indonesia dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional untuk menghadapi berbagai tantangan, apalagi dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 atau 100 Tahun Indonesia merdeka yaitu menjadi salah satu Negara Maju di pentas dunia.

Dari berbagai persoalan yang dihadapi KUMKM saat ini, apalagi sepanjang pandemi Covid-19, makin menunjukkan, perlunya perbaikan kualitas kebijakan agribisnis dan UMKM. Kebijakan harus lebih fokus, dan terkoordinasi dengan lebih baik. Intervensi dan insentif dari pemerintah harus lebih kuat terutama untuk meningkatkan akses sektor ini terhadap upaya perbaikan proses produksi—termasuk teknologi—, pasar, keuangan dan manajemen usaha.

“Ibarat orkestra, sektor agrikultur dan KUMKM membutuhkan dirigen yang mampu memadukan setiap gerak dengan sektor terkait, tidak hanya instansi pemerintah, tapi juga berbagai asosiasi pelaku usaha,” kata Rachmat Gobel.

Inilah yang selalu menjadi perjuangan Rachmat Gobel sebagai anggota dan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang. Menyuarakan berbagai hambatan yang dihadapi rakyat di lapangan, dan mendorong pemerintah sebagai lembaga eksekutif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan untuk memberi solusi bagi peningkatan kualitas ekonomi masyarakat secara luas. (\*)



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berdiskusi dan menyampaikan berbagai gagasan mengenai pembangunan sektor pertanian kepada Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi untuk memajukan dan memperluas nilai tambah sektor strategis ini agar bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.





Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel meyakini, semangat gotong royong adalah bagian dari karakter bangsa yang harus terus dijaga dan badan usaha koperasi salah satu lembaga yang mampu mewujudkan semangat ini. Mendorong pengembangan badan usaha koperasi adalah langkah strategis yang harus dikedepankan, terutama dalam membangun UMKM menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing kuat.

**(2)**

**PARLEMEN  
UNTUK  
KESEJAHTERAAN  
DAN KEADILAN**

**“Parlemen adalah  
mitra kritis pemerintah  
untuk menjaga arah  
pembangunan agar  
berkualitas”**

# Optimalisasi Pasar Nasional Untuk Produk Dalam Negeri

Setiap negara berkepentingan untuk menghidupkan produksi dalam negeri atau produk nasional. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri harus menjadi prioritas dan mutlak, bahkan harus diakselerasi. Produk dan pasar dalam negeri wajib dilindungi dari gempuran produk impor.

Namun sayangnya, berbagai kebijakan pemerintah selama ini belum mampu secara maksimal melindungi dan menghidupkan produk dalam negeri. Keberpihakan terhadap produk nasional dirasakan masih kurang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, produk impor kian merajalela, dan telah sangat merugikan prospek pengembangan produk nasional.

“Memprihatinkan, pasar dalam negeri kita yang seharusnya menjadi modal utama untuk mengembangkan produk nasional, kian hari semakin digerogeti produk impor. Kebijakan yang lebih tegas dalam melindungi pasar dalam negeri sangat dibutuhkan. Ini kepentingan nasional kita sebagai bangsa yaitu ketahanan dan kemandirian ekonomi secara menyeluruh,” kata Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

## **Lahan Subur Produk Impor**

Indonesia adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia sehingga tergabung dalam kelompok negara G-20. Sejumlah lembaga internasional seperti PricewaterhouseCoopers (PWC) menyebutkan, berdasarkan konsep *Purchasing Power Parity*, pada 2030 Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan akan mencapai US\$ 5,42 triliun sehingga masuk menjadi 10 besar dunia, atau naik dari posisi saat ini yaitu 16 besar. Angka ini akan terus meningkat naik menjadi US\$ 10,52 triliun pada 2050 sehingga masuk ke posisi 4 besar dunia setelah China, India dan Amerika Serikat.

“Proyeksi itu menunjukkan betapa besarnya potensi pasar dalam negeri kita ke depan. Ini harus dijaga agar tidak menjadi lahan subur produk impor. Keberpihakan terhadap produk dalam negeri menjadi satu keharusan agar bisa berkembang dan mampu bersaing menghadapi produk asing,” kata Rachmat Gobel.

Dari tahun ke tahun, serbuan produk impor memang terlihat semakin deras. Tidak hanya mengambil alih pasar produk lokal, arus barang impor ini juga telah menggerus surplus neraca perdagangan dan kian meningkatkan risiko pada keseimbangan eksternal perekonomian.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan impor dalam 10 tahun terakhir ini jauh melebihi ekspor. Sepanjang periode 2010-2020, nilai impor naik pesat mencapai rata-rata 16,19%, sementara ekspor hanya meningkat rata-rata 10%. Inilah membuat trend surplus neraca perdagangan terus mengalami penurunan, dan mengancam keseimbangan eksternal perekonomian nasional.

Bahkan, dalam 10 tahun terakhir ini neraca perdagangan beberapa kali mengalami defisit, suatu yang sangat jarang terjadi pada sejarah perekonomian nasional periode sebelumnya. Dalam rentang 2010-2020 terjadi 5 kali defisit neraca perdagangan yaitu pada tahun 2012 sebesar US\$ 1,66 miliar, 2013 sebesar US\$ 4,07 miliar, 2014 sebesar US\$ 2,57 miliar. Kemudian pada 2018 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 8,7 miliar dan 3,04 miliar.

### Perkembangan Neraca Perdagangan 2010-2020 (US\$ miliar)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Ekspor	157,77	203,4	190,03	182,6	176,3	150,39	144,48	169,82	180,01	167,68	163,31	10,39%
Impor	135,66	177,4	191,69	186,6	178,8	142,69	136,65	157,98	188,71	170,72	142,57	16,19%
Surplus/ Defisit	22,11	26,01	-1,66	-4,07	-2,57	7,70	8,83	11,84	-8,70	-3,04	21,74	

Sumber: BPS 2021 (diolah)

Jika kecenderungan itu tidak bisa segera teratasi, tekanan terhadap keseimbangan eksternal bisa dipastikan akan terus berlanjut dan kian meningkat. Ini tentu akan membahayakan stabilitas perekonomian secara keseluruhan, seperti terhadap upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya ekonomi dalam negeri, penyerapan tenaga kerja dan nilai tukar rupiah. Pada akhirnya, semua itu akan melemahkan kemandirian bangsa dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang kian ketat.





Wakil Ketua DPR RI/Korimbang Rachmat Gobel beserta sejumlah anggota DPR Komisi V dan Komisi VI melakukan kunjungan ke pabrik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. BUMN adalah industri strategis sebagai *mother industry* dalam mensuplai kebutuhan baja nasional harus terus mendapat dukungan.

## Sektor Pangan Terancam

Berdasarkan klasifikasi penggunaan produk, laju peningkatan impor terutama terjadi pada barang konsumsi. Impornya sepanjang 2010-2020 naik 48,8 % atau jauh di atas rata-rata pertumbuhan total impor 16,19%. Ini membuat porsi impor produk pangan naik dari 7,36% pada 2010 menjadi 10,35% pada 2020. Pada periode yang sama, impor untuk bahan baku dan penolong naik 17,5% atau relatif sama dengan rata-rata pertumbuhan total impor sehingga persentasenya relatif stabil sekitar 72,9%. Impor barang modal cenderung turun yaitu minus 1,47%, sehingga persentasenya turun dari 19,84% pada 2010 menjadi 16,62% pada 2020.

Dilihat secara lebih rinci, peningkatan impor barang konsumsi itu berasal dari impor produk pangan, di mana pertumbuhannya sepanjang 2010-2020 mencapai 58,7%. Sebagai gambaran, menurut data BPS, pada 2010 impor bahan pangan baru mencapai US\$ 9,75 miliar, pada 2020 sudah mencapai US\$ 15,44 miliar sehingga pangsaanya terhadap total impor naik dari sekitar 7% menjadi 11%.

Tidak hanya nilainya yang meningkat, ragam produknya juga semakin luas. Impor pangan mulai dari gula, beras, gandum, jagung, kedelai, susu, kakao, daging, bawang putih, cabai, kentang, ubi kayu, lada, garam sampai tembakau.

Pada 2021, menurut BPS, sampai semester I (Januari-Juni) impor pangan sudah mencapai US\$ 6,13 miliar. Nilai impor terbesar adalah gandum sebesar US\$ 1,55 miliar, gula senilai US\$ 1,49 miliar, kedelai US\$ 873,3 juta, susu US\$ 425,8 juta, kakao US\$ 286,3 juta dan daging US\$ 276,5 juta. Berikutnya, tembakau US\$ 274,2 juta, bawang putih US\$ 196,2 juta, jagung 99,8 juta, cabai US\$ 59,4 juta, garam

“Data-data itu membuat miris. Bagaimana bisa, sebagai negara agraris dengan lahan yang luas, tanah yang subur, laut yang luas, ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditi pangan terus meningkat,” kata Rachmat Gobel.

## Industri Manufaktur dan Deindustrialisasi

Serbuan produk impor juga sangat dirasakan pada sektor industri manufaktur. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan impor produk industri manufaktur rata-rata 32%. Yang sangat memprihatinkan, pertumbuhan ini juga terjadi pada produk yang dulu dikenal sebagai unggulan Indonesia seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), kayu olahan. Mengacu pada data BPS, sepanjang 2010-2020 impor peralatan listrik naik 50,22%, TPT 37,06%, produk kayu olahan 39,01%.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel meninjau salah satu pabrik mebel dimana potensi industri ini belum berkembang secara maksimal. Dukungan terhadap industri ini belum optimal sehingga potensi keunggulan Indonesia di bidang usaha ini tidak tergarap secara optimal, bahkan produk impor kini mulai menggerus pasar nasional.

Dan yang tidak kalah memperhatikan, serbuan impor juga datang dari produk industri yang mana seharusnya Indonesia mempunyai daya saing kuat karena potensi bahan bakunya tersedia melimpah, seperti industri plastik, produk logam dasar, makanan olahan, karet olahan. Sepanjang 2010-2020, impor bahan plastik mengalami peningkatan 62,21%, produk logam dasar naik 40,39%, makanan olahan 82,01%, karet olahan 31,56%.

Serbuan produk impor sudah sangat mengganggu kondisi industri manufaktur nasional, kinerjanya merosot tajam. Laju pertumbuhannya yang dulu selalu di atas rata-rata PDB sehingga menjadi *leading sector*, dalam satu dekade terakhir kondisinya terseok-seok. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian anjlok, dari dulu mencapai sekitar 30% PDB, dalam 10 tahun terakhir turun di bawah 20%.

Pada tahun 2010 kontribusi terhadap PDB masih sekitar 28%, tapi pada tahun 2020 lalu sudah turun ke posisi 19% PDB atau mengalami penurunan hampir 10% dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Oleh karena



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah mendengar penjelasan mengenai cara kerja ventilator produksi nasional (Vent-I) yang diproduksi oleh PT PHC Indonesia. Rachmat Gobel minta Menkes Budi memberi ruang yang lebih luas bagi pengembangan produk alat kesehatan seperti Vent-I yang merupakan produk kerjasama PHC Indonesia dengan Institute Teknologi Bandung (ITB) ini, karena sampai saat ini 80% dari kebutuhan alat kesehatan masih tergantung impor.

itulah berbagai kalangan mengingatkan, Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi.

Meski deindustrialisasi sering dianggap lumrah dan terjadi secara global, apa yang terjadi di Indonesia dinilai berlangsung terlalu cepat dan terjadi saat PDB masih tergolong rendah yaitu sekitar US\$ 4.000 per tahun. Negara lain seperti Malaysia dan Thailand juga mengalami penurunan kontribusi industri pengolahan, namun berlangsung lebih lambat yaitu hanya turun sekitar 4% dalam 10 tahun terakhir. Bahkan di Korea Selatan, deindustrialisasi baru terjadi pada saat pendapatan per kapita negara ini sudah mencapai di atas US\$ 33.000 per tahun.

Berbeda dengan negara-negara tersebut, deindustrialisasi di Indonesia terjadi terlalu dini atau prematur. Padahal, saat ini Indonesia sangat membutuhkan kinerja industri manufaktur yang kuat untuk memacu

pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, mendorong transformasi ke produk yang bernilai tambah tinggi, memperkuat transfer teknologi.

Data-data mengisyaratkan, betapa pentingnya melakukan restorasi secara menyeluruh di bidang perekonomian karena masalah yang dihadapi sangat struktural. Kebijakan ekonomi saat ini belum mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan produk nasional agar mempunyai daya saing kuat.

Jika tren saat ini tidak bisa diatasi atau terus berlanjut, fondasi struktur ekonomi nasional akan rapuh menghadapi persaingan global yang kian ketat. Negeri ini sangat membutuhkan industrialisasi agar bisa mewujudkan visi menjadi negara maju pada 2045 mendatang.

“Kegagalan kita melakukan restorasi di struktur ekonomi akan membuat visi membawa Indonesia menjadi salah satu Negara Industri Maju ke pentas dunia hanya akan menjadi utopia atau mimpi. Harus ada gebrakan untuk memperbaiki kondisi industri nasional saat ini,” kata Rachmat Gobel.

### **Bentengi Pasar Domestik**

Membentengi atau memproteksi pasar domestik harus menjadi prioritas utama dengan membatasi impor produk tertentu dengan memperketat persyaratan, dan tetap menerapkan berbagai standar World Trade Organization (WTO). Proteksi sangat lazim dilakukan, tidak hanya oleh negara berkembang, negara majupun melakukannya.

Harus diakui, tingkat liberalisasi perdagangan di Indonesia tergolong tinggi, sehingga barang impor dengan mudah bisa masuk. Instrumen hambatan dagang yang diterapkan masih sangat sedikit. Menurut data Kementerian Perindustrian, Indonesia hanya memiliki 102 *safeguard*, sementara negara lain seperti China memiliki 1.020, Thailand 226, dan Filipina 307.

Untuk antidumping, Indonesia hanya punya untuk 48 produk, sedangkan India memiliki 280 dan Filipina 250 instrumen antidumping. Begitu juga dengan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib yang disebut *technical barrier to trade*, Indonesia baru memberlakukan SNI Wajib pada 172 jenis produk, jauh lebih sedikit dibandingkan Uni Eropa sebanyak 4.004, China 1.170, Thailand 585, Filipina 250, dan Malaysia 227.

“Langkah memproteksi pasar dalam negeri masih jauh dari yang seharusnya bisa dilakukan, dan ini sangat merugikan. Proteksi harus diperkuat. Secara aturan WTO, peluang itu sangat terbuka, sayangnya selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Baik melalui Komisi maupun Fraksi saya akan berupaya untuk mendorong agar proteksi pasar dalam negeri ini diperkuat,” kata Rachmat Gobel.

Melihat situasi saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan, jika sejumlah kalangan menilai bahwa serbuan produk impor sudah menjadi bahaya laten. Tidak cukup dengan hanya himbauan agar masyarakat mengutamakan produk dalam negeri, perlu kebijakan atau instrumen yang lebih jelas untuk memproteksi pasar dalam negeri. Apalagi dengan kian berkembangnya pasar *e-commerce* yang menjadi salah satu pintu masuk produk impor.

Seperti terungkap dalam data Dirjen Bea Cukai, paket kiriman *e-commerce* yang masuk ke Indonesia naik tajam. Pada 2018 jumlah paket barang impor melalui *e-commerce* baru mencapai 19,57 juta paket, pada 2019 sudah naik 57,92 juta paket dan angka ini terus meningkat. Mengutip hasil survei Katadata Insight, sebagian besar barang impor yang masuk melalui *e-commerce* adalah produk elektronik 37%, sepatu 26%, pakaian 21% dan gawai 16.

Dengan nilai transaksi yang sudah mencapai Rp 266,3 triliun pada 2020, pasar *e-commerce* Indonesia memang menjadi sangat menarik. Tak heran *platform e-commerce* asing tergiur untuk masuk ke Indonesia, bahkan melakukan investasi untuk membangun gudang dan menjual langsung di *platform* mereka.

Yang lebih memprihatinkan, banyak diantara produk yang ditawarkan *platform e-commerce* itu adalah produk UMKM dari luar negeri, sehingga sangat merugikan pelaku UMKM dalam negeri. Oleh karena itu, penataan *e-commerce* menjadi sangat penting dilakukan.

Selain proteksi melalui perdagangan, memperkuat kebijakan hilirisasi industri juga menjadi langkah yang perlu mendapat prioritas. Lemahnya hilirisasi selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing sektor industri manufaktur karena sangat tergantung pada bahan baku dan bahan penolong impor. Disamping itu, langkah ini juga akan memperkuat ekspor yang selama ini didominasi oleh komoditi primer baik dari sektor pertambangan maupun agro.

“Hilirisasi akan memperkuat struktur industri dan memberi nilai tambah yang tinggi pada komoditas primer di sektor tambang dan agro. Ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk bisa masuk ke kelompok negara maju,” kata Rachmat Gobel.

### **Kebijakan TKDN**

Yang juga sangat memprihatinkan, serbuan produk impor juga terjadi dalam pengadaan barang pemerintah yang dibiayai APBN. Meski berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk memberi kemudahan bagi produk dalam

negeri pada lelang yang diadakan Kementerian dan BUMN, dalam praktiknya belum berjalan efektif.

Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2/M-Ind/Per/2014 misalnya, disebutkan bahwa untuk produk dalam negeri yang telah memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% harus mendapat preferensi harga dalam pengadaan barang oleh pemerintah dan BUMN. Bahkan untuk produk dengan TKDN 40%, pemerintah dan BUMN diwajibkan menggunakannya.

Namun dalam praktiknya, aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Masih banyak keluhan pelaku dan asosiasi industri manufaktur karena kesulitan memenangkan lelang pengadaan barang oleh pemerintah ataupun BUMN. Pasalnya, pelaksana lelang cenderung memenangkan produk impor.

“Ini sangat disayangkan, karena setiap tahun alokasi dana APBN untuk pengadaan barang ini sangat besar. Tahun 2021 saja misalnya, alokasi dana untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai lebih dari Rp 600 triliun, belum termasuk pengadaan BUMN. Ini seharusnya bisa menjadi captive market produk dalam negeri, tapi pada praktiknya masih jauh,” kata Rachmat Gobel.

Pengawasan terhadap pelaksanaan TKDN menjadi sangat penting dan krusial. Berdasarkan data dilapangan, meskipun sudah memenuhi TKDN 25% bahkan lebih, berbagai “permainan” telah menyebabkan produk dalam negeri tidak bisa memanfaatkan fasilitas preferensi harga yang sediakan pemerintah.

Banyak pengusaha dan asosiasi industri mengeluhkan praktik kurang sehat dalam lelang pengadaan di instansi pemerintah maupun BUMN. Mereka sering dikalahkan oleh berbagai hal yang kurang masuk akal. Dari informasi yang ia dapat dari asosiasi industri, menurut Rachmat Gobel, seringkali terjadi pemenang sudah ditetapkan sebelum lelang diselenggarakan atau dikenal sebagai praktik ijon.

“Praktik semacam itu tidak boleh terjadi lagi, seharusnya instansi pemerintah dan BUMN menjadi pionir dalam penggunaan produk dalam negeri. Saya minta kepada pemerintah agar melakukan gebrakan dalam pengawasan pelaksanaan TKDN ini,” katanya. (\*)

**Pengawasan terhadap pelaksanaan TKDN menjadi sangat penting dan krusial.**

# Mendorong Semangat Kemitraan Untuk Memperkuat Pembangunan Daerah

**K**inerja pembangunan nasional merupakan agregasi dari capaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, percepatan pembangunan daerah sangat menentukan dalam pencapaian sasaran visi pembangunan nasional 2045 yaitu menjadikan Indonesia Sebagai Negara Maju. Namun masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang belum berhasil menggali potensi wilayahnya secara maksimal..

Upaya membantu daerah mengatasi berbagai kendala dalam percepatan pembangunan menjadi sangat penting, salah satunya adalah dengan mendorong daerah untuk lebih aktif membangun kemitraan di antara elemen masyarakat.

“Melibatkan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menggali potensi ekonomi daerah. Ini membutuhkan prasyarat yaitu adanya semangat kemitraan diantara elemen masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus bisa menjadi menjadi konduktor, mengharmonikan berbagai kepentingan,” kata Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

Meski era otonomi daerah sudah berjalan lebih dari 20 tahun, data menunjukkan, sebagian besar daerah belum mampu mandiri. Hasil *review* Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun 2020, sekitar 88% daerah masuk dalam katagori belum mandiri. Ini menunjukkan, dalam membiayai pembangunan di wilayahnya, sebagian besar Pemda masih sangat tergantung pada transfer dana APBN.

Bahkan menurut *review* tersebut, mayoritas Pemda yaitu 93,04% tidak mengalami perubahan status/kategori kemandirian fiskalnya sejak 2013. Seperti terlihat pada tabel, sebagian besar Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) terendah ada pada tingkat kabupaten. Dari 378 LKPD pemerintah kabupaten

(Pemkab) yang di-review, 369 (98%) diantaranya masuk dalam katagori belum mandiri. Baru 8 kabupaten yang masuk katagori menuju mandiri dan satu kabupaten masuk katagori mandiri.

## Klasifikasi Indek Kemandirian Fiskal (IKF) Tahun 2020

Status IKF	Provinsi		Kabupaten		Kota	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Belum Mandiri	10	30%	369	98%	64	70%
Menuju Mandiri	16	49%	8	2%	26	28%
Mandiri	7	21%	1	0,26%	2	2%
Sangat Mandiri	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>	<b>378</b>	<b>100%</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>

Sumber: BPK-Laporan Hasil Review Atas Kemandirian Fiskal Pemda Tahun 2020

Di wilayah perkotaan, meski terlihat lebih baik, jumlah yang masuk dalam katagori belum mandiri masih besar. Dari 92 LKPD pemerintah kota (Pemkot) yang di-review, 64 (70%) tergolong belum mandiri. Baru 26 kota yang masuk katagori menuju mandiri dan 2 berhasil masuk dalam katagori mandiri.

Pada tingkat provinsi, dari 33 LKPD pemerintah provinsi (Pemprov) yang di-review, baru 7 (21%) yang sudah tergolong mandiri. Sisanya, 16 provinsi (49%) tergolong menuju mandiri, 10 provinsi (30%) belum mandiri.

Data-data itu memberikan gambaran, perlu upaya yang lebih keras untuk memacu percepatan pembangunan daerah. Tidak sebatas untuk mencapai tujuan otonomi daerah yaitu pengembangan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, juga untuk memperkuat fondasi dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam kunjungannya ke berbagai daerah, menurut Rachmat Gobel, terlihat bahwa sebetulnya potensi untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah sangat terbuka. Namun diakui, tantangan yang dihadapi tidak kalah besar, baik terkait kualitas dan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas anggaran daerah maupun partisipasi masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemda harus mengembangkan cara berpikir yang lebih terbuka. Perlu disadari, pembangunan adalah suatu usaha yang sistematis dari berbagai pihak



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel tengah mengamati kain tenun Sumba yang merupakan salah satu ciri khas daerah ini dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan ke pasar nasional maupun internasional.

atau pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya. Mengkoordinasikan langkah-langkah secara sinergis, saling ketergantungan dan saling terkait menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan di daerah.

### **Dituntut Lebih Kreatif**

Otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendorong Pemda lebih kreatif mengelola sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan target pembangunan, sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Dengan demikian, setidaknya ada dua aspek dalam pelaksanaan otonomi ini, pertama meningkatkan wewenang pemerintah daerah dan kedua memberi tanggung jawab yang lebih luas untuk menggali potensi secara optimal. Keberhasilan dalam mengemban tanggung jawab ini sangat tergantung sejauh mana Pemda mampu merespons secara cepat dan tepat berbagai dinamika kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan berbagai perkembangan teknologi dan informasi, dinamika kebutuhan tersebut berkembang sangat cepat, Oleh karena itulah, menurut Rachmat Gobel, Pemda dituntut untuk lebih kreatif melakukan berbagai inovasi. Mengembangkan wawasan kewirausahaan bagi kepala

daerah menjadi sangat penting agar mampu melihat setiap potensi yang sesuai karakteristik wilayahnya.

“Dengan menggunakan sudut pandang kewirausahaan, akan banyak sekali potensi daerah yang akan terkuak dan dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja seperti melalui sektor industri dan pariwisata maupun pertanian,” katanya.

Mengembangkan sektor usaha menjadi sangat penting, tidak hanya terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lapangan kerja, tapi juga untuk memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD. Pengembangan sektor usaha juga sekaligus bisa mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dengan demikian, keuangan daerah akan lebih mandiri sehingga ketergantungan pembangunan daerah terhadap dana APBN berkurang.

Setiap Pemda perlu mempunyai analisa tentang peluang usaha. Disamping mendorong investor swasta, Pemda harus bisa mengembangkan BUMD yang berbasis potensi atau kearifan lokal. Dalam hal ini, menjalin kemitraan strategis seperti dengan BUMN dan pembentukan BUMD dapat menjadi pilihan kebijakan untuk optimalisasi potensi ekonomi di daerah.

Menurut Rachmat Gobel, dari sejumlah program yang ia coba kembangkan di Dapil (Provinsi Gorontalo) dan sejumlah daerah lainnya, peluang mengembangkan kemitraan strategis ini cukup besar. Banyak BUMN dan lembaga pemerintah, termasuk swasta tertarik untuk mempunyai mitra di daerah.

“Ada sejumlah proyek percontohan yang telah saya kembangkan bersama LSM dan organisasi kepemudaan untuk mendorong kemitraan strategis BUMN dengan sejumlah kelompok tani dan UMKM. Hasilnya mengembirakan,” kata Rachmat Gobel.

### **Pengembangan Produk Lokal**

Salah satu kunci utama mengembangkan kemitraan strategis adalah kemampuan Pemda dalam mengidentifikasi kearifan dan budaya lokal yang dapat dikembangkan menjadi modal peningkatan daya saing. Dengan keragaman budaya yang begitu luas, daerah mempunyai potensi untuk mengembangkan produk lokal, baik di sektor pertanian, industri kerajinan maupun pariwisata.

Banyak negara yang telah berhasil menjadikan pengembangan produk lokal sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi daerah. Konsep ini dikenal sebagai *one village one product* (OVOP) dan kini semakin populer di



Wakil Ketua DPR RI/  
Korinbang Rachmat Gobel  
disambut tarian adat  
saat kunjungan kerja ke  
Kabupaten Sumba Timur,  
Nusa Tenggara Timur.



Wakil Ketua DPR RI/  
Korinbang Rachmat Gobel  
tengah berdiskusi dengan  
Bupati Bolaang Mongondow  
Timur Sam Sachrul Mamonto  
dalam kunjungan kerja ke  
Sulawesi Utara, Juni 2021.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berbincang dan menyerahkan plakat kenang-kenangan dalam acara pertemuan dengan kepada pejabat Pemda KabupatenJember, Jawa Timur.

dunia. Dengan konsep OVOP ini, daerah menetapkan produk yang memiliki keunikan, kemudian dikembangkan guna mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Ini memberikan kontribusi pendapatan cukup besar bagi daerah, karena produknya memiliki keunggulan dan bahkan bisa masuk di pasar internasional.

Menurut Prof. Dr. Morihiko Hiramatsu yang merupakan perintis konsep OVOP, ada tiga prinsip utama yang harus menjadi perhatian. Prinsip ini berdasarkan pengalaman Morihiko saat mengembangkan konsep OVOP ketika menjabat sebagai Gubernur Oita, Jepang pada 1980. Pertama adalah semangat *local yet global* yang bermakna menghasilkan produk atau jasa yang bernilai lokal dan dapat diterima secara global. Kemudian melaksanakannya dengan cara meningkatkan kualitas produk melalui pelatihan teknis peningkatan mutu dan desain.

Kedua, *reliance and creativity* yang berarti memanfaatkan potensi yang dimiliki secara kreatif dengan usaha yang mandiri. Ketiga, *human resource development* yaitu mengembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat agar memiliki semangat untuk kreatif dan mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman.

Produk yang dipilih untuk dikembangkan tidak harus selalu dalam bentuk *tangible product* (berupa barang dan jasa), tapi bisa juga dalam bentuk *intangible product*, misalnya mengangkat kesenian dan kebudayaan lokal yang khas, atau mengembangkan potensi sumber daya alam untuk pariwisata.

Di Indonesia terdapat sekitar 74.000 desa yang memiliki keunikan atau ciri khas. Mayoritas desa ini eksis dengan berbagai kultur dan sektor pertanian atau agrikultur. Dengan kultur tersebut, sangat potensial dikembangkan OVOP, dan Pemda mempunyai peran yang sangat strategis untuk ini.

Peluang untuk mengembangkan produk lokal berbasis OVOP ini semakin terbuka dengan kian meningkatnya alokasi untuk Dana Desa dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (PP 11 Tahun 2021) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 2 Februari 2021. Ini merupakan stimulus untuk mengembangkan produk dan kewirausahaan lokal yang berbasis UMKM.

“Selain mengembangkan wawasan kewirausahaan, Gubernur, Bupati dan Walikota perlu mempunyai kemampuan memainkan fungsi sebagai dirigen seperti dalam orchestra, mengkoordinir berbagai instansi yang ada, termasuk instansi perwakilan pemerintah pusat. Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah atau Forkopimda harus dihidupkan,” kata Rachmat Gobel.

## Kesenjangan Wilayah

Selain percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, menurut Rachmat Gobel, tantangan terbesar lainnya dalam pembangunan ekonomi nasional adalah mengatasi kesenjangan antarwilayah yang masih sangat tinggi. Kondisi ini terutama dirasakan oleh kawasan Indonesia Timur. Dalam hal ini, prakarsa Pemda dalam mengurangi kesenjangan di masing-masing daerahnya menjadi sangat penting.

Terkait kondisi itu, Rachmat Gobel mengakui, ia memberi perhatian lebih terhadap masalah yang dihadapi Indonesia Timur. Ini bukan karena ia berasal dari kawasan Timur, tapi data menunjukkan kawasan ini jauh tertinggal. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebanyak 84% dari sebaran daerah tertinggal berada di Indonesia Timur. Dari total 122 daerah tertinggal pada tingkat kabupaten, 102 di antaranya berada di Indonesia Timur, hanya 20 daerah tertinggal saja yang ada di Indonesia bagian Barat dan Tengah.

Menurut data BPS, lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal dari Indonesia Timur yaitu provinsi Papua dengan angka kemiskinan 26,8%, Papua Barat 21,7%, NTT 21,12%, Maluku 17,99% dan Gorontalo 15,59%.

“Jadi bisa dibayangkan kesenjangan pembangunan ekonomi Indonesia. Inilah yang membuat saya lebih banyak melakukan kunjungan kerja ke wilayah timur, jadi bukan karena semata daerah pemilihan (Dapil) saya di provinsi Gorontalo,” kata Rachmat Gobel.

Ia juga menyoroti, perlunya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan soliditas dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Dari segi anggaran, dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah cukup besar. Lebih dari 25% dana APBN dialokasikan untuk transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pada APBN 2021 misalnya, dari Rp 2.750 triliun belanja pemerintah pusat, sebesar Rp 795,48 triliun di antaranya dialokasikan untuk TKDD.

Sayangnya, realisasi dan penyerapan dana APBD sering kali lambat sehingga banyak dana Pemda yang mengganggu dan hanya disimpan di bank. Sebagai gambaran, menurut Kementerian Keuangan, per Oktober 2021, ada sekitar Rp 226 triliun dana APBD yang belum diserap dan di tempat di bank.

“Hal seperti ini harus dihindari karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dalam upaya mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, Pemda seharusnya tidak menunda-nunda penyerapan dana APBD” kata Rachmat Gobel. (\*)





Dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel selalu mengagendakan pertemuan dengan aparat pemerintah daerah (Pemda) untuk berdiskusi membahas masalah dan tantangan pembangunan ke depan seperti dalam kunjungan ke Kabupaten Lingga, Prov Kepulauan Riau, Maret 2021.

# Legislasi Untuk Fondasi Kebijakan Yang Lebih Responsif

**M**enghasilkan peraturan perundangan yang menjamin terciptanya fondasi yang kuat bagi kebijakan pembangunan dalam mewujudkan kepentingan nasional adalah semangat yang selalu dibawa oleh Wakil Ketua DPR/Korinbang Rachmat Gobel. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat berbagai peraturan, setiap undang undang haruslah mewakili aspirasi rakyat, mampu menciptakan iklim yang adil bagi masyarakat dan antisipatif terhadap berbagai perkembangan dinamika sosial, politik dan ekonomi.

Setiap tahapan proses pembuatan undang-undang haruslah dilaksanakan secara penuh tanggung jawab. Mulai tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pengesahan dan pengundangan. Undang-undang yang dihasilkan harus responsif terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan antisipatif terhadap perkembangan dinamika kebutuhan kedepan.

“Setiap undang-undang harus didukung oleh visi yang jelas, responsif dan antisipatif, sehingga bisa menjadi landasan hukum yang kuat bagi terciptanya solusi bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Rachmat Gobel.

Untuk periode 2020-2024, ada 248 Rancangan Undang Undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dari jumlah itu, 33 RUU diantaranya masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 seperti ditetapkan pada Sidang Paripurna 23 Maret 2021

Sejalan dengan posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dan anggota Fraksi Partai Nasdem, dari 33 RUU yang di tetapkan dalam Prolegnas Prioritas itu, 11 (sebelas) RUU yang menjadi fokus Rachmat Gobel dan Fraksi Partai NasDem. RUU ini akan didorong secara maksimal masuk dalam pembahasan dan disahkan menjadi Undang-undang.



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berfoto dengan delegasi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD-APDESI) seusia melakukan audiensi mengenai RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

RUU tersebut adalah (1) RUU Perlindungan Data Pribadi; (2) RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; (3) RUU Ketentuan Umum Perpajakan; (4) RUU Pendidikan Kedokteran; (5) RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; (6) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; (7) RUU Masyarakat Hukum Adat; (8) RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; (9) RUU Badan Usaha Milik Desa; (10) RUU Badan Usaha Milik Negara; (11) RUU Energi Baru dan Terbarukan.

### **RUU Perlindungan Data Pribadi**

Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan usulan pemerintah, masuk kedalam *list* Nomor 23 pada Prolegnas Prioritas tahun 2021. Fraksi Partai NasDem mengawal dan mendorong RUU ini untuk segera dituntaskan pembahasan dan disahkan. Kebutuhan terhadap aturan perlindungan data pribadi sudah sangat mendesak. Di era digital seperti sekarang, keberadaan UU ini sangat penting untuk menghindari kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

Sebagai gambaran, pada Mei 2020 ada akun yang menyebutkan bahwa mereka menguasai 91 juta data pengguna dan 7 juta data *merchant* Tokopedia. Akun ini menyatakan sudah menjual 15 juta data tersebut yang mencakup



gender, lokasi, *username*, nama lengkap pengguna, alamat *e-mail*, nomor ponsel, diduga dijual disitus gelap (*dark web*).

Kemudian akhir Mei 2021, 279 juta data peserta BPJS Kesehatan yang mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telpon, *e-mail* dijual di situs gelap (*dark web*), diduga bocor ke publik, ini menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.

Secara umum, kesadaran bahwa data pribadi bagian dari properti yang harus dilindungi, masih sangat rendah. Ini antara lain terlihat banyaknya postingan yang mengandung konten data pribadi baik di sejumlah *platform* media sosial maupun diberbagai grup jejaring sosial. Selain itu data pribadi juga harus dilindungi saat masyarakat menggunakan *platform* system elektronik (*e-commerce*, transportasi *online*, *fintech*, dan lain-lain).

Kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data masyarakat



Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel memimpin rapat konsultasi dengan sejumlah menteri dalam rangka membahas berbagai masalah dan aspirasi masyarakat mengenai pelaksanaan proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

serta mengurangi potensi kejahatan yang dilakukan oleh penyimpan data. Semangat menghadirkan UU ini sama dengan Undang-Undang ITE yakni kesadaran atas maraknya kejahatan pada dunia cyber.

RUU Perlindungan Data Pribadi diajukan pemerintah ke DPR pada 24 Januari 2020 melalui Surat Presiden (Supres) Nomor: R-05/Pres/01/2020. Pada 3 Februari 2020, melalui Rapat Konsultasi pengganti Bamus antara Pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi pada masa persidangan II tahun 2019-2020, Komisi I ditugaskan untuk melakukan pembahasan tingkat I bersama dengan Pemerintah.

Sampai saat ini prosesnya masih dalam tahapan pembahasan di Komisi I DPR. Ada beberapa poin krusial yang menjadi penekanan dalam tahap ini, yakni (1) Data pribadi yang bersifat elektronik dan non elektronik; (2) Hak subjek data dan kewajiban pengendalian data; (3) Pelanggaran dan sanksi; (4) Otoritas Lembaga independent pengawas perlindungan data pribadi.

Masih terjadi ketidaksepahaman antara Komisi I dengan pemerintah, khususnya mengenai otoritas lembaga independen pengawas. Komisi I menginginkan lembaga ini langsung bertanggung jawab kepada presiden agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat dilakukan secara objektif. Namun pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kominfo menginginkan lembaga ini berada di bawah Kementerian. Permasalahan inilah yang membuat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi belum menemukan titik temu antara DPR dan Pemerintah.

Melihat permasalahan tersebut Rachmat Gobel akan melakukan komunikasi politik dengan Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga merupakan kader NasDem serta Komisi I. Langkah untuk mencari titik temu agar RUU ini bisa segera disahkan menjadi undang-undang.

“Harus dicari titik temu agar pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi bisa tuntas. Saya akan terus melakukan upaya politik agar segera bisa memberikan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Rachmat Gobel.

### **RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**

Merupakan usul inisiatif pemerintah, Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas nomor 27. Saat ini pembahasannya dalam tahap pembicaraan tingkat I. RUU ini merupakan pengintegrasian antara UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengintegrasian dilakukan agar pelaksanaan hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa lebih komprehensif. Ini akan membantu pendanaan daerah secara merata dan proporsional dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

RUU ini mencakup pemberian sumber pendanaan (*revenue assignment*) diantaranya: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan potensi masing-masing daerah; (2) Dana Bagi Hasil (DBH) guna mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah; (3) Dana Alokasi Umum (DAU) guna mengurangi ketimpangan horisontal antar daerah; (4) Dana Alokasi Khusus (DAK); dan (5) Pemberian insentif fiskal dan pembiayaan sebagai instrumen akselerasi pembangunan daerah, serta Dana Otsus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Dalam hal RUU ini, Rachmat Gobel berperan sebagai anggota Panja dari Fraksi Partai NasDem untuk melakukan pembahasan di Komisi XI.

ia berperan aktif dalam pembahasan dan penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk memberikan arahan agar substansi RUU dapat meningkatkan pembangunan di daerah. Tujuannya adalah agar pengawasan terhadap dana APBN yang disalurkan ke daerah serta APBD bisa berjalan efektif dan dikelola secara efisien untuk keberhasilan pembangunan.

Dalam pembahasan di tingkat fraksi Partai NasDem ada beberapa poin penting yang mendapat perhatian khusus Rachmat Gobel, untuk dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan dibahas di Komisi XI. Diantaranya, (1) perlu perluasan defenisi daerah penghasil, dimana yang dimaksud dengan daerah penghasil kriterianya terdapat mulut tambang, sumur dan industri; (2) penambahan presentase jumlah pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), dari semula 15% menjadi 18%; dan (3) fleksibilitas daerah dalam melakukan pencarian dana di luar dari APBN. Tiga poin inilah yang menjadi isu sentral yang dibawa Rachmat Gobel dan Fraksi Partai NasDem.

Dalam dinamika pembahasan di Komisi XI DPR RI, seluruh Fraksi yang ada mendukung terbentuknya RUU ini, dan di targetkan pada akhir tahun 2021 pembahasan sudah selesai untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

### **RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)**

Melalui pembahasan yang cukup panjang, pada 7 Oktober 2021 DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini menjadi Undang Undang. RUU ini merupakan perubahan kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diusulkan pemerintah pada 5 Mei 2021 dengan surpres Nomor: R-21/Pres/05.2021. Saat itu pemerintah mengusulkan judul dari RUU ini adalah RUU Ketentuan Perpajakan (KUP), namun dalam dinamika pembahasannya di DPR RI khususnya Komisi XI judul berubah nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

RUU HPP lahir untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang harus direspon agar roda pembangunan terus bisa bergerak cepat dan daya saing ekonomi Indonesia bisa terus ditingkatkan. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan penting yang menjadi latar belakang kelahiran UU ini yakni (1) terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi global; (2) adanya potensi stagnasi perekonomian Indonesia (*middle income trap*); dan (3) belum optimalnya daya saing.

Substansi UU HPP adalah mengatur mengenai reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan. UU ini mengusung konsep *omnibus law* dengan menyisir 3 undang-undang, yakni: UU Ketentuan Umum dan Tata Cara

perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Langkah ini dengan tujuan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sejak awal, pembahasan UU ini mendapat tanggapan beragam dari publik diantaranya terkait dengan pasal kenaikan PPN menjadi 11% dan pajak sembako. Pasal ini dinilai sangat membebani masyarakat khususnya dari kelompok menengah kebawah. Pengenaan tarif PPN menjadi 11% akan membuat barang kebutuhan pokok menjadi naik. Dari kalangan dunia usaha menilai, kenaikan tarif PPN bisa menjadi kontaproduktif terhadap pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Untuk menjembatani berbagai aspirasi tersebut, Fraksi Partai NasDem memberikan beberapa catatan di dalam dinamika pembahasan UU HPP ini. Catatan yang pada prinsipnya harus menjadi warning atau peringatan bagi pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang ini.

Dalam proses pembahasan, Rachmat Gobel berperan penting khususnya bagi tim penyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) Fraksi Partai NasDem. Ia memberikan fasilitas bagi tim untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) secara maksimal. Arahan Rachmat Gobel kepada seluruh tim penyusun DIM adalah kehadiran UU HPP harus mampu mengontrol pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan potensi pendapatan negara dari pajak, serta dapat meningkatkan investasi khususnya dari luar negeri.

Sikap Fraksi Partai NasDem tersebut dituangkan dalam Pandangan Mini Fraksi Partai NasDem dan dibacakan pada 29 September 2021. Berkaitan dengan KUP Fraksi Partai NasDem berpendapat bahwa; (1) Perlu adanya relaksasi dan rasionalisasi sanksi administratif terkait pemeriksaan WP dan OP dan yang berkaitan dengan keberatan dan banding harus sesuai semangat UU Cipta Kerja; (2) penting Integrasi Nomor Induk Kependudukan dengan NPWP serta perlunya menyesuaikan dengan RUU PDP yang sementara dibahas; (3) pentingnya asistensi penagihan pajak global yang bersifat timbal balik.

Berkaitan dengan Cukai, Fraksi Partai NasDem berpendapat, perlu adanya penegasan ranah pelanggaran administratif dan prinsip *ultimum remedium* (penghentian penyidikan) pada tindak pidana cukai untuk kepentingan penerimaan negara dan kepastian hukum;

Tentang Pajak Karbon, Fraksi Partai NasDem berpendapat, pentingnya komitmen penyusunan peta jalan (*roadmap*) pajak karbon dan pasar karbon bersama DPR, penetapan subjek, objek, dan tarif pajak karbon, dan insentif bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menerima aspirasi dari berbagai kelompok profesi dan lapisan masyarakat.

Partai NasDem juga berpendapat pentingnya mempertahankan fasilitas untuk WP UMKM yang diatur Pasal 31E UU PPh, penyesuaian tarif PPN secara bertahap seiring pemulihan ekonomi, perbaikan bracket penghasilan kena pajak untuk WP OP kelompok bawah, sekaligus mengatur threshold peredaran bruto tidak kena pajak sebagai bentuk pemihakan nyata bagi WP UMKM.

### **RUU Prioritas Partai NasDem**

Terkait dengan semangat restorasi, dalam Prolegnas Prioritas 2021 ada 4 (empat) RUU yang menjadi prioritas Partai NasDem yaitu RUU Pendidikan Kedokteran, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU Masyarakat Hukum Adat. Dalam pandangan Partai NasDem, kehadiran undang-undang yang terkait dengan 4 hal tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

### **RUU Pendidikan Kedokteran**

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Kedokteran telah diusulkan dari periode 2014-2019 oleh anggota Fraksi Partai NasDem (Alm) Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih, MM., M.H, dan dilanjutkan pada periode 2019-2024. Dalam memperjuangkan RUU ini Partai NasDem mendorong RUU Pendidikan Kedokteran masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Perjuangan ini telah menemukan titik terang, dimana saat ini DPR RI telah menetapkan RUU ini menjadi usul inisiatif DPR pada 29 September 2021

sehingga bisa dipastikan akan segera dilanjutkan ke pembahasan di tingkat I. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran penting Fraksi Partai NasDem, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Panja penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran di Badan Legislasi (Baleg) yaitu Willy Aditya sebagai kader partai.

Fraksi Partai NasDem telah melakukan langkah maju untuk menggandeng semua pihak dalam menyukseskan RUU Pendidikan Kedokteran. Kehadiran Undang-Undang Pendidikan Kedokteran sudah menjadi suatu keharusan karena masyarakat saat ini banyak mengeluhkan mengenai penyebaran dokter, dan biaya pendidikan kedokteran yang mahal. Kedua masalah ini diungkapkan oleh beberapa perwakilan fakultas kedokteran dan dokter-dokter muda yang terdampak buruknya sistem Pendidikan kedokteran di Indonesia dalam Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU) yang diadakan oleh Baleg DPR RI pada 1 September 2021.

Melihat desakan dan kebutuhan masyarakat, Rachmat Gobel akan berupaya maksimal untuk mendorong RUU Pendidikan Kedokteran segera dilakukan pembahasan di tingkat I. Sebagai Langkah awal dilakukan penjaringan permasalahan di Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan seminar. Seminar itu telah digelar oleh DPW Partai NasDem Jawa Timur dilakukan pada 8 Juni 2021 dengan tema “Restorasi Humanisme Pendidikan Kedokteran” dan seminar 9 Juni 2021 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan tema “Tantangan Globalisasi Pendidikan Kedokteran Indonesia di Era Disruptif.”

Dari dua hasil kegiatan itu Fraksi Partai NasDem akan melakukan *list* terkait dengan mahasiswa yang di DO (*drop out*) yang difasilitasi oleh DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Timur dalam hal pendataan, karena tidak lulus ujian kompetensi. Dalam rangka mendorong RUU, Rachmat Gobel mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh Fraksi Partai NasDem untuk melaksanakan belanja masalah yang akan dilaksanakan di 10 Provinsi di Indonesia.

### **RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga**

Fraksi Partai NasDem berhasil mengawal kembali RUU Pekerja Rumah Tangga yang sudah 17 tahun belum menunjukkan progres. RUU ini berhasil masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021 dan tercatat sebagai daftar prioritas nomor 11.

RUU ini sangat dibutuhkan karena saat ini menurut data International Labour Organization (ILO), tidak kurang 5 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia yang mengharapkan kepastian hukum. Kebutuhan akan RUU ini bukan hanya disuarakan oleh PRT namun terdapat beberapa LSM

diantaranya Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT). Aspirasi dan desakan dari publik ini dilandaskan keinginan memberikan perlindungan hukum bagi PRT dari kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Ketiga hal ini merupakan kasus yang sering mereka alami, setidaknya tahun 2015 hingga 2019 terdapat 2.148 kasus kekerasan terhadap PRT.

Mandegnya pembahasan selama ini tidak terlepas dari dinamika politik serta banyaknya distorsi konsep. Tidak bisa di pungkiri, ada sejumlah fraksi seperti Fraksi Golkar dan Fraksi PDI P yang berpandangan, RUU ini tidak fleksibel. Banyak pasal RUU ini yang membebani pemberi kerja serta kurang sesuai dengan budaya Indonesia.

Dalam pusaran desakan publik dan dinamika yang ada di DPR RI, sebagai Wakil Pimpinan DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel telah menyatakan, demi kepastian hukum dari 5 juta PRT, ia akan terus mengawal serta mendorong anggota Fraksi Partai NasDem mengandeng seluruh fraksi untuk segera melanjutkan pembahasan RUU ini.

Rachmat Gobel menegaskan, RUU ini mengatur hal prinsip yang berkesesuaian dengan budaya bangsa. Dalam konteks relasi kerja misalnya, menurut Rachmat Gobel, hubungan antara PRT dengan pemberi kerja serta jasa penyalur atau penyedia pekerja rumah tangga haruslah dibangun berdasarkan azas pro Justitia agar memberi perlindungan hukum dan rasa adil terhadap semua pihak.

Kemudian dalam sudut pandang kultural, Rachmat Gobel berpendapat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan Rancangan Undang-Undang yang sosio-kultural (mengedepankan kesepakatan keduabelah pihak berdasarkan kemanusiaan. Oleh karena itu ia menegaskan, jalan panjang dan terjal dalam menggoalkan RUU Perlindungan PRT harus diakhiri sehingga bisa disahkan menjadi undang undang.

### **RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam daftar list Prolegnas Prioritas tahun 2021 nomor 16 yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. RUU ini telah diusulkan sejak periode 2014-2019. Dalam perjalanannya mengalami banyak dinamika, diantaranya pernah dikeluarkan dari daftar list Prolegnas Prioritas pada 2020. Namun dengan perjuangan serius dari Fraksi Partai NasDem, RUU ini kembali masuk Prolegnas Prioritas tahun 2021.

Dalam pembahasan penyusunan di Baleg, setidaknya terdapat tiga poin penting dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yakni; (1) adanya kekosongan payung hukum untuk masalah kekerasan seksual; (2) aparat

penegak hukum harus berperspektif korban; (3) undang-undang ini harus berpihak kepada korban.

Untuk mendorong RUU ini bisa segera dibahas dan disahkan, Fraksi Partai NasDem telah melakukan berbagai upaya, diantaranya mengadakan forum diskusi, *forum group discussion* (FGD) yang diadakan oleh Forum Denpasar 12 dan difasilitasi oleh Lestari Moerdijat sebagai Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Dalam sejumlah diskusi dengan melibatkan komunitas perempuan, LSM dan akademisi, semuanya menunggu DPR untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagian besar merupakan kekerasan seksual, serta 419 kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Data ini menjelaskan, masyarakat menunggu adanya suatu kepastian hukum untuk melindungi korban-korban dari kekerasan seksual.

**Perlu percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dimana saat ini isu kekerasan seksual belum memiliki payung hukum.**

Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel menegaskan, perlu percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dimana saat ini isu kekerasan seksual belum memiliki payung hukum. Hukum saat ini hanya mengatur mengenai penindakan bagi pelaku, belum ada aturan mengenai perlindungan kepada korban.

### **RUU Masyarakat Hukum Adat**

RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional tahun 2021 urutan Nomor 19 dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. RUU ini merupakan salah satu yang menjadi usul dari anggota Fraksi Partai NasDem (Sulaeman L. Hamzah) Dapil Papua.

RUU ini pernah dibahas di DPR RI pada 2014 dengan judul Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA). Namun pembahasannya tidak dapat terselesaikan sampai akhir jabatan DPR RI Priode 2009-2014. Pada 2017 dengan substansi yang tidak jauh berbeda Fraksi Partai NasDem mengusulkan RUU Masyarakat Hukum Adat masuk kedalam Prolegnas Prioritas. Dimana sebagai pengusul

Fraksi NasDem membentuk tim Fraksi yang bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan penyusunan draf RUU dan Naskah Akademik.

Pada periode 2019-2024, belum mendapatkan respon baik dari fraksi-Fraksi lain yang ada di DPR maupun dari pemerintah. Fraksi NasDem terus mendorong RUU ini untuk dibahas dan disahkan. Perlindungan bagi masyarakat adat belum optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun.

### **RUU Di Bawah Korinbang**

Dalam kedudukan sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang ada 4 Komisi yang berada dalam ruang lingkup tupoksi Rachmat Gobel yaitu Komisi IV, V, VI dan VII. Pada tahun 2021 ada beberapa RUU sedang dalam tahap penyusunan dan pembahasan di Komisi-Komisi ini antara lain; (1) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; (2) RUU Badan Usaha Milik Desa; (3) RUU tentang Badan Usaha Milik Negara; (4) RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Keempat RUU ini menjadi perhatian Rachmat Gobel, bukan hanya sekedar sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang yang memiliki tupoksi sebagai koordinator Komisi IV, V, VI dan VII, tapi adalah bentuk komitmennya menjalankan fungsi legislasi yaitu memberi kepastian hukum, kemanfaatan serta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

### **RUU tentang Perubahan atas UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan**

Pembahasan RUU ini berada di bawah Komisi V DPR RI, masuk dalam daftar prolegnas prioritas nomor 4. Status RUU ini sedang dalam pembahasan yakni tahap pembicaraan tingkat I di Komisi V DPR RI. Dalam pembicaraan tingkat I Rachmat Gobel mendorong kepada seluruh anggota Panja untuk “merampingkan birokrasi terkait dengan pengambilan keputusan dalam membangun jalan yang ada di Indonesia khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar)”. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena kebutuhan akan jalan yang baik akan meningkatkan produktifitas serta ekonomi masyarakat.

Rachmat Gobel mendorong agar pembahasan RUU ini bisa segera dituntaskan sehingga bisa disahkan pada masa sidang periode 2021-2022.

### **RUU Badan Usaha Milik Desa**

RUU ini juga berada di dalam wewenang Komisi V dan masuk dalam daftar prolegnas prioritas nomor 33. Merupakan usul dari DPD RI, dan menyerahkan pembahasannya kepada Komisi V DPR RI. Namun karena substansi dari RUU ini juga melibatkan mitra kerja dari Komisi VI DPR RI, maka di putuskan untuk harmonisasi dari Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh Baleg DPR RI.

Dalam dinamika pembahasan di Baleg DPR RI, akan dilakukan harmonisasi khususnya dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah. Ini penting dilakukan karena banyak substansi dari RUU Badan Usaha Milik Desa diatur dalam aturan turunan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa Rachmat Gobel, pada 18 September 2021 menerima audiensi dari masyarakat Situbondo Jawa Timur. Terdapat beberapa poin aspirasi yang disampaikan masyarakat yaitu (1) pentingnya memperkuat BUMDes Bersama yang dibentuk oleh antar desa; (2) dibutuhkan regulasi yang menjadi payung hukum terkait BUMDes yang didirikan atas beberapa desa; (3) dibutuhkan suntikan dana dari pemerintah guna mengembangkan usaha BUMDes agar usaha BUMDes semakin meningkat.

Ketiga aspirasi tersebut akan diperjuangkan Rachmat Gobel untuk menjadi perhatian bagi DPR dan pemerintah dalam membuat regulasi baik itu Undang-Undang maupun peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini Peraturan Pemerintah.

### **RUU tentang Badan Usaha Milik Negara**

RUU berada dalam ruang lingkup Komisi VI, masuk dalam daftar prolegnas prioritas nomor 5, Rancangan Undang-Undang ini masih dalam tahap penyusunan di Komisi VI DPR RI. Dalam melakukan penyusunan RUU Rachmat Gobel mendorong Komisi VI untuk berkomunikasi dengan pemerintah secara intens. RUU ini dapat mengatur Badan Usaha Negara dengan lebih baik, hal ini dilakukan agar BUMN dapat memberikan keuntungan bagi negara.

### **RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan**

Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan masuk dalam daftar prolegnas prioritas nomor 6 dan berada dalam ruang lingkup Komisi VII. RUU ini masih dalam tahap harmonisasi di Komisi VII DPR RI.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menghadiri rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Terkait dengan RUU ini pada 18 November 2021, Rachmat Gobel melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi VII DPR RI untuk membicarakan produk legislasi yang saat ini sedang di bahas di Komisi ini. Dari hasil pertemuan tersebut Rachmat Gobel mendorong komisi VII untuk segera menyelesaikan penyusunan RUU Energi Baru dan Terbarukan.

Menurut Rachmat Gobel, Indonesia sangat memerlukan undang undang yang mengatur energi baru dan terbaru karena mempunyai potensi besar di bidang sektor ini. Hal ini dilakukan oleh Rachmat Gobel dalam rangka mendukung program Nawacita jilid 2 Presiden Joko Widodo khususnya yang terkait dengan lingkungan “pembangunan kesinambungan berbasis lingkungan”. Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang akan terus berupaya dan mendorong Komisi VII menuntaskan pembahasan RUU ini. Ia juga akan melakukan pendekatan kepada seluruh fraksi yang ada di DPR agar ikut serta mendorong penyusunan dari RUU Energi Baru Terbarukan ini.

## RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021

No.	Posisi/Proses	Judul Rancangan Undang-Undang	Pengusul
1.	Penyusunan	RUU Perubahan atas UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
2.	Penetapan Usulan	RUU tentang Perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR, Pemerintah
3.	Penyusunan	RUU tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	DPR
4.	Pembahasan	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR
5.	Penyusunan	RUU Perubahan atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR
6.	Penyusunan	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR
7.	Pembahasan	RUU Perubahan atas UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR
8.	Penetapan Usulan	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR
9.	Pembahasan	RUU tentang Perubahan atas UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR
10.	Terdaftar	RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (Omnibus Law)	DPR, Pemerintah
11.	Penyusunan	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR
12.	Penetapan Usulan	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat	DPR
13.	Penetapan Usulan	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, Manado	DPR
14.	Penetapan Usulan	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Papua Barat	DPR
15.	Penyusunan	RUU Perubahan atas UUU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR
16.	Penyusunan	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR
17.	Penyusunan	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
18.	Pembahasan	RUU tentang Perubahan atas UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR

19.	Harmonisasi	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR
20.	Pembahasan	RUU tentang Praktik Psikologi	DPR
21.	Terdaftar	RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR
22.	Penetapan Usulan	RUU tentang Badan Pembinaan Idiologi Pancasila	Pemerintah
23.	Pembahasan	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	Pemerintah
24.	Pembahasan	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Pemerintah
25.	Selesai	RUU Perubahan atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Pemerintah
26.	Terdaftar	RUU tentang Perubahan atas UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pemerintah
27.	Pembahasan	RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	Pemerintah
28.	Terdaftar	RUU tentang Ibukota Negara	Pemerintah
29.	Terdaftar	RUU tentang Hukum Acara Perdata	Pemerintah
30.	Terdaftar	RUU tentang Wabah	Pemerintah
31.	Selesai	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR, Pemerintah
32.	Terdaftar	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD
33.	Pembahasan	RUU tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD

# APBN 2022: Anggaran Transisi di Tengah Ketidakpastian

**P**andemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat risiko ketidakpastian ekonomi masih terus tinggi. Meski penyebarannya sudah melandai, belum satu pun negara yang berani menyatakan bebas dari virus ini. Dampaknya terhadap perekonomian, termasuk keuangan negara, masih sangat dirasakan.

Hampir semua negara terpaksa memperbesar defisit anggaran agar bisa membiayai peningkatan kebutuhan dalam menghadapi dampak pandemi. Agar bisa memastikan berbagai masalah bisa ditangani secara komprehensif, penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan pendanaan publik dalam jumlah yang sangat besar. Membiayai insentif untuk menghadapi pelemahan ekonomi dan penanganan sektor kesehatan membutuhkan tindakan tepat waktu dan dana yang tidak sedikit.

Tidak hanya negara berkembang seperti Indonesia, beban berat juga sangat dirasakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia seperti Amerika Serikat (AS), Jepang dan China. Pada 2020 pemerintah AS terpaksa menaikkan defisit anggarannya menjadi 15% PDB, kemudian pada 2021 negara ini masih membutuhkan defisit 12,4% PDB. Angka-angka ini jauh di atas defisit anggaran sebelum pandemi seperti pada 2019 yang hanya 3,2% PDB.

Hal yang sama juga harus dilakukan oleh pemerintah Jepang. Pada 2020 negara Matahari Terbit ini menaikkan defisit anggarannya ke posisi 10,28% PDB dan pada 2021 sebesar 9% atau jauh dibandingkan sebelum pandemi 3,11% PDB. Begitu juga China, pada 2020 pemerintah negara Tirai Bambu ini harus menaikkan defisit anggarannya ke level 11,18% PDB dan 7,54% pada 2021, dari sebelum pandemi 6,34%.

Tekait pengelolaan anggaran menghadapi pandemi, DPR RI dan pemerintah telah mengambil langkah cepat. Sejak awal merebaknya kasus Covid-19 di berbagai negara pada Januari 2020, pemerintah telah

mengantisipasi dengan berbagai langkah. Begitu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, pemerintah segera menyiapkan berbagai perangkat peraturan yang dibutuhkan.

Pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui Sidang Paripurna 12 Mei 2020, DPR RI menyetujui Perpu ini menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Inilah yang menjadi fondasi bagi kebijakan untuk melakukan langkah luar biasa dalam penanganan pandemi Covid-19.

Melalui pasal UU No 2 Tahun 2020 pemerintah diizinkan untuk menetapkan defisit APBN lebih dari 3% PDB atau di atas batas maksimal yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No 2 ini juga memberi keleluasan kepada pemerintah melakukan relokasi pembiayaan dan pendanaan serta memberi sejumlah insentif untuk membantu dunia usaha dalam menghadapi pandemi.

“Tanpa ada UU No.2 Tahun 2020 sebagai fondasi kebijakan, bisa dipastikan APBN tidak akan mampu membiayai berbagai kebutuhan dalam penanganan Covid-19 sehingga dampak pandemi ini akan lebih berat bagi masyarakat,” kata Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

### **APBN 2022 Anggaran Transisi**

Sesuai dengan amanah UU No. 2 Tahun 2020, APBN 2022 adalah kesempatan terakhir untuk menyusun anggaran dengan defisit di atas 3% PDB. Oleh karena itulah APBN 2022 ini disebut sebagai anggaran transisi, menuju kembali kepada ketentuan yang diatur UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dimana defisit APBN maksimal 3% PDB. Defisit APBN 2023 harus di bawah 3% seperti yang berlaku pada APBN sebelum pandemi Covid-19.

Meski perekonomian mulai membaik, pembiayaan APBN masih membutuhkan defisit yang masih besar. Setelah melalui pembahasan panjang, melalui Sidang Paripurna pada 30 September 2021, DPR RI menyetujui dan mengesahkan UU APBN 2022 dengan defisit Rp 858,0 triliun atau 4,85% PDB. Defisit ini berasal target pendapatan negara Rp 1.841 triliun dan kebutuhan belanja negara Rp 2.708,7 triliun.

Pendapatan negara ditargetkan Rp 1.506,6 triliun dari penerimaan pajak, Rp 33,2 triliun dari penerimaan negara bukan pajak (PNB) dan hibah Rp 0,6

triliun. Belanja negara dialokasikan untuk pemerintah pusat Rp 1.938,3 triliun dan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 770,4 triliun.

Rachmat Gobel menilai, APBN 2022 cukup realistis dan terlihat hati-hati seperti tercermin dari volume belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBN 2021. Defisit anggaran 2022 yang juga jauh lebih rendah dibandingkan target APBN 2021 yaitu 5,1%-5,4% PDB.

“Dilihat dari struktur APBN 2022, daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak sekuat APBN 2021. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah, kuncinya adalah pelaksanaan APBN 2022 harus mendapat dukungan kebijakan non-fiskal yang lebih efektif,” kata Rachmat Gobel.

Ia memaklumi langkah pemerintah mengerem belanja negara pada 2022 karena kebijakan fiskal pada 2022 memang harus diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3% PDB pada tahun 2023.

Anggaran tahun 2022 memang harus lebih bersifat konsolidasi karena itu kebijakan nonfiskal menjadi sangat penting. Ini artinya kreativitas dan kemampuan kementerian dan lembaga melahirkan kebijakan untuk mendorong pergerakan ekonomi menjadi sangat penting. “Ini tantangan besar, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar instansi atau kementerian agar sasaran pembangunan 2022 yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai,” katanya.

## Perkembangan APBN dan Defisit Anggaran (Rp triliun)

	2019(*)	2020(*)	2021(**)	2022(**)
<b>PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.961</b>	<b>1.647</b>	<b>1.744</b>	<b>1.841</b>
Penerimaan Pajak	546,1	1.285,1	1.444,5	1.506,9
PNPB	408,9	343,8	298,2	333,2
Hibah	5,5	5,5	0,9	0,6
<b>BELANJA NEGARA</b>	<b>2.309,3</b>	<b>2.595,4</b>	<b>2.750,0</b>	<b>2.708,7</b>
Pemerintah Pusat	1.496,3	1.832,9	1.954,5	1.938,3
TKDD	812,9	762,5	795,5	770,4
<b>DEFISIT ANGGARAN</b>	<b>348,7</b>	<b>947,6</b>	<b>1.006,4</b>	<b>868,0</b>
Defisit Terhadap PDB (%)	2,2	6,1	5,7	4,85

Sumber: Laporan Realisasi dan Nota Keuangan APBN

Ket:

(\* angka realisasi

(\*\* angka outlook

## Indikator Makro APBN 2022

APBN 2022 disusun melalui pertimbangan penuh kehati-hatian mengingat risiko ketidakpastian yang masih tinggi. Dinamika pandemi Covid-19 yang masih cukup tinggi menjadi variabel utama yang mempengaruhi divergensi proyeksi ekonomi global maupun domestik. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mendesain APBN seefektif mungkin untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional.

Meski sudah terlihat sinyal pemulihan ekonomi, baik dalam tataran global maupun nasional, DPR dan pemerintah tetap menyikapinya dengan kehati-hatian. Dalam tataran global, sinyal pemulihan antara lain terlihat pada *Purchasing Managers Index* (PMI) 2021 yang terdeteksi berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara.

Sinyal itu diharapkan terus berlanjut pada 2022. Berdasarkan berbagai perkembangan indikator ekonomi, Bank Dunia melalui *World Economic Outlook* bulan Juli 2021 memperkirakan, perekonomian global 2022 akan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9%. Ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh di kisaran 5,0-5,5%.

Kondisi perekonomian pada 2022 akan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Secara simultan hal ini akan meningkatkan *confidence* masyarakat melakukan aktivitas sosial ekonomi. Kondisi ini diharapkan akan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga sebagai lokomotif utama perekonomian nasional.

Keberhasilan tahun anggaran 2022 sangat menentukan mengingat sebagai periode terakhir pemberlakuan relaksasi defisit fiskal. APBN ini harus menjadi momentum untuk keberlanjutan perbaikan iklim perekonomian, dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mendukung prioritas pembangunan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi.

Berdasarkan berbagai kondisi dan kebutuhan, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati sejumlah asumsi makro sebagai dasar penyusunan APBN 2022 dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Berdasarkan tema ini, ditetapkan APBN 2022 didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,8%, laju inflasi sebesar 3 plus minus 1% dan tingkat bunga Surat Utang Negara tenor sepuluh tahun 6,32%-7,27%.

Selain itu, nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar 13.900-14.800 per US\$. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP US\$-US\$ 70 per bare. *Lifting* minyak



Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/09).

bumi 686.000-750.000 barel per hari (bph) dan *lifting* gas bumi sebesar 1.031-1.200 juta barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD).

Selain asumsi makro itu, ditetapkan pula target pembangunan yaitu tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,5-6,3%, tingkat kemiskinan 8,5-9%, rasio gini 0,376-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46, nilai tukar petani pada kisaran 103-105 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 104-106.

### **Pokok-pokok Kebijakan Fiskal**

Atas dasar indikator makro tersebut ditetapkan pokok-pokok kebijakan fiskal 2022 antara lain; memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonom, memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan.

Selain itu, kebijakan fiskal harus mampu mendukung peningkatan daya saing, produktivitas. Dengan didukung implementasi reformasi struktural



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menerima salam hormat dari salah satu perwakilan fraksi dalam rapat paripurna pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2022.

(UU Cipta Kerja) dan reformasi fiskal, serta optimalisasi pendapatan dan penguatan *spending better*, konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan bisa dicapai.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, pemerintah diminta melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan dengan tetap mempertahankan prinsip terukur dan terarah serta berlandaskan optimalisasi penerimaan pajak dan PNBPN. Insentif fiskal lebih diarahkan untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai efek ganda (*multiplier effect*) yang kuat.

Basis perpajakan harus lebih diperluas melalui ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Inovasi penggalan potensi perpajakan harus lebih dikembangkan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Di bidang belanja negara, penajaman biaya operasional harus ditingkatkan. Optimalisasi teknologi informasi perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu melakukan redesain sistem penganggaran dengan menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik

dengan konsep result based dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan atau dikenal *automatic stabilizer*.

Kebijakan belanja subsidi diarahkan lebih tepat sasaran. Sistem integrasi dan penyempurnaan data harus dibangun agar mekanisme penyaluran subsidi energi, bantuan sosial, subsidi pupuk bisa menggunakan basis data NIK dan alamat (*by name by address*).

Kebijakan belanja negara juga ditujukan untuk memperluas akses permodalan UMKM dan koperasi melalui subsidi bunga KUR, menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR, dan pemberian insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Terkait dengan meningkatkan belanja negara untuk TKDD dan penguatan kualitas desentralisasi fiskal, perlu upaya mendorong belanja infrastruktur daerah melalui *creative financing*. Kemudian memperkuat sinergikan anggaran TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan SDM (terutama sektor pendidikan dan kesehatan). Selanjutnya melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS).

### **Alokasi Anggaran Ketahanan Pangan**

Terkait dengan bidang pembangunan dan industri ada 3 sektor yang mendapat alokasi anggaran cukup besar yaitu sektor ketahanan pangan, infrastruktur dan UMKM. Sektor ketahanan pangan termasuk yang mendapat prioritas tinggi. Berdasarkan data Nota Keuangan beserta RAPBN 2022, sektor ini mendapat alokasi Rp 76,9 triliun. Sebagian besar dialokasikan melalui belanja kementerian dan lembaga (K/L) seperti Kementan dan KKP dan Kemen PUPR terkait irigasi pertanian. Belanja non-K/L antara lain dialokasikan untuk subsidi pupuk, subsidi bunga kredit resi gudang, dan antisipasi atas stok beras pemerintah dan stabilisasi harga pangan.

Sasaran yang hendak dicapai melalui anggaran sektor pangan ini antara lain; target nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) masing-masing pada kisaran 102-104 dan 102-105 pada tahun 2022.

Melalui anggaran ketahanan pangan ini, pemerintah menargetkan sasaran strategis dengan meningkatkan produksi komoditas pangan antara lain; produksi padi 57,5 juta ton, jagung 26,0 juta ton, daging sapi dan kerbau (karkas) sebanyak 0,59 juta ton. Kemudian bantuan kapal perikanan 75 unit, bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan 1.000 unit, pengembangan 10 korporasi nelayan.

Untuk infrastruktur ditargetkan pembangunan jaringan irigasi seluas 5.000 hektare, pembangunan bendungan lanjutan 33 unit dan bendungan baru 4 unit. Selanjutnya rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100.000 hektare oleh pusat dan 93.330 hektare oleh daerah, pengembangan 200 unit lumbung pangan, 66 pelabuhan perikanan, dan 90 balai benih di daerah.

Rencana kerja strategis untuk mencapai target tersebut antara lain meningkatkan efektivitas program Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*), mengarahkan subsidi pupuk lebih tepat sasaran lewat penggunaan Kartu Tani. Mendorong restorasi lahan gambut, perlindungan hutan, pengelolaan air, pengendalian aktivitas pembakaran hutan, dan promosi praktik pertanian berkelanjutan.

Pemerintah juga akan melakukan perbaikan kebijakan terkait importasi produk pangan strategis dengan meningkatkan akurasi data produksi pangan nasional dan alokasi impor dengan menggunakan Neraca Komoditas pada Sistem Indonesia *National Single Window* (INSW).

### **Anggaran Koperasi dan UMKM**

Untuk UMKM, pemerintah dan DPR berkomitmen untuk terus mendukung kelompok pelaku usaha ini agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan transformasi pemulihan ekonomi. Sebagai penyumbang terbesar terhadap PDB, sektor ini berperan penting bagi pemulihan ekonomi nasional.

Alokasi dana APBN 2022 untuk klaster UMKM mencapai Rp 95,87 triliun. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM. Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

Rachmat Gobel memberi perhatian besar terhadap anggaran UMKM ini. Ia meminta, realisasi dan penyerapan dana untuk sektor ini harus lebih ditingkatkan. Sering terjadi selama ini, serapannya tergolong lambat dan rendah.

“Realisasi dukungan UMKM belum maksimal, padahal sektor ini punya peran penting bagi pemulihan ekonomi. Kondisi ini terjadi karena belum ada konduktor yang kuat dalam menyatukan kebijakan pengembangan KUMKM,” kata Rachmat Gobel.

Keprihatinan Rachmat Gobel tersebut bisa dipahami karena realitanya memang penyerapan anggaran UMKM sering terhambat. Tidak hanya dana

dari Pemulihan Ekonomi Nasional, realisasi dana dari K/L pun rendah. Sebagai gambaran, untuk 2021 dari Rp 162,40 triliun alokasi PEN untuk UMKM dan korporasi, sampai Oktober baru terserap Rp 78,73 triliun atau baru 48,5% dari pagu. Sementara secara keseluruhan realisasi realisasi PEN sudah 65% atau Rp 483,91 triliun dari pagunya Rp 744,77 triliun. Ini berarti, realisasi dukungan KUMKM ini terendah di antara kluster lainnya.

### **Anggaran Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk menggerakkan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Dalam jangka pendek, sektor ini akan menjadi motor penggerak ekonomi dari sisi permintaan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur berkontribusi di sisi penawaran yaitu meningkatkan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa sehingga tercipta efisiensi ekonomi.

Pada APBN 2022, pembangunan infrastruktur mendapat alokasi Rp 384,78 triliun. Anggaran ini dikelola oleh pemerintah pusat Rp 170,3 triliun yaitu melalui K/L sebesar Rp 164,25 triliun dan non K/L senilai Rp 6,09 triliun. Lainnya, Rp 119,19 triliun disalurkan melalui TKDD dan Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 95,2 triliun.

Melalui anggaran sebesar itu, pemerintah antara lain menargetkan pembangunan bidang pelayanan dasar berupa rumah susun 3.501 unit dan rumah khusus 2.250 unit, akses sanitasi dan persampahan bagi 114.124 KK, bendungan 37 unit (33 unit lanjutan dan 4 unit baru), serta pembangunan jaringan irigasi seluas 5.000 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100.000 ha.

Selain itu, meningkatkan konektivitas melalui pembangunan jalan sepanjang 205 km, pembangunan jembatan sepanjang 8.244 m, pembangunan jalur kereta api sepanjang 6.624 km, dan pembangunan bandara baru pada 6 lokasi.

Untuk bidang energi dan ketenagalistrikan dalam bentuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 10.000 SR dan pembangunan PLTS *Rooftop* dengan total kapasitas 2,52 MW.

Di bidang teknologi informasi, pembangunan 2.344 BTS baru dan penyediaan akses internet sebanyak 9.463 titik (*existing*) khususnya di daerah 3T, penyediaan kapasitas satelit sebesar 25 Gbps, dan Utilisasi Palapa Ring dengan target rata-rata 41,6%. (\*)



**Pembangunan  
infrastruktur menjadi  
salah satu kunci  
untuk menggerakkan  
pemulihan ekonomi  
dari dampak  
pandemi Covid-19.**

# Memperkuat Daya Saing Melalui Agenda Diplomasi Parlemen

**D**i era globalisasi, tidak ada satupun negara yang bisa mengisolasi diri. Semakin deras arus globalisasi, kian besar kebutuhan untuk memperkuat kerjasama dengan negara lain. Menggali berbagai manfaat dalam hubungan kerjasama, menjadi salah satu kunci untuk mencapai kepentingan nasional, termasuk dalam bidang ekonomi. Diplomasi tidak lagi bisa terpaku pada urusan politik dan keamanan, kepentingan ekonomi kini semakin menonjol.

Diplomasi ekonomi adalah pengelolaan hubungan luar negeri untuk memaksimalkan keunggulan dari sumber daya yang ada, guna memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi bagi kepentingan rakyat. Diplomasi ekonomi harus dilandasi kepentingan untuk memperkuat daya saing berdasarkan keunggulan komparatif.

“Masing-masing negara punya keunggulan, bagaimana kita membangun kerjasama agar keunggulan ini bisa dikelola untuk disinergikan agar bisa mendapat nilai tambah yang lebih tinggi,” kata Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

Atas dasar pemikiran itulah, dalam Masa Persidangan Tahun Sidang 2020-2021, Rachmat Gobel memimpin delegasi diplomasi DPR RI ke sejumlah negara yaitu Turki, Uzbekistan dan Belarusia. Disamping itu, ia juga menghadiri sejumlah forum internasional dan menerima perwakilan negara sahabat.

Diplomasi adalah bagian tanggung jawab DPR seperti diamanahkan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam penjelasan pasal 5 ayat 2, secara eksplisit disebutkan, Hubungan Luar Negeri terdiri dari pemerintah dan nonpemerintah, dimana DPR RI masuk di dalamnya. Pasal ini mengamanatkan agar DPR RI aktif mendukung diplomasi pemerintah.

Selain itu tanggungjawab DPR dalam diplomasi juga ditetapkan melalui UU No 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU No 17 Tahun 2014

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3. Pada pasal 69 ayat 2 UU ini disebutkan, dalam menjalankan fungsi representasi rakyat, anggota DPR RI harus berperan mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.

“Tugas diplomasi merupakan amanah yang dipikul anggota DPR, ikut membangun kerjasama yang erat dengan berbagai negara. Seiring kian derasnya arus globalisasi, peran dan dukungan diplomasi DPR RI sebagai lembaga parlemen menjadi kian strategis agar kerjasama luar negeri berjalan efektif dan aspirasi rakyat yang menjadi kepentingan nasional bisa terus terjaga,” kata Rachmat Gobel.

Dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, Rachmat Gobel terlihat lebih fokus pada upaya menggalang kerjasama dalam meningkatkan daya saing Indonesia seperti melalui kerjasama pengembangan teknologi dan pengembangan pasar sektor unggulan seperti industri manufaktur dan pertanian. Hal ini tercermin pada agenda delegasi parlemen yang dipimpinya, dimana lebih banyak membicarakan peninjauan kerjasama di sektor tersebut.

“Kita perlu membangun kerjasama agar bisa memanfaatkan keunggulan negara lain dalam upaya memperkuat daya saing kita dan sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar bagi produk unggulan kita,” kata Rachmat Gobel mengenai misi diplomasinya.

### **Kunjungan Muhibah Ke Turki**

Hubungan diplomatik Indonesia-Turki telah berlangsung sejak 1950. Kantor Kedutaan Besar Indonesia sudah berdiri di Ankara pada 1958. Selama ini, hubungan Indonesia-Turki sudah terjalin erat, namun di bidang ekonomi belum berkembang sesuai dengan potensi yang ada. Neraca perdagangan Indonesia-Turki baru sekitar US\$ 1,5 miliar, jauh di bawah angka yang seharusnya bisa dicapai. Dengan total *Gross Domestic Product* (GDP) gabungan yang lebih dari US\$ 1.800 miliar --Indonesia US\$ 1.050 miliar dan Turki US\$ 761 miliar-- nilai perdagangan kedua negara berpotensi untuk ditingkatkan minimal menjadi US\$ 10 miliar.

Dalam 20 tahun terakhir ini, ekonomi Turki tumbuh pesat, pendapatan per kapita naik 3 kali lipat dari US\$ 3.000 pada tahun 2000 menjadi US\$ 4 9.000 pada 2020. Negara ini berhasil naik dari *middle income country* menjadi *middle upper income country*. Dengan total GDP sekitar US\$ 761 miliar dan penduduk 80 juta orang, Turki merupakan pasar potensial bagi Indonesia, sekaligus alternatif pintu masuk ekspor ke pasar Uni Eropa.



Jajaran Kementerian Industri dan Teknologi Turki, dalam pertemuan dengan Delegasi Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel.



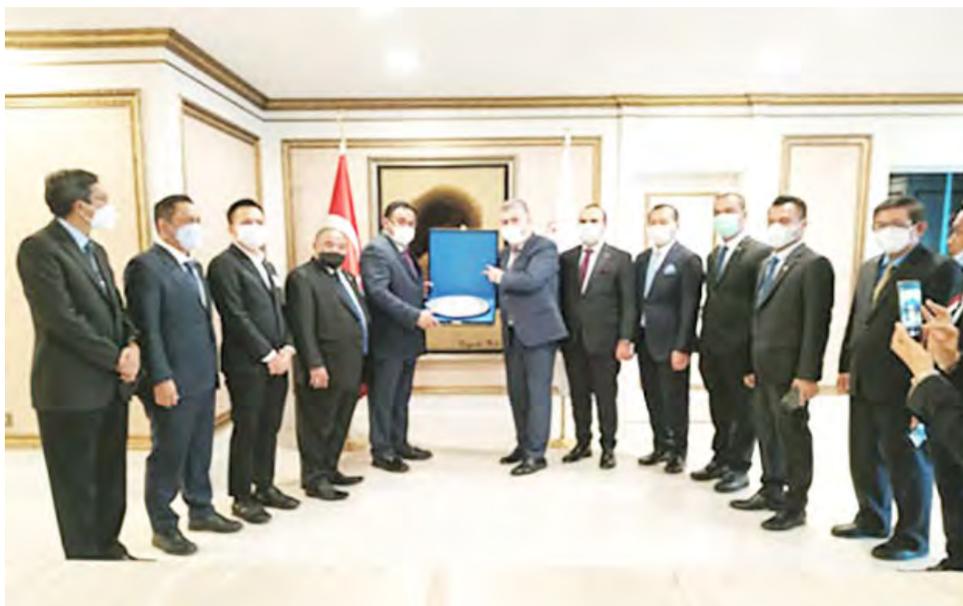
Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel dalam pertemuan dengan Kementerian Industri dan Teknologi Turki.



Deputy Industry Mehmet Fatih Kacir dan Deputy Technology Cetin Ali Donmez Kementerian Industri dan Teknologi Turki serta Presiden TUBITAK Prof. Amet Arif Ergin dalam pertemuan dengan Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan oleh-oleh kopi produk dalam negeri kepada Jajaran Kementerian Industri dan Teknologi Turki.



Saling tukar cinderamata antara Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Wakil Menteri Bidang Industri Memet Kacir.



Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang bersama Kementerian Industri dan Teknologi Turki, di depan kantor Kementerian Industri dan Teknologi, Ankara, Turki.



Pertemuan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Head of Marketing and Sales Department, Omar Catal dan Export Area Sales Manager, Burak Gulguler PT. Pupuk Eti Maden Turki didampingi oleh Conselor Minister KBRI Hikmat Moeljawan dan Dirut. PT. Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo.



Head of Marketing and Sales Department, Omar Catal dan Export Area Sales Manager, Burak Gulguler PT. Pupuk Eti Maden dan Jajaran waktu menerima Delegasi Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel.



Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersama Wakil Menteri Perdagangan Turki Gonca Yillmaz Batur dan jajaran.

Kunjungan muhibah delegasi DPR RI ke Turki berlangsung dari 14-19 Desember 2020. Dipimpin Rachmat Gobel, anggota delegasi terdiri dari perwakilan sejumlah komisi yang berasal dari fraksi Partai NasDem, PKS dan PDIP. Delegasi juga mengikutsertakan perwakilan pemerintah dan BUMN yaitu Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) dan PT Petrokimia Gresik.

Tujuan kunjungan ini antara lain untuk menggali dan menjajaki peluang serta mendengar langsung sisi pandang Turki terhadap prospek pengembangan kerjasama ke depan. Delegasi DPR RI melakukan pertemuan Kementerian Perdagangan Turki, Kementerian Industri dan Teknologi, *Turkish Scientific And Technological Research Council (TUBITAK)*, *Turkish Space Agency (TUA)* dan produsen pupuk terbesar Eti Maden.

Di Kementerian Perdagangan, delegasi disambut oleh Deputy Menteri Perdagangan Turki Gonca Yillmaz Batur. Pertemuan berlangsung hangat dan produktif. Banyak hal terungkap, tidak hanya mengenai potensi perdagangan tapi juga hal-hal yang perlu dilakukan agar kerjasama ekonomi bisa lebih dikembangkan. Gonca antara lain meminta Indonesia meningkatkan impor karena sejak 2015 perdagangan Turki selalu mengalami defisit, sementara Indonesia selalu surplus dan mencapai US\$ 700 juta pada pada 2020.



Tukar cenderamata antara Delegasi DPR RI dan Kementerian Perdagangan Turki.

Tentang pertemuan dengan Gonca, Rachmat Gobel mengatakan, hasrat Turki meningkatkan kerjasama ekonomi sangat terasa. Banyak keunggulan negara ini yang bisa disinergikan dengan potensi Indonesia. Kerjasama kedua negara sangat prospektif dan saling membutuhkan. Banyak peluang yang belum digarap secara optimal karena sejumlah kendala dalam mengembangkan kerjasama.

“DPR akan mendorong agar hal yang bisa meningkatkan kerjasama Indonesia-Turki mendapat perhatian pemerintah. Masing-masing mempunyai banyak potensi dan peluang untuk disinergikan dalam berbagai bentuk kerjasama,” kata Rachmat Gobel.

Di antara isu yang mencuat dalam pertemuan dengan Kementerian Perdagangan Turki adalah perlu langkah untuk mempercepat perundingan dan penandatanganan kerjasama *Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IT-CEPA) yang telah berlangsung sejak 2017. Perjanjian ini diharapkan bisa segera dituntaskan dan ditandatangani agar nilai perdagangan kedua negara bisa ditingkatkan mencapai US\$ 10 miliar.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama, Rachmat Gobel dan Gonca sependapat bahwa perlu dibentuk semacam *high economic commission* sebagai mekanisme yang mencakup semua kerja sama ekonomi dari hulu

sampai ke hilir. Keberadaan lembaga *High Level Statagic Council* (HSCL) ini sangat penting dan strategis untuk mempercepat realisasi kerjasama yang potensinya telah teridentifikasi seperti di industri pertahanan, perkapalan, teknologi, *e-commerce*.

Rachmat Gobel dalam pertemuan tersebut juga memaparkan sejumlah kemajuan yang dicapai Indonesia termasuk perbaikan iklim investasi dengan adanya UU (*Ominus Law*) Cipta Kerja. Turki diminta untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

Menurut Gonca, cukup banyak perusahaan Turki yang tertarik menggarap peluang bisnis di Indonesia. Ia menawarkan agar kontraktor Turki dapat terlibat dalam proyek infrastruktur, termasuk dalam pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan. Kontraktor Turki telah berpengalaman mengerjakan proyek ibukota baru seperti Astana di Kazakhstan. Masalahnya, Indonesia-Turki belum mempunyai *agreement* di bidang konstruksi.

Setelah dengan Kementerian Perdagangan, didampingi Dubes RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal, delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Turki. Rombongan disambut Deputi Menteri bidang Industri Mehmet Fatih Kacir dan Deputi Menteri bidang Teknologi Cetin Ali Donmez.

Kedua Deputi memaparkan pencapaian Turki di bidang industri dan teknologi serta strategi yang diterapkan untuk membawa negara ini ke posisi seperti sekarang. Dari paparan tersebut, menurut Rachmat Gobel, satu kunci keberhasilan Turki mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam dua dekade terakhir ini adalah karena mampu menerapkan pendekatan *triplehelix* yaitu membangun kerjasama yang kuat antara perguruan tinggi (akademik), pelaku industri dan pemerintah. Langkah ini berhasil mendorong pengembangan teknologi melalui penelitian dan pemberdayaan yang tengah berkembang di Turki.

“Turki sukses mencapai kemandirian dalam sektor industri dan pertanian. Hampir sepenuhnya mereka mampu memenuhi kebutuhan industri dari hasil produksi sendiri dan menjadikannya sebagai prioduk unggulan. Bahkan selama pandemi Covid-19, negara ini telah berhasil meningkatkan ketahanan pangannya. Pengalaman Turki ini perlu kita cermati,” kata Rachmat Gobel.

Untuk meningkatkan kerjasama, Deputi Menteri bidang Teknologi Cetin Ali menyampaikan, perlu memperkuat forum konsultasi dengan meningkatkan Forum Konsultasi Bersama (FKB) yang sudah dibentuk kedua negara sejak 2011 ke ke tahap *High Level Strategic Council*. Perlu jalinan

kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi antara Kementerian Perindustrian Indonesia dan Turki.

Pada kesempatan itu, Presiden TUBITAK Prof. Amet Arif Ergin menawarkan kerjasama riset dan teknologi, mengusulkan pertukaran tenaga ahli, dimana tenaga ahli menetap sementara agar terjadi brainstorming, kerjasama penelitian dan pengembangan.

Rachmat Gobel menyambut gembira pandangan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Turki tersebut. Mengenai tawaran TUBITAK, menurut Rachmat Gobel, akan disampaikan kepada Kementerian Riset, BPPT dan LIPI agar dapat ditindaklanjuti.

Kepada delegasi DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, penting bagi Indonesia untuk melakukan sinergi dengan Turki dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing. “Kita perlu mengarahkan kerjasama untuk mengembangkan penelitian bersama. Kita punya banyak bahan baku, bagaimana potensi ini bisa diolah dan dibuat dalam satu kerjasama penelitian untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, seperti pada komoditas pertanian dan perkebunan Indonesia,” katanya.

Gagasan dan ide Rachmat Gobel mendapat dukungan Anggota DPR RI. Apalagi untuk sektor perdagangan, Turki bisa menjadi salah satu pintu masuk utama produk ekspor ke pasar Eropa karena negara ini tergabung dalam Uni Eropa. Sebaliknya, Turki bisa menjadikan pasar Indonesia sebagai pintu masuk mereka ke pasar ASEAN.

Rachmat Gobel mengatakan, berbagai pembicaraan dengan dua kementerian itu akan disampaikan ke kementerian atau instansi terkait, termasuk kepada Kementerian Luar Negeri agar bisa ditindaklanjuti. Bagi Indonesia, posisi Turki sangat strategis dalam rangka memperluas ekspor ke non-tradisional market, apalagi negara ini telah berhasil mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Rachmat Gobel menekan, ditengah situasi yang sulit dan ancaman *middle income trap*, Indonesia harus bisa masuk ke level *high economy* dengan produk bernilai tambah tinggi. Kemitraan dengan Turki bisa menjadi alternatif dan sekaligus memperluas pasar produk Indonesia.

“Turki adalah salah satu kekuatan ekonomi global dan sangat penting. Dengan GDP saat ini US\$ 780 miliar dan diproyeksi akan menjadi ekonomi terbesar ke 12 dengan GDP sebesar US\$ 2,9 triliun dalam beberapa tahun ke depan, posisi negara ini akan menjadi kian strategis bagi Indonesia,” kata Rachmat Gobel.

Sementara itu, kunjungan ke perusahaan pupuk Eti Maden adalah untuk menjajaki peluang kerjasama pengembangan pupuk mikro oleh industri



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Anggota DPR RI Charles Meikyansyah dan Hasby Anshory serta Kasan dalam pertemuan dengan Kementerian Perdagangan Turki.

pupuk nasional seperti PT Petro Kimia Gresik. Eti Maden adalah salah satu tulang punggung keberhasilan pertanian Turki. Pertemuan ini merupakan penjabaran awal kerja sama di bidang pertanian dan produksi pupuk.

Menurut Rachmat Gobel, Indonesia dan Turki dapat bersinergi dalam memproduksi pupuk yang berkualitas karena bisa saling melengkapi baik dari bahan baku, teknologi hingga pemasaran. Bagi Indonesia, lanjutnya, kerjasama dengan Eti Maden ini sangat strategis karena salah satu tantangan terbesar dalam bidang pertanian sampai saat ini adalah ketersediaan pupuk yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau untuk petani.

“Petani kita sangat membutuhkan pupuk berkualitas untuk meningkatkan produktivitas panen mereka. Kerjasama dengan Eti Maden akan bisa membantu pengembangan industri pupuk dalam rangka meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, sekaligus meningkatkan kemampuan kita di bidang ketahanan pangan,” kata Rachmat Gobel.

Beberapa pokok pembicaraan dengan Eti Maden adalah perusahaan ini siap bekerjasama dengan Indonesia. Mereka siap mendukung kebutuhan bahan baku pupuk seperti boron. Eti Maden juga bersedia bekerja sama di bidang penelitian. Sementara itu Presiden Direktur PT Petrokimia Gresik

menyampaikan harapannya dapat bekerja sama dengan Eti Maden untuk penyediaan pupuk mikro.

### **Kunjungan ke Uzbekistan**

Kunjungan delegasi DPR RI ke Uzbekistan berlangsung 15 Mei 2021-20 Mei 2021. Sebagai pimpinan delegasi, Rachmat Gobel didampingi anggota Komisi dan anggota Badan Legislatif (Baleg) dari sejumlah fraksi yaitu Fraksi Partai Gerindra, PAN, PPP dan NasDem. Kunjungan juga mengikutsertakan wakil dari Kemenperind, Dirjen Kimia Industri Farmasi dan Tekstil, wakil dari Kemendag, Staf Ahli Mentdag Arlinda, serta Direktur Utama PT Pupuk Kaltim.

Hubungan diplomatik Indonesia-Uzbekistan resmi dimulai 23 Juni 1992. Indonesia telah membuka kedutaan besar di Tashkent pada 1994 dan Uzbekistan membuka Kedutaan Besarnya di Jakarta pada 1996. Kerjasama ekonomi kedua negara sudah lama terjalin, namun belum berjalan maksimal.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilai perdagangan Indonesia-Uzbekistan masih sangat rendah. Angka tertinggi baru US\$ 63 juta yaitu pada 2018. Prospek perekonomian negara ini cukup besar, setelah Uzbekistan mereformasi sisten perekonomian secara besar-besaran pada 2017.

Selama di Uzbekistan, delegasi DPR RI melakukan kunjungan kehormatan ke Senat Oliy Majlis dan Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan. Kemudian bertemu dengan Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri, Menteri Pariwisata dan Olah Raga dan Ketua Dewan Pimpinan perusahaan pupuk Uzkimyosanoat, Direktur perusahaan perdagangan kimia Uzkimyoimpex serta kunjungan ke Pusat Perpustakaan, Museum dan UKM di Samarkand dan Tashkent.

Dalam kunjungan ke Senat Oliy Majlis, delegasi DPR RI disambut langsung oleh Ketua Senat Tanzila Kamalovna Narbayeva yang didampingi sejumlah anggota Senat Uzbekistan. Begitu juga dalam kunjungan ke Dewan Oliy Majlis, delegasi juga disambut langsung Ketua Dewan Ismailov Nurdinjon. Baik Tanzila, maupun Ismailov menyampaikan harapannya agar hubungan kedua negara akan semakin erat dengan kunjungan delegasi DPR RI yang dipimpin Rachmat Gobel ini.

Keduanya menyampaikan, Indonesia dipandang sebagai negara besar dan cukup maju. Kunjungan Delegasi DPR RI ini sangat berguna, Uzbekistan ingin belajar dari Indonesia yang memiliki lebih banyak pengalaman. Uzbekistan menyadari posisi strategis Indonesia yang merupakan jaringan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dengan dengan Menteri Pariwisata dan Olah Raga Uzbekistan Aziz Abdulkhakimov.

Selain mengucapkan terima kasih, sebagai pimpinan delegasi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menyampaikan, Indonesia mengakui kepentingan strategis Uzbekistan sebagai pintu gerbang Asia Tengah dan Eropa Timur. Kesamaan budaya yaitu penduduknya sama-sama mayoritas Islam, akan menjadi landasan kuat dalam membangun hubungan *people to people*.

Uzbekistan tertarik untuk melakukan kerja sama di bidang pertanian dan perikanan, sementara Indonesia melihat peluang pasar yang cukup besar untuk komoditas kopi, teh, karet, kertas, furnitur, rempah-rempah.

Dalam sejumlah pertemuan dengan pejabat kementerian terlihat, Uzbekistan mempunyai keinginan kuat untuk menggalang kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Deputi PM/Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Uzbekistan Umurzakov Sardor Uktamovich, ia menginginkan agar segera ada aksi konkret yang dilakukan.

Umurzakov berharap, Indonesia dan Uzbekistan segera membentuk *working group*, terdiri dari pejabat Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan sejumlah lembaga terkait. Kelompok Kerja untuk menyusun sektor dan bidang usaha yang bisa dikerjasamakan.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Ketua Senat Oliy Majlis Uzbekistan]Tanzila Kamalovna Narbayeva.

Ia juga mengatakan, sebagai negara *double landlocked*--tidak ada laut dan diapit oleh negara yang tidak memiliki laut—negaranya sedang merencanakan pembangunan jalur transportasi, kombinasi rel kereta api dan jalan raya dari Uzbekistan ke Rusia, ke Afganistan hingga Pakistan. Pembangunan jalur transportasi ini termasuk yang bisa dikerjasamakan dengan Indonesia untuk mempercepat pembangunan di Uzbekistan.

Kepada Umurzakov Rachmat Gobel meminta agar neraca perdagangan Indonesian-Uzbekistan diseimbangkan. Sekitar 66% impor Indonesia dari negara ini ialah bahan baku pupuk. Hingga tahun 2020, Indonesia masih defisit dalam perdagangan dengan Uzbekistan. Pada 2020, impor Indonesia dari Uzbekistan sebesar US\$ 18,16 juta, di mana US\$ 12,27 juta adalah KCL, bahan baku untuk *fertilizers* atau bahan baku untuk pupuk. Di dunia, hanya beberapa negara yang memiliki bahan baku khusus untuk pupuk ini. Selain Uzbekistan, ada Rusia dan Kanada.

Mengenai usulan pembentukan *working group*, Rachmat Gobel mengatakan, ini merupakan sebuah usulan konkret dari kunjungan selama di Uzbekistan. “Tanpa ada langkah konkret, potensi besar kedua negara



Pertemuan Delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Pimpinan Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan.



Kunjungan Kehormatan Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mendapat standing applause dari Anggota Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan.

yang baru sedikit dieksploitasi, akan tetap menjadi potensi. Setiba di Jakarta, saya akan berbicara dengan Menteri Perdagangan,” katanya.

Sementara itu, saat mengunjungi perusahaan pupuk terbesar Uzbekistan Uzkiyosanoat dan perusahaan perdagangan kimia Uzkiyoiimpex, Rachmat Gobel mendapat penjelasan sejumlah peluang kerjasama yang bisa digarap kedua negara. Keduanya mempunyai status sebagai perusahaan negara.

Pertemuan ini membahas soal bahan baku pupuk. Rachmat Gobel melihat, peluang Uzbekistan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pupuk di tanah air, khususnya terkait bahan utama yang selama ini dibutuhkan Indonesia seperti KCl. Indonesia bukan merupakan negara produsen KCl, selama ini kebutuhan dipasok dari Rusia, Kanada, dan Laos. Indonesia dapat mencari peluang dari Uzbekistan sebagai alternatif untuk pemasok keperluan KCl di Indonesia.

Selain soal pupuk, juga dibicarakan produksi kapas dan bahan sintetis. Uzbekistan memproduksi kapas 1 juta ton per tahun, namun negara ini juga membutuhkan bahan sintetis sebagai campuran seperti *viscose*, *polyester*, rayon. Uzbekistan bisa mempelajari produksi dan pengolahan bahan tekstil di Indonesia seperti viscose dan polyester ini.



Ketua Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan Ismailov Nurdinjon memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel sebagai Ketua Delegasi DPR RI ke Uzbekistan pada pertemuan kunjungan kehormatan Delegasi DPR RI ke Uzbekistan, disaksikan oleh Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dan Ketua Baleg DPR RI Spratman Andi Agtas.

Sebagai pimpinan Uzkimyosanoat, Mirzamakhmudov menyatakan minatnya akan produksi karet mentah Indonesia serta pengolahannya. Ia menyadari, produksi karet Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Uzbekistan, khususnya terkait dengan produksi ban kendaraan.

Selain potensi kerja sama di industri pupuk, Rachmat Gobel mengatakan, ada peluang di sektor industri agro. Uzbekistan membutuhkan buah-buah tropis, seperti pisang, buah naga, alpukat, dan kopi untuk konsumsi warganya maupun untuk mendukung industrinya. Karena itu, ia menyampailan, akan mendorong agar ada *sister city* antara kota di Uzbekistan dengan daerah di Indonesia penghasil buah-buah tropis, seperti contoh Kabupaten Lumajang yang merupakan daerah penghasil pisang di Jawa Timur atau daerah penghasil buah lainnya seperti buah naga dan kopi.

Delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Olah Raga Aziz Abdukhakimov. Dalam pertemuan ini, Abdukhakimov menyambut delegasi secara antusias dan berharap delegasi yang dipimpin Rachmat Gobel ini akan lebih meningkatkan hubungan bilateral yang sudah terjalin lama. Tercatat, Presiden Pertama RI Soekarno pernah melakukan kunjungan historis ke Uzbekistan pada 1956 dan ini meninggalkan kesan yang mendalam pada rakyat Uzbekistan. Soekarno ikut berjuang meyakinkan



Jabat tangan selamat datang Deputy PM Uzbekistan merangkap Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Umurzakov Sardor Uktamovich kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam rangka kunjungan Muhibah Delegasi DPR RI ke Uzbekistan.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berbincang akrab dengan Wakil Perdana Menteri/Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Uzbekistan Mr. Umurzakov Sardor Uktamovich setelah menggelar pertemuan resmi.



Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Menteri Investasi dan Perdagangan Uzbekistan Mr. Umurzakov Sardor Uktamovich didampingi Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Dubes LBBP RI untuk Uzbekistan Sunaryo Kartadinata, Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI Mohammad Khayam, staf Ahli Menteri Perdagangan RI Arlinda, Dirut PT. Pupuk Kaltim Rahmat Pribadi, Dirut Metro TV Don Bosco Salamun, Pimred Berita Satu TV Primus Dorimulu, Pimred Kumparan.Com Arifin Asyhad dan Staf Khusus Korinbang DPR RI Nasihin Masha.



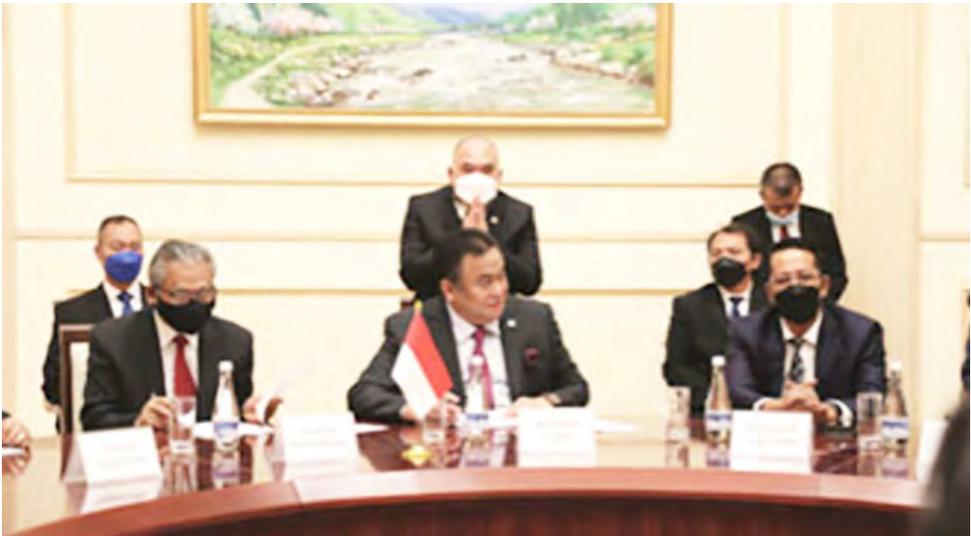
Pertemuan Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Menteri Pariwisata dan Olah Raga Uzbekistan Aziz Abdulkhakimov, didampingi oleh Anggota DPR RI dan Dirut Metro TV Don Bosco Selamun, Pimred Berita Satu TV, Primus Dorimulu dan Pimred kumparan. Com Arifin Asyhad.



Menteri Pariwisata dan Olah Raga Uzbekistan Aziz Abdulkhakimov mengajak Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel untuk melihat kompleks Kementerian Pariwisata dan Olah Raga Uzbekistan.



Kedatangan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel disambut hangat oleh Ketua Senat Oliy Majlis Uzbekistan Tanzila Kamalovna Narbayeva di Gedung Parlemen Uzbekistan.



Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel pada saat pertemuan dengan Senat Oliy Majlis Uzbekistan, di Gedung Parlemen.



Pertemuan Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dengan Ketua Senat Oliy Majlis Uzbekistan didampingi oleh Duta Besar LBBP RI untuk Uzbekistan di Gedung parlemen Uzbekistan.



Ketua Senat Oliy Majlis Uzbekistan, menerima cinderamata dari Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel (replika Gedung DPR RI).



Ketua Senat Oliy Majlis Uzbekistan, memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel (kerajinan khas Uzbekistan).



Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Ketua dan Anggota Senat Oliy Majlis Uzbekistan, di Gedung Parlemen Uzbekistan.



Pertemuan Delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Pimpinan Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan.



Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Ketua dan Anggota Legislative Oliy Majlis Uzbekistan di Gedung Parlemen Uzbekistan.



Ketua Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan Ismailov Nurdinjon memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel sebagai Ketua Delegasi DPR RI ke Uzbekistan pada kunjungan kehormatan Delegasi DPR RI ke Uzbekistan, disaksikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan produk kopi dalam negeri kepada Ketua Dewan Legislative Uzbekistan.



Anggota DPR RI Willy Aditya memberikan produk makanan pisang dalam negeri kepada Ketua Dewan Legislative Uzbekistan, disaksikan oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.



Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan RI, Dirut PT. Pupuk Kaltim, Pimpinan Redaksi Media dan Staf Khusus Korinbang DPR RI di depan Gedung Parlemen Uzbekistan.



Pertemuan Delegasi DPR RI dengan Ketua Dewan Pimpinan Uzkimyosanoat dan Direktur Uzkimyoimpex Uzbekistan Uzkimyosanoat adalah perusahaan pupuk terbesar Uzbekistan, sedangkan Uzkimyoimpex perusahaan kimia terbesar. Pertemuan membahas potensi kerja sama Indonesia dan Uzbekistan ke depan di bidang pupuk.



Dalam pertemuan dengan perusahaan Uzkiyosanoat Ketua Delegasi DPR RI Rachmat Gobel menjelaskan perlunya meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan khususnya di bidang pupuk.



Pertemuan Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Wakil Perdana Menteri/Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Uzbekistan Mr. Umurzakov Sardor Uktamovich dan Jajaran.



Kunjungan Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel ke Wilayah Samarkand disambut dan diterima baik oleh Gubernur Samarkand didampingi oleh Imam Masjid Imam Bukhari.



Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang diajak meninjau Lokasi Perluasan Masjid dan Makam Imam Bukhari di Samarkand.



Delegasi DPR RI dan pejabat kota Samarkand berdoa bersama di Makam Imam Bukhari (Marawis Hadis).



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan Ketua Komisi VII DPR RI mengunjungi Museum dan Perpustakaan Imam Bukhari di Samarkand.

pemerintah Uni Soviet saat itu untuk menemukan makam Imam Al-Bukhori, seorang perawi ahli hadis terkenal.

Sepanjang pertemuan, kedua belah pihak membahas beberapa hal seperti upaya memperkuat kerjasama dan kolaborasi di bidang ekonomi, budaya, wisata, peninggalan bersejarah dan pendidikan. Uzbekistan memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi dan mitra kerja sama yang strategis, sehingga mengharapkan kerjasama yang ada perlu ditingkatkan demi kemanfaatan bersama.

Dalam kesempatan itu, Abdulkhakimov mengungkap daya tarik pariwisata negaranya, khususnya wisata religi. Ia menawarkan kerjasama di bidang transportasi yaitu penerbangan langsung dari Indonesia ke Uzbekistan dan fasilitas diskon khusus bagi wisatawan asal Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam diharapkan dapat melakukan perjalanan religi ke Uzbekistan. Banyaknya peninggalan tokoh Islam pada masa lalu yang layak dikunjungi seperti makam Imam Al-Bukhari yang terletak 25 km dari Samarkhand.

Makam imam terkenal ini mendapat status sebagai warisan dunia dari UNESCO. Juga tidak kalah menarik adalah situs peninggalan agama Buddha dan Kristen yang dibawa oleh St Thomas dan St Andreas. Berbagai arsitektur masa lalu yang terkait dengan bangunan kuil dan gereja banyak terdapat di Uzbekistan.

“Saya berharap pak Rachmat Gobel bisa menjembatani hubungan yang lebih kuat antara Indonesia dan Uzbekistan. Saya disini selalu mengucapkan kata Rachmat Gobel tiap hari dan berkali-kali. Di Uzbekistan kata Rachmat Gobel itu berarti terima kasih kepada Tuhan,” kata Abdulkhakimov.

Mengakhiri kunjungan ke Uzbekistan, delegasi DPR RI sempat mengunjungi kota Bukhara di Samarkand yang dulunya dikenal sebagai jalur sutra, perlintasan Asia bagian selatan, barat, dan timur menuju Eropa. Samarkand dikenal sebagai destinasi wisata religi karena banyak tokoh Islam yang berasal dan dimakamkan di kota ini. Selain Imam Al-Bukhori, ada makam Abu Mansur Maturidi, Baha-us-Din Naqsband, dan Abdul Khalid Ghajadwani. Di samping objek wisata rohani Islam, ada kuil dan gereja tua warisan masa lalu yang juga ditetapkan UNESCO sebagai international heritage.

Rachmat Gobel bersama delegasi disambut oleh Wakil Gubernur dan Mufti Besar Samarkand. Kemudian melakukan pertemuan dengan Imam Masjid Imam Bukhari. Sebagai rasa hormat kepada Rachmat Gobel bersama rombongan, tuan rumah memotong seekor sapi besar di kawasan makam Imam Bukhari yang dagingnya akan diberikan kepada masyarakat sekitar.



Delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan Deputi Menteri Perindustrian Belarusia Dmitry Haritonchik dan manajemen OJSC Minsk Tractor Works, yang didampingi oleh Duta Besar RI Moscow merangkap Belarus, Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI serta PT Pupuk Kaltim.

### **Kunjungan Muhibah Ke Belarusia**

Delegasi DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel tiba di Bandara Internasional Minsk, Belarus, pada Kamis 21 Oktober 2021 dan disambut langsung Wakil Ketua Parlemen Belarus, Valery Mitskevich di ruang VVIP bandara. Ikut serta dalam delegasi DPR RI ini sejumlah anggota dan pimpinan Komisi serta Staf Ahli Menteri Perdagangan Arlinda, Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Muhammad Khayam, Dubes RI untuk Rusia dan Belarus Jose AM Taveres.

Selain dengan Parlemen, delegasi DPR RI bertemu dengan sejumlah pejabat kementerian dan perusahaan Belarusia. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendorong kerja sama yang lebih erat dan membuka pasar lebih besar bagi Indonesia.

Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Duta Besar RI Moscow melakukan kunjungan kehormatan ke Parlemen Republik Belarusia, pada 21 Oktober 2021. Kedatangan delegasi diterima dan disambut baik oleh Ketua Parlemen Republik Belarusia Vladimir Andreichenko beserta Anggota Parlemen. Sambutan hangat anggota parlemen dan candaaan Rachmat Gobel membuat suasana lebih rileks.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Ketua Parlemen Republik Belarusia Vladimir Andreichenko beserta Anggota Parlemen.

Kedua pemimpin parlemen mengakui, realisasi neraca perdagangan kedua negara masih jauh dari potensi sehingga perlu ditingkatkan. Menurut Kementerian Perdagangan RI, total perdagangan RI-Belarusia hanya US\$ 165,2 juta pada 2020, di mana US\$ 151,1 juta merupakan impor Indonesia sehingga mengalami defisit yang cukup besar. Pada Januari-Agustus 2021 perdagangan kedua negara tercatat US\$ 153,4 juta, dan Indonesia masih mengalami defisit.

Rachmat Gobel meminta dukungan parlemen Belarusia agar mendorong percepatan FTA Indonesia-Eurasia (FTA Indonesia-Eurasian Economic Union/EAEU) yang saat ini masih tahap *joint feasibility study*. Ia juga minta dukungan agar minyak sawit Indonesia bisa masuk lebih besar ke kawasan Eurasia. Inilah salah satu tujuan utama Delegasi DPR RI ke Belarusia, mendorong pemerintah dan pelaku dunia usaha meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan melengkapi.

Dalam pertemuan, Ketua Parlemen Belarusia Vladimir Andreichenko menyampaikan keinginan negaranya agar Indonesia membuka perwakilan tetap atau Kedutaan Besar di Republik Belarusia agar bisa lebih memudahkan



Delegasi DPR RI di depan Perusahaan DumpTruck Belaz.

meningkatkan hubungan kerja sama. Isu ini juga kembali disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Belarusia, Mikalay Borisevich.

Secara khusus, Vladimir Andreichenko juga meminta dukungan DPR RI agar perusahaan tambang Indonesia memakai *dump truck* dari Belarusia, mengingat negara ini merupakan salah satu produsen *dump truck* terkemuka di dunia.

Sebagai Ketua Delegasi DPR, Rachmat Gobel menyampaikan harapan agar kedua negara membangun hubungan dagang yang lebih seimbang, salah satunya adalah melalui joint investment seperti pendirian pabrik *dump-truck* dan pembuatan traktor yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, serta memanfaatkan karet Indonesia. Peningkatan ekspor lainnya dari Indonesia adalah hasil perikanan, tekstil, minyak kelapa sawit.

Sebagai tanda hormat, pada 22 Oktober 2021 Parlemen Belarusia menyelenggarakan jamuan makan malam untuk delegasi DPR RI. Jamuan berlangsung hangat yang ditandai aksi spontan Rachmat Gobel bertukar dasi dengan Wakil Ketua Parlemen Belarus Valery Mitskevich sebagai simbol keakraban dan persahabatan.

“Kita dasinya sama-sama berwarna biru. Ini menunjukkan kita satu hati. Bolehkah jika kita bertukar dasi,” kata Rachmat Gobel dan langsung sambut oleh Valery. Momen ini pun disambut tepuk tangan meriah dari hadirin. Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa “Dasi ini nanti saya simpan khusus sebagai kenang-kenangan dan tanda persahabatan”. Ini adalah bagian dari khas diplomasi Rachmat Gobel yang selalu mengedepankan pendekatan *heart to heart*, bukan *pocket to pocket*. Valery mengaku terkejut dengan aksi tukar dasi ini. “Ini pertama terjadi,” untkapnya dengan rasa senang.

Saat bertemu dengan Deputi Menteri Perindustrian Belarusia Dmitry Haritonchik, Delegasi DPR RI mendapat penjelasan mengenai keunggulan industri negaranya yang berhasil memelihara dan menyempurnakan warisan teknologi Uni Soviet. Ekonomi negara ini berorientasi pada ekspor, di mana 60% dari produksi diekspor, sisanya untuk kebutuhan dalam negeri. Dalam pertemuan ini, Dmitry didampingi oleh manajemen OJSC Minsk Tractor Works.

Manajemen Minsk Tractor menyampaikan, perusahaan ini tengah melakukan sertifikasi produknya agar bisa masuk ke pasar Indonesia. Minsk Tractor sendiri telah memiliki pengalaman ekspor ke 110 negara di dunia.

Menanggapi hal ini, Rachmat Gobel mengajak Minsk Tractor berinvestasi di Indonesia, dimana traktor produksi Belarusia dapat digunakan di Indonesia dan juga dapat dipasarkan di kawasan ASEAN. Bersama anggota delegasi lainnya, Rachmat Gobel melihat langsung pembuatan traktor Minsk *Tractor Works* yang mampu memproduksi 27 jenis traktor, dari kekuatan 9 pk hingga 359 PK.

Melihat industri tersebut dan keinginan Belarus memasok alat beratnya ke Indonesia, Rachmat Gobel melihat peluang untuk mengekspor karet alam dan turunannya ke negara ini. Indonesia memiliki kualitas karet yang bagus yang bisa digunakan sebagai bahan baku ban kendaraan alat berat. Menanggapi hal itu Dmitri mengakui, kualitas karet Indonesia bagus. Saat ini Belarusia mengimpor karet dari Vietnam dan Afrika Barat, namun tidak tertutup kemungkinan industri mengimpor karet dari Indonesia.

Rachmat Gobel mengatakan, tertarik dengan industri traktor dan alat berat yang dikembangkan negara ini baik untuk pertanian, perkebunan, infrastruktur, hingga tambang. Ia minta Belarusia mendirikan pabrik traktor di Indonesia agar petani Indonesia lebih percaya dan merasa nyaman menggunakan traktor tersebut karena ada kepastian suku cadang.

Delegasi DPR RI juga mengunjungi produsen *dump truck*, Belaz, yang merupakan salah satu pemain terkemuka di dunia. Saat ini sudah ada 80 unit *dump truck* Belaz yang sudah dipakai di Indonesia untuk pertambangan.



Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel disambut di kantor Kementerian Pertanian Belarusia.

Selain dengan Kementerian Pertanian, delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Belarus Ivan Krupko serta Deputi Menteri Pertanian Igor Brylo. Delegasi mendapat penjelasan, pertanian merupakan sektor utama Belarusia dengan kontribusi terhadap GDP sebesar 7%. Hasil pertanian melebihi kebutuhan domestiknya.

Pada pertemuan ini turut hadir perwakilan Farmasi terbesar di Belarus “Belphamprom” dan menyatakan minat untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia. Delegasi DPR RI melakukan kunjungan ke Tambang Belarussian Potash dan melakukan pertemuan dengan perusahaan pupuk Belaruskali. Belaruskali memastikan keberlangsungan suplai pupuk potasium ke



Ketua Parlemen Belarusia Vladimir Andreichenko memberi buku tentang Belarusia kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel disaksikan oleh Anggota DPR RI.



Ketua Parlemen Belarusia Vladimir Andreichenko memberi cenderamata patung bison, binatang khas dan ikon Belarusia kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.



Jabat tangan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dengan Ketua Parlemen Belarusia, sebagai tanda persahabatan.



Wakil Menteri Luar Negeri Belarusia Mikalay Borisevich dan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel pertemuan di Kantor Kementerian Luar Negeri di Minsk, Belarusia.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel melihat produk traktor buatan Minsk Tractor Belarusia.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suprawoto dan anggota DPR RI Heri Gunawan bersama dengan Manajemen OJSC Minsk Tractor, Belarusia.



Pertemuan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Menteri Pertanian Ivan Krupto didampingi oleh Deputi Menteri Pertanian Belarusia Igor Brylo.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menunjukkan produk kopi Indonesia kepada Menteri Pertanian Belarusia Ivan Krupto disaksikan Ketua Komisi VII DPR RI.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mencoba produk dump-truck "OJSC BELAZ" yang merupakan truk tambang atau dump-truck untuk fasilitas tambang potasium milik "OJSC Belaruskali" didampingi Kepala Operasional Teknisi.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Ketua Komisi VII DPR RI dan Dirut PT. Pupuk Kaltim untuk persiapan meninjau tambang potash 500 M di bawah tanah.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berada di tambang potash Belaruskali 500 m bawah tanah.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel melihat dari dekat proses penambangan potash yang menjadi salah satu bahan baku pupuk yang dikelola oleh perusahaan pupuk Belaruskali.

Indonesia, dimana pada 2020 Indonesia mengimpor 692 ribu ton komoditas ini dari Belarus.

### **Menghadiri World Halal Forum dan Teknofast**

Wujud peran diplomasi DPR RI tidak hanya sebatas untuk memperkuat hubungan antar negara, tetapi juga menjadi ruang penting bagi Anggota DPR RI dalam meningkatkan kapasitas dan perannya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan menghadiri berbagai forum internasional. Nilai pembelajaran ini salah satunya ialah perbandingan kebijakan antar negara. Analisis perbandingan kebijakan adalah salah satu cara DPR RI dalam melaksanakan proses pengawasan pembangunan di berbagai sektor termasuk di perdagangan, industri dan teknologi.

Dalam rangka kegiatan tersebut, sepanjang Masa Sidang 2020-2021, Rachmat Gobel antara lain menghadiri *World Halal Summit* dan Teknofest. *World Halal Summit* adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh *Organization of Islamic Cooperation (OIC)*, *The Islamic Centre for Development of Trade (ICDT)*, dan *Standard and Metrology for Islamic Countries (SMIC)*. Wakil Ketua DPR/Korinbang Rachmat Gobel menghadiri forum ini atas undangan Presiden *World Halal Summit Council*. Acara yang digelar di



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, melihat produk jamu dari Peserta Expo Halal 2021 yang dipamerkan di Paviliun Indonesia.

Istanbul pada 25-28 November 2021 ini merupakan *World Halal Summit* yang ke-7 yang secara bersamaan juga diselenggarakan OIC Halal Expo ke-8.

Dalam kunjungan ini Rachmat Gobel didampingi sejumlah anggota DPR RI, Kepala Badan Standardisasi Kebijakan Jasa Industri Kemenperind dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag.

Dalam pertemuan *World Halal Summit* terungkap, potensi pasar produk halal dunia kini sudah mencapai US\$ 7 triliun yang mencakup produk makanan, tekstil, pariwisata, kosmetika, obat-obatan, dan lain-lain. Angka ini naik tajam dibandingkan 2017 yang baru mencapai US\$ 4 triliun. Pada 2024, nilainya diperkirakan US\$ 11 triliun. Namun sayangnya, produsen produk halal dunia masih dikuasai negara dengan penduduk Islam minoritas seperti Brasil, Australia, Prancis, Jerman, dan Selandia Baru.

Untuk itu, melalui forum *World Halal Summit* ini, Rachmat Gobel menyarankan, negara berpenduduk mayoritas muslim duduk bersama untuk membangun kesamaan prosedur, ukuran, dan metode pengujian halal. “Harus diakui saat ini masih ada perbedaan di antara negara atau lembaga pemberi sertifikat halal tentang hal-hal tadi,” kata Rachmat Gobel.

Ia mengatakan, Indonesia juga harus lebih fokus untuk membidik pertumbuhan pasar produk halal dunia ini. Indonesia harus banyak belajar



Expo Halal 2021 “8th OIC Halal Expo and 7th World Halal Summit” dibuka oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay pada tanggal 25 November 2021 di Congress Center, Istanbul, Turki



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel didampingi oleh Duta Besar RI di Turki, Lalu Muhammad Iqbal dalam pembukaan Expo Halal di Istanbul, Turki.



Wakil Presiden Turki, Fuat Oktay setelah membuka Expo Halal 2021 mengunjungi Paviliun Indonesia dan disambut oleh Dubes RI untuk Turki lalu M. Iqbal.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikiansyah, meninjau produk halal dari Indonesia yang dipamerkan di Paviliun Indonesia pada expo halal 2021 Turki.



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, disambut oleh Tarian Tanah Leluhur Gorontalo pada kunjungan ke Paviliun Indonesia Expo Halal 2021 di Istanbul, Turki.

agar tidak hanya menjadi pasar produk halal dunia, tapi juga menjadi pemain atau produsen utama.

Dalam kesempatan itu, Rachmat Gobel dan rombongan juga mengunjungi OIC Halal Expo-8. Tidak kurang dari 34.865 pengunjung yang hadir dan datang dari 94 negara dengan 378 peserta, termasuk sejumlah UMKM dari Indonesia. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat langsung pengembangan industri produk halal, khususnya Turki. Negara ini mampu membangun industri halal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)-nya dengan kemampuan teknologi yang dimiliki negara itu.

“Turki merupakan negara muslim yang mampu membangun struktur industri yang kuat, terutama industri halalnya. Untuk mengembangkan industri halal, kalau perlu kita bekerja sama dengan Turki atau negara muslim lainnya yang hadir pada ajang ini,” katanya.

Sementara itu, TEKNOFEST adalah festival dirgantara dan teknologi yang diselenggarakan oleh Turki yang pertama kali diadakan pada 2018. Meski relatif baru, TEKNOFEST berhasil menarik berbagai negara dan industri teknologi tinggi. Pada 2019 pameran ini berhasil memecahkan rekor sebagai festival teknologi Eropa yang paling banyak dikunjungi dengan partisipasi lebih dari 120 negara dan dikunjungi 1,5 juta orang.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam kunjungan ke Istutusi Standarisasi Turki memberikan penjelasan terkait Standard Halal di Indonesia.

Pada TEKNOFEST 2021 yang diselenggarakan 21-26 September, tidak kurang dari 111 negara berpartisipasi. Ikut berpartisipasi, Indonesia mengikutsertakan dua BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Industri Kereta Api (INKA) serta sejumlah lembaga riset dan pengembangan teknologi terkemuka untuk memamerkan hasil karyanya antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT RAI, Artha Graha Group, PT Pastac dan Carbon Addons. Ikut serta sejumlah perguruan tinggi yaitu dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan Universitas Indonesia (UI).

Selain untuk memenuhi undangan panitia, kehadiran Wakil Ketua DPR RI/Korinbang bersama delegasi DPR RI sekaligus untuk melihat langsung berbagai perkembangan negara peserta. Ini akan menjadi bahan perbandingan dalam rangka mendorong industri *high technology* Indonesia. Juga untuk menjajaki berbagai peluang kerjasama strategis yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan sektor industri nasional.

Pada festival ini Indonesia menampilkan berbagai prototype produk teknologi seperti pesawat terbang CN 235 dan N 219 dan industri pertahanan. Ajang ini harus digunakan sebagai ajang Indonesia melakukan *rebranding* sebagai negara perodusen produk berteknologi tinggi.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) Dr. Ir. Elfiyen Goentoro, MBA dengan CEO Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAVELSAN) Dr.Mehmet Aktif Nacar mengenai kerjasama Aircraft Simulator untuk pesawat N219 didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukarto Suratto serta Duta Besar RI di Turki Lalu Muhammad Iqbal di Istanbul (21-9-2021).



CEO HAVELSAN, Dr.Mehmet Aktif Nacar memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel setelah penandatanganan MoU pada Festival Teknologi "TEKNOFEST" di Istanbul didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Duta Besar RI di Turki dan Dirut PT. DI. (21-9-2021)



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan Kopi produk Indonesia kepada Vice President, R&D Prototype Turkish Aerospace Industries (TAI) Fahrettin Ozturk.



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima cinderamata dari President & CEO Turkish Aerospace Industries (TAI) Mr. Temel Kotil didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan Anggota DPR RI



Delegasi DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menghadiri undangan Festival Teknologi “TEKNOFEST” di Istanbul, Turki yang dibuka pada tanggal 21 September 2021.

“Kehadiran Indonesia di ajang ini sangat penting dan strategis, PT DI dan PT INKA memiliki peluang yang besar untuk menjual produk/jasa ke Turki maupun ke negara ketiga melalui kemitraan dengan perusahaan Turki. Ini momentum untuk memasuki pasar Turki dan kawasan *Middle East and North Africa*,” kata Rachmat Gobel.

Rachmat Gobel mengatakan, melalui TEKNOFEST 2021 banyak hal yang bisa menjadi masukan. Melalui ajang ini juga bisa dilihat, bagaimana Turki membangun kemandirian dalam teknologi dan tampil sebagai negara yang disegani. Melalui *Turkey Aerospace Industries* (TAI), negara ini telah memiliki kekuatan dalam teknologi pesawat militer, memproduksi secara mandiri kepentingan pertahanan mereka seperti pesawat tempur, pesawat helikopter, pesawat tanpa awak (*drone*).

“DPR RI akan mendorong pemerintah agar lebih memberikan dukungan kepada BUMN bidang teknologi untuk dapat menghasilkan produk dan inovasi yang mampu bersaing di tingkat internasional,” kata Rachmat Gobel.

Selain melihat berbagai produk di ajang TEKNOFEST, Rachmat Gobel juga melakukan pertemuan dengan Menteri Industri dan Teknologi Turki Mustafa Varank untuk membicarakan kerja sama teknologi. Dalam pertemuan ini Rachmat Gobel mengatakan, Indonesia dan Turki memiliki pemahaman



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, melihat dan melakukan peninjauan ke paviliun-paviliun lokasi Festival Teknologi TEKNOFEST di Bandar Udara Atartuk Istanbul, Turki didampingi oleh Duta Besar RI di Turki Lalu Muhammad Iqbal dan Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia Elfin Goentoro (21 September 2021).



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) Dr. Ir. Elfin Goentoro, MBA dengan CEO Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAVELSAN) Dr.Mehmet Aktif Nacar mengenai kerjasama Aircraft Simulator untuk pesawat N219 didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukarto Suratno serta Duta Besar RI di Turki Lalu Muhammad Iqbal di Istanbul (21-9-2021).

yang sama untuk menjalin hubungan kerja sama teknologi kedirgantaraan dan ruang angkasa. Pertemuan berlangsung sangat produktif, dan banyak kesepahaman yang ditandatangani antara kedua negara diantaranya PTDI dengan *Turkey Aerospace Industries* (TAI) dan juga PTDI dengan HAVELSAN.

Indonesia-Turki bersepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan pesawat N219 milik PTDI, pengembangan kapasitas dan sumberdaya manusia, serta kerja sama teknologi masa depan. Turki akan belajar dari Indonesia untuk teknologi pesawat sipil, dan Indonesia akan belajar dari Turki untuk teknologi pesawat militer.

### **Menerima Kunjungan Duta Besar**

Pada masa persidangan 2020-2021 atau pada tahun ke 2 Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Ia beberapa kali menerima audiensi Duta Besar (dubes) negara sahabat yaitu dari Turki, Jepang, Uzbekistan dan Belarus serta Perwakilan Perdagangan dan Ekonomi Taiwan untuk Indonesia (TETO) di Jakarta.

Pertemuan dengan Dubes Turki Mr. Mahmut Erol Kilic berlangsung pada Desember 2020. Disamping membicarakan hubungan yang lebih kuat bagi Indonesia-Turki, pertemuan ini membicarakan upaya mempercepat penandatanganan perjanjian kerjasama komprehensif IT-CEPA. Perjanjian ini diharapkan akan meningkatkan nilai investasi dan perdagangan kedua negara.

Pada 21 April 2021, Rachmat Gobel menerima kunjungan Duta Besar Jepang Kanasugi Kenji, kemudian diikuti pertemuan berikutnya 11 Juni 2021 dan 25 Agustus 2021. Pertemuan berlangsung sangat akrab, bahkan Dubes Jepang sempat mengajak isterinya untuk jamuan makan malam di kediaman Rachmat Gobel. Dan Wakil Ketua DPR RI juga didampingi isteri Ade Rachmat Gobel. Keduanya saling bertukar pikiran dan pandangan dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, pertanian, pariwisata dan kebudayaan. Disamping itu juga membicarakan bagaimana meningkatkan perekonomian kedua negara di masa pandemi Covid-19.

Pertemuan dengan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia Ulugbek Rozukulov juga berlangsung tiga kali yaitu Februari 2021, 31 Mei 2021 dan 10 Juni 2021. Semua pertemuan tersebut berlangsung di gedung DPR RI, membicarakan peningkatan kerjasama perekonomian dan perdagangan kedua negara serta strategi menangani pandemi Covid-19.

Pertemuan ini kemudian diikuti kunjungan muhibah delegasi DPR RI yang ke Uzbekistan yang dipimpin oleh Rachmat Gobel. Menindaklanjuti hasil kunjungan muhibah, pada pertemuan 10 Juni Rachmat Gobel juga



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan M.Luthfi dan Duta Besar (Dubes) Uzbekistan untuk Indonesia, Ulugbek Rozukulov. Dalam pertemuan ini Rachmat Gobel menjelaskan berbagai hasil pertemuan delegasi DPR RI ke dengan sejumlah pejabat tinggi Uzbekistan selama kunjungan kerja ke negara sahabat ini untuk bisa ditindaklanjuti.

mengundang Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi untuk bertemu dengan Ulugbek. Pertemuan ini berlangsung di ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI.

Pada 31 Agustus 2031 Rachmat Gobel menerima kunjungan Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Valery Kolesnik guna membicarakan peningkatan hubungan bilateral maupun multilateral antara parlemen Indonesia dan Belarusia. (\*)





Wakil Ketua DPR RI/  
Korinbang Rachmat Gobel  
memberi penjelasan  
kepada Menteri Luar  
Negeri Retno Marsudi  
tentang berbagai langkah  
dan hasil kunjungan  
muhibah delegasi DPR  
RI ke sejumlah negara  
seperti Turki, Belarusia dan  
Uzbekistan.

# Bantuan Program Kerja Untuk Pembangunan Daerah

Selain percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, menurut Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel, tantangan terbesar lainnya dalam pembangunan ekonomi nasional adalah mengatasi kesenjangan antarwilayah yang masih sangat tinggi. Kondisi ini terutama dirasakan oleh kawasan Indonesia Timur. Dalam hal ini, prakarsa Pemda dalam mengurangi kesenjangan di masing-masing daerahnya menjadi sangat penting.

Terkait kondisi itu, Rachmat Gobel mengakui, ia memberi perhatian lebih terhadap masalah yang dihadapi Indonesia Timur. Ini bukan karena ia berasal dari kawasan Timur, tapi data menunjukkan bahwa kawasan ini memang jauh tertinggal. Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebanyak 84% dari sebaran daerah tertinggal berada di Indonesia Timur. Dari total 122 daerah tertinggal di tingkat kabupaten, 102 di antaranya berada di bagian Indonesia Timur, artinya hanya 20 daerah tertinggal saja yang ada di Indonesia bagian Barat dan Tengah.

Menurut data BPS, lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal dari Indonesia Timur yaitu provinsi Papua dengan angka kemiskinan 26,8%, Papua Barat 21,7%, NTT 21,12%, Maluku 17,99% dan Gorontalo 15,59%.

“Jadi bisa dibayangkan kesenjangan pembangunan ekonomi Indonesia. Inilah yang membuat saya lebih banyak melakukan kunjungan kerja ke wilayah timur, jadi bukan karena semata daerah pemilihan (Dapil) saya di provinsi Gorontalo,” kata Rachmat Gobel.

Ia juga menyoroti, perlunya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan soliditas dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Dari segi anggaran, dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah sudah cukup besar. Lebih dari sekitar 25% dana APBN dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pada APBN 2021 misalnya,



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menyerahkan bantuan alat panen jenis *combine harvester* dan *multi commodity* kepada kelompok tani. Alat ini adalah salah satu tipe mesin panen yang kegiatan memotong, memegang, merontok dan membersihkan dilakukan sekaligus dan dapat digunakan untuk panen padi dan jagung.

dari Rp 2.750 triliun belanja pemerintah pusat, sebesar Rp 795,48 triliun di antaranya dialokasikan untuk TKDD.

Namun sayangnya, realisasi dan penyerapan dana APBD sering kali lambat sehingga banyak dana Pemda yang menggangu hanya di simpan di bank. Sebagai gambaran, menurut Kementerian Keuangan, per Oktober 2021, ada sekitar Rp 226 triliun dana APBD yang belum diserap dan di tempat di bank.

“Hal seperti ini tidak boleh terjadi karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dalam upaya mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, Pemda seharusnya tidak menunda-nunda penyerapan dana APBD” kata Rachmat Gobel.

### **Menyebarkan Program Bantuan**

Rachmat Gobel menjelaskan, dalam setiap kunjungan kerja ke daerah ia selalu turun langsung ke masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi rakyat untuk kemudian mendiskusikannya dengan pejabat pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Dari sinilah kemudian Rachmat Gobel



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama sejumlah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu program untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap penerima mendapat dukungan dana Rp 20 juta.

mencari solusi yang bisa memberi inspirasi dan stimulan bagi percepatan pembangunan.

“Sumpah jabatan saya sebagai anggota parlemen adalah memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus saya perjuangkan,” kata Rachmat Gobel.

Dalam rangka mewujudkan sumpahnya itulah, Rachmat Gobel merancang berbagai program kerja. Tidak hanya fokus pada daerah pemilihan (dapil) Gorontalo, bantuan program kerja juga disalurkan ke berbagai daerah lain. Menggandeng berbagai pihak, Rachmat Gobel mendorong daerah untuk bekerjasama dengan pusat.

Bersama Bank Indonesia misalnya, Rachmat Gobel telah menyalurkan berbagai paket bantuan, mulai dari untuk peningkatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Tidak kurang dari 100 paket bantuan yang



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama kelompok tani penerima bantuan berbagai alat pertanian untuk panen antara lain mesin perontok jagung dan padi, serta alat panen multiguna.

disalurkannya bersama program CSR Bank Indonesia dengan nilai sekitar Rp 25 juta-135 juta per paket.

Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sepanjang Tahun 2020 mendorong terealisasinya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), irigasi, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) yang tersebar di berbagai wilayah Gorontalo.

Program BSPS merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas. Selain mampu meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni, program BSPS ternyata mampu mengubah kawasan kumuh menjadi salah satu objek wisata baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai contoh, bantuan Program BSPS di Kelurahan Dembe

Wakil Ketua DPR RI/  
Korinbang Rachmat  
Gobel mengamati unit  
traktor empat roda  
yang akan diserahkan  
kepada kelompok tani  
yang penggunaannya  
dilakukan secara  
bersama.



Wakil Ketua DPR RI/  
Korinbang Rachmat  
Gobel bersama petani  
yang menerima  
bantuan bibit jagung  
jenis Pioneer P 35  
yang merupakan  
varietas tanaman  
jagung yang tahan  
terhadap penyakit  
bulai yang sering  
mengganggu petani.





Wakil Ketua DPR RI/  
Korinbang Rachmat  
Gobel bersama petani  
yang menerima  
bantuan pupuk  
nonsubsidi dan  
penerima Kredit  
Usahar Rakyat (KUR).

Satu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo di cat berwarna warni dan di lukis mural 3D. Program tersebut terealisasi 100% persen dimana pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 2500 unit dan 1700 unit pada tahun 2021.

Program Irigasi juga teralisasi 100% sebanyak 10 titik pada tahun anggaran 2020 dan 50 titik pada tahun anggaran 2021. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan layanan irigasi dan tentunya sebagai solusi peningkatan ekonomi masyarakat saat musim pandemi.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) terealisasi seratus persen sebanyak 10 titik pada tahun 2020 dan 10 titik pada tahun anggaran 2021. Program ini bertujuan membangun sistem yang terpadu untuk penanganan pemukiman kumuh dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) juga terealisasi 100% sebanyak 10 titik untuk tahun anggaran 2020 dan sebanyak 10 titik pada tahun anggaran 2021. Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan sosial ekonomi wilayah berbasis pada potensi sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Selain memperjuangkan program PUPR di dalam daerah pemilihan Gorontalo, Rachmat Gobel juga memperjuangkan program di luar dapil. Melalui kerjasama dengan Ditjen Penyedia Perumahan, Program BPS terealisasi sebesar 1.000 unit BPS pada tahun anggaran 2020 dan 300 unit di Sulawesi Tengah. Selain itu terealisasi pula pembangunan irigasi di wilayah yaitu sejumlah 5 titik di Lumajang, 10 titik di Nusa Tenggara Timur, dan 7 titik di Sulawesi Selatan.

Program kerjasama juga dilakukan bersama dengan Kementerian Pertanian dengan sasaran di beberapa wilayah Provinsi Gorontalo pada tahun 2021. Kegiatan yang dilakukan bersama dengan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Pra Panen) berhasil membagikan alsintan berupa traktor roda 2 dan 4 di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Puhwato dengan total 88 unit. Dilanjutkan dengan kerjasama dengan Ditjen Tanaman Pangan (Pascapanen) berhasil membagikan alsintan berupa *combine harvester* besar, *power thraser*, *power thraser* Multiguna, dan RMU (*rice milling unit*) di Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Bone Bolango, dan Kota Gorontalo dengan total 52 unit.

Di luar Provinsi Gorontalo terealisasi di 5 titik pada tahun 2020 yaitu 3 Ton pupuk non subsidi di Sulawesi Selatan, 4 ton pupuk non subsidi di Sulawesi Barat, 2 ton pupuk non subsidi di Sulawesi Tenggara, 10 ton pupuk non subsidi di Nusa Tenggara Timur, dan 5 ton pupuk non subsidi di Jember. Sedangkan pada tahun 2021 pembagian pupuk non subsidi dilakukan di Madiun dengan jumlah 5 ton.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Di antaranya mengadakan demonstrasi plot (*dempplot*) pertanian di Provinsi NTT. Selain itu, pengembangan sektor pertanian di NTT ini juga dikawal oleh PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). Para petani bakal diberikan pendampingan dari pengembangan lahan hingga panen. Diharapkan, pengawalan dapat meningkatkan hasil panen petani. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas para Petani dan harapan besar bisa menjadi lumbung pangan untuk wilayah NTT dan sekitarnya.

Kementerian Perhubungan juga menjalin kerjasama melalui penyaluran 4 bus sekolah yang diperuntukkan bagi wilayah Gorontalo. Tidak berhenti disitu, kerjasama juga dilakukan dengan Bank Indonesia (BI) bagi UMKM dan masjid yang turut menyasar di beberapa wilayah Provinsi Gorontalo seperti kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, Bone Bolango, dan kota Gorontalo. Bantuan dialokasikan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid dan gereja serta beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan total 58 penerima dengan total anggaran kurang lebih Rp 1,5 miliar.

Memasuki tahun 2022, kerjasama akan kembali dilakukan bersama dengan Kementerian PUPR. Di wilayah Gorontalo akan diajukan setidaknya 50 titik irigasi, 5000 BSPS, 10 titik Pisew, 10 titik Kotaku, Bronjong yang disebar di 3 titik, sumur bor di 3 titik, dan pembangunan jembatan gantung di 1 titik lokasi. Adapun di luar wilayah Gorontalo diajukan 700 BSPS di wilayah Sulawesi Tengah, 7 titik irigasi di wilayah Sulawesi Selatan, 7 titik irigasi di Sulawesi Barat, 5 titik irigasi di Lumajang, dan Bronjong untuk 1 titik sungai di wilayah Nusa Tenggara Timur. (\*)

# Inisiasi Mengurai Benang Kusut Pupuk Subsidi dan Upaya Membudayakan Pupuk Nonsubsidi

Sudah sejak era 1970-an sebagai salah satu sarana utama membantu petani, produksi dan penyaluran pupuk subsidi masih saja dibelit berbagai persoalan. Tiap musim tanam, petani masih berteriak menghadapi kelangkaan, kesulitan mendapat pupuk subsidi. Di sisi lain, instansi yang bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi komoditi ini, merasa dan menyatakan sudah melakukan langkah dan kebijakan yang tepat.

Persoalan pupuk subsidi sudah seperti benang kusut. Bahkan Presiden Jokowi pernah bicara keras soal ini. Tiap tahun melalui APBN pemerintah selalu mengucurkan dana puluhan triliun untuk subsidi pupuk, tapi petani masih berteriak kesulitan mendapatkannya.

“Kalau setiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan dari sisi produksi, berarti ada yang salah. Ada yang tidak benar di situ,” kata Jokowi seperti dikutip berbagai media saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (11/1/2021).

Seperti Presiden Jokowi, Rachmat Gobel juga mempunyai keprihatinan yang sama. Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, ia berupaya mengurai dan mencari titik temu, seperti konflik kepentingan sektoral yang menyebabkan persoalan menjadi berlarut-larut. Persoalan yang juga menyebabkan distribusi pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

Rachmat Gobel menegaskan, penanganan masalah pupuk subsidi harus ditinjau secara total dari hulu hingga ke hilir agar tercapainya distribusi secara merata. Persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh, dari tingkat

desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Setiap masalah harus dilihat secara objektif pada setiap tahapan distribusi.

Mengingat berbagai masalah yang dihadapi, sebagai langkah inisiatif, pada 25 Januari 2021 Rachmat Gobel mengadakan Rapat Koordinasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi IV, VI, VII dan XI. Disepakati, untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yang menjadi pusat kelangkaan pupuk bersubsidi.

Dari hasil kunjungan kerja itu ditemukan berbagai bentuk persoalan, diantaranya; (1) data base pupuk kurang akurat; (2) verifikasi penerima dan distribusi pupuk bersubsidi bermasalah, serta tidak tepat sasaran; (3) pemerintah mempunyai hutang kepada PT. Pupuk Indonesia ( *Holding Company*) sebesar Rp 5,692 triliun yang mempengaruhi kinerja produksi pupuk.

### Data Piutang Pemerintah ke Perusahaan Pupuk (Rp juta)

Perusahaan	Piutang 2019	Perkiraan Piutang 2020 (unaudited)	Tota Piutang
PT Pusri Palembang	305.023	165.198	470.221
PT Pupuk Kaltim	291.303	72.804	364.107
PT Pupuk Kujang	258.408	238.886	497.294
PT Petrokimia Gresik	2.604.130	1.282.467	3.886.597
PT Pupuk Iskandar Muda	324.603	149.440	474.043
<b>Total</b>	<b>3.783.468</b>	<b>1.908.795</b>	<b>5.692.261</b>

Sumber: materi RDP di Komisi IV dengan Kementerian BUMN

Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi itu, pada 9 Februari 2021 Rachmat Gobel mengundang menteri terkait untuk melakukan rapat konsultasi. Rapat dihadiri 4 menteri yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menkeu Sri Mulyani dan Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Muhammad Khayam mewakili Menperin. Dari DPR RI hadir pimpinan Komisi IV, VI, VII dan XI DPR RI.

Sebagai pimpinan rapat, Rachmat Gobel menyampaikan bahwa “ketahanan energi, pangan, dan air merupakan tiga tujuan utama pembangunan berkelanjutan dari sustainable development goals (SDGs)”.



Dalam rangka mendorong penggunaan pupuk nonsubsidi, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan bantuan kepada kelompok tani di berbagai daerah, termasuk batuan 5 ton kepada sejumlah kelompok petani di Jember, Jawa Timur yang diserahkan oleh Staf Khusus Rachmat Gobel yaitu Nining Indra Saleh (kanan).

Industri pupuk memiliki peran sangat strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Salah satu tujuan pemerintah mempertahankan kebijakan pupuk bersubsidi adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam rapat Rachmat Gobel juga menyampaikan beberapa data antara lain tentang pengurangan subsidi pupuk dalam APBN 2021 dan kebutuhan pupuk. Alokasi anggaran subsidi pupuk dikurangi menjadi Rp 25,276 triliun dengan volume 7,2 juta ton. Sementara itu berdasarkan data Ditjen PSP Kementerian Pertanian, kebutuhan pupuk bersubsidi 23,2 juta ton untuk 16,5 juta petani atau Rp 67,12 triliun, sehingga terjadi kekurangan anggaran Rp 41,905 triliun.

Dari segi penyediaan bahan baku, pasokan gas bumi untuk PT Pupuk Indonesia sampai tahun 2021 masih surplus, tetapi mulai tahun 2022 diperkirakan terjadi defisit pasokan sebesar -25 MMSCFD, defisit -64 MMSCFD tahun 2023, -327 MMSCFD di tahun 2024 dan seterusnya diproyeksikan defisit terus meningkat hingga -286 MMSCFD di tahun 2028.

Selanjutnya, mengenai harga gas ke pabrik pupuk, secara umum rata-rata US\$ 6 per MMBTU, namun biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi karena *toll fee* yang cukup tinggi.

Pendistribusian pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran, perlu adanya evaluasi serta kajian secara mendalam. Sebagai salah satu alternatif, program subsidi pupuk dialihkan menjadi subsidi langsung kepada keluarga petani (KK-Tani).

Banyak sekali kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang terjadi di hampir seluruh daerah seperti penggunaan diluar peruntukan, dipasarkan sebagai pupuk nonsubsidi. Ada celah dalam pengawasan distribusi karena tanggung jawab produsen hanya sampai ke level 3, sementara di level 4 dari pengecer ke petani itu diatur oleh Kementan dan Kemendag yang kiosnya berada di level kabupaten, kecamatan, desa.

### **Mendapat Apresiasi**

Inisiatif Rachmat Gobel menyelenggarakan rapat konsultasi mendapat sambutan antusias dari instansi terkait dan Komisi DPR RI. Mendapat apresiasi yang tinggi, karena dalam sejarah persoalan pupuk belum pernah dilakukan rapat konsultasi seperti yang diinisiasi Rachmat Gobel ini. Karena bersifat konsultasi, rapat ini memang tidak untuk merumuskan satu kebijakan.

Namun demikian, rapat ini telah menghasilkan pemahaman yang sama bahwa distribusi pupuk bersubsidi banyak yang menyimpang, perlu evaluasi serta kajian secara mendalam. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah kebijakan pupuk subsidi perlu dilanjutkan atau dicarikan alternatif lain agar pemberian subsidi ini tepat sasaran. Sebagai salah satu alternatif, subsidi pupuk dialihkan menjadi subsidi langsung kepada keluarga petani (KK-Tani).

Rapat juga menyepakati, perlu langkah pembenahan secara holistik, baik permasalahan dari hulu hingga hilir. Hasil pembahasan ini harus menjadi perhatian pemerintah khususnya dalam hal pelaksanaan pendistribusian agar pupuk selalu tersedia setiap saat, tepat sasaran dan sesuai dengan data yang disampaikan oleh Menteri Pertanian.

Rachmat Gobel mengakui, masalah pupuk subsidi ini sangat kompleks sehingga butuh waktu untuk menyelesaikan dan mendapatkan solusi yang efektif. Namun belajar dari pengalaman negara lain, katanya, perlu dicarikan solusi agar petani tidak perlu tergantung pada pupuk subsidi.

Alternatif itu, menurutnya adalah mendorong petani menggunakan pupuk nonsubsidi. Alasannya, penggunaan pupuk jenis ini memberikan keuntungan

sekaligus kepada tiga pihak yaitu (1) bagi petani, produktivitasnya akan naik sehingga akan lebih sejahtera, (2) kinerja pabrik pupuk menjadi baik karena tidak terbebani program subsidi, dan (3) bagi negara/pemerintah akan sangat membantu tercukupinya pasokan pangan karena meningkatnya produktivitas lahan pertanian padi.

### **Berbagai Pandangan**

Inisiatif Rachmat Gobel telah memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan sudut pandang masing-masing. Berbagai pandangan ini akan menjadi masukan bagi setiap instansi dalam rangka pelaksanaan reformasi pupuk bersubsidi dan untuk evaluasi ketahanan pangan.

Pandangan itu dari sejumlah instansi itu sekaligus memberikan gambaran mengenai peta masalah pupuk subsidi yang begitu rumit seperti ibarat benang kusut. Disepakati, rapat konsultasi ini perlu dilaksanakan secara periodik, minimal satu kali dalam satu tahun.

### **Pandangan Menteri Pertanian**

Menteri Pertanian Yasin Limpo menekankan pentingnya keberadaan pupuk subsidi terutama untuk peningkatan produktivitas komoditi pangan. Yasin antara lain mengemukakan (1) permasalahan pupuk sangat penting dalam produktivitas pertanian, berdasarkan data tahun 2020 telah memperlihatkan kinerja yang cukup baik, pada kuartal II, III, dan IV; (2) pupuk bersubsidi membantu peningkatan produktivitas pertanian nasional, yang ditunjukkan dalam produktivitas padi yang menduduki urutan ke-2 (kedua) dari 9 (sembilan) negara-negara FAO di Asia; (3) subsidi pupuk jangan dicabut, karena sangat besar manfaatnya kepada petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 2 (dua) hektar sekaligus menunjukkan wujud kepedulian Pemerintah membantu/melindungi petani kecil; (4) Kementerian Pertanian selalu berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar pasokan dapat berjalan lancar dan akan membenahi keadaan di lapangan terkait tata kelola, agen yang diperbaiki, membuat road map dukungan pemerintah, peningkatan pemantauan dan pengawasan (*monitoring*);

### **Pandangan Menteri ESDM**

Menteri ESDM Arif Tasrif menyampaikan upaya meningkatkan kinerja dalam penyaluran gas bagi pabrik pupuk. Menurut Tasrif; (1) penyesuaian harga gas bumi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi diprioritaskan penggunaannya untuk suplai ke industri pupuk; (2)

menjaga realisasi pasokan gas sesuai dengan permintaan dan kebutuhan produksi industri pupuk; (3) melakukan pemetaan dan proyeksi pemenuhan kebutuhan gas industri pupuk.

### **Pandangan Menteri BUMN**

Menteri BUMN Erick Tohir dalam pandangannya menekankan akan melakukan langkah meningkatkan sinergitas, antara lain; (1) meningkatkan kapasitas produksi dan optimasi HPP (Harga Pokok Produksi); (2) untuk memastikan supply chain dari hulu kehilir dan memastikan ketersediaan bahan baku, Kementerian BUMN bersama BUMN holding pupuk akan mengeksplorasi tambang *phosphate* di luar negeri; (4) Kementerian BUMN telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait potensi target akuisisi perusahaan di luar negeri seperti di Yordania dan Maroko; (5) Kementerian BUMN akan memastikan sinergisitas antara BUMN holding pupuk dan BUMN holding pertambangan untuk proses akuisisi tambang *phosphate* di luar negeri; (6) Kementerian BUMN akan melakukan reformasi pupuk nasional dengan meningkatkan pengelolaan BUMN holding pupuk secara lebih profesional dan; (7) mengusulkan reformasi Pupuk Subsidi Langsung.

### **Pandangan Menteri Keuangan**

Menteri Keuangan Sri Mulyani engemukakan; (1) realisasi anggaran untuk subsidi pupuk meningkat setiap tahun naik 5%-6% dengan jumlah produksi 8-9 (delapan sampai sembilan) juta ton. Penggunaan anggaran harus semaksimal mungkin. (2) penghitungan besaran anggaran subsidi dalam APBN dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, HPP (Harga Pokok Produksi), harga gas, dan nilai tukar rupiah; (3) terkait tagihan pupuk subsidi PT. Pupuk Indonesia ( *Holding Company*) kepada pemerintah sebesar Rp 5,69 triliun, akan dibayar setelah dilakukan audit oleh BPK.

### **Pandangan Menteri Perindustrian**

Dirjen IKFT Muhammad Khayam mewakili Menperin menyampaikan; (1) untuk mendukung penugasan subsidi dan melayani pasar komersil Pupuk Indonesia group memiliki unit produksi di Lhokseumawe, Palembang, Cikampek, Gresik, dan Bontang; (2) kinerja penjualan pupuk anorganik subsidi oleh PT Pupuk Indonesia group sangat baik dengan dukungan stok yang mencukupi sehingga pupuk dapat diperoleh dengan mudah hingga di Lini IV; (3) faktor yang menyebabkan kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP)

adalah kenaikan harga gas, kurs inflasi, volume subsidi, harga BBM solar dan beban bunga.

### **Pandangan Komisi IV DPR RI**

Sesuai dengan tupoksi dan temuan di lapangan, Komisi IV menyampaikan; (1) mengapresiasi pernyataan Menteri BUMN yang tidak akan mencabut subsidi pupuk untuk petani dan Menteri Keuangan yang menyarankan untuk menggunakan anggaran subsidi pupuk yang masih ada semaksimal mungkin; (2) pemerintah perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian tentang kriteria definisi “petani miskin” yang mengatakan petani yang mempunyai lahan pertanian kurang dari dua hektar menjadi kurang dari satu hektar;

### **Pandangan Komisi VI DPR RI**

Dalam rapat konsultasi ini, Komisi VI menyampaikan; (1) tidak mencukupinya kapasitas produksi PT. Pupuk Indonesia harus dicari solusi, misalnya melalui impor atau harus ada pembangunan pabrik pupuk yang baru, terkait permasalahan harga gas yang menjadi suplai bahan baku pabrik pupuk harus mendapat perhatian terutama infrastruktur gas tersebut; (2) KartuTani yang belum dimanfaatkan secara maksimal, contoh penggunaan Kartu Tani hanya 1% (didaerah Banten), harus dicek keberadaannya untuk mencari solusi permasalahan tersebut karena berpengaruh dengan pilihan-pilihan kebijakan tentang pupuk subsidi.

### **Pandangan Komisi VII DPR RI:**

Wakil dari Komisi VII dalam rapat antara lain menyampaikan; (1) gas sebagai salah satu bahan baku industri pupuk harus terus dijaga keberadaannya, diperlukan kebijakan strategis untuk mengatasinya dengan mengurangi volume ekspor gas agar dialihkan kepada industri pupuk agar tidak terjadi kekurangan gas untuk bahan bakarnya; (2) subsidi pupuk saat ini yang menjadi masalah bukan karena kebijakannya, tetapi pupuk dan gas (BBM) tidak tepat sasaran kepada penerima manfaatnya dan harus mendapat perhatian semua pihak untuk mengatasinya; (3) terkait dengan harga gas, Komisi VII DPR RI telah meminta kepada BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan lebih ketat terkait *toll fee* sehingga usaha pengangkutan gas bumi dapat berjalan secara efisien. Penurunan harga gas menjadi US\$ 6 per MMBTU tersebut akan menghasilkan *multiplier effect* berupa penghematan subsidi Rp 1,4 triliun per tahun. Penurunan harga gas juga dapat meningkatkan *competitiveness*.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berfoto bersama dengan peserta rapat konsultasi pupuk subsidi.

### **Pandangan Komisi XI DPR RI**

Wakil dari Komisi XI DPR RI dalam rapat menegaskan; (1) anggaran subsidi untuk pupuk sebesar Rp 25 triliun pada tahun 2021 telah diberikan, walaupun tidak semua petani menerima manfaat tersebut; (2) pemerintah perlu menjaga deviasi Harga Pokok Produksi dengan Harga Eceran pupuk subsidi tidak terlalu besar, karena akan berdampak pada kurang tepat sasaran seperti terjadi pada distribusi subsidi BBM; (3) perlu adanya pendataan kepada petani agar dapat menerima pupuk subsidi tepat waktu dengan volume yang diharapkan dapat disalurkan langsung kepada petani tersebut/yang bersangkutan dengan berkoordinasi kepada pemerintah daerah.

### **Membudayakan Pupuk Nonsubsidi**

Rachmat Gobel berkeyakinan, membudayakan pemakaian pupuk nonsubsidi di kalangan petani bisa menjadi alternatif yang efektif sebagai jalan keluar. Keyakinan itu datang dari bukti kuat yaitu hasil *pilot project demonstration plot (demplot)* yang dikembangkannya bersama berbagai

kelompok tani. Meski harganya lebih mahal, produktivitas yang dihasilkan dari pemakaian pupuk nonsubsidi berkali kali lipat lebih tinggi. Untuk tanaman padi, peningkatan produktivitas berkisar 2-3 kali lipat atau jauh lebih tinggi dibandingkan selisih harga pupuk nonsubsidi dengan pupuk subsidi.

*Pilot project* pertama dikembangkan Rachmat Gobel di daerah pemilihan (dapil) sendiri yaitu di sejumlah kabupaten di provinsi Gorontalo. Bekerjasama dengan kelompok tani, koperasi, PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia Gresik, sejak awal 2020 tim yang ia bentuk menggarap sejumlah *demplot* di berbagai desa dengan menanam padi, jagung dan hortikultura seperti cabai, tomat dan bawang. Hasilnya sangat mengembirakan, di mana produksi padi yang sebelumnya 4-5 ton per ha, naik menjadi 9-10 ton per ha.

Untuk tanaman tomat, jika sebelum menggunakan pupuk subsidi hanya bisa menghasilkan 24 ton per ha, menggunakan pupuk nonsubsidi naik menjadi 43,2 ton per ha dengan kualitas yang lebih baik, besar, dagingnya lebih tebal sehingga tidak cepat busuk. Hal yang sama juga terlihat pada penggunaan pada tanaman cabai, produktivitasnya naik dari sekitar 8 ton per ha menjadi 12 ton per ha.

Melihat hasil itu, sejak 2021 Rachmat Gobel memperluas proyek *demplot* ini ke sejumlah provinsi di Sulawesi, kemudian ke Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) di NTT dan Kabupaten Lumajang di Jatim. Dengan skema yang sama, hasil yang dicapai juga sangat mengembirakan, seperti yang dicapai di Gorontalo.

Di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, *demplot* milik kelompok tani Ndara Tana mampu meningkatkan produktivitas kelompok ini dari sebelumnya hanya sekitar 5 ton menjadi 9 ton. “Hasilnya bagus. Dengan pupuk subsidi cuma menghasilkan sekitar 5 ton per hektare, tapi dengan pupuk non-subsidi menjadi 9,4 ton per hektare,” kata Ketua Kelompok Tani Ndara Tanah, Andreas Umbu Wosa saat panen bersama Rachmat Gobel pada April 2021,

Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rachmat Gobel melakukan kerjasama mengembangkan *demplot* dengan 5 kelompok tani dari Desa Mendak, Desa Segulung, Desa Ngeranget, Desa Padas, dan Desa Tileng. Tetap menggandeng PT Pupuk Kaltim, melalui kelompok tani ini ia menyerahkan 5 ton pupuk nonsubsidi. Karena kesibukan jadwal kerja, bantuan diserahkan melalui Staf Khususnya Nining Indra Shalehdan dihadiri oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Jawa Timur VIII Soehartono, Wali Kota Kota Madiun Maidi, Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur ibu Sri Sajekti

Sudjunadi, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Madiun Taupan Devyanto, dan perwakilan dari PT Pupuk Kaltim.

Berdasarkan pengalamannya itu, Rachmat Gobel mengatakan, dibutuhkan suatu gerakan yang masif dan bersinergi untuk melakukan pencerahan kepada petani bahwa pemakaian pupuk nonsubsidi jauh lebih menguntungkan. Tidak hanya itu, petani juga akan lebih mandiri karena tidak lagi tergantung pada bantuan subsidi pupuk dari pemerintah.

Bagi petani, akan sangat menguntungkan jika subsidi pupuk bisa dialihkan ke dalam bentuk bantuan yang lebih produktif seperti program peningkatan teknologi dan program lain yang lebih strategis. Jangan diartikan, ajakan meningkatkan penggunaan pupuk nonsubsidi berarti mengurangi bantuan untuk petani, tapi dananya dialihkan ke program yang lebih produktif.

Bayangkan saja, dengan kebutuhan pupuk subsidi yang sebesar Rp 67,12 triliun per tahun (tahun 2021), jika dipakai untuk membangun irigasi, infrastruktur pertanian, menyediakan benih berkualitas, dan bantuan alat mesin pertanian, tentu petani akan lebih maju dan sejahtera.

Dalam berbagai kesempatan Rachmat Gobel selalu menegaskan, pemberdayaan petani harus dilakukan dalam program yang terintegrasi sehingga solusinya bisa lebih menyeluruh. Dalam istilah Rachmat Gobel, pemberdayaan petani harus menggunakan konsep agri solution, dimana berbagai masalah yang ada tidak hanya dilihat dari satu sektoral saja. Inilah yang tengah ia lakukan melalui proyek *demplot* yang kini kian tersebar di berbagai daerah.

Ia juga mengedepankan, pentingnya petani melalui kelompok masing-masing meningkatkan kualitas usaha taninya, salah satunya adalah membentuk koperasi. Banyak hal yang bisa dilakukan petani secara mandiri melalui koperasi, mulai dari mendapatkan bibit unggul, kebutuhan pupuk, insektisida, alsinta sampai pemasaran.

”Dalam mengembangkan pertanian juga harus terintegrasi dan linier dengan pengembangan ekonomi lainnya seperti Koperasi atau UMKM,” kata Rachmat Gobel. (\*)





Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan Menteri Pertanian Yasin Limpo selesai rapat konsultasi yang membahas mengenai berbagai persoalan produksi dan distribusi pupuk subsidi, di Gedung DPR.

# Menggerakkan Agribisnis Melalui Kebijakan Yang Berorientasi Nilai Tambah

**D**ibandingkan potensi yang ada, perkembangan sektor pertanian atau agrikultur masih jauh dari yang diharapkan. Dari potensi lahan seluas 34,8 juta ha misalnya, masih banyak yang belum digarap secara maksimal. Kontribusi terhadap lapangan kerja tinggi, tidak kurang dari 35,25 juta orang penghasilannya utamanya dari sektor ini, baik itu petani, nelayan atau peternak. Namun hasil yang mereka peroleh kurang memadai sehingga tidak heran jika sebagian besar kantong kemiskinan diisi oleh mereka yang bekerja di sektor ini.

Berdasarkan data sumber penghasilan utama pada 2020, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 46,3% rumah tangga miskin berasal dari sektor pertanian. Sedangkan dari sektor industri 6,58% dan lainnya 32,10%. Angka ini mengidentifikasi dengan jelas bahwa rata-rata nilai tambah yang bisa dihasilkan pelaku sektor pertanian, jauh di bawah industri ataupun sektor lainnya.

“Terlepas dari yang sudah dilakukan pemerintah, data menunjukkan bahwa memperkuat pendekatan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah untuk sektor pertanian kian menjadi keharusan,” kata Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

Kebijakan yang berorientasi pada nilai tambah adalah kebijakan yang memungkinkan petani, peternak ataupun nelayan mempunyai kemampuan untuk menyelaraskan produk yang mereka hasilkan dengan preferensi konsumen, baik dalam soal bentuk, kualitas, ruang, waktu, identitas. Hal ini sulit ditemui pada komoditas yang dihasilkan secara tradisional. Pertanian tidak bisa semata menghasilkan produk yang hanya bisa digunakan atau dikonsumsi sebagai kebutuhan primer, tetapi harus memberikan nilai tambah yang bisa diolah menjadi barang sekunder dan tersier.

Pertanian bernilai tambah merupakan strategi penting untuk meningkatkan kewirausahaan pertanian dan pembangunan pedesaan.

Ini sangat terkait dengan kepentingan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian serta martabat bangsa.

### **Membangun Pertanian Berkualitas**

Organisasi pangan dunia *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam sejumlah laporannya selalu menegaskan, sektor pertanian tidak bisa lagi ditangani dengan kebijakan yang bersifat business usual atau biasa-biasa saja. Pada intinya lembaga ini mengingatkan, kebijakan pertanian yang mengedepankan penggunaan pada sumber daya alam secara besar-besaran seperti selama ini telah menyebabkan terjadinya deforestasi, kelangkaan air, penipisan tanah dan tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, harus ditinggalkan. Perlu pendekatan baru yang lebih menjamin tercapainya kebutuhan pangan dan produksi pertanian yang berkelanjutan.

Sektor pertanian membutuhkan kebijakan yang lebih inovatif dan holitis agar bisa tampil menjadi sektor berkualitas. Perlu perbaikan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan membantu mengatasi perubahan iklim. Pertanian yang berkualitas, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan, juga akan menjadi lokomotif dalam meningkatkan kesejahteraan, serta tetap mengedepankan kebutuhan pembangunan keberlanjutan.

Menurut Rachmat Gobel, modernisasi dengan penggunaan infrastruktur dan teknologi modern tidak terelakkan lagi. Untuk meningkatkan produktivitas, petani tidak hanya dituntut untuk memaksimalkan produksi, tapi juga harus mampu menghasilkan produk berkualitas, sesuai preferensi konsumen yang terus berkembang. Usaha pertanian tidak lagi bisa dengan mengandalkan proses alamiah secara tradisional, memerlukan teknologi modern. Komoditas yang dihasilkan usaha tani tidak bisa hanya untuk dipakai atau dikonsumsi sebagai kebutuhan primer, tetapi harus memberikan nilai tambah yang diolah untuk menjadi barang sekunder dan tersier.

Bagi Indonesia, menurut Rachmat Gobel, membangun pertanian berarti membangun petani seutuhnya, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka yang masih tertinggal, sekaligus mengamankan ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian masih merupakan penopang utama mata pencaharian masyarakat, terutama di pedesaan.

Data Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2020 menyebutkan, tenaga kerja di sektor ini mencapai 35,25 juta orang. Angka ini belum termasuk anggota keluarga yang hidup dari hasil pertanian dan keluarga buruh tani.

Dalam pandangan Rachmat Gobel, untuk mencapai pertanian yang berkualitas tidak cukup hanya menyiapkan infrastruktur, sarana,

prasarana. Harus terintegrasi dengan bidang lainnya seperti penguatan SDM dan dukungan pembiayaan dan teknologi modern yang diadopsi di dalam pengelolaan pertanian di setiap level; mulai pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, distribusi pasca panen, termasuk peningkatan produktivitas tanah melalui pupuk berkualitas.

Pemberdayaan SDM menjadi kunci, baik melalui pendidikan formal maupun informal seperti penyuluhan, pelatihan dan pembinaan. Kualitas SDM yang tergolong rendah membuat pengelolaan usaha tani cenderung konvensional atau tradisional sehingga jauh dari kemampuan mengadopsi kemajuan teknologi.

Rachmat Gobel yakin, pengembangan SDM yang handal, pendidikan berorientasi pertanian, infrastruktur yang memadai, alat pertanian yang canggih, dan dukungan political will pemerintah, dipastikan akan menghasilkan produk pertanian berkualitas dan melimpah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan bisa diekspor.

Ia juga mendorong terbentuknya industri pengolahan yang mampu mengolah hasil pertanian yang tidak hanya berkualitas, tapi juga variatif. Satu jenis komoditas pertanian harus bisa menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomi, diolah menjadi barang lebih bernilai tinggi. Jika hal ini bisa dilakukan dengan baik, maka setiap proses pengelolaan pertanian bisa menjadi potensi bisnis yang sangat besar dan menguntungkan.

Selain itu, menurut Rachmat Gobel, infrastruktur kelembagaan juga harus diperkuat agar bisa mendukung permodalan dan sistem pemasaran yang baik. Sistem distribusi dan rantai pasok yang efektif dan terintegrasi harus dibangun untuk menjaga kualitas produksi saat sampai di tangan konsumen.

Tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pembangunan pertanian berkualitas menjadi sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Seperti diketahui, saat ini impor komoditi pangan masih sangat besar dan semakin beragam. Tidak hanya impor beras, jagung, gula dan gandum, tapi juga bawang merah, bawang putih dan cabai.

### **Agribisnis dan Petani Millenial**

Data menunjukkan, banyak generasi muda yang enggan jadi petani. Padahal jumlah generasi ini semakin membludak yang menurut BPS mencapai 145,39 juta orang atau lebih dari separuh jumlah penduduk yaitu 53,81% dari total populasi. Kenapa mereka enggan jadi petani? Ini harus dipikirkan bersama, karena di berbagai negara yang berlomba



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan latar belakang kawasan Food Estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.

meningkatkan produksi pangan dengan teknologi moderen, generasi muda mereka menjadi garda terdepan.

Dunia pertanian memang semakin jauh dari generasi muda. Banyak aspek yang menciptakan kondisi ini, mulai dari citra yang jauh dari modernisasi, terlihat kumuh, terbelakang, susah dan kemiskinan. Padahal di sisi lain, potensi sektor ini sangat besar. Sebagai negara tropis yang dikenal subur dan iklim yang mendukung, Indonesia mempunyai lahan yang luas.

Menurut data Statistik Pertanian 2019, dari potensi yang ada, luas penggunaan lahan pertanian pangan di Indonesia baru mencapai 34,8 juta hektar, masih ada lahan yang belum diusahakan seluas 10, 77 juta ha (30,92%). Dari lahan yang sudah digarap itu, 7,1 juta ha (20,40%) berbentuk sawah, kemudian tegal/kebun seluas 11,69 juta ha (33,59%) dan ladang/huma 5,25 juta ha (15,09%).

Meningkatkan wawasan generasi muda terhadap sektor pertanian harus dilakukan agar mereka melihat dengan lebih jernih potensi yang ada, tidak sekedar memandang dari sisi citra yang ada sekarang ini. Pertanian tidak hanya sebatas bersawah atau terjun ke ladang, jauh lebih luas dari itu. Usaha



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel akrab dengan para petani, sesuai acara pelatihan budi daya jagung. Komoditi ini mempunyai potensi dan prospek yang cerah bagi petani Indonesia, baik untuk kebutuhan pangan maupun untuk pakan ternak.

pertanian atau agribisnis adalah mulai dari tahap penyediaan bibit, proses tanam, pengembangbiakan, panen, pascapanen, proses pengolahan.

Setiap tahapan itu menghasilkan nilai ekonomi. Tiap elemen produksi dan distribusi bisa dijelaskan sebagai aktivitas agrobisnis, baik digarap sendiri (pertanian subsistem) ataupun menggunakan jasa pihak lain.

Di berbagai kesempatan, Rachmat Gobel selalu berusaha mengingatkan dan mendorong berbagai pihak untuk terus berupaya secara maksimal mendorong modernisasi pertanian, dari hulu ke hilir. Kemajuan sektor ini akan sangat berarti untuk menjaga kepentingan nasional, menjadikan Indonesia sebagai negara agraris yang digdaya dan sejahtera dari hasil kekayaan alam dan kesuburan tanahnya.

Rachmat Gobel menyambut baik dan sangat mendukung penuh program pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian untuk melibatkan anak muda di sektor pertanian. Membuat program yang menarik atau membuat tertarik generasi milenial dalam mengambil bagian untuk memajukan pertanian.

“Membangun visi bersama dengan menarik generasi milenial untuk menjadikan Indonesia menjadi negara besar dengan kekuatan agraris yang kuat adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan,” katanya.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel di tengah anggota kelompok tani di Sumba, Nusa Tenggara Timur, memotivasi mereka untuk meningkatkan produktivitas agar kawasan ini mampu tampil sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Perlu upaya membangkitkan optimisme generasi muda bahwa menjadi petani merupakan salah satu langkah tepat. Menjadi petani tidak hanya berurusan dengan cangkul dan lumpur, tetapi sebaliknya, menjadi petani bisa mengadopsi teknologi yang sangat modern sekalipun. Menjadi petani, bahkan bisa menjadi orang kaya raya dengan menghasilkan berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat di seluruh dunia.

Harus diyakinkan, pertanian sangat menjanjikan untuk masa depan, tidak perlu enggan dan gengsi untuk menjadi petani. Banyak negara berhasil menarik generasi mudanya terjun ke sektor ini seperti China dan Jepang.

Di China, banyak pemuda yang menjadi petani, bahkan ada lulusan doktor terbaik universitas ternama di China mau menjadi petani, menjadi pengusaha pertanian yang sukses. Mereka mendapat dukungan pemerintah dan berbagai perusahaan swasta agar bisa mengerjakan usaha tani secara modern. Dari mulai pembibitan, penanaman, panen, sampai mengurus hasil panen, mereka menggunakan teknologi modern, robot, alat-alat canggih, *artificial intelligence tools*, teknologi *drone*, rekayasa genetika, *botanical science*.

Pertanian China mampu mencukupi kebutuhan hidup 1,44 miliar penduduknya, bahkan sampai diekspor ke berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan linearnya penggunaan teknologi modern dengan luasnya partisipasi anak muda dalam menggarap pertanian.

Contoh lain adalah Jepang. Pemerintahannya punya rasa tanggungjawab yang sangat kuat terhadap petani. Sangat mendukung produktivitas petani, rakyat Jepang pun cinta hasil pertanian dalam negeri mereka. Pemerintah membantu mesin, memberikan subsidi dan mengontrol harga supaya petani untung dan rakyat tetap bisa beli. Untuk urusan mengatur dan mengorganisasi petani.

Pemerintah Jepang membentuk Nokyo atau JA (*Japan Agriculture*) yang mengurus soal keseluruhan produksi, mengatur *packaging*, urusan transportasi, menyediakan semua kebutuhan modal, sampai penjualan produk ke tangan konsumen. Keseluruhan proses berada dalam komitmen pemerintah menyediakan pangan sebagai kebutuhan vital untuk rakyat, khususnya bagi kesejahteraan petani.

Persoalan yang dihadapi sektor pertanian memang sangat kompleks, namun dengan pendekatan yang lebih holistik dan kebijakan yang terkoordinir serta terintegrasi, berbagai persoalan itu bisa diurai dan diatasi. Bila ini bisa diwujudkan, prospek usaha di bidang pertanian akan lebih menjanjikan dan akan menarik lebih banyak kalangan milenial untuk terjun mewujudkan Indonesia sebagai negara agraris yang kuat dan handal.

### **Food Estate dan Kemandirian Petani**

Salah satu program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah saat ini adalah *food estate*. Program andalan ini mengusung konsep pengembangan pangan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, peternakan dalam satu kawasan. Sejauh ini sudah ada 30.000 hektar lahan yang digarap melalui program ini.

Berdasarkan sejumlah tolak ukur utama seperti realisasi luas tanam dan panen yang tinggi, meningkatnya produksi indeks pertanaman, dan produktivitasnya, pelaksanaan *food estate* di beberapa daerah berjalan cukup baik.

Di luar sejumlah persoalan yang masih menjadi catatan seperti pemilihan lokasi yang tidak *accessible*, kurang subur, lahan rusak, berpotensi banjir, menurut Rachmat Gobel, program ini memberi peluang dalam membangun kemandirian bagi petani. Program ini harus bisa memberi iklim yang kondusif bagi penguatan kelembagaan di kalangan petani. Mendorong petani untuk membangun sistem koperasi dengan petani itu sendiri sebagai anggotanya. Koperasi ini yang akan menyiapkan pupuk dan bibit, membeli hasil panen petani (*off taker*), dan bisa bekerja sama dengan Bulog sebagai *off taker* terakhir.



Wakil Ketua DPR RI/Rachmat Gobel tengah memanen bawang di salah satu *demplo*t yang diinisiasinya. Penggunaan pupuk nonsubsidi oleh kelompok tani telah berhasil meningkatkan produktivitas tanaman bawang baik dari sisi hasil panen maupun kualitas.

Menurutnya, melalui kerja sama dengan Bulog, petani bisa memproduksi beras premium yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh petani, bukan lagi oleh pemain besar sebagai pihak ketiga. Hal ini bisa memecahkan persoalan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, khususnya di kantong-kantong pertanian.

Langkah penting yang harus dilakukan untuk memajukan pertanian dan program *food estate* adalah dengan sistem pertanian terintegrasi dari hulu ke hilir. Sistem terintegrasi artinya petani menjadi pemain utama dalam pengelolaan agribisnis, dengan dibantu oleh pemerintah dan berbagai pihak. Lembaga koperasi misalnya, dikembangkan untuk membantu petani dalam mencukupi kebutuhan akan bibit, pupuk, alsintan, sarana dan prasarana pertanian.

Persoalan yang tak kalah penting adalah akses modal. Melalui sistem pertanian terintegrasi, petani bisa mengakses modal melalui koperasi yang merupakan swakelola modal oleh petani itu sendiri atau mengakses modal dari perbankan melalui badan hukum koperasi yang didirikan oleh petani.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menghadiri panen raya *demplo*t padi yang menggunakan pupuk nonsubsidi dengan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan penggunaan pupuk subsidi.

Pertanian terintegrasi akan membawa kemandirian bagi petani, tidak menggantungkan harapan pada subsidi pemerintah seperti melalui pupuk subsidi, suntikan modal. Petani bisa mandiri dengan mengelola bisnis pertanian dengan kemampuan sendiri yang menghasilkan nilai tambah dan peningkatan produktivitas.

Pemerintah hanya perlu mendorong dan memfasilitasi dengan bantuan yang bersifat meningkatkan kemandirian, penguatan kualitas, dan modernisasi pengelolaan pertanian, serta menuntun petani untuk menggerakkan agribisnis yang memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan mereka.

Melalui pembangunan pertanian berkualitas dan modern, anak muda akan menerima profesi sebagai petani karena memberikan hasil yang memuaskan. Adanya sentuhan teknologi kekinian yang menjadi semangat

mereka, dan menjadi petani tidak lagi dipandang primitif, kotor, dan miskin. Sistem agribisnis terintegrasi akan menjadi magnet kuat dan akan mempercepat kemandirian petani.

### **Bantuan Untuk Petani dan UMKM**

Dalam mewujudkan pendekatan nilai tambah, Rachmat Gobel telah membangun sejumlah proyek percontohan dengan menerapkan sistem pertanian terintegrasi melalui *demonstration plot (demplot)* yang dibangunnya di Provinsi Gorontalo, Jawa Timur, dan NTT. Sistem terintegrasi dilakukan melalui edukasi *by doing* dan melibatkan anak muda. Dengan menyediakan fasilitas *demplot* sebagai tempat praktik langsung, petani bisa melihat bagaimana cara produksi, mengolah lahan, panen, dan mengolah hasil panen dengan baik.

Melalui *demplot* itu, anak-anak muda belajar menjadi petani berkualitas dengan mengadopsi sistem pertanian modern, juga menjadi mandiri dengan menggunakan pupuk nonsubsidi atau tidak lagi mengandalkan pupuk subsidi dari pemerintah. Hasilnya, produktivitas pertanian naik tiga kali lipat. Hasil panen tiga kali lipat lebih banyak dan kualitas terjaga.

Komitmen Rachmat Gobel mengembangkan dan memajukan pertanian tidak berhenti di situ, tetapi juga memberikan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan) yang sangat dibutuhkan untuk melangkah pada sistem pertanian modern. Ia sudah membagikan ratusan *power thresher*, puluhan *combine harvester* besar, dan alat-alat pertanian modern lainnya kepada para petani se-Indonesia, khususnya di Gorontalo. Mesin ini sangat membantu petani meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk fisik, melalui tim yang ia bangun, Rachmat Gobel juga melakukan pendampingan. Memberi penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengelolaan pertanian.

Bahkan, Rachmat Gobel juga mendatangkan bantuan ahli dari daerah lain atau dari universitas yang memang memiliki keahlian dalam pengelolaan pertanian. Pendampingan yang dilakukan pada pasca panen atau penjualan hasil pertanian, termasuk tidak menganjurkan menggunakan pupuk subsidi.

Sejak dilantik menjadi anggota DPR RI, lewat aspirasi masyarakat yang disampaikannya ke kementerian terkait, Rachmat Gobel juga sudah bersumbangsiah membangun 10 titik irigasi pada tahun 2020, 50 titik irigasi pada tahun 2021. Bantuan irigasi sebesar 200 juta per titik ini, sudah diberikan oleh Rachmat Gobel kepada petani di Gorontalo, Lumajang, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. (\*)



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama petani milenial dalam salah satu kunjungannya ke perusahaan petani yang menggunakan teknologi *hydrofarm*.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel foto bersama kelompok tani milenial bidang usaha perkebunan cabai di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

# Mempertahankan Kepentingan Nasional Dalam Proyek Kereta Cepat dan Garuda Indonesia

**D**ikenal sebagai pribadi yang santun, Rachmat Gobel adalah sosok yang tidak suka berbicara dalam bahasa yang keras, apalagi di depan publik. Namun itu bukan berarti ia tidak bisa melakukannya. Dalam menghadapi hal yang bersifat prinsip, Rachmat Gobel juga tidak akan segan untuk bicara lantang dan ini terlihat jelas dalam pandangannya terhadap kasus proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan PT (Persero) Garuda Indonesia.

Dalam soal kereta cepat yang dibangun oleh perusahaan patungan Indonesia-China PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel melihat, ada sejumlah langkah pemerintah yang perlu disoroti karena sangat mengganggu dalam menjaga kepentingan nasional. Setidaknya ada tiga (3) hal mendasar yang perlu dikritisi yaitu tidak ada sikap tegas pemerintah terhadap KCIC dalam hal terjadinya pembengkakan biaya investasi, penggunaan dana APBN yang melanggar komitmen bahwa proyek ini bersifat *business to business* (btb) dan proses alih teknologi yang tidak jelas.

Mengenai masalah Garuda Indonesia, Rachmat Gobel melihat, pemerintah jangan terlalu cepat membuka opsi untuk melakukan likuidasi terhadap BUMN yang kini terbelit utang dalam jumlah besar ini. Opsi ini harus dibicarakan pada titik terakhir, dan harus mempertimbangkan posisi strategis Garuda sebagai *flight carrier* dan berbagai kepentingan nasional yang diemban oleh perusahaan selama ini. Dalam menentukan apakah

Garuda harus likuidasi, tidak bisa hanya didasarkan pada perhitungan faktor bisnis atau finansial semata.

### **Lika Liku Proyek Kereta Cepat**

Sejatinya, Rachmat Gobel adalah pendukung pembangunan kereta cepat yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, meski memiliki kedekatan dengan Jepang, bahkan ia adalah Ketua Asosiasi Persahabatan Indonesia-Jepang dan memiliki preferensi terhadap negara Matahari terbit ini, Rachmat Gobel tidak pernah mempermasalahkan atau mengkritisi pemerintah ketika lebih memilih menggandeng China ketimbang Jepang dalam menggarap proyek ini.

Dilihat dari sejarahnya, perjalanan proyek kereta cepat ini memang penuh lika-liku. Gagasan pembangunan kereta cepat sudah ada sejak era Presiden SBY. Seperti dilaporkan majalah Tempo, pada April 2011 Kementerian Perhubungan membuat Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, yang di dalamnya memuat program kereta cepat Jakarta-Surabaya pada 2030. Lalu pada Oktober 2011, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggagas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Untuk mewujudkan gagasan itu, pemerintah meminta bantuan teknis pemerintah Jepang. Permintaan ini dipenuhi dengan menugaskan Japan International Cooperation (JICA) melakukan prastudi dengan menggunakan hibah US\$ 500 ribu. Studi awal ini selesai pada Maret 2012. Pada Januari 2014 dilakukan studi kelayakan tahap pertama, dengan tetap dibiayai dana hibah Jepang US\$ 3,5 juta. Namun sampai masa periodenya berakhir, pemerintahan SBY pada saat itu tidak berani mengambil keputusan atas hasil studi ini.

Kemudian, entah atas inisiatif siapa, saat kunjungan ke China pada Februari 2015, Presiden Jokowi yang baru beberapa bulan dilantik menggantikan SBY, membicarakan kemungkinan kerjasama pembangunan kereta cepat. China tampaknya tertarik. Lalu Menteri BUMN yang saat itu dijabat Rini Soemarno meneken MoU dengan Negara Tirai Bambu ini untuk rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. China kemudian melakukan studi kelayakan yang diberitakan menghabiskan dana US\$ 5 juta.

Langkah Rini itu menandai terjadinya persaingan sengit Jepang vs China dalam memenangkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam waktu singkat yaitu pada 11 Agustus 2015, China mengirim proposal dengan mengajukan biaya investasi US\$ 5,585 miliar. Jepang tidak tinggal diam, merevisi proposal yang pernah dibuat di era SBY, pada 26 Agustus 2015 negara ini mengajukan penawaran US\$ 6,223 miliar.

Rombongan anggota Komisi VI DPR RI di depan terowongan jalur kereta cepat sesuai melakukan kunjungan kerja ke lapangan di kawasan Walini, Jawa Barat.







Wakil Ketua DPR/RI/Korinbang Rachmat Gobel berdiskusi dengan direksi PT KAI tentang berbagai tantangan dan prospek transportasi kereta di masa datang.

Namun pada September 2015 muncul rumor bahwa proyek kereta cepat ini dibatalkan. Rumor ini sempat dibenarkan Menko Perekonomian saat itu Darmin Nasution. Seperti ditulis Majalah Tempo, mengutip pendapat Presiden Jokowi, Darmin mengatakan, alasan pembatalan itu karena jarak Jakarta-Bandung yang hanya 150 km tak layak untuk kereta cepat. Pernyataan ini mendapat reaksi dari Jepang sehingga Duta Besar Jepang untuk Indonesia saat itu Tanizaki Yasuaiki menjambangi Kantor Menko Perekonomian. Pertemuan itu berlangsung pada 23 September 2015.

Namun dalam kesempatan itu Darmin memberi pernyataan yang berbeda. Kepada Tanizaki, seperti diberitakan berbagai media, Darmin menjelaskan, proyek tetap dilanjutkan dan diserahkan kepada Kementerian BUMN atau tidak lagi berada di bawah Kementerian Perhubungan. Juga dikatakan, proyek ini dijalankan dengan beberapa syarat yakni tidak menggunakan dana APBN baik langsung maupun tidak langsung atau murni *b to b*. Selain itu juga ditegaskan bahwa proyek ini tidak mendapat jaminan pemerintah.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam gerbong Kereta Wisata.

Secara tiba-tiba, pada 1 Oktober pemerintah melalui Rini Soemarno langsung mengumumkan bahwa proyek ini akan digarap oleh China. “Begini, soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah dan ini transaksi *b to b* karena BUMN dengan BUMN,” ujar Rini saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2015), seperti dimuat Kompas.com.

Menanggapi keputusan itu, Menteri Perhubungan saat itu Ignasius Jonan sempat mengingatkan agar petimbangannya jangan hanya soal biaya yang lebih murah, tapi yang utama justru aspek keselamatan. Namun Rini mengatakan, pemerintah ingin proyek ini bersifat *b to b* dan China menyetujuinya. Faktor inilah yang diduga menjadi alasan Jonan tidak menghadiri acara *groundbreaking* proyek ini oleh Presiden Jokowi pada 21 Januari 2016, di perkebunan teh Mandalasari, Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat.



Presiden Joko Widodo dalam satu kunjungan kerjanya menjelaskan kepada media massa mengenai progress pembangunan konstruksi kereta cepat Jakarta-Padalarang (kiri) dan pembangunan konstruksi light rail transit (LRT) rute Jatimulya (Bekasi)-Cawang (Jakarta Timur). (Foto: Dokumentasi KCIC).

Secara resmi ada tiga alasan dikemukakan Rini mengenai alasan mengapa memilih China ketimbang Jepang. Pertama, China menawarkan akan menggunakan skema *b to b*. Kedua, tidak menggunakan dana APBN. Ketiga, tanpa meminta jaminan pemerintah. Di balik itu ada hal lain yaitu janji transfer teknologi.

Meski menerima, Dubes Tanizaki sempat mengemukakan kekecewaannya. Pasalnya, Jepang telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melakukan studi awal atas permintaan Indonesia sendiri. Tidak kurang dari US\$ 4 juta dana hibah Jepang yang disalurkan melalui JICA. Kemudian teknologi yang ditawarkan Jepang jauh lebih tinggi, termasuk dari sisi keamanan.

Tidak hanya pemerintahannya, masyarakat Jepang juga banyak yang kecewa dan ini tentu bisa dimaklumi. Seperti dikatakan Rachmat Gobel, bagi masyarakat Jepang teknologi kereta cepat Shinkansen yang ditawarkan



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam kunjungan kerja ke kantor pusat PT (Perum) Kereta Api Indonesia di Bandung.

Jepang bukan sekadar barang industri, tapi sudah menjadi simbol dan kebanggaan. Teknologi ini telah teruji, dan bahkan teknologi yang ditawarkan China juga berawal Shinkansen yang kemudian mereka kembangkan sendiri.

Pemerintah Indonesia bergerak cepat, pada 16 Oktober 2015, langsung dibentuk perusahaan patungan Indonesia-China yaitu PT KCIC. Pemegang sahamnya, 60% dari Indonesia yang diwakili PT Pilar Sinergi BUMN yang merupakan konsorsium PT Wijaya Karya (selaku *leader*), PT Jasamarga, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Kereta Api Indonesia. Saham China 40% yang diwakili *China Railway* atau juga disebut Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Perusahaan ini adalah konsorsium China Railway International Co. Ltd (selaku *leader*), China Railway Group Ltd, Sinohydro Corporation Ltd, CRRC Coporation Ltd, dan China Railway Signal and Communication Corp.

Sebelum pembentukan PT KCIC diumumkan, pemerintah terlebih dahulu telah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) No 107 Tahun 2015 tentang

Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perpres ini ditandatangani 6 Oktober 2015 yang dengan ditegaskan menyebutkan, proyek ini tidak boleh menggunakan dana APBN dan tak mendapatkan jaminan pemerintah seperti tertuang pada Pasal 4 (2).

Perpres ini juga mewajibkan untuk memaksimalkan menggunakan kandungan lokal seperti dimuat pada Pasal 6 (1). Dalam Pasal 6 (2) ditegaskan tentang keharusan alih teknologi. Selanjutnya pada Pasal 7 disebutkan, pemerintah juga memberi fasilitas berupa kemudahan perizinan, biaya perizinan, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan.

Setelah berlangsung 6 tahun, keputusan pemerintah menggandeng China tengah menghadapi ujian berat. Semua persyaratan yang diberikan pemerintah sudah diterabas. Penyelesaian proyek molor, dari dijadualkan tuntas 2018 dan beroperasi 2019, kenyataannya sampai akhir tahun 2021 pengerjaannya masih berlangsung. Biaya investasi juga terus membengkak. Janji tidak akan menggunakan dana APBN, kenyataannya pemerintah telah mengucurkan dana untuk mem-backup kelangsungan proyek ini. Inilah yang kemudian melahirkan pertanyaan besar, apakah pemerintah telah mengkaji dengan sepenuhnya validitas kelayakan proyek yang ditawarkan China?

Dalam pandangan Rachmat Gobel, munculnya pertanyaan itu bisa dimaklumi karena konsekuensinya terhadap kepentingan nasional sangat besar. Pembengkakan biaya investasi (*over run*) akan berdampak besar pada kemampuan pengembalian dana investasi itu sendiri. Bisa dipastikan, masalahnya akan bermuara risiko kenaikan tarif dan kualitas pelayanan kereta ini kepada masyarakat luas.

KCIC sudah dua kali mengumumkan *over run*. Pertama pada 2018, perusahaan ini mengatakan biaya investasi naik menjadi US\$ 6,071 miliar atau setara Rp 86,5 triliun. Kedua pada Oktober 2021, KCIC kembali mengumumkan biaya investasi naik lagi menjadi US\$ 7,97 miliar atau setara Rp 114,24 triliun. Angka sudah sekitar 43% lebih besar dari penawaran awal yaitu US\$ 5,585 miliar, bahkan sudah melewati angka yang diajukan Jepang US\$ 6,223 miliar.

Beban berat proyek ini semakin terasa, karena 75% dari biaya pembangunan berasal dari pinjaman China, hanya 25% dari modal KCIC. Meski dikatakan pinjaman ini tidak dijamin pemerintah, tapi fakta bahwa ada empat (4) BUMN yang terlibat sebagai pemegang saham tentu tidak bisa menghilangkan kekhawatiran dampaknya pada pemerintah dan akhirnya juga akan menjadi beban rakyat banyak.

Sayangnya, tidak ada sikap yang tegas pemerintah terhadap kinerja KCIC. Alih-alih memberi sanksi, pemerintah malah merevisi Perpres No 107 Tahun

2015 dengan mengeluarkan Perpres No 93 tahun 2021. Pada Perpres yang baru ini, pemerintah seakan-akan mengamini saja terjadinya pembengkak biaya investasi, padahal nilainya sudah jauh lebih besar dari proposal awal, bahkan jauh melebihi penawaran Jepang.

Selain mengalihkan pimpinan konsorsium BUMN dari PT Wijaya Karya ke PT KAI, melalui Pasal 2 Pepres No 93 tahun 2021, pemerintah juga melakukan perubahan trase dari Jakarta-Walini-Bandung menjadi Jakarta-Padalarang-Bandung sehingga jalurnya menjadi lebih singkat.

Yang paling kontroversial adalah perubahan Pasal 4 Ayat (2) yaitu pemerintah memberi izin untuk menggunakan dana APBN. Kemudian pasal 3 A ayat (2) yang memuat aturan baru untuk mengatur tentang “pemberian penjaminan pemerintah”. Inilah yang membuat, semua komitmen awal yang diatur pada Perpres No 17 Tahun 2015 menjadi buyar. Tiga janji awal pemerintah bahwa proyek bersifat *b to b*, tak menggunakan dana APBN, dan tak ada penjaminan pemerintah, telah rontok semua. Bahkan pemerintah telah melakukan injeksi melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT KAI sebesar Rp 4,3 triliun.

Semua faktor yang membuat China memenangkan proyek, telah diterabas. Biayanya sudah jauh lebih besar dari pada biaya usulan Jepang. Apakah ke depan ada jaminan tak ada kenaikan biaya lagi? Apakah ke depan ada jaminan tidak ada permintaan subsidi tarif atau tiket?

Berdasarkan semua itulah, Rachmat Gobel melihat harus ada tindakan tegas dan teguran dari pemerintah terhadap KCIC. Konsorsium ini harus dituntut berlaku transparan dan jujur. “Demi kepentingan nasional, buka saja semuanya. Bagaimana dengan perhitungan konsultan sebetulnya agar kita tahu bagaimana masa depan pembiayaan kereta cepat ini. Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,” katanya.

Ia sangat menyayangkan langkah pemerintah memberikan suntikan modal Rp 4,3 triliun melalui skema PMN ke PT KAI. “Pemerintah harusnya konsisten, sesuai prinsip *b to b* maka pembiayaan harus diserahkan sepenuhnya kepada investor. Akibat pandemi Covid-19, Indonesia dihadapkan pada keterbatasan anggaran untuk pemulihan ekonomi, ini harus menjadi prioritas, bukan mengucurkan dana APBN untuk kereta cepat. Demi menjaga kepentingan nasional, semua pihak yang terlibat harus memperhatikan hal ini secara seksama,” kata Rachmat Gobel seperti dikutip berbagai media Minggu (31/10/2021).

Rachmat Gobel juga mempertanyakan realisasi komitmen transfer teknologi yang dijanjikan China. Belum terlihat komitmen ini berjalan

dengan baik. Pelaksana proyek ini adalah *High Speed Railway Contractor Consortium* (HSRCC). Konsorsium kontraktor ini membagi pekerjaan untuk kedua pihak. Indonesia mengerjakan 30% melalui Wijaya Karya, dan 70% dikerjakan oleh kontraktor dari China. Bagaimana realisasinya, masih tanda tanya besar.

Menurut Rachmat Gobel, sewaktu menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Jepang, masalah transfer teknologi ini sudah dibicarakan. Menurutnya, transfer teknologi itu memiliki tiga tahap. Pertama, *transfer of jobs*, yaitu transfer pekerjaan. Jadi, pengerjaannya dilakukan oleh warga Indonesia, bukan oleh asing. Inilah yang dilakukan dalam pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) antara Lebak Bulus-Sudirman, yang juga menggunakan teknologi Jepang. Dengan cara ini, warga Indonesia memiliki pengalaman dalam membangun suatu proyek atau pabrik atau barang.

Kedua transfer teknologi dilakukan melalui *transfer of knowhow*, yaitu bagaimana suatu hal dikerjakan. Ini soal pemahaman dan pengetahuan tentang tata cara dan prosedur pengerjaan sesuatu. Biasanya ini tentang kontraktor dan atau subkontraktor pengerjaan suatu proyek atau produk. Siapa kontraktor pengeboran, siapa kontraktor pemasangan rel, siapa kontraktor instalasi, siapa kontraktor sistem sinyal, dan sebagainya. Intinya ada transfer pengerjaan, bukan sekadar transfer pekerjaanya.

Ketiga, *transfer of product development*. Ini tahap tertinggi: merancang, mendesain, dan membuat teknologinya. Misalnya bisa membuat bor sendiri, membuat rel sendiri, membuat persinyalan sendiri, membuat gerbong sendiri, membuat lokomotif sendiri, dan tentu yang terpenting rahasia teknologi kereta bisa melaju cepat, dan sebagainya. Biasanya yang terpenting adalah arsitekturnya, karena teknologi lainnya bisa dibeli melalui hak cipta. Seperti dulu BJ Habibie merancang N-250 atau Ilham Habibie merancang N-2130. Rancangannya dibuat oleh Habibie, tapi teknologi turbin, mesin, landing gear dan sebagainya membeli dari pabrikan lain.

Jepang, kata Rachmat Gobel, tentu bisa melakukan transfer teknologi pada tingkat pertama dan tingkat kedua. Untuk tingkat ketiga tentu tidak gampang, butuh perjanjian khusus. Seperti Mercedes, BMW, juga Honda dan Toyota misalnya, tentu tidak akan begitu saja memberikan hak ciptanya. Begitu juga Boeing dan Airbus.

Apakah China akan memberikan transfer teknologi pada ketiga tahap itu? Ini yang ditunggu semua orang. Yang pasti, investasi China di seluruh dunia terikat pada skema turn-key project, hal ini sesuai dengan regulasi negara tersebut. Setiap investasi China di negara lain, ada keharusan untuk

pengerjaannya dilakukan oleh warga China. Mengapa? China memiliki penduduk terbesar di dunia, negara ini harus memberikan lapangan pekerjaan yang banyak bagi penduduknya.

Tentu hal itu tak terjadi pada investor dari Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Eropa karena tidak memiliki beban penduduk seperti China. Mereka hanya menaruh pegawai untuk level ahli dan menyangkut kerahasiaan teknologi. Beda dengan China, jika memasuki pembangkit listrik PLTU yang mereka bangun, orang akan mendapati semua tetap dikendalikan mereka. Alat-alat yang digunakan selalu dalam Bahasa Mandarin.

Jadi, apakah pada pengerjaan pembangunan kereta cepat ada *transfer of jobs*? Ini yang harus dialami lagi, demikian pula dengan *transfer of knowhow*. Hal ini harus dilihat siapa kontraktor dan subkontraktornya. Selain itu, dari mana saja material semen, besi, dan juga relnya, apakah memunahi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)?

### **Dukung Penyelamatan Garuda**

Rachmat Gobel juga memberi perhatian khusus pada masalah keuangan yang membelit perusahaan penerbangan nasional PT Garuda Indonesia. Eksistensi BUMN yang menjadi *national flight carrier* harus dipertahankan sekuat tenaga, sehingga jangan terlalu mudah untuk memilih opsi likuidasi.

“Kami harapkan likuidasi menjadi solusi terakhir dan kami mengharap hal itu tidak terjadi. Saya percaya manajemen bisa mencari solusi, dan kami siap memberi dukungan,” kata Rachmat Gobel seperti dikutip berbagai media setelah ia bertemu dengan manajemen Garuda di Kantor Pusat Garuda, Rabu (2/6/2021).

Sebelumnya pada 26 Mei 2021, Rachmat Gobel juga telah membuat pernyataan pers. Ia mendukung upaya penyelamatan Garuda. “Upaya menjaga keberlangsungan usaha Garuda Indonesia sebagai salah satu aset bangsa, tentunya sudah seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak,” katanya.

Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa, lanjut Rachmat Gobel, Garuda Indonesia berperan penting dalam penyediaan layanan konektivitas udara guna memenuhi ketersediaan aksesibilitas masyarakat khususnya di masa pandemi. Pernyataan ini disampaikan setelah sejumlah media memberitakan tentang dokumen milik Kementerian BUMN yang memuat masalah yang dihadapi maskapai penerbangan nasional ini. Dokumen itu antara lain berisi tentang empat opsi yang bisa dilakukan mengatasi masalah Garuda.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama dewan direksi PT (Persero) Garuda Indonesia berdiskusi mengenai berbagai masalah, termasuk beban keuangan yang dihadapi perusahaan penerbangan nasional ini.

Pertama, pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman ekuitas. Kedua, menerapkan *legal bankruptcy* untuk melakukan restrukturisasi kewajiban Garuda seperti bayar utang, biaya sewa, dan pemenuhan kontrak kerja. Ketiga, Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi dengan kemampuan sendiri. Pada saat bersamaan ada maskapai penerbangan lain yang mengambil alih sebagian besar rute yang ditinggalkan Garuda. Keempat, Garuda akan dilikuidasi.

Dokumen itu kian menguatkan kekhawatiran publik terhadap kondisi Garuda. Menanggapi kekhawatiran itulah, pada 2 Juni 2021 Rachmat Gobel didampingi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Martin Manurung dari Fraksi NasDem mendatangi manajemen Garuda. “Alasan bertemu karena



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel meninggalkan kantor PT (Persero) Garuda Indonesia se usai mendapat penjelasan dan manajemen mengenai masalah yang dihadapi perusahaan dan langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit.

berkembangnya berita yang membuat kekhawatiran. Karena Garuda sebagai BUMN, dengan nama besarnya, tentu kami ingin berupaya membantu supaya tetap eksis dan terus berkembang. Harus dicari solusinya, apa yang bisa dilakukan,” kata Rachmat Gobel.

Sebagian besar masyarakat memang mempunyai hubungan emosional yang kuat dengan Garuda Indonesia. Tidak hanya sebagai *flight carrier*, BUMN yang sudah berdiri sejak 28 Desember 1949 atau sehari setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, mempunyai catatan sejarah yang erat dalam perjuangan rakyat. Kelahirannya ditandai dengan penerbangan dua pesawat Dakota DC-3 dari Bandara Kemayoran, Jakarta, menuju Bandara Maguwo, Yogyakarta untuk menjemput Presiden Sukarno untuk kembali

ke Jakarta setelah empat tahun mengungsi di Yogyakarta. Penjemputan ini sekaligus menandai perpindahan kembali ibukota negara dari Yogyakarta ke Jakarta.

Di usianya yang ke-72 tahun pada 2021, perusahaan ini telah jauh berkembang. Mempunyai 90 destinasi di seluruh dunia, melakukan 600 penerbangan per hari dan mengoperasikan 144 pesawat. Berbagai penghargaan internasional pun sudah banyak diraih, terutama tentang kualitas layanan *cabin crew*.

Kini Garuda tengah menghadapi prahara. Sama seperti perusahaan penerbangan lainnya, pandemi Covid-19 telah membuat kinerjanya anjlok. Dalam sebuah rekaman suara yang beredar di publik pada Mei 2021, terdengar suara Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra yang menyampaikan

**Kini Garuda tengah menghadapi prahara. Sama seperti perusahaan penerbangan lainnya, pandemi Covid-19 telah membuat kinerjanya anjlok.**

kepada karyawannya bahwa utang perusahaan sudah mencapai Rp 70 triliun, dan setiap bulan terus bertambah. Kenapa? Pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang harus ditanggung, *gap*-nya sangat besar.

Bulan Mei itu merupakan salah satu kondisi terburuk Garuda. Pendapatan diperkirakan hanya US\$ 56 juta, sementara biaya yang harus ditanggung tidak kurang dari US\$ 136 juta yang terdiri; dari bayar sewa pesawat US\$ 56 juta, maintenance pesawat US\$ 20 juta, avtur US\$ 20 juta, biaya pegawai US\$ 20 juta. Pada Mei itu, menurut Irfan, secara *cash flow* Garuda sudah negatif, dan modal sudah minus Rp 41 triliun.

Ia juga menyampaikan, bisa saja tiba-tiba operasional Garuda berhenti seketika.

Pertama, jika *lessor* melarang pesawat yang mereka sewakan kepada Garuda untuk terbang karena tidak memenuhi kewajiban. Kedua, dipailitkan oleh pihak yang merasa dirugikan Garuda.

Dari sebuah dokumen milik Garuda terungkap, perusahaan ini menghadapi masalah dari dua arah. Pertama, tata kelola korporasi buruk, adanya kerjasama yang memberatkan seperti *mark-up* nilai sewa pesawat, dan kasus suap serta pencucian uang pada 2011-2012. Menurut Bloomberg Garuda adalah *highest aircraft rental cost to revenue in the world* dengan

proporsi biaya kontrak *lessor* terhadap pendapatan mencapai 24,7% atau empat kali lebih besar di atas rata-rata dunia.

Kedua, kondisi diperparah pandemi Covid-19 yang disebut sebagai “*perfect storm*” dan membuat Garuda melayang tersapu. Pendapatan tahun 2020 turun 70% dibandingkan 2019 sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional tiap bulannya yang sekitar US\$ 130 juta– US\$ 150 juta. Dengan kondisi itu, secara teknis sebetulnya Garuda sejatinya sudah bangkrut.

Hal itu diakui Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. “Dengan kondisi saat ini, dalam istilah perbankan ini Garuda sebetulnya *technically bankrupt*, tetapi *legally* belum. Sekarang kami sedang berusaha untuk keluar dari kondisi ini,” katanya.

Seperti dikutip berbagai media massa, per September 2021 ekuitas Garuda sudah negatif US\$ 2,8 miliar sekitar Rp 40 triliun. Liabilitas atau kewajiban ke pihak luar US\$ 9,8 miliar, mayoritas berupa utang kepada *lessor* yaitu US\$ 6,35 miliar. Lainnya utang ke bank US\$ 967 juta, utang dalam bentuk obligasi US\$ 630 juta. Adapun asetnya hanya US\$ 6,9 miliar.

Menurut Rachmat Gobel, dalam masalah Garuda ini, semua pihak diminta untuk melihat secara komprehensif antara lain peran perusahaan selama ini seperti secara konsisten melakukan penyediaan aksesibilitas layanan penerbangan bagi masyarakat. Hal ini juga, tetap dilakukan di masa pengendalian transportasi akibat pandemi Covid19.

Bukan hanya itu saja, kata lanjut dia, di masa pandemi ini Garuda juga berperan sebagai angkutan distribusi logistik esensial seperti pengangkutan bahan baku vaksin, alat medis, hingga distribusi komoditas ekspor nasional. “Ini, tentunya turut memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Dalam upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia, Rachmat Gobel menegaskan, siap membantu menjembatani segala kebutuhan ruang komunikasi bersama *stakeholders* terkait untuk menciptakan ekosistem usaha yang semakin solid bagi Garuda Indonesia. (\*)

**Semua pihak diminta untuk melihat secara komprehensif antara lain peran perusahaan selama ini seperti secara konsisten melakukan penyediaan aksesibilitas layanan.**

# Membangun Indonesia Dari Pinggiran

Pembangunan wilayah perbatasan terus digalakkan. Langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah mewujudkan amanat konstitusi seperti tertuang dalam Amandemen UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijelaskan dalam Bab IXA Pasal 25A Tahun 2000. Secara detail, pasal 25A menjelaskan bagaimana negara harus menjamin penuh wilayah negara sebagai kedaulatan negara yang utuh, demi kesejahteraan segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat.

Wilayah perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia, memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keutuhan wilayah NKRI. Nilai yang strategis itu memiliki berbagai dimensi yang penting, yakni kedaulatan negara, pertahanan keamanan, dan ekonomi.

Untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan, Presiden Jokowi telah mengambil berbagai langkah, dengan target hingga tahun 2024 aktivitas lintas batas negara akan dilayani oleh 26 (dua puluh enam) Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Untuk mewujudkan itu, pada 24 April 2015 Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres No.6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Sampai tahun 2019 telah dibangun 7 (tujuh) PLBN masing-masing di Provinsi Kalimantan Barat (PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Nanga Badau), Provinsi Nusa Tenggara Timur (PLBN Motaain, PLBN Wini, PLBN Motamasin) dan Provinsi Papua (PLBN Skouw).

Selanjutnya, sampai 2024 akan dibangun 18 pos perbatasan, diantaranya 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang. Berdasarkan Inpres ini, terdapat satu PLBN di Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua yang telah dibangun tahun 2020, sementara sepuluh PLBN lainnya masih akan dibangun.

Diantaranya PLBN yang akan dibangun adalah di Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Natuna. Kemudian dua) PLBN di Kalbar yaitu Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan Sei Kelik, Kabupaten Sintang. Selanjutnya empat PLBN di Kalimantan Utara yaitu di Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Labang di Kabupaten Nunukan, Long Midang di Kabupaten Nunukan, Long Nawang di Kabupaten Malinau. Kemudian tiga PLBN di NTT yaitu di desa Oepoli, Kabupaten Kupang dan di Napan Kabupaten Timor Tengah Utara dan satu lagi di Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Pada pada 11 Januari 2021 Presiden kembali mengeluarkan instruksi untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan dengan mengeluarkan Inpres Nomor 1 2021. Inpres ini menyebutkan, sampai 11 Januari 2023, pembangunan wilayah perbatasan akan lebih difokuskan pada perbatasan negara di Aruk (Provinsi Kalimantan Barat), Motaain (Provinsi Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Provinsi Papua).

Mengacu pada Inpres No 1 Tahun 2001, berbagai program pembangunan di tiga kawasan ini ditujukan untuk mendorong; (1) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan negara; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan; (3) penyerapan tenaga kerja di kawasan perbatasan negara, terutama masyarakat lokal dan masyarakat yang terdampak Covid-19; (4) pemerataan pembangunan dan ekonomi di kawasan perbatasan negara.

Dalam Inpres tersebut ditetapkan 60 program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 10 kementerian atau lembaga yang terkait. Program kegiatan tersebut terdiri atas 21 program kegiatan di Aruk, 20 program di Motaain, dan 19 program kegiatan di Skouw.

Pembangunan kawasan Aruk ditekankan untuk mewujudkan kawasan ini sebagai kawasan peningkatan hasil dan pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Terdapat delapan kementerian yang melaksanakan program dan kegiatan pada kawasan ini.

Di Aruk, Kementan akan mengembangkan Kawasan Sentra Produksi Kelapa dan Jeruk, Lada dan pembangunan Pusat Pembenihan dan budidaya padi wawa, dan padi Inbrida. Kemenperin akan mengembangkan industri pengolahan dan kawasan komoditas jeruk, *packaging* komoditas beras, area sentra industri lada, pengembangan Sentra Produksi Tanaman Padi untuk menghasilkan beras premium.

Kementerian PUPR telah merencanakan peningkatan jalan Teluk Atong, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, pembangunan Jalan Nasional di Kabupaten Sambas, pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM), dan pembangunan Jalan Seajar Perbatasan yang merupakan Jalan



Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kedua dari kiri), Menteri Dalam Negeri Tito Karnivan (kedua dari kanan) dan Menteri Pendesaan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar (kanan) tengah mengikuti rapat yang membahas pembangunan daerah perbatasan di DPR. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel yang juga Ketua Tim Pengawasan Pembangunan Wilayah Perbatasan DRPR-RI.

Strategis Nasional di Kalbar. Kementerian Perhubungan akan melakukan pengembangan Terminal Barang dan Penumpang PLBN Aruk.

Kementerian lainnya, Kementerian Perdagangan akan membangun Gudang/Depo Non SRG dan revitalisasi pasar rakyat, Kementerian ESDM membangun SPBU, dan Jaringan Distribusi Listrik. Selanjutnya, Kementerian Desa PDTT meningkatkan Jalan Perbatasan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh dan Kemeninfo meningkatkan Kapasitas Jaringan Telekomunikasi.

Sedangkan 20 program di Motaain sarannya adalah mewujudkan kawasan ini sebagai pusat pelayanan dan pusat distribusi barang dan jasa yang berbasis pertanian dan peternakan terpadu. Di kawasan ini Kemendag akan melakukan revitalisasi pasar rakyat di Tasifeto Timur, Pembangunan Gudang/Depo Non SRG di Tasifeto Timur, dan revitalisasi pasar rakyat



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di sela rapat koordinasi mengenai pembangunan wilayah perbatasan.

di Lamaknen Selatan. Kementerian Perindustrian merencanakan pembangunan Industri Pakan Ternak Ayam di Tasifeto Timur.

Kementan akan membangun Kawasan Peternakan Terpadu Sonis Laloran di Tasifeto Barat, Rumah Potong Hewan Standar Ekspor di Tasifeto Timur, serta Penyediaan Bibit Sapi untuk peningkatan produksi ternak di Tasifeto Timur. Kementerian PUPR menangani jalan yang menghubungkan Atapupu–Oikusi (Republik Demokratik Timor Leste), Penanganan Jalan dalam Kota Atambua yang Terhubung Dengan Jalan Simpang Haliluik, Pembangunan Jalan Masuk Sonis Laloran, Jalan Desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Jalan Penghubung PLBN Motaain – Atapupu, Ruas Jalan Fulur – Nualain – Henes, serta Ruas Jalan Lalu – Turiskain. Kemudian pembangunan Embung Air Baku di Kecamatan Lakmane, Penanganan dan Sumur Bor Air Tanah Dalam,

Kementerian Desa PDTT akan membangun Embung Teknis Naskasa dan Pembangunan Embung Teknis Lookeu, sedangkan Kementerian ESDM membangun SPBU di Motaain dan Jaringan Distribusi Listrik di Kawasan Perbatasan Motaain.

Sementara itu, 19 program di kawasan Skouw targetnya untuk mewujudkan kawasan perbatasan ini sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis pada pengembangan kluster pangan dan sabuk wisata perbatasan. Terdapat tujuh kementerian yang terlibat dalam pembangunan di Skouw. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Pembuatan Kolam Ikan Bagi Kelompok Pembudidaya, Rehabilitasi Tambak Bagi Kelompok Pembudidaya, serta Pembangunan Sarana Budidaya Benih dan Pakan Bagi Kelompok Pembudidaya.

Kementerian Pertanian: Pengadaan Benih Padi Hibrida, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sagu di Skouw Yambe, *Upgrading Rice Milling Unit*, Pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung, dan Pembangunan Pengudangan Beras. Kementerian Koperasi dan UKM: Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi di daerah perbatasan, tertinggal dan pasca bencana. Kementerian ESDM: Pengembangan jaringan distribusi listrik di Distrik Muara Tami dan Abepura, dan Pembangunan SPBU di Skouw.

Sedangkan program kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika: Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Akses Internet dan GSM. Kementerian Perhubungan: Percepatan Pembangunan dan Operasionalisasi Terminal Barang Internasional dan Showcase di Kawasan PLBN Skouw. Kementerian PUPR: Pembangunan Tambatan Perah, Pembangunan Jalan Jeramba di Enggros, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Jalan Provinsi Penghubung Kelurahan Koya Timur – Kelurahan Koya Barat, Pembangunan Jalan Inspeksi Saluran Irigasi Primer Perbatasan dan Pembangunan Jalan Poros Kampung Mosso – Kabupaten Keerom (lebar 4,5 meter).

Kementerian/Lembaga yang diberi waktu dua tahun pelaksanaan yaitu 2021 dan 2022 untuk menyelesaikan program percepatan pembangunan ekonomi di tiga kawasan tersebut. Sumber pembiayaan berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam pelaksanaan Inpres itu perlu ada perhatian khusus. Dari perkembangan terakhir yang diketahui, dari 60 program kegiatan, baru dua program yang telah selesai sekitar 3,33%, 42 program sedang berjalan (70%), dan 16 program masih tertunda, sekitar 26,67%. Dua program yang telah selesai adalah pembangunan jalan inspeksi saluran irigasi primer

perbatasan di Skouw, Jayapura, Papua dan penanganan ruas jalan Fulur-Nualain-Henes, Motaain, Belu, Nusa Tenggara Timur.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, proses percepatan pembangunan di tiga wilayah ini diharapkan dapat berlangsung sebagaimana sesuai rencana agar peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut tetap terealisasikan.

### **Raker Timwas Perbatasan Dengan Pemerintah**

Selaku Ketua Timwas DPR RI, pada 15 Maret 2021 Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mengundang Menteri terkait untuk melakukan rapat kerja. Hadir dalam rapat Mendagri (Kepala BNPP), Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

Dalam rapat Rachmat Gobel antara lain mengingatkan, pendekatan pengelolaan wilayah kini tidak lagi menekankan pendekatan pertahanan dan keamanan seperti sebelum tahun 2008. Sejalan disahkannya UU No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pengelolaan Wilayah Negara, pengelolaan kawasan perbatasan kini tidak dilakukan semata pada aspek pertahanan dan keamanan tapi juga pendekatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan yang semuanya dijalankan secara bersamaan. Pemerintah juga telah membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) untuk provinsi, kabupaten/kota.

Dalam rangka memfokuskan dan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, dewan memberikan apresiasi atas ditetapkannya Inpres No 1 Tahun 2021. Juga disampaikan, pembangunan kawasan perbatasan harus memperhatikan keterlibatan masyarakat sekitar. Selain pembangunan ekonomi yang menjadi perhatian utama, masalah pertahanan dan keamanan harus tetap menjadi perhatian timwas DPR RI.

Sementara itu Mendagri/Kepala BNPP Tito Karnavian menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Tito antara lain mengatakan, pengelolaan perbatasan negara harus dilihat dari dua dimensi yaitu Dimensi Batas Wilayah Negara (*Boundary Dimension*) dan Dimensi Kawasan Perbatasan (*Frontier Dimension*).

Ia juga menekankan, kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama, untuk itu pemerintah tidak berhenti hanya pada pembangunan zona inti di PLBN untuk pelayanan lintas batas (kepabeanan, imigrasi dan karantina), tetapi terus dilanjutkan dengan pembangunan pada zona

pendukung dan memperlancar jalur konektivitas baik akses wilayah di perbatasan maupun ke negara tetangga. Diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi agar kawasan perbatasan dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terpadu dengan wilayah sekitarnya.

Sebagai tindak lanjut Inpres No 1 Tahun 2021, Mendagri selaku Kepala BNPP akan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah pada pertengahan atau akhir Maret 2021, untuk memastikan kondisi di lapangan, akan melakukan peninjauan sekaligus koordinasi teknis langsung bersama pemerintah daerah untuk kawasan Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat; Motaain di Kabupaten Nelu, Nusa Tenggara Timur dan Skouw di kota Jayapura, Papua.

Sementara itu Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa memberikan beberapa penjelasan mengenai agenda kawasan perbatasan dalam konteks lima arahan Presiden RI yaitu; (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengembangan sumber daya manusia; (3) penyederhanaan birokrasi; (4) transformasi ekonomi; (5) regulasi/investasi.

Menurut Suharso Monoarfa, presiden menyetujui untuk dilakukan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain dan Skouw sebagai *pilot project*. Konsep percepatan pembangunan ekonomi di tiga kawasan ini adalah kawasan Aruk dengan isu strategis pengembangan pertanian (padi) dan perkebunan (lada, kelapa, dan jeruk) dibutuhkan prasarana dan sarana untuk pertanian, perkebunan dan perikanan.

Kemudian kawasan Motaain dengan isu strategis pengembangan peternakan sapi dan pertanian, dibutuhkan sarana berupa penyediaan air bersih, sistem transportasi dan logistik, sistem perdagangan *online* (*e-commerce*). Untuk kawasan Skouw isu strategisnya membutuhkan dukungan infrastruktur kelistrikan, pengembangan pusat pertanian dan perdagangan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam paparannya mengatakan, dukungan Kementerian PUPR terhadap Inpres No 1 Tahun 2021, meliputi 17 kegiatan, dengan rincian tiga kegiatan sumber daya air, 12 kegiatan Bina Marga dan dua kegiatan Cipta Karya yang akan diselesaikan pada tahun 2021-2022. Beberapa diantaranya dilaksanakan pada 2021 dan sebagian dilanjutkan pada 2022. Di kawasan perbatasan Aruk akan dilakukan pembangunan bidang jalan dan jembatan dengan target sepanjang 209,24 kilometer. Bidang pemukiman akan dilakukan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jaringan.

Untuk kawasan Motaain, Kementerian PUPR akan membangun dua unit sumur bor air tanah di kecamatan Tasifeto Timur tahun 2021 dan satu

embung air baku di kecamatan Lakmanen Tahun 2022. Bidang jalan dan jembatan dengan target sepanjang 664, 28 kilometer.

Sedangkan di kawasan perbatasan Skouw sudah dibangun saluran irigasi primer di Koya Timir sepanjang 2,4 kilometer (sudah selesai). Bidang jalan dan jembatan, pembangunan jalan poros kampung Mosso sepanjang 30 km. Jalan Jaramba di Enggros sepanjang 5 kilometer, dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan provinsi.

Sementara itu Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam beberapa poin menjelaskan, sesuai Inpres No 1 Tahun 2021 program kementeriannya adalah peningkatan jalan desa Temanjuk di Aruk, sepanjang 2,16 km. Pembangunan jalan masuk Sonis Laloran desa Tukuneno, Motaain, sepanjang 0,8 km dan pembangunan jalan di desa Silawan, Motaain, sepanjang 0,6 km. Kemudian pembangunan embung di Desa Naekasa, Motaain, dengan luas areal yang diairi 6 ha. Pembangunan embung di desa Lookeu, Motaain dengan luas area yang diiri 20 ha.

### **Kesimpulan dan Catatan Raker Timwas**

Dewan memberikan apresiasi atas ditetapkannya Inpres No. 1 Tahun 2021. Model pembangunan kawasan Aruk, Motaain dan Skouw sebagaimana dalam Inpres ini diharapkan bisa mejadi role model bagi pembangunan wilayah perbatasan lainnya. Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan jangan sampai mengabaikan faktor keamanan. Pelibatan masyarakat harus diutamakan untuk meningkatkan nasionalisme bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Timwas DPR RI akan melaksanakan rapat lanjutan dengan beberapa Menteri terkait dan melaksanakan kegiatan raker, RDP, RDPU dengan instansi pusat/daerah dan melaksanakan peninjauan ke lokasi pembangunan wilayah perbatasan secara berkala bersama dengan pemerintah. Hasil kerja Tim Pengawas akan dilaporkan kepada Rapat Paripura DPR RI dan akan mengundang kembali Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Perdagangan, untuk Rapat Timwas Perbatasan berikutnya.

Percepatan pembangunan wilayah perbatasan khususnya dalam pembangunan ekonomi memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, swasta, masyarakat sipil dan masyarakat lokal. Keterlibatan investasi swasta juga diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi, pengemasan dan pemasaran. Pemerintah daerah diminta membuat perencanaan peruntukan tata ruang wilayahnya agar menjadi suatu konsep yang terpadu.



Rombongan Timwas DPR RI Tentang Pembangunan Daerah Perbatasan, dipimpin Yakobus Jacki Uly (tujuh dari kiri) dari Fraksi NasDem, disertai anggota Timwas lainnya dari Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah (tujuh dari kanan) berfoto bersama dengan Bupati Belu, NTT, Agustinus Taolin (baju putih tengah), Administrator PLBN Motaain, Engelberthus Klau (lima dari kanan) disertai dengan beberapa pejabat terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Jumat 12 November 2021.

Patut diperhatikan adanya potensi gangguan seperti kegiatan ilegal, penyelundupan barang, perdagangan gelap narkoba, *illegal trafficking*, dan juga masih adanya tindakan memindahkan patok perbatasan yang dapat mengancam kedaulatan NKRI.

### **Kunjungan ke Wilayah Perbatasan**

Sesuai Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, Timwas DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk mengidentifikasi permasalahan sosial ekonomi dan juga keamanan ke wilayah perbatasan. Tujuannya untuk mencari masukan tentang solusi yang harus dilakukan agar pengelolaan perbatasan dapat berjalan lebih baik lagi.

Semula kunjungan akan dilakukan di ketiga lokasi perbatasan yaitu, di Aruk (Kalimantan Barat), Motaain (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua), namun karena jadwal yang padat dari anggota Timwas, kunjungan baru dilakukan ke Motaain. Kunjungan ke Aruk dan Skouw akan dijadwalkan kemudian hari melihat jadwal anggota tim yang ada.



Rombongan Timwas DPR RI Tentang Pembangunan Daerah Perbatasan, dipimpin Yakobus Jacki Uly (kanan) dari Fraksi NasDem, disertai anggota Timwas dari Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah (kiri), mengunjungi Sumur Sadi, desa Sadi, Kec Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 13 November 2021, didampingi Bupati Belu, NTT, Agustinus Taolin (baju putih tengah) dan beberapa pejabat terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah.

Kunjungan ke PLBN Motaain, Kabupaten Belu, NTT berlangsung 12-14 November 2021 dipimpin anggota Timwas dari Fraksi NasDem, Yakobus Jacki Uly, dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, didampingi Anita Jacoba Gah, Fraksi Partai Demokrat, yang juga dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, Bupati Belu, Agustinus Taolin, Administrator PLBN Motaain, Engelberthus Klau dan beberapa pejabat terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PLBN Motaain diresmikan Presiden Joko Widodo 28 Desember 2016, secara geografis berada di desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT. Memiliki luas 8,5 hektar, PLBN ini terletak 296 km dari kota Kupang dengan waktu tempuh sekitar 7 jam. PLBN Motaain terdiri atas unit-unit bangunan seperti, gedung utama, gedung kargo keberangkatan, gedung kargo kedatangan, wisma Indonesia, mess karyawan, plaza, pasar perbatasan dan area parkir.

Engelberthus Klau dalam perbincangan dengan Jacki Uly pada Jumat 12 November 2021 menjelaskan tentang kegiatan di PLBN Motaain sepanjang pandemi Covid-19. Menurut Klau kegiatan berlangsung seperti biasa, tidak

Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel sebagai Ketua Timwas Pembangunan Perbatasan DPR RI Tim Pengawas (Timwas) Pembangunan Perbatasan DPR RI memimpin rapat konsultasi dengan sejumlah kementerian terkait mengenai pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.



lockdown. Jadwal pelayanan Senin-Rabu pada pukul 09.00-14.00 Wita dan Selasa-Minggu pukul 09.00-12.00 Wita.

Sedangkan Timor Leste menerapkan kebijakan masuk ke Indonesia Senin dan Rabu 09.00 Wita-14.00 Wita. Sedangkan Selasa-Minggu dibuka khusus dengan alasan kemanusiaan bagi orang yang ingin berobat, kedukaan, dan perawatan di rumah sakit.

Menurut Klau, kegiatan ekspor tidak terganggu selama pandemi Covid-19, ada 50-80 kendaraan yang melintasi PLBN Motaain setiap minggunya. Masalah umum lainnya gangguan teknis di bidang komunikasi *online* yang kadang terganggu.

Dalam penjelasannya, Klau mengatakan, ada hambatan dan kendala jembatan di jalan negara satu-satunya yang berada di pintu perbatasan yang belum diperbaiki. Jembatan ini dangkal, mengalami keretakan dan kropos, sehingga ketika airnya meluap dikuatirkan rubuh. Saat ini PLBN melarang kendaraan berukuran berat melewati jembatan ini. Masalah lain seperti penyelundupan, narkoba, dan lain-lain dapat diantisipasi dengan adanya CCTV.

Selain itu juga dibahas mengenai jaringan internet *wifi*. Menurut Klau, sebelumnya memang ada kendala, namun sejak Juni 2021 telah dapat diatasi setelah akses internet tertangani oleh Kemeninfo melalui Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI).

Timwas juga mendapat penjelasan krisis air bersih dan embung-embung di Kabupaten Belu yang menipis jika musim kemarau tiba. Salah satu kendalanya karena kebocoran pipa.

Sebelum menuju ke pos lintas batas di Oepoli, Kabupaten Kupang, rombongan sempat mampir ke Belu. Dalam pertemuan malam hari di rumah dinas, Bupati Belu Agustinus Taolin menjelaskan beberapa masalah seperti infrastruktur jalan, perbaikan jembatan, kesehatan, irigasi, jaringan internet, dan lain-lain yang sebelumnya ada kendala mulai teratasi. Namun menurut dia, Pemda Tingkat II Kabupaten Belu, masih menantikan realisasi anggaran dari pusat terkait dari beberapa proyek yang telah diputuskan dalam Inpres No 1 Tahun 2021 tersebut yang masih dalam on progress dan ditunda.

Sabtu 13 November 2021 dalam persiapan menuju ke pos lintas batas di Oepoli, Kabupaten Kupang, Tim Pengawasan menyempatkan diri mampir di desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang posisinya tidak jauh dari PLBN Motaain. Tim melihat hasil pemboran sumur di desa ini. Dengan kedalaman 60 meter dan debit air dua liter per detik, sumur ini melayani 2.000 orang dan juga untuk irigasi. Timwas juga mendapat penjelasan bahwa pembangunan jalan sepanjang 22 Km akan selesai 31 Desember 2021.

Menanggapi hal tersebut baik Y. Jacki Uly dan Anita Jacoba Gah mengatakan akan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi kepada Ketua Timwas Rachmat Gobel dan nantinya diadakan rapat khusus dengan beberapa menteri terkait.

Jacki Uly menambahkan, kegiatan ekonomi tidak boleh melemah apalagi telah dibangun plaza, pasar, mess pegawai, dan wisma Indonesia untuk menunjang ekonomi di sana. Dia juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur baik PLBN Oepoli, jalan, dan jembatan jangan sampai terhambat dan harus selesai sesuai rencana yang dijadwalkan.

Dari rangkaian keseluruhan paparan selama kunjungan Timwas diharapkan, wilayah perbatasan berpotensi menjadi milestone dan wajah terdepan Indonesia, sebagai cermin kemajuan pembangunan ekonomi yang merupakan tekad Presiden Jokowi. Sejalan dengan butir ketiga “Nawa Cita” yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, wilayah perbatasan tidak bisa dipisahkan dari gagasan kemandirian bangsa.

Pembangunan yang merata dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia harus tetap dikedepankan, tentunya dengan tetap memperhatikan segi pertahanan dan keamanan, karena wilayah yang stabil baik ekonomi dan keamanan adalah kunci bagi kemajuan Indonesia menuju masyarakat adil dan sejahtera. (\*)

# Membangun Semangat Restorasi Dalam Keragaman

“**P**artai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. Kami mengusung mandat konstitusi untuk membangun sebuah negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai prinsip Bhinneka Tungga Ika,” demikian bunyi Mukadimah Anggaran Dasar Partai NasDem.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem menegaskan, partai ini adalah sebuah gerakan perubahan melalui restorasi Indonesia. Gerakan untuk memulihkan, mengembalikan, dan memajukan Indonesia kepada cita-cita proklamasi. Untuk mencapai tujuan itu, Indonesia harus memegang prinsip persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan.

Oleh karena itu, keberadaan Partai NasDem adalah bagian dari perwujudan nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, kekuatan yang demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki martabat dalam pergaulan internasional.

Tidak hanya sebatas berhaluan kebangsaan, Partai NasDem juga merupakan partai religius. Hal ini bisa dibaca pada Garis Besar Haluan Partai: “NasDem berprinsip bahwa nasionalisme dan demokrasi haruslah merujuk pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan nasionalisme sebagai pemersatu bangsa haruslah diisi dengan nilai-nilai spiritualitas. Spiritualitas akan membuat kemajemukan bangsa menjadi anugerah dari Sang Maha Kuasa dan akan



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menjadi imam shalat tawarih dalam salah satu kunjungannya Gorontalo pada Ramadhan 2021 lalu.

melahirkan sikap toleran terhadap setiap bentuk perbedaan yang hadir. Spiritualitas juga akan mampu membuat segala bentuk kontestasi dan persaingan politik menjadi bermartabat.”

Semua itu menjadi panduan bagi Rachmat Gobel dalam menjalankan fungsi sebagai Kader Partai NasDem yang diamanahkan untuk memangku jabatan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang. Ia selalu berusaha sebaik-baiknya menerapkan prinsip kebangsaan dan religiusitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

“Berdasarkan nilai-nilai dasar negara, ideologi partai, realitas sosial masyarakat serta latar belakang keluarga membawa saya kepada pemahaman bahwa perilaku hidup yang religius harus menjadi pendorong kemajuan bangsa. Bukan menjadi penghambat,” kata Rachmat Gobel.

Bagi Rachmat Gobel, sama sekali tidak ada kesulitan dalam mempraktikkan nilai kebangsaan dan religiusitas secara bersamaan. Sejak kecil ia telah akrab dengan nilai-nilai ini karena ayahnya yaitu Thayeb Mohammad Gobel riwayat dalam pergerakan Sarekat Islam yang juga mengedepankan nilai



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menghadiri muktamar Sarekat Islam di Kota Solo, 4 Desember 2021.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama para tokoh di pembukaan muktamar Sarekat Islam di Kota Solo, 4 Desember 2021.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menghadiri acara Natal Gorontalo, 25 Desember 2021.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersilaturahmi kepada Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, 24 April 2021.

kebangsaan. Sarekat Islam adalah organisasi yang dibesarkan seorang tokoh pergerakan kebangsaan HOS Tjokroaminoto. Melalui organisasi ini telah lahir tokoh dan guru bangsa seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muis.

Sampai akhir hayatnya, Thayeb Mohammad Gobel juga aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang dideklarasikan pada 5 Januari 1973 sebagai fusi dari sejumlah partai Islam yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSSI), Persatuan Tarbiyah Islamiah (Perti) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Jas-jas seragam SI dan PPP masih tersimpan rapi di lemari peninggalan Thayeb Mohammad Gobel. Karena itu tak heran jika Rachmat Gobel memiliki darah religiusitas dan kebangsaan yang kuat.

Kedekatan dan nilai-nilai perjuangan Sarekat Islam yang diwariskan almahum ayahnya sampai saat ini masih melekat erat pada diri Rachmat Gobel. Ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk menghadiri berbagai kegiatan oleh organisasi Islam tertua ini seperti Mukhtar yang digelar pada 4 Desember 2021 di Kota Solo, Jawa Tengah.

### **Memahami Sejarah Bangsa**

Tidak hanya dari keluarga, pemahaman Rachmat Gobel terhadap pertautan nilai kebangsaan dan keagamaan juga datang dari pemahamannya terhadap sejarah bangsa yang antara lain ia rujuk dari pidato tokoh proklamator kemerdekaan Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato yang dikenal sebagai hari lahir Pancasila itu, Bung Karno menyatakan, “Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme-agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan!”

Dasar Ketuhanan ini, kata Sukarno, telah menjadi sejarah bangsa dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. “Bagaimana seluruh rakyat Indonesia pada garis besarnya? Kalau pada garis besarnya telah saya *gogo*, saya selami, sudah saya lihat secara historis, sudah saya lihat dari sejarah keagamaan, pada garis besarnya rakyat Indonesia ini percaya kepada Tuhan,” katanya, dalam pidato kursus Pancasila pada 1958.

Latar belakang sejarah yang panjang sebagai masyarakat yang beragama maka bangsa Indonesia tidak lepas dari kehidupan keagamaan. Karena itu, semua agama yang kemudian datang mudah berkembang dan hidup subur. Ini karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius.

Dalam pidato 1 Juni, Sukarno menempatkan sila Ketuhanan pada urutan kelima, sedangkan urutan pertamanya adalah Kebangsaan. Namun urutan

itu kemudian mengalami perubahan pada 22 Juni 1945 dan akhirnya dikukuhkan pada 18 Agustus 1945. Sila Ketuhanan menempati urutan pertama.

Tentang perubahan itu, latar belakangnya dapat dipahami dalam penjelasan Bung Hatta. Menurut Bung Hatta, Pancasila terdiri atas dua lapis fundamen, yaitu fundamen politik dan fundamen moral atau etik agama. “Bagi Bung Karno sendi politik didahulukan, sendi moral menjadi penutupnya,” kata Bung Hatta. Akhirnya, keputusan yang dibuat Panitia Sembilan maupun PPKI yang menjadi keputusan formal pengesahan Pancasila sebagai dasar negara seperti termaktub pada Pembukaan UUD 1945, sila Ketuhanan menempati urutan pertama.

Dengan demikian meletakkan dasar moral di urutan teratas. Hal ini, kata Bung Hatta, yang ikut menjadi anggota Panitia Sembilan, sila Ketuhanan menjadi dasar “yang memimpin cita-cita negara” dan “memberikan jiwa kepada usaha” penyelenggaraan cita-cita negara tersebut. Perubahan ini juga memberikan tambahan pemahaman tentang sila Ketuhanan dari yang dimaksud Bung Karno. “Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin,” kata Bung Hatta. Tak hanya itu, kata Hatta, “Di bawah bimbingan sila yang pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kelima sila itu ikat-mengikat”.

Sila Ketuhanan ini memiliki posisi yang penting, sebagaimana sila Kebangsaan yaitu dasar moral, yang satunya menjadi dasar politik. Keduanya harus berjalan seiring, karena itu, slogan Bhinneka Tunggal Ika menempati posisi yang tak kalah pentingnya karena mengamanahkan persatuan.

Tentang persatuan itu, telah ditangkap dengan baik oleh *founding fathers* dalam Panitia Sembilan. Sila Kebangsaan dinilai masih kurang tegas untuk konteks mempersatukan sehingga bunyinya berubah menjadi Persatuan Indonesia. Di sini kata persatuan menjadi penekanan tersendiri. Selain itu, sesuai Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” telah menempatkan Indonesia sebagai negara religius dan bukan negara sekular, namun juga bukan negara agama. Dasar-dasar inilah yang menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara Indonesia.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama sejumlah pengurus Pondok Pesantren Al-Khairaat Boalemo, Gorontalo, sesuai pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan asrama salah satu pondok pesantren terbesar di provinsi ini.

### **Membangun Politik Persahabatan**

Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Tidak hanya terdiri berbagai suku dan bahasa, agamanya pun beragam. Menurut data BPS, tidak kurang dari 1.340 suku bangsa yang hidup Indonesia dengan berbagai perbedaan budaya yang membentuk keanekaragaman bangsa ini.

Negara Indonesia juga mengakui keragaman kehidupan keagamaan. Agama pendatang, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu merupakan kepercayaan yang diakui keberadaannya. Demikian pula dengan penghayat kepercayaan, atau agama lokal, seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan lainnya. Keanekaragaman semakin luas karena masyarakat juga terafiliasi kepada berbagai organisasi dengan ciri khas masing-masing. Semua diberi hak hidup dan penghormatan yang sama.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mengunjungi jemaat salah satu gereja GPI di desa Karangetan, Gorontalo.

Di dalam agama Islam ada organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama/NU (berdiri 1926, Surabaya), Muhammadiyah (1912, Yogyakarta), Persatuan Islam/Persis (1932, Bandung), Nahdlatul Wathan/NW (1953, Lombok Timur), Persatuan Tarbiyah Islamiyah/Perti (1930, Bukittinggi), Al Jam'iyatul Washliyah/Al Washliyah (1930, Medan), Persatuan Umat Islam/PUI (1917, Majalengka), Mathla'ul Anwar (1916, Pandeglang), Hidayatullah (1973, Balikpapan), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia/DDII (1967, Jakarta), Ikatan Dai Indonesia/Ikadi, Wahdah Islamiyah (1988, Makassar), Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia/ICMI (1990, Jakarta), Sarekat Islam/SI (1912, Solo), Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia/PITI (1961, Jakarta), Al Khairaat (1930, Palu).

Atas prakarsa pemerintah, untuk memayungi organisasi keagamaan Islam dibentuklah Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada 1975. Selain itu juga terdapat organisasi Islam pemuda dan pelajar yang independen, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam/HMI (1947, Yogyakarta) dan Pelajar Islam Indonesia/PII (1947, Yogyakarta). Sedangkan ormas sejenis yang lain umumnya bernaung di bawah ormas Islam besar sebagai payung seperti PMII, IPNU, IPPNU, IMM, dan sebagainya.

Sedangkan ormas keagamaan lainnya adalah Konferensi Waligereja Indonesia/KWI (1955) untuk Katolik, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia/PGI (1950) untuk Kristen, lalu ada Perwalian Umat Buddha Indonesia/Walubi untuk Buddha, Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI (1959) untuk Hindu, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia/MATAKIN (1923) untuk

Konghucu. Semua itu merupakan organisasi payung, karena di bawahnya masih terdapat lembaga-lembaga perkumpulan sendiri-sendiri. Bahkan untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdapat ratusan organisasi.

Keanekaragaman itu merupakan potensi sekaligus tantangan tersendiri. Tantangan ini dari kenyataan, segala hal yang menyangkut keyakinan dan tata nilai yang beragam selalu memiliki sisi manifes dan sisi laten. Sisi manifes selalu bernilai positif dan luhur, namun sisi laten justru berkebalikan

mempunyai potensi menimbulkan konflik dan persaingan.

Sisi laten inilah yang seperti ditekankan Bung Karno, sikap hormat-menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaan menjadi sangat penting dan harus selalu dijaga. Tidak ada egoisme. Pada titik inilah pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai *weltanschauung*, sebagai pandangan dunia, sebagai *common platform*.

Oleh karena itu, dalam pandangan Rachmat Gobel, meningkatkan kemampuan dalam komunikasi dan interaksi sesama anak bangsa menjadi sangat penting. Banyak hal bisa diselesaikan dengan lebih mudah jika komunikasi dan interaksi sesama anak bangsa berlangsung damai dan penuh persahabatan, termasuk dalam politik.

“Politik persahabatan harus menjadi langgam utama dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini bukan saja karena Indonesia negeri yang bhinneka dan luas, tapi juga karena kondisi geografis sebagai kepulauan yang

**Keanekaragaman itu merupakan potensi sekaligus tantangan tersendiri.**

memudahkan meletupnya konflik. Selain itu juga karena kemiskinan yang besar dan ketimpangan yang masih lebar, dua hal yang bisa menjadi bahan bakar yang efektif untuk menghanguskan kehidupan sosial,” kata Rachmat Gobel.

Bukan hanya sebagai jargon, membangun politik persahabatan telah menjadi bagian inheren dalam pribadi Rachmat Gobel dalam menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, baik dalam berinteraksi secara formal maupun nonformal. Bahkan dalam menjalankan diplomasi, politik persahabatan telah menjadi ciri khasnya baik ketika menjadi Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk Jepang, maupun dalam menjalankan diplomasi ke berbagai negara.

Bagi Rachmat Gobel, politik persahabatan itu telah dicontohkan dengan bagus sekali oleh generasi *founding father*. Para bapak bangsa memiliki politik persahabatan yang luhur. Usai berdebat di parlemen, mereka bisa berboncengan sepeda bersama, saling berkunjung ke rumah masing-masing, bahkan urunan membelikan rumah untuk yang belum punya rumah.

Nilai-nilai itulah, lanjut Rachmat Gobel, yang harus terus dirawat dan dilestarikan. Karena karakter seperti itu yang menjadi ciri dari bangsa-bangsa maju. Hubungan yang dibangun dalam semangat persahabatan akan membangun sinergi di antara anak bangsa, melahirkan berbagai ide dan gagasan cemerlang dan membentuk karakter yang kuat bagi bangsa ini.

Politik persahabatanlah membuat Rachmat Gobel selalu berupaya merespon dengan cepat berbagai masalah yang dihadapi. Sebagai ilustrasi, saat terjadi Badai Siklon Seroja di Flores yang menimbulkan banjir dan korban jiwa hingga lebih dari 100 orang pada April 2021 lalu, ia langsung melakukan komunikasi langsung dengan Uskup Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Mgr Fransiskus Kopong Kung. Padahal saat itu Rachmat Gobel juga tengah ketar-ketir karena pada saat badai berlangsung ia tengah melakukan kunjungan kerja ke Sumba, NTT.

Namun segala khawatir dan was-was pada dirinya langsung hilang begitu mendengar kabar bahwa badai telah membuat sejumlah wilayah NTT kebanjiran dan memakan banyak korban. Rachmat Gobel yang juga merasakan drama badai ini membayangkan penderitaan yang harus dihadapi penduduk yang terkena banjir. Ia langsung menghubungi dan berkomunikasi dengan Keuskupan Larantuka—membawahi Flores Timur dan Lembata—untuk menawarkan bantuan. Korban terbesar berasal dari dua kabupaten ini.

Berkoordinasi Ketua DPW Partai NasDem NTT, Rachmat Gobel menginstruksikan untuk membangun posko bencana dan dapur umum.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berramah tamah dengan Ketua Umum MUI merangkap Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, 20 Maret 2021.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel di damping oleh dua anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Nusa Tenggara Timur beserta uskup di Keuskupan Larantuka,, melakukan kunjungan ke Pulau Sumba, April 2021.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang  
Rachmat Gobel bersama santri  
di Pondok Pesantren Hubulo  
Gorontalo.

“Saya menyampaikan simpati dan duka cita kepada Uskup serta apa yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat yang berduka. NasDem segera membentuk posko bencana dan dapur umum untuk membantu korban bencana,” kata Rachmat Gobel seperti dikutip sejumlah media.

Ia juga memanfaatkan momen hari raya keagamaan dalam membangun komunikasi dan interaksi yang lebih kuat dengan dengan lembaga dan tokoh-tokoh agama. Setiap lebaran Idul Adha misalnya, Rachmat Gobel selalu menitipkan kurban berbagai organisasi Islam. Pada lebaran Idul Adha 2021 misalnya ia menitipkan hewan kurban ke Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta, dan Mathla’ul Anwar, Pandeglang, Banten.

Terinspirasi semangat *founding fathers* bangsa, menurut Rachmat Gobel, dalam berinteraksi dan komunikasi tak harus ada kejadian atau bersifat materi. Ia selalu menjaga silaturahmi secara rutin seperti dengan Kiai Said Aqil Sirodj, Ketua Umum PBNU maupun dengan Rois Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Silaturahmi juga dilakukan dengan pimpinan pondok pesantren maupun pemimpin gereja.

Pesan politik persahabatan ini juga ia kumandangkan pada berbagai kesempatan seperti saat menghadiri ibadah Ramadhan. Selama menjalankan ibadah Ramadhan 2021 di Gorontalo, Rachmat Gobel menggelar shalat tarawih berjamaah di aula di depan rumahnya, di Tapa yang dilokasi ini berdiri rumah adat warisan kerajaan Bolango.

Sementara itu, saat menghadiri acara Natal di Gorontalo, Rachmat Gobel menyampaikan pesan bahwa sebagai bangsa yang majemuk, semua pihak harus saling bahu membahu dan hidup dalam harmoni untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan makmur. Indonesia, katanya, adalah negara kaya dan semua potensi harus dijaga untuk masa depan bangsa yang lebih baik. “Sebagai wujud dalam membangun keharmonian, saya sengaja memperpanjang kunjungan kerja ke Gorontalo ini agar bisa ikut hadir dalam acara silaturahmi Natal ini,” kata Rachmat Gobel.

Di tengah berbagai kesibukan agenda kerja, ia selalu berupaya untuk bisa ikut dalam berbagai acara keagamaan seperti peringatan Mualid Nabi Muhammad SAW. Selain untuk mendengar nasihat ulama, kehadirannya dalam berbagai acara keagamaan ini sekaligus untuk menangkap aspirasi masyarakat. “Dalam acara seperti ini, kita ingin memperkuat iman kita, sekaligus memperkuat silaturahmi dengan masyarakat,” kata Rachmat Gobel saat menghadiri peringatan Maulid Nabi SAW di Mesjid Agung Baiturrahim Gorontalo yang diisi tausiah ulama terkenal Ustadz Das’ad Latif, pada Sabtu (13/11/2021).

## **Pesantren dan Penguatan Karakter**

Seperti kata Bung Hatta, sila pertama Pancasila memimpin sila yang lain, Ketuhanan harus menjiwai sila-sila yang lain. Tuhan adalah *prima causa* dan semua manusia sama dan sederajat. Tuhan satu-satunya yang di atas manusia.

Dengan pemahaman yang seperti itu, maka sebagai masyarakat religius sudah seharusnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang percaya diri. Tak harus minder dan inferior di hadapan bangsa-bangsa lain. Semua manusia hakikatnya sama, tak ada ras yang lebih unggul daripada ras yang lainnya. Jika ada perbedaan, itu lebih karena hasil usahanya. Semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi bangsa yang unggul.

“Kita tidak boleh minder dan rendah diri di hadapan bangsa lain. Tapi kita juga tak menjadi sombong. Kita sederajat. Dengan prinsip ini maka Indonesia memiliki rasa percaya diri dalam pergaulan internasional sekaligus percaya diri dalam mengejar *national interest*,” kata Rachmat Gobel.

Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang religius. Simbol religiusitas tampak dari sebutan Aceh sebagai Serambi Mekkah, Gorontalo sebagai Serambi Madinah, Manado dengan patung Yesusnya, Manokwari sebagai Kota Injil, Bali sebagai Pulau Dewata. Di setiap daerah selalu ada petilasan orang-orang suci dan keramat, bertebarannya rumah-rumah ibadah. Semua itu menunjukkan fakta ekspresi keberagaman masyarakat Indonesia.

Dengan kenyataan ini, moralitas agama yang mengajarkan tentang kesetaraan manusia, harus menjadi nilai-nilai yang membangun kepercayaan diri dan kuat karakter. Bukan seperti yang dinyatakan Mochtar Lubis maupun Koentjaraningrat yang mengatakan, kondisi manusia Indonesia yang masih lemah karakter dan tidak percaya diri.

Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Inilah yang harus dijawab bersama. Moral agama dan ekspresi keagamaan ternyata bisa menjadi sesuatu yang

**Simbol religiusitas tampak dari sebutan Aceh sebagai Serambi Mekkah, Gorontalo sebagai Serambi Madinah, Manado dengan patung Yesusnya, Manokwari sebagai Kota Injil, Bali sebagai Pulau Dewata.**

tak selalu *in line*. Ternyata di antara moral dan ekspresi masih ada variabel lain.

Pendidikan dan ajaran agama, moral agama, nilai-nilai agama tak bisa begitu saja melekat di dalam setiap manusia. Ia butuh internalisasi melalui para penafsirnya. Di sinilah pentingnya pendidikan. Karena itu pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses pemajuan bangsa, termasuk dalam hal pendidikan agama. Dalam kaitan ini, Rachmat Gobel memiliki kepedulian terhadap pemajuan pendidikan keagamaan.

Melalui program aspirasi Dewan yang diambil dari Kementerian PUPR, Gobel membantu pembangunan asrama santri di pesantren milik Al Khairaat di Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Pesantren yang dipimpin Ustad Abdul Ghali itu telah berumur 53 tahun. Asrama ini memiliki kapasitas 56 kamar. Asrama itu akan langsung dilengkapi dengan dipan susun dua dan kasurnya serta lemari. Nilai proyek pembangunan asrama tersebut Rp 2,3 miliar. “Ini sumbangan terbesar yang pernah diterima pesantren ini,” kata Abdul Ghali dalam sambutannya, Kamis, 29 Juli 2021.

Rachmat Gobel melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan pesantren tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan, pesantren merupakan pilar penting pembangunan sumberdaya manusia. Pendidikan, selain menekankan iptek, juga harus menguatkan iman dan takwa (imtak). Ada filosofi penting yang harus dipahami bersama yaitu sebelum memproduksi sesuatu, yang harus dilakukan lebih dulu adalah membangun sumberdaya manusianya.

“Kita ingin Gorontalo menjadi provinsi termakmur nomor lima di Indonesia dan pesantren harus berkontribusi menyiapkan sumberdaya manusianya. Dengan meningkatkan kualitas lembaga, sarana, dan prasarananya, kita harapkan kualitas sumberdaya lulusannya pun akan meningkat dengan lebih baik lagi,” katanya.

Sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pesantren atau dalam bahasa lain disebut dayah, meunasah, atau surau memiliki peran yang strategis, punya sejarah yang panjang sejak sebelum Indonesia merdeka. Penyelenggaraan dan keberadaan pesantren harus dan telah menjadi bagian penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesantren sebagai lembaga sosial telah berperan besar bagi perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam kerangka itu pulalah, Partai NasDem sedang memperjuangkan gelar pahlawan untuk Syaikhona KH Kholil Bangkalan, Madura. KH Kholil adalah guru Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari. KH Hasyim Asy’ari adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan Rois Akbar atau ketua umum pertama PBNU. Sebelum mendirikan NU, kakek KH Abdurrahman Wahid

dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, itu meminta restu dari KH Kholil. KH Kholil memang menjadi guru para tokoh NU. Peran dan jasa KH Kholil sangat besar, namun hingga kini belum mendapat gelar pahlawan dari negara.

Dalam rangka mewujudkan keinginan itu, pada 20 Maret 2021 Rachmat Gobel membuka seminar nasional tentang Syaikhona Kholil di Surabaya. Seminar ini diadakan oleh Fraksi Partai NasDem MPR RI dan DPW Jawa Timur. Keputusan untuk memperjuangkan Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional merupakan keputusan resmi Partai NasDem sejak Desember 2020. Seminar itu juga dihadiri Rois Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Syaikhona Kholil memiliki nama lengkap Muhammad Kholil bin Abdul Lahir. Beliau lahir 9 Shafar 1252 H atau 25 Mei 1835 dan wafat pada 29 Ramadhan 1343 H atau 24 April 1925. Beliau menjadi guru para pendiri NU seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri. Muridnya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui pendidikan, pesantren, dan keteladanannya, KH Kholil telah menjadi inspirasi tentang wujud Islam Indonesia, nilai-nilai moral, dan nasionalisme di kalangan santri.

Mereka itulah yang kemudian menjadi figur gerakan kebangsaan dan gerakan kemerdekaan. Melalui syiar agama dan lembaga pendidikan maka lahirlah gerakan melawan penjajahan Belanda. Karena itu, pada 15 Februari 2019, Partai NasDem membentuk tim untuk melakukan riset dan sosialisasi ke berbagai pihak untuk memperjuangkan KH Kholil untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.

“Ini harus menjadi upaya bersama semua komponen bangsa untuk memperjuangkan Syaikhona Kholil untuk menjadi pahlawan nasional,” kata Gobel.

Pengusulan gelar pahlawan nasional ini merupakan bagian dari membangun nilai-nilai dan keteladanan agar bangsa memiliki rujukan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan tentang pengusulan gelar pahlawan nasional bagi Syaikhona Kholil. Pertama, pesantren yang ia asuh memiliki murid yang tersebar di berbagai daerah. Mereka inilah yang kemudian menjadi pengasuh pesantren di daerahnya masing-masing seperti di Madura, Jawa, dan Bali. Kedua, Syaikhona Kholil merupakan sentrum pengkajian ilmu sehingga para santri berdatangan untuk beguru, tak hanya dari Jawa, tapi juga dari Tanah Melayu.

Ketiga, Syaikhona Kholil membangun dan memimpin jaringan ulama sebagai kekuatan kultural dalam kehidupan sosial politik bangsa. Keempat, Syaikhona Kholil menjadi pelopor implementasi instrumen pendidikan

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberi sambutan dalam seminar mengenai peran ulama besar Syaikhona Kholil yang merupakan guru para pahlawan. Seminar diselenggarakan DPW Partai NasDem Jawa Timur dalam rangka mengusulkan agar tokoh ulama ini menjadi Pahlawan Nasional.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama sejumlah tokoh ulama Jawa Timur dan panitia Seminar Nasional Syaikhona Kholil Guru Para Pahlawan.



Islam dalam membumikan ajaran Islam sehingga menjadi basis perlawanan terhadap kolonialisme. Kelima, Syaikhona Kholil menjadi pencetak kader ulama dan pahlawan nasional.

Keenam, Syaikhona Kholil mengajarkan nilai-nilai Islam Indonesia yang universal, moderat, terbuka, dan toleran. Ketujuh, Syaikhona Kholil melakukan penguatan nasionalisme di kalangan ulama dan santri serta menjadi embrio lahirnya pergerakan kebangsaan di lingkungan pesantren. Kedelapan, Syaikhona Kholil menjadi penentu lahirnya NU. Kesembilan, Syaikhona Kholil melahirkan santri yang menjadi simpul perlawanan terhadap kolonialisme.

Keluarga besar Rachmat Gobel juga membangun pesantren di Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Pesantren ini merupakan wasiat Thayeb Mohammad Gobel. Pesantren didirikan pada 1989, yaitu Pesantren Hubulo. Nama pesantren ini menggunakan nama moyang keluarga Gobel, dan secara kebetulan lokasinya di kaki bukit tempat kuburan Hubulo, raja Bolango yang berkuasa pada 1752-1772. Hubulo adalah raja Bolango pertama yang beragama Islam. Karena itu ia memiliki gelar Aulia Salihin, orang saleh awal.

Berkat ketokohnya, khususnya karena pengetahuan agama dan silaturahmi yang bagus, Hubulo disegani oleh pembesar dari kerajaan lain di Gorontalo – ada lima kerajaan utama yang membentuk persekutuan di Gorontalo, yaitu Gorontalo, Bolango, Limboto, Suwawa, dan Atinggola.

Posisi Bolango kemudian digantikan Boalemo setelah Bolango hijrah ke pedalaman karena menolak bekerja sama dengan Belanda. Kuburan Hubulo (lahir 1809 dan wafat 1793) adalah salah satu makam yang dikeramatkan di Gorontalo.

Hubulo adalah pengucapan bahasa lokal untuk frasa Hubbulloh, cinta Allah. Dari kata Hubulo itu kemudian bermetamorfosis menjadi Gobel. Ini gara-gara pengucapan penjajah Belanda terhadap kata Hubulo. Orang Belanda mengucapkan Hubulo menjadi Hubel. Lalu pengucapan Hubel itu ditulis menjadi Gobel. Jadilah kata Hubbulloh menjadi Hubulo, dan akhirnya Gobel.

Dengan pembangunan pesantren tersebut, jejak dakwah keturunan Hubulo terlembagakan. Pesantren ini memiliki posisi yang strategis di kaki bukit, di tepi Sungai Bolango, dan dalam hamparan lembah dengan lanskap bukit-bukit di belakangnya. Suasana pesantren ini membuat nyaman penghuninya dengan hamparan rumput dan pepohonan yang ditata asri. Pesantren yang asri dan nyaman itu merupakan salah satu pesantren favorit di Gorontalo. (\*)



**Spiritualitas akan membuat kemajemukan bangsa menjadi anugerah dari Sang Maha Kuasa dan akan melahirkan sikap toleran terhadap setiap bentuk perbedaan yang hadir. Spiritualitas juga akan mampu membuat segala bentuk kontestasi dan persaingan politik menjadi bermartabat.**

**(3)**

**LANGKAH  
GORONTALO  
MEWUJUDKAN  
VISI 2051**

**“Optimistis hanya  
akan muncul dalam  
semangat dan  
dedikasi yang tinggi”**

# Misi Besar di Balik Pengembangan Pelabuhan Anggrek dan Rencana Kawasan Produk Halal

Masyarakat Gorontalo harus semakin optimis mewujudkan Visi Pembangunan 2051 yaitu “Dari Daerah 5 Termiskin Menuju 5 Termakmur”. Berbagai sarana dan prasana pendukung kian tersedia, satu diantaranya adalah pengembangan Pelabuhan Anggrek yang sudah bertahun-tahun ditunggu-tunggu, lainnya rencana pengembangan kawasan produk halal. Ada misi besar di balik keduanya yaitu mengubah protret masyarakat bumi Gorontalo dari gambar yang penuh kemiskinan menjadi makmur.

Misi itu pastilah bukan hanya sebatas jargon, tapi adalah cita-cita luhur dari putera Gorontalo sendiri yaitu Rachmat Gobel, dimana dedikasinya sudah terlihat nyata selama ini. Kiprahnya kian bergelora setelah sebagian besar masyarakat Gorontalo menitipkan kepercayaan kepadanya yang ditandai raihan suara tertinggi pada Pileg 2019. Bagi Rachmat Gobel, ini adalah amanah besar yang sifatnya wajib diperjuangkan.

“Mari bersama-sama kita mengubah protret masyarakat Gorontalo, dari provinsi miskin menjadi wilayah makmur. Membangun untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Gorontalo, mengembangkan warisan yang menjadi kebanggaan generasi penerus,” kata Rachmat Gobel saat acara penyerahan pengelolaan pelabuhan Anggrek kepada kepada PT Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) dari pengelola sebelumnya Kantor Unit Penyelenggara Kelas II Pelabuhan Anggrek, pada Selasa (28/09,2001).

Serah terima ini menjadi tanda dimulainya pengembangan pelabuhan Anggrek untuk 30 tahun ke depan. Membangun Anggrek menjadi pelabuhan

hub logistik dan bagian rantai strategis untuk meningkatkan konektivitas. Memperkuat posisi daerah ini sebagai pintu terdepan perdagangan luar negeri untuk kawasan Asia Timur Jauh seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan Hongkong.

Realisasi proyek ini tergolong cepat. Rencana induknya baru disahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Desember 2019 melalui surat keputusan KM No. 263 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Anggrek. Pembiayaannya diputuskan masuk dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN. Pada Juni 2021, Kementerian Perhubungan memutuskan untuk mempercayakan pengembangan Anggrek kepada PT AGIT, proposal konsorsium inilah yang paling meyakinkan sebagai pelaksana KPBU. Pada September 2021 serah terima proyek sudah bisa terealisasi.

Diakui oleh Menteri Budi Karya, semangat investor yang tergabung dalam konsorsium AGIT memang luar biasa dan ini sangat membantu dalam mempercepat realisasi proyek ini. Dalam hitungan komersial, sebetulnya proyek ini tidak bisa dikatakan terlalu menjanjikan. Berada di wilayah 3 T (terluar, terdepan dan tertinggal) sehingga risikonya sangat besar. Namun gairah konsorsium yang sangat tinggi, seperti dikatakan Menhub, adalah energi yang sangat membantu dalam pengembangan pelabuhan Anggrek ke depan.

“Semangat investor tergolong luar biasa, kalau sisi komersial proyek ini sebetulnya tidak begitu menarik. Tapi ada tantangan lain yang mungkin mereka lihat yaitu pengembangan wilayah dan ini bisa menjadi menarik dan memberi prospek yang luar biasa dalam jangka panjang, termasuk mendukung tol laut yang menjadi visi Presiden Jokowi,” kata Budi Karya yang ikut hadir dalam acara penyerahan pengelolaan Anggrek.

Menhub berpesan agar investor selalu ingat akan komitmennya sehingga harapan yang ditumpukan pada pengembangan pelabuhan Anggrek dapat berjalan sesuai target. Tidak sebatas bisa meningkatkan konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo serta kawasan sekitarnya, tapi juga memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian dan daya saing Indonesia, terutama untuk Kawasan Timur.

### **Lokomotif Pembangunan**

Sebagai putera daerah dan juga anggota legislatif dari daerah pemilihan Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel sangat antusias dengan pengembangan pelabuhan Anggrek. Ia yakin, satu daerah akan lebih cepat maju dengan fasilitas transportasi yang berkualitas, terutama



Wakil Ketua DPR/Korinbang Rachmat Gobel tengah mendengar penjelasan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kawasan proyek pengembangan pelabuhan Anggrek, di Gorontalo Utara.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mendengar penjelasan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tentang skema pengembangan dan skema pengelolaan pelabuhan Anggrek, Gorontalo Utara

pelabuhan. Sejarah menunjukkan, kemajuan ekonomi dan peradaban berawal dari kawasan pelabuhan seperti terlihat pada proses pembangunan negara yang maju, di mana mereka memiliki fasilitas pelabuhan yang mumpuni.

“Kami akan mendorong agar AGIT membangun kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha agar misi besar menjadikan pelabuhan ini sebagai lokomotif ekonomi Gorontalo bisa segera terwujud. Membangun sinergi untuk membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan hinterland,” kata Rachmat Gobel.

Secara nasional, lanjut dia, pengembangan pelabuhan ini akan ikut berkontribusi mendorong Gorontalo untuk tampil sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Pasalnya, terdapat potensi daerah ini di bidang agribisnis seperti komoditas jagung, cokelat, kelapa, perikanan serta berbagai hilirisasinya.

Rachmat Gobel optimis, sinergi akan bisa membawa pelabuhan ini menjadi sentral pertumbuhan Gorontalo. Berada di kawasan pengembangan berbagai komoditi pertanian di kawasan hinterland dan juga terhubung dan pendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Gorontalo-Paguyaman-Anggrek-Kwandang (Gopandang), ke depan pelabuhan Anggrek akan berfungsi sebagai penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan serta simpul distribusi, produksi, dan konsolidasi.

Pengembangan Anggrek memang sudah lama mendapat perhatian khusus dari Rachmat Gobel. Dengan pengalaman yang panjang sebagai pelaku dunia usaha, ia sangat paham potensi dan peran strategis pelabuhan ini, baik bagi pembangunan provinsi Gorontalo maupun nasional, terutama kawasan Indonesia Timur. Karena itulah, Rachmat Gobel memasukan pengembangan pelabuhan ini masuk dalam bagian strategi roadmap Visi Gorontalo 2051.

Diakui banyak kalangan, Rachmat Gobel berperan besar dalam memacu progress pengembangan pelabuhan Anggrek dengan terus menyampaikan aspirasi masyarakat Gorontalo kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Ia sendiri juga mengakui, dukungan Presiden Jokowi melalui Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Mochamad Basuki Hadimoljono, Menkeu Sri Mulyani dan Ketua Bappenas Suharso Manoarfa serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat membantu terealisasinya proyek ini.

“Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan sehingga aspirasi masyarakat

Gorontalo untuk mempunyai pelabuhan dengan fasilitas modern ini bisa terealisasi,” katanya.

### **Pelabuhan Modern**

Proyek KPBU Pelabuhan Anggrek meliputi penyediaan dermaga untuk peti kemas yang dapat mengakomodir kapal kapasitas 30.000 DWT, kapal *general cargo* dengan bobot 10.000 DWT. Peningkatan kapasitas dan kualitas kegiatan bongkar muat barang, peti kemas, curah, serta penyediaan dan pelayanan jasa terkait kepelabuhan. Pengembangan pelabuhan ini dilakukan karena kapasitas operasional dermaga saat ini sudah melampaui standar kinerja pelabuhan. Fasilitas yang ada sudah tidak memadai untuk melayani secara optimal kapal peti kemas dan kargo ukuran besar.

Pelabuhan logistik ini akan dikembangkan dalam dua tahap, di mana tahap I pada 2021-2022 dan tahap II 2031-3032. Pada tahap I dibutuhkan investasi Rp 1,4 triliun yang sepenuhnya ditanggung oleh investor. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dermaga.

Tidak sebatas itu, AGIT sebagai investor dan pengelola juga telah menyiapkan disain strategi untuk menjadikan Anggrek sebagai pelabuhan modern yang dilengkapi perluasan terminal bongkar muat, peningkatan layanan peti kemas, curah umum, curah cari, dan peti kemas pendingin (*reefer container*).

Juga akan dilakukan pengembangan layanan terminal barang seperti penumpukan peti kemas, curah kering, barang umum dan *general cargo* serta peti kemas kosong. Pelabuhan ini dilengkapi dengan layanan konsolidasi dan distribusi barang (CFS), peralatan bongkar muat *Harbour Mobil Crane* (HMC) dan lapangan parkir truk peti kemas dan kargo. Hal yang menarik, AGIT juga mengadopsi konsep *green port* yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan *sustainable development goals* (SDGs).

Pengembangan Anggrek membutuhkan areal daratan yang lebih luas, tidak kurang 20,08 Ha dibandingkan sebelumnya hanya 4,40 Ha. Areal perairan yang dibutuhkan mencapai 6.101 Ha, termasuk untuk area penunjang keselamatan pelayaran seluas 5.321,44 Ha.

### **Produk Halal dan Potensi Budaya**

Menurut Rachmat Gobel, sebagai wilayah yang tergolong 3 T, Gorontalo dituntut untuk bisa melakukan perubahan besar agar masyarakatnya tidak tergilas arus globalisasi. Tanpa ada perubahan nyata dalam skala besar, kondisi masyarakat menjadi rawan terhadap berbagai masalah sosial dan

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menghadiri seremonial penyerahan pengelolaan Pelabuhan Anggrek ke PT AGIT melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan motivasi kepada pelaku UMKM Gorontalo mengenai prospek pengembangan ekonomi Syariah dan produk halal di daerah yang mendapat julukan Serambi Madinah ini.



ekonomi. Kondisi ini akan membuat mereka rentan terhadap berbagai hal yang mengurangi rasa aman dan nyaman.

“Tanpa perubahan besar, kemiskinan akan tetap menghiasi potret kehidupan masyarakat Gorontalo. Ditempa arus globalisasi yang kian deras, kondisi ini akan memicu berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, akan membuat repot aparat hukum, Kalpoda, Korem, Kejaksaan Tinggi, termasuk Angkatan Laut,” katanya.

Setelah berhasil mendorong realisasi pengembangan pelabuhan Anggerek, Rachmat Gobel tengah menyiapkan gagasan untuk mengembangkan Gorontalo sebagai salah satu pusat kawasan pengembangan produk halal. Ia melihat, potensi ke arah ini sangat besar, sumber daya alam dan kultur atau budaya masyarakat sangat mendukung.

Gagasan ini disampaikan setelah kunjungan Rachmat Gobel ke Turki guna menghadiri undangan pemerintah Turki dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) dalam penyelenggaraan World Halal Summit ke 7 dan World Halal Expo ke-8 di Istanbul, Turki pada 25-28 November 2021.

Dalam kunjungannya bersama delegasi DPR RI dan sejumlah tokoh dari Gorontalo, Rachmat Gobel sangat terkejut oleh kenyataan bahwa produsen produk halal dunia masih dikuasai negara yang penduduk Islam-nya minoritas seperti Brasil, Australia, Prancis, Jerman, dan Selandia Baru. Di sisi lain, potensi pasar produk halal dunia terus berkembang, ini sudah mencapai US\$ 7 triliun dan diproyeksikan naik menjadi US\$ 11 triliun pada 2024. Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar, Indonesia harus lebih fokus untuk membidik pertumbuhan pasar produk halal dunia ini.

Selain memenuhi undangan Turki dan OKI, kunjungan Rachmat Gobel juga dimaksudkan untuk melihat langsung pengembangan industri produk halal, khususnya Turki sendiri. Negara ini mampu membangun industri halal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)-nya dengan kemampuan teknologi yang dimiliki negara itu.

“Sebagai sesama negara dengan mayoritas Islam, kita perlu belajar dari keberhasilan Turki. Negara ini mampu membangun industri, bukan sekadar membangun pabrik. Struktur industri halalnya sangat kuat,” kata Rachmat Gobel.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, lanjut Rachmat Gobel, Indonesia harus banyak belajar agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk halal dunia, tapi juga menjadi pemain atau produsen utama dan Gorontalo mempunyai potensi besar untuk berperan. Potensi sumber daya alam cukup tersedia seperti komoditi pertanian, perkebunan,

perikanan dan peternakan. Budaya atau kultur masyarakat juga sangat kental dengan nilai-nilai Islami.

Sejak masuk beberapa abad lalu, agama Islam berkembang pesat di Gorontalo sehingga sejak ratusan tahun lalu nilai-nilai kehalalan sudah melekat kuat dalam setiap kegiatan hidup masyarakat daerah ini. Praktik halal sudah menyatu pada sebagian besar masyarakat yang mendapat julukan Serambi Madinah ini. Tidak sulit bagi mereka menerima standard kehalalan dari setiap proses produksi yang mereka lakukan.

Dari pengalamannya melihat begitu banyak kehidupan masyarakat dalam setiap kunjungan ke berbagai pelosok, Rachmat Gobel berkesimpulan, masyarakat Gorontalo mempunyai semangat yang kuat untuk maju. Ini terbukti, banyaknya tokoh nasional yang lahir dari daerah Gorontalo. Sebut saja Dr. Ing BJ Habibie, ahli teknologi pesawat terbang yang sukses sebagai Presiden dalam mengawal peralihan dari era orde baru ke era reformasi, sehingga Indonesia bisa berkembang seperti sekarang.

Kemudian ada John Ario Katili, saintis di bidang geologi yang juga merupakan Doktor Geologi pertama di ITB dan juga Indonesia. HB Jasim seorang sastrawan terkenal, yang sampai saat ini sulit dicari tandingannya. Kemudian, Jusuf Syarif (JS) Badudu seorang ahli bahasa terkemuka dan Thayeb Mohammad Gobel yang merupakan perintis industri elektronika nasional yang juga merupakan ayah dari Rachmat Gobel.

“Banyak tokoh nasional lahir dan besar dalam semangat budaya Gorontalo. Ini membuktikan kultur Gorontalo mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang kuat dan produktif. Ini adalah potensi dan saya melihat, jika disediakan pemantik gelora masyarakat Gorontalo akan bangkit untuk mewujudkan kemakmuran,” kata Rachmat Gobel.

Oleh karena itu, Rachmat Gobel optimis, gagasan menjadikan Gorontalo sebagai pusat kawasan produk halal adalah sesuatu yang realistis, bukan sesuatu utopis. “Mari kita semuanya bersinergi untuk membangkitkan semangat membangun warisan yang membanggakan bagi generasi penerus. Inilah misi besar di balik pengembangan pelabuhan Anggrek dan gagasan membangun kawasan produk halal,” katanya. (\*)

**Banyak tokoh nasional lahir dan besar dalam semangat budaya Gorontalo.**

# “Demplot” Berkembang, Kelompok Tani dan Koperasi Jadi Ujung Tombak

**\*Bantuan Modal dan Alsintan Terus Mengalir**

Pancaran optimistis terlihat jelas di raut wajah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat bicara soal *demonstration plot* (*demplot*) yang ia kembangkan bersama sejumlah kelompok tani di Gorontalo. Sebagai upaya perbaikan kualitas usaha dan kesejahteraan petani, proyek yang telah mendapat dukungan berbagai pihak ini karena kian menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dari setiap kunjungan ke desa-desa, Rachmat Gobel melihat antusias yang tinggi dari petani dan UMKM untuk berpartisipasi dalam program *demplot* yang ia inisiasi sejak 2019 lalu sebagai program aspirasinya.

“Dilihat dari antusias petani dan UMKM, saya bersyukur program *demplot* cukup memberi inspirasi. Tidak hanya di Gorontalo, dalam kunjungan saya ke daerah lain, juga banyak petani yang meminta agar saya mendirikan *demplot* di daerah mereka,” kata Rachmat Gobel.

Bagi Rachmat Gobel, *demplot* bukan hanya sekedar bagaimana membantu petani ataupun UMKM meningkatkan hasil produksi, tapi sekaligus langkah untuk menguji keyakinannya yaitu pembangunan sektor pertanian dan UMKM adalah sarana efektif untuk mengatasi berbagai persoalan yang membelit kehidupan masyarakat lapisan bawah, seperti tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan.

Keyakinan itu antara lain didasarkan pada data dan fakta bahwa tingkat kemiskinan tertinggi ada di masyarakat pedesaan di mana mata pencaharian utamanya adalah bertani. Secara nasional, menurut data BPS, jumlah penduduk miskin per Maret 2021 mencapai 29,54 juta orang atau

10,14% dari total penduduk. Dari jumlah itu, 15,37 juta ada di pedesaan atau 13,2% dari total penduduk pedesaan, sedangkan jumlah penduduk miskin di perkotaan 12,18 juta atau 7,88%.

Di provinsi Gorontalo, tingkat kemiskinan wilayah pedesaan jauh lebih parah, mencapai 24,47%. Sementara itu, kemiskinan di perkotaan 4,03% atau jauh di bawah rata-rata nasional 7,88%.

Yang lebih memprihatinkan, menurut BPS, Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index*) maupun Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index*) masih sangat tinggi di daerah pedesaan. Indeks Keparahan Kemiskinan memberi gambaran tentang penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangannya. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, di mana semakin tinggi indeks kian parah kondisi kemiskinan.

Data BPS mencatat, secara nasional Indeks Kedalaman Kemiskinan di pedesaan pada 2021 sekitar 2,27 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,57. Untuk Gorontalo angkanya jauh lebih tinggi, masing-masing 4,66 dan 1,33. Ini menunjukkan harus ada perhatian khusus terhadap masyarakat desa agar mereka bisa keluar dari kemiskinan.

Dari sisi ketenagakerjaan, menurut data BPS, 97% ada di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dimana sekitar 30% diantaranya ada di sektor pertanian. Angka ini jauh di atas jumlah tenaga kerja yang ada di sektor perdagangan sekitar 19,23% dan di sektor industri pengolahan (manufaktur) 13,21%.

Berbagai data itu menunjukkan, harus ada upaya khusus yang harus dilakukan dalam menangani kemiskinan dan ketimpangan di daerah pedesaan. Dari berbagai gambaran itulah, yang antara lain menjadi dasar bagi Rachmat Gobel menempatkan pengembangan sektor pertanian, Koperasi dan UMKM sebagai agenda utamanya.

“Dari setiap kunjungan kerja ke lapangan, potret kemiskinan dan ketimpangan itu sangat jelas, apalagi di pedesaan. Ini problem kita, jadi kita tidak bisa bicara soal investasi yang besar-besar saja. Sebagian besar yang hidup dalam kemiskinan adalah mereka yang bekerja di sektor usaha mikro dan kecil, dan berusaha di sektor pertanian atau petani, mereka ini harus mendapat prioritas” kata Rachmat Gobel.

Dari hasil yang dicapai, setidaknya dalam dua tahun terakhir ini, Rachmat Gobel semakin yakin bahwa jika mendapat pendampingan dan stimulan yang kuat seperti bantuan modal dan alat produksi, petani, nelayan, peternak,



Sejumlah anggota kelompok tani dari berbagai desa di wilayah Provinsi Gorontalo foto bersama setelah menerima bantuan alat pertanian dari Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.



Selain memberikan bantuan berupa alat pertanian untuk berbagai kelompok tani, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel juga memberi bantuan modal kepada UMKM seperti yang diterima oleh Koperasi Jaya Bersama.



Melakukan kunjungan langsung ke berbagai desa dan berbincang dengan kelompok tani yang merupakan agenda tetap Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam setiap kunjungan reses ke daerah pemilihannya, provinsi Gorontalo.

pengembangan UMKM, maka soal kemiskinan dan ketimpangan ini akan bisa tertasi.

Keyakinan itu antara lain datang dari melihat hasil yang dicapai oleh kelompok tani yang tergabung dalam *demplot* yang hasil produksinya naik tajam. Seperti diakui, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Fony Tangahu, terobosan yang dilakukan Rachmat Gobel melalui *demplot* telah memberi dampak positif dan sangat membantu petani. “Kalau hanya sekedar bantuan budidaya, ini sudah biasa. Tapi yang dilakukan Rachmat Gobel sangat luar biasa, karena juga menyangkut teknologi pertanian. Hasilnya bisa dilihat, kini panen padi bisa menjadi 10 ton per hektar,” kata Fony Tangahu saat mendampingi Rachmat Gobel dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Gorontalo pada 26 Maret 2021.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua APH (Asosiasi Petani Holtikultura) Gorontalo Rum Pagau saat ia bersama Rachmat Gobel menghadiri panen bawang merah di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Tilamuta, Kabupaten Boalemo pada 30 Januari 2021. Rum menilai, komitmen dan langkah konkrit Rachmat Gobel memajukan usaha pertanian di Gorontalo telah membangkit semangat petani.

“Pak Rachmat Gobel bukan tipe orang sekedar berjanji, ia selalu menepati janjinya. Pak Rachmat Gobel adalah orang yang memegang komitmen seperti yang telah dibuktikan dalam berbagai program pertanian dan pengembangan koperasi. Ke depan, InsyaAllah petani akan semakin maju, kian banyak yang mau bernaung dalam koperasi tani seperti digagas Pak Rachmat Gobel,” kata Rum.

Dalam kunjungannya ke desa Molombate, Rachmat Gobel juga mengikutsertakan ahli pertanian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk melihat hasil pertanian di Gorontalo. “Saya sengaja mengajak Pak Agus dari LIPI, agar bisa melihat hasil pertanian seperti tomat, bawang merah, padi dan jagung. Hasil itu bisa diolah menjadi makanan ekspor atau bahan baku industri, sehingga harga hasil pertanian tetap stabil atau lebih meningkat ketika masa panen,” katanya.

Pada kesempatan itu ia juga mengatakan, dari 1,6 hektar lahan yang ditanami bawang merah di Desa Molombulahe mampu menghasilkan 20 ton bawang merah basah. Jika dalam keadaan kering berkisar 15-16 ton. “Jika harga jual saat ini Rp35.000 per kg untuk bawang kering, maka hasil pertaniannya bisa mencapai Rp 525.000.000 untuk lahan 1,6 hektar,” katanya.

Tidak hanya di Gorontalo, program Rachmat Gobel juga disambut secara antusias oleh petani di daerah lain seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT). Seperti diakui oleh Andreas Umbu Wosa, Ketua Kelompok Tani Ndara Tanah,

program Rachmat Gobel ini mampu meningkatkan hasil panen padi mereka dari biasanya sekitar 4,5-5 ton per hektar menjadi 9,4 ton per ha. Karena itu Andreas berharap, program ini terus diperluas.

“Sekarang program ini baru mencakup lahan seluas tiga hektare. Ke depan kami harapkan bisa diperluas lagi,” kata Andreas saat ikut dalam acara penen raya bersama Rachmat Gobel di Kecamatan Wewewa Timur Sumba Barat Daya dan NT pada 5 April 2021.

Melihat hasil yang dicapai, Rachmat Gobel tidak canggung-canggung untuk mempromosikan *demplot* yang ia kembang dengan kelompok tani ini. Tidak hanya di Gorontalo, dalam kunjungan ke daerah lainpun, Rachmat Gobel selalu membicarakan ini, bahkan saat kunjungan kerjanya ke sejumlah negara.

“Tinggal kini bagaimana menjadikan program pertanian dan pengembangan UMKM betul-betul sebagai prioritas dalam agenda pembangunan, dan dilaksanakan secara efektif, tidak sebatas di atas kertas. Ini membutuhkan koordinasi dan sinergi dari berbagai pihak terkait,” katanya.

### **Prospek Pertanian Cerah, Koperasi dan UMKM Harus Jadi Pemain Utama**

Sesungguhnya, skema pembangunan yang dikembangkan Rachmat Gobel ini tidak sebatas bagaimana meningkatkan hasil panen, tapi juga mengajak petani dan UMKM untuk mengelola usaha taninya secara profesional dan modern. Menata manajemen dari hulu sampai hilir, mulai dari pencairan bibit, proses tanam, pemupukan, sampai pasca panen. Membuka wawasan dan meningkatkan kesadaran petani bahwa usaha pertanian mempunyai prospek yang cerah. Sektor ini menjadi leading ketahanan pangan yang tidak hanya menjadi masalah besar dan tantangan Indonesia, tapi juga berbagai negara lain di dunia.

Seperti perkiraan lembaga pangan dunia yaitu *Food Agriculture Organizations* (FAO), masalah pangan menjadi persoalan besar dan menjadi tantangan berat dunia kedepan. Dalam laporannya yang berjudul *The Future of Food and Agriculture—Trends and Challenges*, FAO menyebutkan, populasi dunia pada 2050 mendatang diperkirakan akan mencapai sekitar 10 miliar orang, dan ini akan membutuhkan pangan yang tidak sedikit. Menggunakan basis data 2013, FAO memperkirakan kebutuhan pangan pada 2050 akan naik 50%. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah sistem pertanian dan pangan saat ini mampu memenuhi kebutuhan populasi global itu.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selalu membantu dan mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan kebijakan berbagai fasilitas stimulus keuangan di masa pandemi Covid-19. Melalui kunjungannya ke pelaku UMKM seperti pengrajin kopra, Rachmat Gobel aktif melakukan sosialisasi pembiayaan usaha yang sehat dengan menjauhi pembiayaan ilegal.

Perkiraan itu menunjukkan, *trend* permintaan terhadap komoditas pangan akan terus tumbuh tinggi. Sebagai gambaran, menurut FAO, permintaan sereal, baik untuk makanan dan penggunaan pakan ternak diproyeksikan mencapai sekitar 3 miliar ton pada tahun 2050, naik dari hampir 2,1 miliar ton pada saat ini.

Indonesia juga akan menghadapi persoalan yang sama, apa lagi Indeks Ketahanan Pangan relatif masih rendah, berada di ranking 65 di antara 113 negara. Menurut perkiraan BPS, jumlah penduduk sampai 2045 saja sudah akan mencapai sekitar 316 juta-320 juta jiwa dan ini berarti membutuhkan pangan yang jauh lebih besar dari saat ini.

Tidak hanya berasal dari pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan kesejahteraan pun juga ikut mendongkrak kebutuhan pangan. Peningkatan kesejahteraan juga akan meningkatkan tingkat konsumsi pangan. Seperti dipublikasi oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, rata-



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel tengah memperhatikan sejumlah produk makanan yang menjadi salah satu andalan UMKM Gorontalo. Rachmat menilai, pelaku UMKM Gorontalo mempunyai kreativitas yang cukup tinggi untuk mengembangkan berbagai ragam produk makanan berbasis sumber daya alam lokal.

rata konsumsi per kapita mengalami peningkatan cukup signifikan akibat meningkatnya penghasilan masyarakat. Konsumsi sayuran per kapita misalnya, diperkirakan naik menjadi 60,45 kg per tahun dibanding saat ini 58,08 kg. Konsumsi ikan per kapitas naik dari 29,33 kg menjadi 32,35 kg per kapita, daging naik dari 3,46 kg menjadi 4,12 kg dan unggas naik dari 9,26 kg menjadi 10,42.

“Tindakan cepat dan terarah untuk memastikan keberlanjutan sistem pangan dan dukungan dari pembangunan sektor pertanian sangat dibutuhkan,” kata Rachmat Gobel.

Ia juga menekan, Koperasi dan UMKM harus memainkan peranan besar agar *multiplier effect* pembangunan pertanian menjadi semakin tinggi. Program ketahanan pangan jangan jadi mainan perusahaan besar, tapi harus mengandalkan koperasi dan UMKM.

Dalam rangka itulah, kepada petani dan UMKM Rachmat Gobel selalu mengajak untuk memperkuat kelembagaan usaha mereka dengan bergabung dengan mendirikan koperasi. Melalui badan usaha ini, petani dan UMKM lainnya bisa menghimpun kekuatan sehingga bisa lebih mudah mendapat bibit, pupuk dan kebutuhan produksi lainnya, termasuk dalam pemasaran. Untuk mendorong masyarakat membentuk koperasi, ia telah menyalurkan bantuan permodalan melalui Koperasi KK RG yang sengaja dibentuk untuk melakukan pendampingan kepada koperasi petani dan UMKM di Gorontalo.

Indonesia perlu mencontoh negara lain, bagaimana sektor pangan mereka menjadi tumpuan koperasi dan UMKM dan berhasil mensejahterakan petani. Apa yang dilakukan Jepang dan China misalnya, membuktikan bahwa kemajuan di sektor pertanian akan sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan di rakyat yang tinggal di kawasan pedesaan.

“Pengalaman sejumlah negara membuktikan, bagaimana koperasi mampu menjadi penyatu kekuatan petani, peternak dan UMKM sehingga mempunyai daya tawar yang lebih kuat dalam meningkatkan kinerja usaha mereka,” katanya.

### **Dukungan dan Bantuan Mengalir**

Untuk menjamin kebutuhan petani dan UMKM, menurut Rachmat Gobel, ia telah membangun kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk dengan BUMN. Program ini mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian BUMN melalui BUMN Pupuk seperti PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia Gresik dan Bulog. Dukungan juga datang datang dari Kementerian PUPR, Bank Indonesia.

Rachmat Gobel sangat mengapresiasi berbagai dukungan tersebut. Melalui program Agro Solution misalnya, PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia Gresik telah menyalurkan puluhan ton bantuan pupuk nonsubsidi yang mampu meningkatkan hasil panen berlipat-lipat. Dengan hasil nyata yang berlimpah, diharapkan penggunaan pupuk nosubsidi dapat menambah wawasan petani bahwa mereka tidak perlu tergantung pada pupuk subsidi dari pemerintah. Meski harganya lebih mahal, peningkatan hasil panen dengan menggunakan pupuk nonsubsidi jauh lebih tinggi sehingga jauh lebih menguntungkan.

Dari Kementerian Pertanian program aspirasi Rachmat Gobel sebagai anggota dan pimpinan DPR RI, mendapat bantuan berbagai alsintan berupa traktor dan alat pasca panen. Sepanjang 2021 tidak kurang dari 88 unit traktor tangan 2 roda dan 4 roda dari Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian dan *Thresher* atau 52 unit mesin perontok serba guna. Semuanya



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mengunjungi pabrik batako yang dimiliki dan dikelola UMKM. Rachmat mengharapkan agar pemerintah daerah Gorontalo lebih mengutamakan penggunaan produk UMKM ini dalam berbagai proyek Pemda.

sudah disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di 5 kabupaten yang ada di provinsi Gorontalo.

Sementara itu dari Kementerian PUPR, dalam rangka mendukung sektor pertanian, sepanjang 2020-2021 kementerian ini telah memperbaiki saluran irigasi di 60 titik berbagai wilayah Gorontalo, disamping merealisasi program Pengembang Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 10 titik.

Bantuan untuk program aspirasi Rachmat Gobel juga datang dari Bank Indonesia berupa bantuan modal untuk UMKM. Tercatat lebih dari 70 UMKM yang mendapat bantuan modal dari bank sentral ini dengan nilai rata-rata Rp 25 juta. Selain itu, melalui aspirasi Rachmat Gobel, Bank Indonesia menyalurkan bantuan untuk pembangunan dan perbaikan sejumlah masjid, gereja dan pesantren.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan inovasi sektor pertanian yang terbukti mampu menaikkan produktivitas pertanian secara signifikan. Melalui kerjasama terintegrasi dari berbagai pihak dalam memajukan petani dan UMKM, secara agregat akan memberi dampak positif pada peningkatan kualitas perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan ke depan yang akan semakin berat,” kata Rachmat Gobel. (\*)



Sektor perikanan merupakan salah satu potensi terbesar ekonomi rakyat Provinsi Gorontalo dan mendapat perhatian besar dari Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel. Dalam kunjungan kerja ke daerah pemilihannya ini, Rachmat Gobel selalu mengagendakan pertemuan dengan nelayan seperti mengunjungi salah satu tempat pelelangan ikan.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel tengah ikut memanen cabe rawit di salah satu lokasi *demplot* yang dikembangkannya bersama sejumlah kelompok tani. Perbaikan pengelohan tanam dan penggunaan pupuk nonsubsidi telah berhasil meningkatkan produktivitas tanaman cabe dari 80% sampai di atas 100%.

# Penataan Lingkungan Untuk Membangun Hidup Yang Lebih Berkualitas

Setiap orang berhak untuk mempunyai tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini merupakan amanah UUD 1945 seperti tertuang dalam pasal 28H. Pencapaian standar tempat tinggal yang layak juga merupakan salah satu elemen dasar dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini menjadi indikator untuk mengukur capaian pembangunan baik fisik maupun nonfisik.

Hakekat dari rumah layak huni adalah rumah yang menjamin keamanan dan ketenangan atau kenyamanan bagi penghuninya, khususnya terhadap kondisi sekitar (alam dan lingkungan). Sejak 2019, pemerintah mendefinisikan bahwa tempat tinggal yang layak atau rumah layak huni harus memenuhi kriteria; (1) kecukupan luas yaitu minimal 7,2 m<sup>2</sup> per kapita; (2) memiliki akses terhadap air minum layak; (3) memiliki akses terhadap sanitasi layak; (4) ketahanan bangunan yang memadai.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga yang mempunyai akses terhadap rumah layak huni masih terbatas, baru sekitar 60,9%. Artinya, hampir 40% penduduk di Indonesia masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH). Mereka tinggal di rumah yang kondisi belum memberi jaminan rasa aman dan nyaman penghuninya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah telah menetapkan target pembangunan perumahan nasional yaitu 70% rumah tangga dapat menempati hunian layak, baik melalui bantuan pemerintah maupun non-pemerintah. Dan menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, masih ada 14 juta keluarga (KK) dari total 70 juta keluarga Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di berbagai daerah perkotaan maupun pedesaan.

## Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Huni

Lokasi	2019	2020	2021
Perkotaan	61,09	63,24	64,65
Perdesaan	50,67	54,82	55,95
Kota + Desa	56,51	59,54	60,9

Sumber: BPS

Rumah tidak layak huni mempunyai dampak langsung dan tidak langsung, baik secara fisik atau nonfisik kepada penghuni. Dampak fisik, penghuni RTLH tidak terlindung secara penuh dari berbagai risiko seperti panas dan hujan serta bahaya roboh karena kontruksi atau kondisi lahan yang tidak memadai. Secara fisik, penghuni RLTH juga rawan terhadap risiko kesehatan dan ancaman bencana. Kondisi ini akan berdampak terhadap aspek non-fisik seperti kecemasan yang berkepanjangan.

RTLH yang disebabkan faktor kurangnya kecukupan luas ruang (sempit) akan berdampak pada pertumbuhan kejiwaan anak-anak. Selain mengurangi keleluasaan bergerak bagi orang dewasa dan secara nonfisik membuat penghuni tidak betah tinggal didalam rumah sehingga saat remaja anak-anak menjadi lebih senang keluyuran atau banyak di jalanan.

Dampak fisik rumah tidak layak huni karena kurang pencahayaan dan penghawaan juga berdampak buruk terhadap kesehatan, mudah sakit, mudah lelah dan tidak produktif dan dampak nonfisiknya membuat penghuni kurang, bahkan tidak betah tinggal di dalam rumah. Dampak kesehatan juga ada dirasakan penghuni rumah yang tidak mempunyai sistem limbah yang tidak mendukung serta tidak mempunyai ketersediaan air bersih yang cukup.

“Kondisi hunian atau tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup. Penghuninya menjadi kurang produktif dan dampak ikutannya mereka berpotensi besar terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang menerus. Dan, konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hunian yang layak,” kata Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

Dalam rangka menjalankan amanah konstitusi itulah, penataan lingkungan pemukiman menjadi salah satu prioritas utama Rachmat Gobel dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota legislatif, baik melalui fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel foto bersama sejumlah keluarga yang mendapat bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui loby ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rachmat Gobel berperan dalam meningkatkan secara signifikan jumlah penerima program BSPS di provinsi Gorontalo.



Wakil Ketua DPR RI/Korimbang Rachmat Gobel menerima ucapan terima kasih dari salah satu anggota keluarga yang mendapat bantuan program BSPS.

## Program BSPS

Melalui berbagai program, setiap tahun Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menganggarkan dana triliunan rupiah dari APBN untuk program perbaikan infrastruktur permukiman. Satu diantaranya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal juga program Bedah Rumah. Program ini merupakan bantuan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan peningkatan kualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah rumah, beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.

Program BSPS dilaksanakan Kementerian PUPR di seluruh wilayah Indonesia. Adapun jumlah bantuan untuk setiap unit rumah adalah sebesar Rp 20 juta. Dana tersebut diterima masyarakat dalam bentuk bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Pada 2021, melalui Direktorat Jenderal Perumahan pemerintah mengalokasikan Rp 4,7 triliun untuk mendorong program BSPS. Dana ini disalurkan untuk kegiatan bedah rumah yang tidak layak huni sebanyak 220.000 unit di seluruh Indonesia. Kegiatan pembangunan rumah swadaya ini setidaknya juga telah menyerap sekitar 244.170 orang tenaga kerja.

“Program BSPS cukup berhasil, tidak hanya untuk sarana penataan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup rakyat, tapi juga cukup besar dampaknya terhadap penambahan lapangan kerja,” kata Rachmat Gobel saat meninjau realisasi renovasi salah satu warga yang ikut program BSPS di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Gorontalo Utara.

Selaku anggota legislatif dari Gorontalo, Rachmat Gobel selalu mengagendakan kegiatan resesnya untuk mengunjungi pelaksanaan BSPS di berbagai desa di provinsi ini. Menjadi salah satu perhatian utamanya, karena masih banyak rakyat Gorontalo yang belum mempunyai akses terhadap rumah layak huni.

Menurut data BPS Gorontalo, dari sisi kriteria rumah layak huni yaitu akses terhadap sanitasi yang layak, masih banyak rumah tangga yang belum bisa memenuhi. Secara rata-rata baru sekitar 75% rumah tangga di provinsi Gorontalo yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Belum lagi kalau dilihat dari kriteria lainnya, terhadap air minum dan rata-rata luas rumah, bisa dipastikan semakin banyak rumah tangga di provinsi ini yang menempati rumah tidak layak huni.

Sejak dari awal terpilih sebagai anggota DPR RI dari Gorontalo pada 2019 lalu, Rachmat Gobel sudah memperjuangkan agar alokasi program BSPS untuk provinsi ini bisa lebih besar. Pada 2020, ia berhasil mendorong Kementerian PUPR untuk meningkatkan jumlah peserta BSPS sehingga

## Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak di Prov Gorontalo (2017-2020)

Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020
Boalemo	40,04	50,81	62,19	63,19
Gorontalo	56,93	64,48	76,32	78,18
Pohuwato	59,99	57,08	71,9	66,03
Bone Bolango	54,22	63,34	70,77	77,22
Gorontalo Utara	47,49	57,87	69,83	71,80
Kota Gorontalo	84,99	84,02	86,77	87,61
Provinsi Gorontalo	59,04	64,59	74,57	75,68

Sumber: Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2021

bisa mencapai 2.500 unit dan pada 2021 sebanyak 1.700 unit. Disamping itu, lewat aspirasinya Rachmat Gobel, Kemen PUPR juga menambah alokasi BSPS untuk provinsi Sulteng masing-masing 1.000 unit pada 2020 dan 300 unit pada 2021.

“Saya sangat mengapresiasi program BSPS ini. Dan berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari tingkat desa sampai provinsi, termasuk perbankan, semua program tersebut sudah terealisasi 100%,” katanya.

### Kampung Mural

Atas inisiatif Rachmat Gobel, rumah peserta BSPS tidak hanya diperbaiki tapi juga dihiasi dengan lukisan mural yang membuat suasana kampung menjadi lebih meriah. Lukisan muralnya pun beraneka ragam ada yang bergambar kapal laut seperti Titanic, hewan dan aneka lukisan lainnya.

Seperti diakui Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, insiatif Rachmat Gobel ini membuat rumah yang sudah direnovasi menjadi semakin menarik. Lukisan mural membuat rumah menjadi berwarna warni dengan berbagai gambar tiga dimensi (3D).

“Dalam program BSPS di Gorontalo kami mendapat bantuan dari Rachmat Gobel. Beliau menginisiasi agar rumah-rumah penerima program BSPS bisa lebih menarik dengan lukisan mural warna warni dan berbagai gambar 3D. Hal ini membuat rumah di sini lebih menarik dan menjadi objek wisata baru bagi masyarakat,” kata Khalawi saat meninjau ke lokasi program BSPS di Kelurahan Dembe Satu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Senin (4/10/2021).

Ada 20 unit rumah yang mendapat bantuan Program BSPS di Kelurahan Dembe Satu ini. Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai pengepul barang bekas. Terinspirasi oleh inisiatif Rachmat Gobel, banyak diantara mereka menggunakan besi-besi seperti rangka sepeda dan botol bekas untuk dijadikan pagar.

Hasilnya, tampilan rumahnya semakin baik dan menarik. “Kami berharap daerah ini yang rumahnya sebelumnya tidak layak setelah berubah layak dan berwarna warni bisa menjadi Kampung Warna Warni yang menarik wisatawan dan menambah pendapatan masyarakat di masa pandemi ini,” ujar Khalawi.

### Program Kotaku

Selain melalui BSPS, penataan lingkungan juga dilakukan pemerintah lewat program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program ini untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan *platform* kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Ruang lingkup program Kotaku berupa perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan, penyediaan air bersih dan akses sanitasi layak. Tujuan umum program ini untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh di kawasan perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Semua ini dalam rangka mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) serta dari lembaga mitra

**Ruang lingkup program Kotaku berupa perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan, penyediaan air bersih dan akses sanitasi layak.**



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel tengah berdiskusi dengan Ketua Balai Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II PUPR Naswardi tentang revitalisasi sungai Bone, Gorontalo, saat meninjau proyek ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo.

pembangunan pemerintah (World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IsDB).

Pelaksanaan program Kotaku di Gorontalo juga sangat mendapatkan perhatian Rachmat Gobel. Melalui Kementerian PUPR, ia memperjuangkan aspirasi agar program ini semakin diperbanyak di provinsi ini. Sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021 program Kotaku sudah terealisasi di 20 titik.

“Program Kotaku mempunyai arti yang sangat strategis untuk menciptakan kawasan pemukiman yang bersih, sehat dan nyaman. Dengan adanya kawasan yang sudah tertata ini, saya berharap agar masyarakat di daerah ini dapat memelihara dan memanfaatkan dengan baik apa yang sudah dibangun oleh pemerintah,” kata Rachmat Gobel meresmikan Sarana Infrastruktur BPM Skala Lingkungan Program Kotaku tahun 2021, di kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. (\*)

Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel meresmikan proyek sarana infrastruktur program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di lingkungan Kota Gorontalo Utara yang merupakan bagian dari penataan lingkungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).



Mendorong percepatan realisasi penataan sungai Bone merupakan salah satu agenda prioritas Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam rangka mencegah terjadinya banjir di daerah aliran sungai yang sangat merugikan masyarakat Gorontalo.

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel tengah berdiskusi dengan Ketua Balai Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II PUPR Naswardi tentang revitalisasi sungai Bone, Gorontalo, saat meninjau proyek ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo.



Penataan lingkungan hidup dan percepatan pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat Gorontalo menjadi salah satu agenda utama Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel sebagai anggota legislatif yang mewakili provinsi ini. Tampak Rachmat Gobel mendapat penjelasan dari Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II PUPR Naswardi tentang revitalisasi sungai Bone, Gorontalo sebagai bagian dari proyek penataan lingkungan dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi.



# Peningkatan Kualitas SDM: Dari Bantuan Pendidikan Sampai Pencegahan *Stunting* dan Ventilator

**B**erbagai langkah terus dilakukan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel sebagai upaya mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan Gorontalo. Dengan menggalang berbagai elemen, Rachmat Gobel memperjuangkan agar aspirasi masyarakat provinsi ini terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana dapat terealisasi, membantu mempercepat pembangunan, termasuk dalam peningkatan kualitas SDM.

Dibandingkan sejumlah daerah, Akses masyarakat Gorontalo terhadap hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, memang masih terbatas. Ini antara lain terlihat pada masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi ini. BPS mencatat, IPM provinsi ini pada 2020 baru 69,0 atau jauh di bawah rata-rata nasional 72,29.

Kondisi itu antara lain karena usia harapan hidup yang rendah yaitu 68,19 tahun dibandingkan rata-rata nasional 71,57%, dan rata-rata lama sekolah 7,90 tahun dibandingkan nasional 8,59 tahun. Rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga rendah Rp 10,257 juta per tahun dibanding nasional Rp 11,16 juta.

“Rendahnya IPM Gorontalo antara lain terkait dengan usia hidup, harapan sekolah dan tingkat ekonomi yang masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Oleh karena bantuan program yang bisa langsung atau tidak langsung terhadap perbaikan kualitas IPM harus lebih digencarkan,” kata Rachmat Gobel.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mendengar penjelasan Kepada Badan Narkoba Nasional Provinsi Gorontalo Brigjen Pol. Wisnu Andayana S.S.T.M.K, Senin (15/02/2021) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di kawasan provinsi ini. Program P4GN mendapat perhatian Rachmat Gobel sebagai upaya mencegah masyarakat, terutama generasi muda Gorontalo dari dampak negative negative narkoba terhadap upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

### **Bantuan Pendidikan**

Selain menggunakan dana aspirasi sebagai anggota DPR RI, untuk mendorong pembangunan Gorontalo juga menggalang bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga. Untuk mempercepat pembangunan di bidang pendidikan misalnya, pada 2021 Rachmat Gobel antara lain berhasil memperoleh bantuan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bantuan tersebut, selain diberikan langsung, juga ada yang disalurkan melalui pemerintah daerah untuk diserahkan kepada masyarakat.

Seperti disebutkan oleh Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli, sejumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) di daerahnya telah mendapat bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) Rachmat Gobel. Bantuan itu merupakan hasil aspirasi Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI yang ditindaklanjuti melalui Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan sambutan dalam acara Ground Breaking Pembangunan Rumah Sakit Pemda Kabupaten Gorontalo. Pembangunan fasilitas kesehatan ini diharapkan akan lebih memudahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Gorontalo.

“Jadi ini berkat komunikasi saya dengan Pak Rachmat Gobel, setelah mendengar penyampaian kami bahwa masih banyak PAUD dan TK di Bone Bolango yang membutuhkan APE dan tempat bermain anak. Aspirasi ini diperjuangkan Pak Rachmat Gobel ke Kemendibudristek dan kemudian bantuan itu turun,” kata Merlan seperti dikutip sejumlah media Gorontalo.

Setiap PAUD dan TK mendapatkan satu paket dengan 33 item APE senilai Rp 25 juta. Merlan bersyukur bahwa paket bantuan tersebut dapat membantu PAUD dan TK yang ada di kelurahan maupun desa. “Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan Insya Allah akan ada kelanjutannya bantuan APE ini untuk PAUD dan TK yang lain, terutama bagi PAUD dan TK yang belum memiliki APE,” katanya.

Alat Permainan Edukatif (APE) adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan belajar dan bermain. Alat ini sangat penting dan dibutuhkan dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, bantuan sarana pembelajaran dalam bentuk permainan seperti memiliki posisi yang vital.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kualitas pendidikan anak, menggunakan dananya sendiri Rachmat Gobel juga telah memborong



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel di Stadion Merdeka lebih dikenal dengan Gelanggang Olahraga Nani Wartabone. Rachmat Gobel berencana untuk merenovasi stadion ini agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana peningkatan kualitas hidup dan prestasi olah raga masyarakat Gorontalo.

sejumlah paket APE yang diproduksi oleh UMKM Yogyakarta. Di tengah kesibukannya untuk menghadiri Kongres Nasional ke-41 Serikat Islam, organisasi yang dibesarkan HOS Tjokroaminoto di Solo pada Desember 2021, Rachmat Gobel menyempatkan diri untuk mengunjungi bengkel seni milik Eri Sudarmono untuk melihat langsung produksi APE buatan pria lulusan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta ini, berupa robot.

“Saya nonton liputan tentang Pak Eri di Metro TV. Saya memang menyukai budaya dan handicraft. Saya juga peduli pada UMKM. Jadi saya ke sini sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian,” kata Rachmat Gobel.

Menurut Eri Sudarmono, Rachmat Gobel mengeluarkan dana cukup besar untuk membeli sejumlah robot buatannya. Ada robot model megalatron, robot yang sedang naik sepeda, bumble bee dan beragam varian mirip dalam lakon film *thriller* Transformer, robot kalajengking. Robot ini akan diserahkan Rachmat Gobel untuk PAUD dan TK di Gorontalo, termasuk PAUD berstandar Internasional yang dibangunnya sendiri. “Pak Gobel memesan sejumlah robot. Nilainya lebih dari Rp 200 juta,” kata Eri Sudarmono.

Menurut Rachmat Gobel, dalam pembangunan peningkatan kualitas SDM, PAUD dan TK merupakan tahapan penting karena anak didik berada dalam

tahap golden moment yaitu saat yang tepat untuk membentuk karakter si anak. Karena itulah, sebagai dedikasinya terhadap masyarakat Gorontalo, ia sedang membangun sekolah untuk anak-anak balita bertaraf internasional di Gorontalo.

Selain bantuan APE, Rachmat Gobel juga telah memperjuangkan bantuan bus sekolah bagi pelajar dan mahasiswa Gorontalo. Melalui bantuan dari Kementerian Perhubungan, provinsi Gorontalo mendapat 4 unit bus sekolah diserahkan pemerintah kabupaten.

Seperti diungkapkan oleh Bupati Bone Bolango Hamim Pou, daerahnya telah menerima satu unit bus sekolah berkat perjuangan Rachmat Gobel. “Kita patut bersyukur, empat bulan lalu saya mengajukan proposal ke Kementerian Perhubungan lewat Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. Alhamdulillah, saat ini kita dapat Bus Sekolah,” kata Hamim Pou.

Bantuan juga diserahkan Rachmat Gobel untuk Pondok Pesantren Al-Akhirat di Talamuta. Boalemo. Menurut Rachmat Gobel, pembangunan fasilitas Pondok Pesantren Al-Akhirat wujud perjuangannya membangun SDM yang berkualitas. “Ada filosofi, sebelum membuat produk berkualitas, maka buat manusia yang berkualitas, kita berharap, pesantren ini bisa mempersiapkan SDM yang kelak bisa menjadi pejuang ekonomi dan membangun NKRI ini lebih baik lagi,” katanya saat meletakkan batu pertama pembangunan pesantren ini Juli 2021 yang juga dihadiri Bupati Boalemo Anas Jusuf.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Boalemo menyampaikan terima kasih atas kunjungan bapak Rachmat Gobel yang selalu membawa program-program aspirasi yang beliau kawal dari kementerian-kementerian,” ungkap Anas.

Menurut Anas, dana yang disalurkan Rachmat Gobel tergolong besar mencapai Rp 2,5 miliar, untuk bangunan dan berbagai peralatan untuk fasilitas santri Al-Akhirat Talamuta. Pembangunan ini sangat mewah, ini kebahagiaan bagi masyarakat Boalemo, khususnya warga Al-Akhirat yang mendapatkan bantuan. “Pada 2018 dan 2019 pemerintah daerah juga mengalokasikan jumlah yang cukup besar, total Rp 900 juta. Namun dua tahun terakhir ini bantuan kita tidak besar,” katanya.

### **Stunting dan Ventilator**

Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat Gorontalo adalah masih banyaknya bayi atau anak yang mengalami *stunting*, di mana pertumbuhan mereka di bawah standar normal. Pertumbuhan bayi tidak hanya dilihat dari berat, tapi juga tinggi badannya. Kedua faktor ini menjadi

penanda apakah nutrisi anak sudah cukup atau belum. Jika tubuhnya lebih pendek dibandingkan teman-teman seusianya dan penyebab utama adalah kekurangan nutrisi, hal ini menunjukkan si anak mengalami *stunting*.

Seperti dikatakan Rachmat Gobel, salah satu aspirasi masyarakat yang banyak disampaikan kepadanya—terutama ibu ibu penggerak PKK—adalah masih tingginya kasus *stunting* di provinsi ini. “Dalam kunjungan kerja saya ke berbagai wilayah di Gorontalo, Ibu-ibu penggerak PKK kalau bertemu selalu membicarakan masalah *stunting* ini,” kata Rachmat Gobel.

*Stunting* memang masih tergolong tinggi di Indonesia. Masih banyak ditemukan anak kekurangan gizi di berbagai daerah. Fakta ini menunjukkan, pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pembangunan sektor fisik belum berjalan searah dengan perbaikan gizi masyarakat.

Masalah *stunting* harus mendapat perhatian serius, karena anak-anak yang mengalaminya sangat berisiko. Kemampuan kognitif dan performa sekolah mereka menjadi rendah. Menurunkan kapasitas belajar, nilai dan prestasi sekolah sehingga membuat produktivitas mereka menjadi tertinggal.

Menurut penelitian Bank Dunia, *stunting* menyebabkan pertumbuhan ekonomi serta produktivitas pasar kerja terhambat, dan akan memperburuk kesenjangan. Ketika dewasa, anak yang mengalami kondisi *stunting* potensi penghasilan mereka 20% lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami *stunting*. Dalam jangka panjang *stunting* dapat menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2%-3% dari produk domestik bruto (PDB) per tahun.

Penyebab utama *stunting* ialah kurangnya asupan gizi selama anak dalam kandungan maupun setelah lahir. WHO menyatakan, sekitar 20% kejadian *stunting* sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran.

Terkait hal itulah, menurut Rachmat Gobel, aspirasi mengenai masalah *stunting* ini menjadi salah satu prioritasnya. Pada kesempatan bertemu dengan Direktur Utama Bulog Budi Waseso, ia diberitahu kalau ada beras untuk mencegah munculnya persoalan *stunting* ini. “Saya bertemu dengan Pak Budi Waseso, saya diberitahu ada beras fortivit yang bisa untuk mencegah *stunting* dan juga meningkatkan imunitas. Lalu saya putuskan untuk mengadakan beras fortivit ini untuk masyarakat Gorontalo,” kata Rachmat Gobel.





Bekerjasama dengan Bank Indonesia, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menyalurkan paket bantuan sosial untuk masyarakat Gorontalo yang membutuhkan melalui Yayasan Cahaya RG dan Yayasan Inspirasi Masyarakat Tani.

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menyerahkan bantuan beras premium Fortivit untuk masyarakat Gorontalo yang keluarga mereka memiliki balita yang mengalami *stunting*.

Beras Fortivit adalah beras premium yang diolah melalui proses fortifikasi. Beras ini mengandung 8 vitamin dan mineral diantaranya zat besi (FE), asam folat, vitamin A, B1, B3, B6, B12 dan zinc.

Lalu Rachmat Gobel memutuskan untuk melakukan pengadaan sebanyak 12 ton beras fortivit yang kemudian didistribusikan menjadi 2.400 paket, dimana setiap paket berisi 5 kg. Beras ini dibagikan kepada ibu hamil dan menyusui yang ada di provinsi Gorontalo, disertai harapan agar anak yang dikandung serta dilahirkan mendapat gizi yang baik sehingga tumbuh seperti yang diharapkan. “Anak-anak adalah masa depan bangsa, mereka akan menjadi tulang punggung di masa datang sehingga harus menjadi orang hebat,” katanya.

Selain menyerahkan bantuan untuk pencegahan *stunting*, di bidang kesehatan ini Rachmat Gobel melalui Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai NasDem juga memberikan bantuan peralatan 3 unit ventilator untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Bantuan ini untuk memperkuat kapasitas rumah sakit dalam menangani dan menyelamatkan nyawa masyarakat yang terpapar Covid-19. Dengan bantuan ini, jumlah ventilator RSUD yang sebelumnya hanya 4 unit, kini menjadi unit.

“Bantuan tiga unit ventilator dari Partai Nasdem dan Pak Rachmat Gobel ini sebagai komitmen Partai Nasdem Gorontalo yang berperan serta bersama pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengurangi persebaran Covid-19 di Gorontalo,” kata Ketua DWP Partai NasDem Gorontalo, Hamim Pou.

Selain RSUD Toto Kabila, bantuan serupa juga telah diserahkan untuk RS Aloei Saboe yang berlokasi di Kota Gorontalo.

Ventilator merupakan alat bantu pernafasan yang sangat dibutuhkan saat melakukan tindakan penyelamatan terhadap pasien Covid-19 maupun pasien yang mengalami gangguan pernafasan yang menjalani perawatan di ruang ICU maupun UGD rumah sakit. Banyak pasien Covid-19 maupun pasien umum yang mengalami gangguan pernafasan yang tidak tertolong karena ketiadaan ventilator.

Selain bantuan pendidikan dan kesehatan, menghadapi pandemi Covid-19 Rachmat Gobel juga telah menyerahkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat Gorontalo melalui kerjasama dengan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). BI melalui program ini menyiapkan total 2.375 paket dengan rincian senilai Rp 250 juta kepada Yayasan Inspirasi Sahabat Tani dan paket senilai Rp 248 juta untuk Yayasan Cahaya RG.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama sejumlah anggota kelompok tani milenial yang menjadi salah satu tulang punggung masa depan ketahanan pangan provinsi Gorontalo.

“Kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi kepada BI yang memiliki program yang bisa membantu masyarakat terkena dampak pandemi Covid-19. Yang saya tahu banyak program yang dibuat oleh BI untuk membantu atau mendorong pertumbuhan daerah,” kata Gobel saat menyaksikan penyerahan secara simbolis program bantuan sosial BI untuk masyarakat di Provinsi Gorontalo, Jum’at (30/4). (\*)

# Menyulap Wajah Pariwisata: Dari Benteng Tua sampai Kampung Mural

Selain agribisnis, menurut Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel, pariwisata adalah sektor yang menjanjikan bagi Gorontalo. Banyak obyek wisata yang menarik, mulai dari wisata alam, laut dan berbagai peninggalan sejarah serta budaya masyarakat yang religius dan unik. Pemerintah Daerah (Pemda) perlu membuka peluang seluas-luasnya kepada investor untuk bekerjasama mengembangkan potensi destinasi wisata.

“Siapa bilang daerah kita miskin, itu nggak benar. Gorontalo adalah daerah yang sangat kaya. Saya siap “sulap” wajah pariwisata untuk menunjang Gorontalo sebagai daerah jasa,” kata Rachmat Gobel dalam satu kesempatan.

Industri pariwisata merupakan sektor usaha yang mengalami perkembangan sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir. Dalam tataran global, menurut data World Travel and Tourism Council (WTTC), sebelum pandemi Covid-19 yaitu pada 2019, kontribusi sektor ini terhadap GDP dunia sudah mencapai 10,04% dengan nilai US\$ 9,2 triliun yang berasal dari 1,5 miliar perjalanan turis. Namun angka ini turun tajam karena pandemi, menjadi sekitar 3,4% GDP dunia pada 2020.

Di Indonesia, sebelum pandemi atau 2019 kontribusi sektor ini terhadap PDB tercatat 4,8%. Meski masih di bawah trends global, berdasarkan data BPS, perkembangan sektor ini termasuk tinggi, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Jumlah wisatawan manca negara (wisman) ke Indonesia naik dari 10,14 juta orang pada 2015 menjadi 16,5 juta orang pada 2019. Jumlah wisatawan nusantara (wisnu) tumbuh hampir tiga kali lipat yaitu dari 256

juta perjalanan pada 2015 menjadi 722,2 juta perjalanan pada 2019, dan akibat Covid-19 turun menjadi 518,6 juta perjalanan pada 2020.

Angka-angka tersebut memberi gambaran, potensi pertumbuhan sektor pariwisata nasional sangat besar. Pemerintah memproyeksikan, dalam 5 tahun-10 tahun mendatang, kontribusi sektor ini terhadap PDB bisa mencapai 12%.

Untuk provinsi Gorontalo, pertumbuhan sektor pariwisata juga cukup tinggi. Dalam rentang waktu 2015-2019, jumlah wisatawan nusantara naik lebih dari 3 kali lipat dari sekitar 829 ribu perjalanan menjadi 2,589 juta perjalanan.

“Dengan ragam destinasi serta keunikan berbagai obyek wisata yang bisa dikembangkan, pariwisata akan menjadi sektor yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Gorontalo,” kata Rachmat Gobel.

Pariwisata dikenal sebagai sektor ekonomi yang mempunyai efek ganda atau *multiplier effect* yang tinggi. Tidak hanya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya seperti mendorong pertumbuhan di sektor industri primer dan sekunder.

Menurut Rachmat Gobel, dalam kunjungan kerjanya bersama delegasi DPR RI ke Turki, negara ini berhasil menjadikan sektor pariwisatanya sebagai lokomotif dalam mendorong pertumbuhan sektor industri, terutama pada produk halal. Negara ini sekarang dikenal sebagai salah satu produsen produk halal terbesar di dunia.

“Salah satu keberhasilan Turki menjadikan industri produk halal mereka menjadi unggulan antara lain karena didukung oleh sektor pariwisata,” kata Rachmat Gobel.

### **Dukungan Sarana Publik**

Salah satu komponen utama untuk bisa mendorong percepatan pertumbuhan sektor pariwisata adalah dukungan sarana publik untuk meningkatkan aksesibilitas destinasi atau obyek wisata. Banyak destinasi wisata yang menarik, namun tidak bisa berkembang karena aksesibilitas terutama jaringan jalan tidak mendukung

Sektor ini juga memerlukan dukungan kelembagaan yang berfokus pada peningkatan SDM, kesadaran masyarakat, dan industri. Kesadaran dan kewirausahaan masyarakat terhadap potensi pariwisata perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi. Semua itu menyangkut profesionalitas manajemen pengelolaan, karena itu pariwisata juga harus didukung

standarisasi dan sertifikasi usaha. Berikutnya, komponen yang diperlukan adalah promosi yang sering kali disebut dengan BAS yaitu *branding*, *advertising*, dan *selling*.

Sebagai dukungan terhadap kemajuan sektor pariwisata Gorontalo, Rachmat Gobel antara lain telah memperjuangkan pembangunan akses jalan ke destinasi pantai yang berlokasi di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Kawasan ini cukup menarik sebagai destinasi wisata, namun karena ketiadaan akses menjadi tidak berkembang.

Seperti diakui Wakil Walikota Gorontalo, Ryan Kono, atas perjuangan Rachmat Gobel melalui program Kotaku dari Kementerian PUPR, akses ke pantai di kawasan Leato Utara sudah bisa dibangun sehingga kini menjadi destinasi wisata Tamendao Beach.

“Terima kasih atas dukungan Pak Rachmat Gobel sehingga akses ke kawasan pantai ini telah tersedia,” kata Ryan Kono saat mendampingi Rachmat Gobel meresmikan obyek wisata yang kini diberi nama Tamendao Beach.

Kepada penduduk sekitar yang umumnya adalah nelayan, Rachmat Gobel berpesan agar menjaga kebersihan areal pantai karena ini menjadi salah satu faktor keberhasilan Tamendao ke depan. “Insya Allah jika keasrian pantai terjaga, pengunjung akan berdatangan dan ini akan mendatangkan aktivitas ekonomi yang bisa dinikmati warga sekitar,” katanya.

Kepada Pemkot Gorontalo, Rachmat Gobel juga telah menyampaikan rencananya untuk mendukung pengembangan salah satu destinasi wisata yang berjarak sekitar 8 km dari pusat kota yaitu benteng peninggalan Portugis yaitu kawasan Benteng Otanaha.

Benteng ini awalnya dibuat sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh. Di kawasan Benteng Otanaha yang terletak di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, terdapat tiga benteng yaitu Benteng Otanaha sendiri, kemudian Benteng Otahiya dan Benteng Ulupahu.

Selain sebagai obyek wisata sejarah, kawasan Benteng Otanaha yang berada di lokasi ketinggian juga menawarkan spot-spot yang bagus untuk pengunjung. Pemandangan ke arah Danau Limboto menjadi salah satu atraksi bagi pengunjung.

Aksi menarik lainnya adalah, untuk mencapai benteng Otanaha pengunjung harus mendaki 351 anak tangga. Untuk sampai ke puncak bukit tempat benteng, pengunjung akan melewati empat pos yang bisa digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk rehat menghirup udara segar.

Berbagai sumber menyebutkan, kawasan benteng ini dibangun tahun 1522. Ketiga benteng di kawasan ini dibangun oleh Portugis. Benteng ini

merupakan saksi sejarah dari perjuangan masyarakat Gorontalo saat itu ketika berperang melawan Portugis.

Portugis datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Mula-mula mereka merebut pelabuhan strategis di Malaka. Portugis kemudian melanjutkan pelayaran untuk menemukan kepulauan rempah-rempah. Sebagian sampai ke wilayah Ternate. Sebagian lagi tersesat tapi menemukan jalur perdagangan rempah di kawasan timur antara Maluku dan Sulawesi.

Semula, kedatangan Portugis memperoleh sambutan baik. Kerjasama perdagangan pun tercipta. Tapi ketika Portugis ingin memonopoli, serangan dilancarkan kerajaan-kerajaan lokal. Portugis terusir dari Ternate, lalu mencoba mencari tempat berlindung di Kerajaan Limboto, salah satu kerajaan dari konfederasi Lima Pahalaa (Lima Kerajaan) bersama Gorontalo, Boalemo, Atinggola, dan Bone yang akhirnya menjadi Kerajaan Gorontalo di Sulawesi Utara. Atas kesepakatan dan izin dari raja Limboto, mereka mendirikan tiga benteng pertahanan.

Hubungan Portugis dan Limboto tak berlangsung lama. Kerajaan Limboto menilai Portugis melanggar kedudukan dan adat-istiadat Gorontalo. Maka, Limboto menjalin kerjasama dengan Ternate. Portugis akhirnya meninggalkan Sulawesi. Benteng pertahanannya digunakan oleh Limboto dan masih berdiri kokoh hingga saat ini.

Menurut Rachmat Gobel, jika dilengkapi taman kawasan Benteng Otanaha ini akan semakin menarik banyak pengunjung dan ini bisa menjadi salah satu sentra ekonomi bagi rakyat Gorontalo. Kepada Pemkot Gorontalo Rachmat Gobel telah menyampaikan ide ini dan mendapat dukungan. Sebelumnya Rachmat Gobel juga telah berhasil mengembangkan kawasan wisata Danau Limboto yang semulanya terbengkalai, kini telah hidup kembali.

Di kawasan danau Limboto, Rachmat Gobel merenovasi menara setinggi 65 meter dengan disain mirip Eiffel yang ada di Paris. Dihiasi berbagai lampu warna warni, menara yang diberi nama Menara Keagungan ini, menjadi sangat menarik pada malam hari sehingga banyak dikunjungi dan menjadi salah satu sentral bagi usaha mikro dan kecil.

### **Kampung Mural dan Wisata Heritage**

Mural kini menjadi trend di Gorontalo setelah tim Ruang Gambar (RG) *Mural For Gorontalo* berhasil mempopulerkan seni ini lewat aksi mewarnai dan menggambar rumah hasil renovasi program BSPS. Koordinator RG *Mural For Gorontalo*, Gannet Garna Putra mengatakan, program ini merupakan inisiasi Rachmat Gobel yang menginginkan Provinsi Gorontalo lebih berwarna dan dapat menggaet wisatawan untuk berkunjung ke Gorontalo.





Wakil Ketua DPR RI/Korinbang di depan rumah peserta program BSPS yang dihiasi mural tiga dimensi. Ide yang berasal dari Rachmat Gobel untuk mempercantik rumah dengan mural ini telah mendapat apresiasi dari Kementerian PUPR karena mampu membangun suasana yang lebih menarik dan bahkan menjadi destinasi wisata tersendiri bagi masyarakat.



Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel memperhatikan pemandangan di sekitar benteng Otahana yaitu salah satu destinasi wisata Gorontalo yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Sejak awal desember tahun 2020, tim *RG Mural For Gorontalo* yang dikomandoi Gannet sudah mulai memoles beberapa pemukiman warga hingga akhirnya ada tiga tempat atau sekitar 26 rumah yang digambari dengan seni mural. Semua rumah ini adalah hasil renovasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.

Mural For Gorontalo mendapat apresiasi dari Kementerian PUPR seperti disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid. Saat meninjau ke lokasi Kampung Warna Warni di Kelurahan Dembe Satu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Senin (4/10/2021), Khalawi mengatakan, inisiatif Rachmat Gobel ini tidak hanya membuat penampilan rumah menjadi lebih menarik, sekaligus juga membuat destinasi baru bagi wisata.

“Selain mampu meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni, program BSPS ternyata mampu mengubah kawasan kumuh menjadi salah



Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel meresmikan objek Wisata Tamendao Beach yang berada di tepi pantai Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, setelah kawasan ini direnovasi melalui program Kotaku Tanpa Kumuh.

satu objek wisata baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Khalawi.

Beraneka macam gambar yang terlihat unik, dari desain motif 2 dimensi hingga 3 dimensi yang memanjakan mata dengan warna-warni dan aneka motif. Gannet menjelaskan, untuk penentuan tema secara teknis melalui persetujuan dari Rachmat Gobel. Konten gambar sendiri beragam dan berbeda-beda mulai dari konten kartun, hewan, tumbuhan, tokoh superhero, pemandangan dan lain-lain.

“Ada banyak macam gambar mulai dari gambar hewan, tumbuhan hingga mural yang berbentuk abstrak bisa dijadikan latar foto, dan gambarnya pun sebelum dibuat kita perlihatkan dulu ke Pak Rachmat Gobel sebelum tim kita eksekusi,” terangnya.

Gannet sebagai penanggung jawab RG *Mural For Gorontalo* berharap, dengan hadirnya wisata ruang gambar yang digagas Rachmat Gobel ini,

diharapkan dapat menjadi daya pikat sendiri untuk Gorontalo. “Sebagai pemural memang kami diminta oleh Pak Rachmat Gobel untuk membuat ini di Gorontalo dengan bekerja sama Kementerian PUPR. Kita harapkan ini menjadi daya pikat sendiri untuk Gorontalo” katanya.

Diakui oleh Safril Rahman yang menjadi pengunjung Kampung Mural di Kelurahan Dembe Satu, seni mural yang ditampilkan harus terlihat unik. “Memasuki kelurahan ini mata kita mulai dimanjakan dengan gambar mural berwarna-warni dengan aneka macam gambar. Gambar keren, mulai dari gambar hewan, tumbuhan hingga mural yang berbentuk abstrak bisa dijadikan latar foto,” kata Safril Rahman seperti dikutip Liputan6.com.

Kini mural dan graffiti menjadi ikon baru di Gorontalo, termasuk di taman budaya Limboto. Gambar atau lukisan di atas media dinding, tembok atau permukaan luas yang bersifat permanen ini akan menghiasi taman budaya Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Di sektor pariwisata, seni mural memang menjadi salah satu tren untuk menarik wisatawan global. Seni ini termasuk dalam kelompok destinasi *heritage*. Melalui karyanya, seniman mural mengungkapkan sesuatu tentang politik, warisan dan identitas lokasi yang dikunjungi.

Di dunia internasional, seni mural berkembang dan bertransisi sebagai instrumen politik, warisan, dan identitas. Mengeksplorasi berbagai pesan sehingga mural lebih dari sekadar atraksi wisata atau aspek kebetulan dari budaya material pariwisata.

Dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis budaya, Rachmat Gobel juga sangat ingin mempromosikan salah satu kerajinan tradisional Gorontalo yaitu sulaman Karawo. Saat berkunjung ke salah satu pengrajin Karawo Agus Lahinta, Rachmat Gobel mengatakan, perlu ada upaya menyemangati pelaku UKM yang bergerak di bidang usaha kerajinan khas Gorontalo ini.

Melihat perjalanan Agus Lahinta yang pernah menampilkan fashion Karawo di New York Fashion Week, Rachmat Gobel yakin, seni sulaman ini tidak hanya bisa dikembangkan sebagai produk fashion, juga sebagai obyek wisata. Ia sangat mendukung langkah Agus Lahinta membuka pelatihan desain sulaman Karawo. Sambil melihat koleksi yang dipajang dan berbelanja, pengunjung dan pelanggan Rumah Karawo juga dapat melihat dan mempelajari rangkaian pembuatan Karawo. Mulai dari penerapan pola, pengirisan pola hingga menjahit kembali pola yang sudah dibuat di atas kain.

Untuk wisata, Rumah Karawo yang dikembangkan Agus juga menampilkan sejarah dan perkembangan karawo. “Jadi selain berbelanja, pengunjung Rumah Karawo juga dapat belajar dan berwisata sejarah karawo,” katanya.

(\*)



**Kini mural dan graffiti  
menjadi ikon baru di  
Gorontalo, termasuk di  
taman budaya Limboto.  
Gambar atau lukisan di atas  
media dinding, tembok atau  
permukaan luas yang bersifat  
permanen ini akan menghiasi  
taman budaya Limboto,  
Kabupaten Gorontalo.**

# Meraih Kemenangan Pemilu Untuk Kesejahteraan Rakyat

**B**agi Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang yang juga adalah Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum legislatif 2024 mendatang di wilayah Sulawesi adalah, para kader NasDem agar senantiasa memegang komitmen tercapainya kesejahteraan rakyat serta memiliki semangat militansi yang tinggi.

“Gol politik Partai NasDem adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dalam meraih kemenangan Pemilu Legislatif 2024,” kata Rachmat Gobel.

Untuk itu dalam pesannya kepada para kader NasDem yang ditemuinya, dia selalu meminta agar prinsip tersebut senantiasa menjadi pegangan para kader di wilayah Sulawesi.

Selain itu, bagi Rachmat Gobel, juga penting para kader memiliki semangat militansi untuk membangun partai NasDem sebagai partai yang maju dan moderen selain juga menekankan politik NasDem yang berorientasi pada pembangunan. Baginya, hal ini merupakan hal wajar yang harus dimiliki para kader, karena sebagai mesin partai, para kader memiliki peran yang penting dan strategis dalam memenangkan pemilihan legislatif 2024 mendatang.

Ketika memberikan pengarahannya dalam Workshop Nasional Fraksi NasDem di kota Makassar, Sulawesi Selatan, 24-26 September 2021, Rachmat Gobel mengatakan kepada para pengurus partai, pengurus sayap, badan partai dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Partai NasDem se-Sulawesi, untuk mencapai target dan menjadikan Partai NasDem sebagai partai pemenang Pemilu, sesuai tekad dan harapan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh.

Ada beberapa poin yang harus dilaksanakan:



Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo, di kota Gorontalo, 31 Maret 2021.

A. Menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) untuk mengukur kinerja partai. Dia mengutarakan setidaknya terdapat enam indikator:

- Membangun identitas partai, dan menambah jumlah perolehan kursi dewan;
- Membangun ketokohan dengan terus berjuang bersama rakyat;
- Membangun kekuatan, jejaring, struktur dan meningkatkan kapasitas kader sampai ke pelosok tanah air;
- Membangun jejaring eksternal;
- Meningkatkan keterikatan dengan konstituen;
- Fokus pada tema tertentu, sesuai dengan daerah masing-masing.

B. Meningkatkan kohesivitas antara anggota dalam suatu kelompok, di mana dalam Partai NasDem kohesivitas mencakup:

- Internal struktur;
- Struktur dengan eksekutif;
- Struktur dengan legislatif;



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel sebagai Ketua Pemenang Pemilu Partai Nasdem memukul gong menandai dibukanya Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo, di kota Gorontalo, 31 Maret 2021.

- Struktur dengan sayap dan badan; serta
- Struktur dan kader.

Rachmat Gobel menggambarkan bagaimana dalam Pileg 2019, Partai NasDem telah menghasilkan 59 kursi di DPR RI, 186 kursi DPRD Provinsi dan 1.629 kursi DPRD Kabupaten/Kota, sehingga total jumlah anggota legislatif dari Partai NasDem di seluruh wilayah Indonesia hasil Pemilu 2019 sebanyak 1.864 anggota (naik 24,1%) jika dibandingkan dengan pemilu 2014.

Rachmat Gobel menegaskan berdasarkan usulan dari DPW Partai NasDem seluruh Indonesia, Partai NasDem menargetkan 111 kursi DPR RI, 329 kursi DPRD Provinsi dan 2.469 kursi DPRD Kabupaten/Kota.

Sedangkan bagi kemenangan Partai NasDem di wilayah Sulawesi, Rachmat Gobel memaparkan beberapa target yang telah direncanakan bagi peraihan suara dalam Pileg 2024.



Memeriah suasana Rakorwil, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel sebagai Ketua Pemenang Pemilu Partai Nasdem memainkan angklung bersama kader partai.

### **Provinsi Gorontalo**

Untuk provinsi Gorontalo yang adalah daerah pemilihan Rachmat Gobel, dia mengatakan optimismenya Partai NasDem di Gorontalo bisa memenangkan posisi gubernur dan parlemen dalam Pemilu 2024. NasDem Gorontalo menargetkan minimal meraih dua kursi di DPR RI. “Caranya, adalah dengan terus bekerja keras dan berbuat yang terbaik di masyarakat,” ujar Gobel.

Menurut Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai NasDem ini, NasDem Gorontalo memikirkan konsep yang sudah berjalan di masyarakat. Baginya, untuk meraih kesuksesan peraihan kursi bagi provinsi Gorontalo, baik di DPR RI, Provinsi, Kabupaten/Kota, ia hadirkan sistem politik pembangunan, guna melayani masyarakat dan bisa memberikan nilai tersendiri kepada mereka. Pembangunan bukan hanya sekedar membangun sebuah rumah



Wakil Ketua DPR RI/  
Korinbang Rachmat  
Gobel beserta peserta  
Rakorwil Partai NasDem  
Gorontalo pada April  
2021



atau bangunan. Tetapi bagaimana bisa membangun kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke depan.

Legislator NasDem dari daerah pemilihan (Dapil) Gorontalo itu juga mengatakan, dia menargetkan DPRD Provinsi Gorontalo minimal meraih 10 kursi. Sedangkan seluruh kabupaten/kota memiliki 24 kursi DPRD.

Ketika membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW Partai NasDem Gorontalo 31 Maret 2021 di kota Gorontalo, Rachmat Gobel meminta seluruh pengurus maupun anggota DPRD dari Partai NasDem untuk memahami tujuan berpartai dan berpolitik. Menurutnya, berpolitik bukan hanya sekedar berkumpul untuk memenangkan calon melainkan bagaimana bisa memberi dan melayani masyarakat melalui partai politik.

Bagi masyarakat Gorontalo, langkah politik NasDem dan Rachmat Gobel, sangat diterima dan didukung penuh oleh berbagai golongan masyarakat di sana. Hal ini, karena masyarakat melihat hampir setiap programnya, menyentuh kebutuhan masyarakat, baik masyarakat yang lemah ekonominya maupun masyarakat yang berusaha meningkatkan produk ekonomi pertaniannya.

Salah satu gagasan Rachmat Gobel yang terkenal dalam membangun Provinsi Gorontalo adalah Visi 2051 yang lebih fokus kepada tiga sektor, yakni sektor pertama, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sedangkan sektor kedua usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan terakhir sektor pangan dan herbal.

Dengan gagasan ini, Rachmat Gobel mengajak kader Partai NasDem untuk menjalani laku politik pembangunan. Menurut dia politik pembangunan adalah politik gagasan sesuai dengan visi Partai NasDem sebagai partai yang mengusung restorasi.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu basis terkuat Partai NasDem di Sulawesi. Dalam Pileg 2019 lalu Partai NasDem menempati urutan kedua dengan jumlah suara 169.509 setelah Golkar yang menempati urutan pertama dengan perolehan suara 194.660 dan Rachmat Gobel meraih kursi DPR RI.

Sedangkan jumlah kursi Partai NasDem secara keseluruhannya berjumlah 24 kursi yaitu: satu kursi di DPR RI, enam kursi DPRD Provinsi, enam kursi di Kabupaten Bone Bolango, empat kursi Kabupaten Gorontalo, lima kursi Kabupaten Gorontalo Utara dan dua kursi di Kabupaten Boalemo.

### **Provinsi Sulawesi Selatan**

Sementara untuk provinsi Sulawesi Selatan, Rachmat Gobel selaku Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem,

menargetkan NasDem sebagai partai pemenang Pileg 2024. Adapun perinciannya adalah untuk DPR RI semula 4 kursi menjadi 6 kursi, DPRD Provinsi dari 12 kursi menjadi 16 kursi, sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota, semula 105 kursi menjadi 172 kursi.

Rachmat Gobel meminta agar seluruh pengurus dan kader NasDem Sulawesi Selatan berjuang dan bekerja keras pada Pileg 2024 mendatang. “Tidak ada suatu kesuksesan tanpa bekerja keras dan berkeringat. Semuanya harus bersatu padu meraih kemenangan,” kata Rachmat Gobel.”

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel, menjelaskan bagaimana pengalaman Partai NasDem dalam mengikuti Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020.

Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bekal yang cukup bagi NasDem. Partai NasDem ada pada kisaran 3 (tiga) besar pemenang pilkada, untuk itu dia menekankan, pada Pilkada serentak 2024, prestasi partai NasDem untuk meraih kemenangan di Sulsel harus ditingkatkan lagi.

“Selaku Ketua Pemenangan Sulawesi saya minta kepada seluruh fungsionaris partai untuk segera mempersiapkan kader-kader terbaik yang ada di Sulsel,” kata Rachmat Gobel.

Kepada para kader Partai NasDem di Sulsel, Rachmat Gobel menekankan NasDem Sulsel harus menjadi pemenang Pilkada 2024 di 24 Kabupaten/Kota. Terutama menurut dia, pada Pilkada 2024 nanti, target pemilihan Gubernur Sulsel dimenangkan oleh kader terbaik dari Partai NasDem.

Sesuai keputusan Rakorsus, Rachmat Gobel meminta agar segera membenahi dan memperkuat Struktur organisasi baik DPW/DPD/ DPC/ DPRT. Dia juga mengapresiasi upaya DPW Sulsel yang menargetkan untuk merampungkan pembenahan struktur partai dengan peraturan partai No 1 Tahun 2020 mencapai 100% disertai E-KTA nya, sesuai target DPP Partai NasDem Juni 2021. Apresiasi lainnya adalah telah tersebarnya papan nama, bendera NasDem yang telah tersebar di seluruh desa-desa di Sulsel.

“Program ini sangat strategis untuk mencapai kemenangan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Kinerja Partai NasDem Sulsel patut menjadi contoh untuk DPW lainnya di seluruh Sulawesi,” kata Rachmat Gobel.

Ada program-program khusus NasDem untuk Sulsel dalam meraih perhatian masyarakat bagi pemenangan NasDem di sana. Sebagai contoh di kota Makassar akan diberikan 10 program “Kotaku” (Kota Tanpa Kumuh), sedangkan untuk Kabupaten/Kota lainnya akan menyusul.

Program lainnya adalah “Pisew” (Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah), seperti pembangunan jembatan, jalan yang menghubungkan dari desa ke desa untuk pengembangan ekonomi. Program BSPS (Bantuan



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama kader Partai NasDem Sulawesi Utara.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberi pengarahan dalam rapat konsolidasi Partai Nasdem di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.



Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel didepan kader partai dalam kunjungan ke Kabupaten Pangkep.



Penyerahan Bendera Pataka Partai NasDem dari Koordinator Teritorial Pemenangan Pemilu Sulawesi Partai NasDem Rachmat Gobel kepada Ketua DPW Partai NasDem yang Baru Periode 2021-2024 Hamim Pou tanggal 30 Juli 2021 di Grand Palace Convention Center, Gorontalo yang dihadiri oleh Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem Kabupaten/ Kota serta kader Partai NasDem (Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota).



Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, ketika memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Selatan, di kota Makassar, 29 Maret 2021.



Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, bersama pengurus DPP Partai NasDem dan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Selatan, dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil).



Rachmat Gobel sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Partai NasDem Sulawesi mengunjungi Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Stimulan Perumahan Swadaya), pengembangan koperasi dan pertanian serta lainnya.

Rachmat Gobel menghimbau agar program-program tersebut memberikan dampak maksimal bagi kemenangan partai di provinsi Sulsel, dan menyarankan agar pengelolaannya melibatkan struktur partai dan anggota legislatif di wilayahnya masing-masing.

### **Provinsi Sulawesi Utara**

Untuk Sulawesi Utara terbilang istimewa. Di masa lalu, Partai NasDem tidak memiliki kursi dari Sulawesi Utara di DPR RI, namun di Pileg 2019, NasDem Sulut meraih 2 kursi untuk DPR RI. Partai NasDem bertekad akan menjadi partai nomor satu di Sulawesi Utara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Tentu saja pencapaian di Pileg 2019, memompa semangat para kader agar menjadi nomor satu di provinsi tersebut.

Hal istimewa lainnya adalah, sebelumnya NasDem belum memiliki fasilitas yang cukup, namun bisa mencapai nomor dua di Sulawesi Utara.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama kader muda Partai NasDem dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, se usai rapat konsolidasi untuk pemenangan partai.

Sejalan dengan perkembangan yang ada dengan fasilitas yang semakin mumpuni, dan militansi para kader, NasDem tergetkan di pemilu mendatang bisa mencapai nomor satu di Sulawesi Utara.

Adalah Rachmat Gobel mengatakan ketika memberikan arahnya dalam Rakorwil DPW Partai NasDem Sulawesi Utara 26-27 Mei 2021 lalu. Menurut Rachmat Gobel, Partai NasDem Sulawesi Utara harus menjadi pemenang di Pileg 2024 dengan memperoleh target sebagai berikut:

- DPR RI, dalam Pileg 2019 memperoleh 2 kursi untuk dipertahankan menjadi 2 kursi (tetap).
- DPRD Provinsi semula 9 kursi menjadi 12 kursi.
- DPRD Kabupaten/Kota, perolehan sebelumnya 55 kursi menjadi 65 kursi.

Rachmat Gobel, selaku Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem itu mengatakan tantangan yang mendatang akan semakin berat dihadapi NasDem Sulut dalam Pilkada Serentak 2024. Untuk itu menurutnya, ia meminta kepada seluruh fungsionaris partai



Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, bersama pengurus dan kader DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Utara.



Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, memberikan sambutan dalam silaturahmi bersama tokoh masyarakat kota Bitung, November 2020.

untuk segera mempersiapkan kader-kader terbaik yang ada di Sulawesi Utara untuk mengikuti kontestasi dalam pilkada yang akan datang.

“Saya minta NasDem menjadi pemenang Pilkada 2024 di Sulawesi Utara,” kata Rachmat Gobel dalam sambutannya.

Rachmat Gobel sendiri sepakat dalam Pemilu 2024, Partai NasDem dihadapkan kepada tantangan yang cukup besar. Menurut dia ada 2 hal utama yang dihadapi yaitu:

- Pertama, bagaimana mempertahankan perolehan Pileg 2019 dan memenangkan kembali kepala daerah yang sebelumnya dimenangkan oleh Kader NasDem.
- Kedua bagaimana NasDem Sulut merumuskan strategi untuk memperoleh basis suara pada Pemilu 2024.

### **Provinsi Sulawesi Barat**

Perhatian khusus dari DPP Partai NasDem dalam memenangkan Pemilu 2024 di wilayah Sulawesi sangat besar. Berbagai strategi dan target telah dilakukan, salah satunya adalah menghidupkan dan menggerakkan mesin-mesin pemenangan partai yang ada.

Partai Nasdem bertekad untuk memenangkan Pemilu Serentak 2024, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu berdasarkan mandat Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, mantan Gubernur Sulbar dua periode Anwar Adnan Saleh ditunjuk sebagai ketua DPW NasDem Sulbar.

Rachmat Gobel mengatakan, dia meyakini dibawah kepemimpinan Anwar Adnan Saleh sebagai Ketua DPW Sulbar, konsolidasi seluruh kekuatan partai menghadapi tugas dan fungsi NasDem sebagai partai politik, khususnya untuk menghadapi Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2024 dan Pilkada serentak 2024 mendatang akan berjalan dengan sukses sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

“Pak Adnan politisi berpengalaman dan sukses sebagai Gubernur Sulbar dua periode. Tentunya dengan pengalaman yang ada, dapat membawa kesuksesan bagi Partai NasDem Sulbar yang dipimpinnya,” tegas Rachmat Gobel.

Dalam arahannya di Rakorwil DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat 24-26 September 2021 lalu di Makassar, Sulawesi Selatan, sesuai target pemenangan NasDem di wilayah Sulawesi, NasDem Sulbar harus menjadi pemenang Pileg 2024, dengan memperoleh target kursi sebagai berikut:

- DPR RI, semula 1 kursi dipertahankan tetap menjadi 1 kursi;
- DPRD Provinsi, semula 6 kursi menjadi 7 kursi;
- DPRD Kabupaten/Kota semula 20 kursi menjadi 24 kursi.



Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, sedang berbicara dengan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, ketika menghadiri acara Pelantikan dan Rakorwil DPW Partai NasDem Sulbar, di kota Makassar, 24–26 September 2021.



Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, memberikan sambutan dalam acara Pelantikan dan Rakorwil DPW Partai NasDem Sulawesi Barat, di kota Makassar, 24–26 September 2021.



Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, bersama kader Partai NasDem di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Oktober 2020.

Ketua DPW NasDem Provinsi Sulbar Anwar Adnan Saleh mengatakan dengan dipercayakannya memimpin NasDem Sulbar, Anwar bertekad untuk memenangkan perhelatan politik 2024 di enam Kabupaten Sulbar. “Saya masih ingin memperjuangkan kemajuan Sulbar. Apapun akan saya korbankan. Saya ingin membesarkan NasDem di Sulbar, sehingga saya menerima amanah sebagai Ketua NasDem Sulbar,” tegasnya.

### **Provinsi Sulawesi Tenggara**

Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, mengatakan optimismenya bahwa Partai NasDem akan meraih kemenangan di provinsi Sultra. Hal ini dia melihat sejalan dengan semakin gencarnya mesin pemenangan partai yang dia pimpin untuk meraih kemenangan dalam Pilkada 2024 mendatang.

“Kami sangat yakin Partai NasDem akan memenangi Pilkada di Sultra 2024 mendatang, karena semakin kuatnya konsolidasi partai dan meningkatnya militansi para kader di sini serta tekad yang besar dari para kader dan pengurus partai baik pengurus di DPW/DPD/DPC/DPRT, jelas Ali Mazi yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara.

Sejalan dengan Ali Mazi, Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel mengatakan target kursi untuk perolehan kemenangan Pileg 2024 di Sulawesi Tenggara adalah kursi DPR RI yang

sebelumnya memperoleh 1 kursi, menjadi 2 kursi. DPRD Provinsi dari 5 kursi menjadi 6 kursi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2019 meraih 55 kursi ditargetkan meningkat menjadi 65 kursi.

Perolehan ini tidak muluk, karena merupakan target dengan perolehan suara yang signifikan dengan melihat kondisi yang ada sekarang. Namun Rachmat Gobel mengingatkan para kader NasDem di Sultra, perolehan tersebut harus dibarengi pula dengan bekerja keras.

“Tidak ada cerita, semua kesuksesan dan keberhasilan hanya bisa diraih dengan ketekunan dan kerja keras,” kata Ketua Pemenangan NasDem Sulawesi itu.

### **Provinsi Sulawesi Tengah**

Dalam menghadapi Pileg 2024, Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah optimis peraihan suara akan lebih baik dibandingkan dengan Pileg periode sebelumnya. Hal ini mengingat perolehan suara Partai NasDem di provinsi tersebut dalam Pilkada 2020 sangat signifikan.

Pada Pilkada 2020, NasDem di wilayah Sulteng berhasil mengantar Rusdi Mastura dan Ma'mun Amir menjadi pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng.

Selain itu, NasDem juga menang di Kabupaten Toliti-toli, Tojo Una-una, Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai.

Kemudian pada Pileg 2019, NasDem berhasil meraih kursi Ketua DPRD Sulteng yang saat ini dijabat oleh Nilam Sari Lawira.

Tidak mengherankan Provinsi Sulteng menjadi basis utama Partai NasDem, berdasarkan prestasi yang diraih dari hasil pemilu dan pilkada.

Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Wilayah Sulawesi, Rachmat Gobel, mengatakan kader dan pengurus serta simpatisan NasDem Sulawesi Tengah bertanggung jawab besar untuk memenangkan Pemilu 2024.

“Tanggung jawab berada di punggung semua kader dan pengurus Partai Nasdem di Sulteng. Semua kader bertanggung jawab menangkan NasDem di Pileg dan Pilkada,” kata Rachmat Gobel.

Rachmat Gobel mengemukakan, semua kader dan pengurus partai termasuk simpatisan harus memiliki komitmen dan cita-cita besar untuk memenangkan NasDem di Pilkada maupun Pileg dengan tetap menjunjung tinggi dan mengedepankan tujuan dari Partai NasDem, untuk membangun kesejahteraan masyarakat lewat gerakan restorasi.



Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, ketika kampanye Pilkada Sulawesi Tengah, mendukung Rusdi Mastura dan Ma'mun Amir, November 2020.



Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, bersama kader Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah, November 2020.

NasDem pada pemilu 2019 berhasil mendapat 65 kursi legislatif terdiri dari satu kursi untuk DPR RI, tujuh kursi DPRD Provinsi Sulteng dan 57 kursi di DPRD Kabupaten/Kota.

NasDem berhasil mendapat jatah ketua DPRD di empat kabupaten, dan tujuh wakil ketua DPRD di tujuh kabupaten.

### **Sebagai Tokoh Nasional**

Sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel tidak hanya memusatkan perhatiannya kepada wilayah Sulawesi saja, namun sebagai salah satu tokoh Nasional, Rachmat Gobel juga berbicara mengenai kondisi wilayah lain di Indonesia. Salah satunya, Rachmat Gobel berbicara dalam Rakorwil DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Timur yang berlangsung 10-11 Desember 2021, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, selama 2021, Rachmat Gobel telah memberikan perhatian khusus untuk provinsi Nusa Tenggara Timur berupa beberapa program yang telah diperjuangkan dan dilaksanakan diantaranya bantuan pupuk non subsidi yang diberikan di delapan kabupaten sejumlah kurang lebih 10 ton, bantuan pembangunan irigadi di lima kabupaten dengan jumlah 12 titik, serta bantuan program pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi wilayah (PISEW) yang diberikan di empat Kabupaten se provinsi NTT dengan jumlah empat titik.

Selain itu juga dijelaskan, selaku salah satu pimpinan di DPR RI, Rachmat Gobel telah ditugaskan menjadi Ketua Tim Pengawasan Pembangunan Wilayah Perbatasan, salah satunya wilayah perbatasan yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Motaain, Kabupaten Belu, NTT.

Pos Lintas Batas Negara Motaain, NTT adalah salah satu percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara selain di Aruk (Provinsi Kalimantan Barat), dan Skouw (Provinsi Papua) seperti yang diamanatkan dalam Instruksi presiden Nomor 1 2021 yang ditandatangani presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 11 Januari 2021.

Rachmat Gobel menjelaskan sebagai Ketua Timwas pembangunan wilayah perbatasan, ia telah menugaskan sebuah tim yang diwakilkan Yakobus Jacki Uly (Anggota DPR RI Komisi II Fraksi NasDem) untuk melakukan kunjungan dan pengawasan ke perbatasan Indonesia-Timor Leste 12-14 November 2021.

Pada bagian lainnya ia mengingatkan agar terus membangun kekompakan dan solidaritas partai dan kader serta berjuang dengan semangat, nilai-nilai, dan ideologi yang sesuai dengan konstitusi partai untuk memenangkan Partai NasDem di provinsi Nusa Tenggara Timur.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel, memberikan sambutan dan Rakorwil DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Timur, di Labuan Bajo, NTT, 10 Desember 2021.

Dari rangkaian tulisan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Wilayah Sulawesi, Rachmat Gobel bukan saja milik masyarakat Sulawesi atau Gorontalo saja, melainkan tokoh nasional yang juga memperhatikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat luar Sulawesi. Bahkan kiprahnya juga dikenal secara luas secara internasional.

Selain itu sikap dan perilaku politiknya juga segaris dengan karakter dan dasar kepribadian seorang Rachmat Gobel yang selalu bekerja keras dan menikmati prosesnya. Dalam setiap masa resesnya yang dijalankannya, ia selalu mengunjungi konstituennya, berdialog, mencari dan menemui berbagai masalah klasik yang ada di masyarakat, yaitu problem distribusi dan alokasi kebijakan dan program yang datang dari sisi eksekutif atau pemerintah.

Dengan turun langsung ke lapangan, mendengar dan melihat kondisi langsung yang disaksikan dengan semangat dan bekerja keras niscaya tekad Rachmat Gobel bagi pemenangan partai NasDem di wilayah Sulawesi sudah ada di depan mata. (\*)

**(4)**

**IDE DAN  
GAGASAN  
UNTUK  
KEPENTINGAN  
NASIONAL**

**“Menjaga warisan  
keinginan yang luhur  
dari pahlawan bangsa”**

# Catatan Untuk Agenda *Road to G20 Indonesia* 2022

Pertama-tama tentu kita perlu bersyukur atas kesempatan Indonesia menjadi Presidensi G20 tahun 2022. Meski diselenggarakan dalam situasi yang tidak mudah—di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia—sebagai bangsa tentu kita semua wajib untuk mensukseskan pertemuan G20 pada 2022. Ini merupakan momentum Indonesia berkontribusi besar memimpin pemulihan ekonomi dunia.

Kedudukan sebagai Presidensi memberi ruang yang luas bagi Indonesia untuk berperan besar dalam diplomasi ekonomi global. Dengan tema *Recover Together, Recover Stronger*, Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk memfokuskan agenda G20 nanti pada tiga topik besar yaitu arsitektur kesehatan global, transisi berbasis digital dan transisi energi bersih dan terjangkau. Ketiganya merupakan masalah krusial yang dihadapi dunia dan juga menjadi concern Indonesia.

Ada sejumlah catatan yang mungkin bisa disampaikan sebagai urun rembug. Bisa dipastikan, perbedaan pandangan setiap negara dalam menyikapi setiap topik akan cukup keras, bahkan mungkin akan sangat keras. Kemampuan independensi Indonesia akan diuji.

Pertanyaan kunci yang harus bisa dijawab adalah bagaimana mengawinkan kepentingan nasional dan kepentingan global agar kita bisa

Tulisan ini merupakan sambutan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam Webinar yang diselenggarakan Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas, ITB dengan topik *Save The World Recover Together, Recover Stronger And Smarter*, pada 9 Desember 2021.

mendapat manfaat besar ini. Pertemuan 2022 nanti harus bisa menjadi *show case* potensi dan prospek Indonesia. Pemahaman yang akurat tentang persoalan dalam negeri menjadi sangat penting agar bisa memperjuangkan kepentingan nasional searah dengan kepentingan global.

### **Arsitektur Kesehatan Global**

Terkait dengan topik arsitektur kesehatan global misalnya, kita harus meyakinkan dunia bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia berjalan efektif. Fakta menunjukkan, berbagai langkah yang dilakukan membuahkan hasil mengembirakan, penyebaran virus kian melandai. Penanganan di sektor ekonomi juga cukup membanggakan, tekanan terhadap perekonomian nasional bisa ditangani sehingga laju pertumbuhan Indonesia tergolong lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN.

Terkait isu penting dunia saat ini yaitu ketimpangan vaksinasi, dengan pengalaman yang dihadapi selama ini, Indonesia harus bisa mendorong anggota G20 untuk bahu membahu membantu penyediaan vaksin.

Sperti kita ketahui, ketimpangan vaksinasi adalah salah satu penyebab lambatnya pemulihan dunia dari pandemi Covid-19. Kondisi ini menyebabkan risiko terjadinya mutasi virus terus meningkat. Peluang munculnya varian baru masih tinggi dan semakin sulit ditangani seperti varian omicron yang baru-baru ini muncul dari Afrika Selatan. Kuat dugaan, varian ini muncul karena vaksinasi di negara ini masih sangat rendah dan juga di sejumlah negara Afrika lainnya.

Ketimpangan vaksinasi semakin memperlambat pemulihan ekonomi dunia, baik negara maju, negara berkembang maupun negara miskin. Dari berbagai perkiraan yang ditulis media massa, perekonomian dunia mengalami kerugian US\$ 2,3 triliun akibat keterlambatan vaksinasi.

Indonesia juga sangat berkepentingan terhadap ketersediaan dan distribusi vaksin. Meski tergolong cepat, sampai saat ini tingkat vaksinasi masih mencapai di bawah 77% seperti yang ditargetkan pemerintah sebanyak 208 juta orang. Per Minggu (5/12), capaian vaksinasi dosis pertama baru 68,38% dari target dan dosis kedua 47,54%.

### **Transisi Digital**

Topik transisi berbasis digital sangat penting strategis bagi Indonesia. Mewakili negara berkembang, Indonesia perlu bersuara lantang terhadap arus digitalisasi yang semakin deras. Di satu sisi digitalisasi memang memberi peluang yang sangat besar, namun juga menimbulkan ekkses yang harus bisa dikendali agar tidak menimbulkan kerugian.

Persoalannya bukan sebatas ketimpangan akses atau lain sebagainya, tapi juga menyangkut tata kelola aliran data lintas batas. Indonesia perlu menekankan isu ini dalam G20, pasalnya masalah ini kian memperparah kesenjangan digital.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, persoalan data lintas batas sangat penting agar tidak hanya menjadi subordinat dalam ekosistem digitalisasi global. Keuntungan terbesar hanya diraih beberapa negara dan perusahaan digital global, yang dengan kemajuan teknologinya mampu

mengontrol data lintas batas. Kita jangan hanya akan menjadi penyedia data mentah untuk *platform* digital global, namun harus membayar mahal untuk kecerdasan digital yang dibangun oleh negara maju, padahal datanya diperoleh dari kita sendiri.

Disamping itu, fakta juga menunjukkan, *e-commerce* yang berkembang pesat bersama kemajuan digitalisasi, telah menimbulkan eksek dan potensi kerugian yang besar bagi Indonesia. Peningkatan transaksi *online* misalnya, telah membuat semakin luasnya barang impor masuk ke Indonesia. Menurut data Dirjen Bea Cukai, kiriman barang *e-commerce* yang masuk ke Indonesia melonjak tajam, dari hanya 19,57 juta pake pada 2018 menjadi 49,69 juta paket pada 2019. Sudah bisa dipastikan, saat ini angkanya kian membesar.

Masalahnya bukan sekedar arus impor, tapi telah sangat mengganggu kegiatan ekonomi dalam negeri, terutama UMKM. Dan ini sejalan dengan laporan UNCTAD, dimana perkembangan data lintas batas ini meningkatkan ketidakpastian dan ini sangat merugikan usaha mikro dan kecil. Maraknya kasus pinjaman on-line oleh perusahaan *fintech* ilegal dari luar negeri juga bisa menjadi contoh.

Melalui pembahasan topik transisi digitalisasi, jika sebagai presidensi bisa menyuarakan dengan keras, Indonesia bepeluang memberikan kontribusi yang besar dalam membangun tata kelola data lintas batas global yang adil. Untuk itu, Indonesia jangan sampai terjebak oleh kepentingan negara kuat Amerika, Eropa dan China. Seperti kita tahu di antara pemain utama dalam

**Pertanyaan kunci yang harus bisa dijawab adalah bagaimana mengawinkan kepentingan nasional dan kepentingan global agar kita bisa mendapat manfaat besar ini.**

ekonomi digital ini, mereka mempunyai pendekatan yang berbeda dalam pendekatan tata kelola data lintas batas.

### **Transisi Energi Bersih**

Topik ini memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen mengatasi tantangan perubahan iklim (*climate change*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Mendesak anggota G20 yang menjadi penyumbang CO<sub>2</sub> terbesar untuk lebih aktif mengurangi emisi yang mereka hasilkan.

Berdasarkan data, lima negara penyumbang terbesar adalah China, Amerika Serikat, India, Rusia dan Uni Eropa. Ke-lima negara ini menyumbang 60% emisi CO<sub>2</sub> global. China misalnya, tiap tahun menghasilkan 10,66 miliar ton CO<sub>2</sub> atau 30,65% dari total dunia 36,7 miliar ton. Amerika Serikat 4,71 miliar ton (13,54%), India, Rusia dan Uni Eropa masing-masing sekitar 2,5 miliar ton, atau masing-masing memberi kontribusi sekitar 7%.

Melalui *Conference Of Parties* (COP-21), Indonesia telah menyatakan komitmen untuk menekan emisi CO<sub>2</sub> sebesar 29% pada 2030, dan bisa sampai 41% dengan bantuan internasional. Target ini antara lain bisa dicapai dengan meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan dari saat ini sekitar 11% menjadi 23%.

Perlu meyakinkan anggota G20 bahwa Indonesia mempunyai kedudukan strategis dan mempunyai kesiapan untuk berperan besar dalam membantu dunia menekan emisi CO<sub>2</sub>. Menawarkan sejumlah proyek hijau (*green project*) yang saling menguntungkan menjadi kunci dan sekaligus bisa mendatangkan investasi dalam jumlah besar. (\*)

**Perlu meyakinkan anggota G20 bahwa Indonesia mempunyai kedudukan strategis dan mempunyai kesiapan untuk berperan besar dalam membantu dunia menekan emisi CO<sub>2</sub>.**

# Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Penyerapan Dana PEN, Belanja K/L dan Daerah

**Jakarta:** Agar target pertumbuhan ekonomi 3,8%-4,5% pada 2021 ini bisa tercapai, Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel minta agar pemerintah mempercepat realisasi atau penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah. Langkah ini sangat diperlukan karena salah satu penyebab tidak tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III lalu adalah akibat melambatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah.

“Kalau dilihat dari data BPS, selain terjadinya perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III lalu adalah minimnya dorongan dari sektor konsumsi pemerintah. Untuk itu, pada kuartal IV ini pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara, baik melalui PEN, K/L dan pemerintah daerah,” kata Rachmat Gobel.

Badan Pusat Statistik mengumumkan, capaian pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal III lalu (Juli-September) hanya mencapai 3,51% atau jauh di bawah ekspektasi. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III bisa mencapai 4,5%.

Melesetnya capaian tersebut terutama disebabkan terjadinya tekanan luar biasa pada sektor konsumsi, akibat penerapan PPKM Darurat dalam penanganan Covid-19 Gelombang Kedua yang berlangsung dari pertengahan Juli sampai September. Sepanjang Kuartal III, pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1,03% (year-on-year/YoY), angka ini jauh di bawah Kuartal II yang mencapai pertumbuhan 5,96%. Begitu juga konsumsi pemerintah, dimana pada pertumbuhannya sepanjang Kuartal III hanya 0,66% (YoY), padahal pada kuartal II/2021 tumbuh 8,03%.

Tulisan ini merupakan pers release Wakil Ketua DPR RI/Korinbang atas kinerja pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2021.

“Jika tidak ada upaya kongkrit untuk mendorong pertumbuhan konsumsi, termasuk di sektor pemerintah, bisa dipastikan pencapaian target pertumbuhan 2021 ini bisa terganggu dan ini akan memberi dampak luas,” kata Rachmat Gobel.

Menurut data Kantor Menko Perekonomian, per 5 November lalu realisasi penyerapan dana PEN baru mencapai baru mencapai 61,3% atau senilai Rp 456,35 triliun dari pagu Rp 744,77 triliun. Penyerapan ini tergolong lambat, karena waktu yang tersisa untuk menuntaskan realisasi dana ini agar sesuai target tinggal 2 bulan.

Penyerapan terendah pada dukungan UMKM dan korporasi yang baru mencapai Rp 62,60 triliun atau 38,5% dari pagu Rp 162,40 triliun. Penyerapan tertinggi pada insentif usaha, realisasi insentif usaha mencapai 95,8% dari pagu Rp 62,83 triliun dan perlindungan sosial mencapai Rp 125,10 triliun atau 67% dari pagu Rp 186,64 triliun.

Lainnya, realisasi anggaran untuk klaster kesehatan mencapai 54,3% atau Rp 116,82 triliun dari pagu Rp 214,96 triliun dan program prioritas mencapai Rp 65,69 triliun atau 55,7% dari pagu Rp 117,94 triliun.

Mengenai penyerapan dana APBD, menurut data Kementerian Keuangan melaporkan, melaporkan realisasi belanja hingga akhir September masih rendah, baru mencapai Rp 603,57 triliun secara *year on year* (yoy) atau kontraksi 2,11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercatat Rp 616,59 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 49,56% dari pagu belanja sebesar Rp 1.217,74 triliun.

“Baik pemerintah pusat maupun daerah harus segera mendorong percepatan belanja untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sisa waktu Kuartal IV ini,” ujar Rachmat Gobel.

Rachmat Gobel cukup yakin, jika pemerintah pusat dan daerah mampu mendorong percepatan realisasi pos belanja APBN dan APBD, peluang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi untuk 2021 bisa tercapai. Dengan terus diperlonggarnya pelaksanaan PPKM, mobilitas ekonomi diharapkan bisa meningkat seperti terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

Berdasarkan survei Bank Indonesia, seiring dengan diperlonggarnya PPKM, sejak Oktober lalu konsumen kembali optimistis akan kondisi perekonomian. IKK pada Oktober berada di level 113,4 atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya pada 95,5.

“Momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sepanjang Kuartal IV ini cukup terbuka, dan ini yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah dengan mempercepat penyerapan pos belanja APBN dan APBD,” kata Rachmat Gobel. (\*)

# Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19

**M**eski sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun, sebagian besar negara masih belum bisa menuntaskan masalah pandemi ini, termasuk Indonesia. Muncul dan menyebarnya varian baru serta risiko terjadinya lonjakan kasus masih jadi agenda utama.

Seperti kita tahu, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak luas pada sektor kesehatan, tapi juga telah membuat perekonomian anjlok ke titik terendah. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2020 lalu ekonomi dunia mengalami kontraksi -3,6%. Hal yang sama juga sangat dirasakan Indonesia, dimana perekonomian nasional mengalami kontraksi -2,07%.

Pada tahun 2021 ini, pemulihan ekonomi global tengah berjalan dan prospeknya memang cukup optimistis. IMF memperkirakan, tahun ini ekonomi dunia bisa tumbuh sekitar 6%.

Proses pemulihan ekonomi Indonesia juga tengah bergerak. Pekan lalu pemerintah mengumumkan, secara year on year (yoy) atau dibandingkan kuartal II 2020, ekonomi pada kuartal II 2021 tumbuh 7,07%. Capaian ini memang cukup membesarkan hati, namun demikian kita juga perlu menyadari, secara *kuartal to kuartal (q to q)* yaitu pertumbuhan kuartal II 2021 dibandingkan kuartal I 2021 masih sekitar 3,1% atau jauh di bawah

rata-rata sebelum pandemi 4%-5%. Apalagi menurut BPS, pertumbuhan kuartal II 2021 belum banyak berpengaruh pada serapan tenaga kerja.

Untuk itu, sangat penting untuk mencermati kualitas proses pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung saat ini. Tentu tidak ada yang mengharapkan, proses pemulihan ini akan menimbulkan beban baru berupa meningkatnya ketimpangan.

Tantangan ke depan memang tidak hanya sekedar bagaimana mencapai pertumbuhan yang tinggi, tapi juga meningkatkan kualitas pembangunan itu sendiri. Isu utama pembangunan ke depan adalah membawa Indonesia ke luar dari *middle income trap*. Ini memang tidak mudah.

Secara struktur, pelaku ekonomi nasional masih sangat didominasi sektor UMKM yang secara kualitas masih sangat membutuhkan insentif dalam berbagai bentuk. Tidak hanya menyangkut permodalan, tapi juga akses pasar dan peningkatan efisien sumber daya manusia dan teknologi. Inilah tantangan terbesar yang harus dijawab agar pembangunan ekonomi bisa dirasakan semua lapisan bangsa Indonesia.

### **Peran IJB-Net**

Baik dalam kerangka *government to government (G to G)* maupun *business to business (B to B)*, dinamika hubungan kerjasama Indonesia-Jepang berjalan sangat baik dan saling menguntungkan. Bangsa Indonesia dan bangsa Jepang telah melihat dan merasakan, hubungan kedua negara berjalan setara sebagai mitra strategis, dalam semangat *heart to heart*. Hubungan yang terjalin sejak 1958 tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, juga semakin mendekatkan ke dua bangsa secara budaya, sosial dan politik.

Sejak Indonesia memasuki era penanaman modal asing (PMA) pada 1967, Jepang telah menjadi mitra bisnis terbesar. Tidak hanya menjadi mitra dagang utama, Jepang juga adalah salah satu investor terbesar di Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020), realiasi investasi Jepang di Indonesia mencapai US\$ 39,1 miliar atau berada di posisi ke dua setelah Singapura US\$ 77,2 miliar.

Sampai saat ini, tidak kurang dari 1.500 perusahaan Jepang bermitra dan beroperasi di Indonesia dengan kontribusi nilai tambah US\$ 52,5 miliar atau 10% total PDB Indonesia. Tenaga kerja yang diserap 4,7 juta orang, di mana 93,3% di antaranya adalah pekerja lokal.

Jepang juga berkontribusi melalui sektor infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik yang secara total kapasitasnya 9.980 MW. Melalui MRT, Jepang juga berperan dalam pembangunan fasilitas transportasi di Indonesia.

**semua pihak perlu menyadari, skala kecepatan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 di antara negara di dunia akan sangat berbeda. Indonesia tidak boleh tertinggal agar tantangan pembangunan ekonomi ke depan tidak semakin berat.**

Seperti negara lainnya, saat ini Indonesia dan Jepang sama-sama berada dalam pemulihan ekonomi. Tentu tidak berlebihan untuk mengatakan, hubungan yang sudah terjalin selama ini menjadi modal bagi kedua negara untuk lebih saling bersinergi dalam proses pemulihan ekonomi ini.

Sebagai organisasi yang beranggotakan pelaku bisnis, akademisi, profesional, IJB-Net tentu berpeluang besar untuk berperan aktif menjadi katalisator memperkuat kerjasama tersebut. Meski baru berusia 3 tahun, IJB-Net telah menunjukkan kiprahnya.

Saya berharap, semua pihak perlu menyadari, skala kecepatan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 di antara negara di dunia akan sangat berbeda. Indonesia tidak boleh tertinggal agar tantangan pembangunan ekonomi ke depan tidak semakin berat. Sebagai mitra strategis yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad, memperkuat sinergi dengan Jepang adalah pilihan yang sangat layak mendapat prioritas.

Seiring kebutuhan meningkatkan kualitas struktur ekonomi, IJB-Net sangat diharap berkontribusi meningkatkan kerjasama Indonesia-Jepang dalam bidang pengembangan SDM industri di Indonesia dalam rangka *Making Indonesia 4.0*. Membangun budaya industri yang di Jepang dikenal sebagai Monuzukuri dan Hitozukuri.

Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk IJB-Net.

# Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel Minta Agar OJK Lakukan Moratorium Pinjol

**Jakarta:** Wakil Ketua DPR Korinbang Rachmat Gobel meminta agar pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan moratorium terhadap aktivitas pinjaman *online*, seiring kian maraknya praktik ilegal yang sangat merugikan masyarakat.

“Tiap hari kita disodori berita yang menyedihkan dari masyarakat yang terbelit masalah akibat praktik tidak sehat dari pengelola pinjaman *online*. Bahkan ada yang bunuh diri karena tidak bisa membayar cicilan utang mereka yang membengkak secara luar biasa. Pinjam satu juta dua juta, tapi pengembaliannya bisa membengkak sampai puluhan juta, ini kan tidak masuk akal. Untuk melindungi masyarakat, saya minta OJK melakukan moratorium,” kata Rachmat Gobel.

Rachmat Gobel mengakui, ide awal dari kelahiran pinjol ini adalah untuk meningkatkan inklusivitas sektor keuangan, namun dalam praktiknya terlihat ada ketidaksiapan dari berbagai lembaga terkait. Inilah yang kemudian membuat munculnya praktik tidak sehat, bahkan menjamurnya pengelola pinjol ilegal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Seperti diberitakan di berbagai media maupun seperti beredar di media sosial, rakyat kecil banyak terjerat pinjol. Mereka teriming-imingi oleh kemudahan pinjol tapi kemudian tak mampu membayar karena bunganya yang berlipat. Padahal mereka umumnya rakyat kecil yang sedang kesusahan, seperti kemiskinan maupun kehilangan pekerjaan. “Kalau praktik pinjol ini seperti ini sama saja mereka itu seperti rentenir,” kata Gobel.

Otoritas keuangan, menurut Gobel, perlu melakukan evaluasi serius terhadap keberadaan pinjol ini. Membuat pemetaan dari berbagai masalah

Press release ini merupakan tanggapan Rachmat Gobel atas maraknya kasus nasabah pinjaman online yang diintimidasi karena terlambat atau tidak sanggup membayar cicilan akibat bunga tinggi yang ditetapkan oleh pengelola.

yang muncul selama ini dan bagaimana mengatasinya. Termasuk bagaimana mengatasi perusahaan pinjol yang beroperasi dari luar negeri. Ini harus segera dilakukan agar situasi tidak semakin memburuk.

Menurut data Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penegakan hukum penanganan pinjol masih menghadapi banyak masalah, terutama yang ilegal. Mereka sulit untuk ditangani karena dari pemilik pinjol ilegal karena hanya 22% saja yang memiliki server di Indonesia. Sedangkan, 44% lainnya tidak terdeteksi dan sisanya berada di luar negeri.

Wakil rakyat dari Partai Nasdem ini menilai, maraknya pinjol ini juga harus menjadi indikator bagi otoritas keuang untuk perlu introspeksi bagi lembaga-lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan PNM. “Maraknya pinjol tidak terlepas dari ketidakmampuan bank, koperasi dan PNNM menjangkau orang-orang yang sedang kesusahan tersebut,” katanya.

Karena itu, Gobel berpendapat, pemerintah dan otoritas keuangan segera memperkuat perbankan untuk rakyat kecil, koperasi, dan PNM. “Berikan prosedur yang lebih mudah,” katanya. Selain itu, katanya, juga memperkuat jejaringnya agar bisa menjangkau ke seluruh pelosok negeri.

Menurut survei Bank Indonesia (BI), pelaku usaha kecil yang sudah mendapat aliran kredit dari bank sebenarnya baru mencapai 30,5% dari total UMKM yang ada di dalam negeri. Sementara sisanya 69,5% belum mendapat akses kredit dari bank dan dari jumlah ini sekitar 43% dinilai sangat membutuhkan kredit dengan potensi bisa mencapai Rp 1.600 triliun.

“Jadi *credit gap* atau kesejangan kredit masih tinggi, oleh karena itu tidak boleh menyalahkan masyarakat jika mereka tergiur dengan pinjol. Mereka sangat membutuhkan pembiayaan, tapi bank, koperasi dan PMN tidak mampu melayani kebutuhan itu. Kondisi inilah yang harus dibehani,” kata Rachmat Gobel.

Dari sisi regulasi, menurut Rachmat Gobel, perlindungan terhadap masyarakat belum kuat karena kehadiran perusahaan pinjol baru diatur berdasarkan Peraturan OJK No.77 Tahun 2016. Selain itu, sampai saat ini UU Perlindungan Data Pribadi belum juga bisa disahkan karena pemerintah tidak setuju dibentuknya lembaga pengawas yang bersifat independen.

Terkait dengan aktivitas keuangan digital seperti pinjol, Indonesia membutuhkan UU *Financial Technology (Fintech)* dan UU Perlindungan Data Pribadi. Namun sampai saat ini UU *Fintech* masih menjadi wacana, sementara untuk pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi terganjal sikap pemerintah. (\*)

# Mengenang HOS Tjokroaminoto

Saya sangat berbahagia dan bersyukur karena bisa menghadiri Acara Malam Peringatan untuk Mengenang Perjuangan Haji Omar Said (HOS) Tjokroaminoto. Beliau adalah pendiri Sarekat Islam (SI) dan pahlawan besar Indonesia. Pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis.

Kiprahnya yang begitu besar telah membuat pada masanya beliau digelari Raja Tanpa Mahkota. Kemampuannya berpidato, membesarkan



Pidato dalam acara Mengenang HOS Tjokroaminoto yang diselenggarakan Sarekat Islam

organisasi, dan memberi arah pergerakan kebangsaan sudah menjadi pengetahuan umum.

Beliau bukan saja pemimpin yang mampu menggerakkan dan menggetarkan, juga menginspirasi dan yang terpenting menjadi pendidik para calon pemimpin. Salah satu anak didiknya, dan pernah menjadi menantunya, adalah Bung Karno.

Saya berbangga hati karena lahir dan besar dalam semangat dan darah SI. Ayah saya, Thayeb Mohammad Gobel adalah seorang yang lahir dari rahim organisasi ini dan Alhamdulillah semangat dan darah itu terus terpelihara pada diri saya hingga kini.

Insyallah, semangat SI tidak akan lepas dari diri saya, dan akan selalu mewarnai setiap langkah saya, baik di bidang usaha maupun politik yang kini tengah saya jalani.

Bukakkah sejak awal tokoh kita HOS Tjokroaminoto telah menegaskan bahwa SI adalah perhimpunan yang berhaluan politik? Sejarah mencatat, sikap ini secara tegas telah dinyatakan beliau pada dalam rapat Centraal Sarekat Islam pada 18 April 1914 dan Kongres Nasional Sarekat Islam di Bandung pada 17-24 Juni 1916.

SI pernah berjaya menjadi pergerakan dan organisasi terbesar di tanah air. Setelah mengalami pasang surut yang cukup panjang, kini kita harus bertekad untuk kembali membesarkan pergerakan ini dengan memahami elan vital SI, seperti yang dikukuhkan para perintisnya, khususnya HOS Tjokroaminoto, Sang Pemimpin Besar Kita.

Sampai saat ini, SI masih mempunyai kantong-kantong pergerakan dan berpengaruh di sejumlah titik. Di Sulawesi misalnya, SI masih sangat berpengaruh. Di tanah Jawa, masih ada *enclave-enclave* SI yang besar, salah satunya di Banjarnegara.

Semoga acara peringatan yang diinisiasi Banjarnegara, menjadi pertanda SI akan kembali menjadi penjurong pergerakan kebangsaan. Banjarnegara harus menjadi pelopornya untuk menjadi lokomotif kebangsaan SI.

Sesuai cikal bakal SI yang berasal dari Syarekat Dagang Islam, anggaran dasar yang diwariskan Tjokroaminoto secara tegas menyatakan, tujuan SI adalah kesejahteraan umum dan kemakmuran ekonomi. Oleh karena itu, SI adalah gerakan politik kemakmuran, bukan sekedar politik kekuasaan. Saya sendiri lebih suka menyebutkan politik SI adalah Politik Pembangunan.

Dalam posisi sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, saya selalu berupaya mewujudkan semangat politik pembangunan SI ini yaitu meningkatkan

kesejahteraan umum melalui kualitas pendidikan dan kesehatan serta kemakmuran ekonomi.

Oleh karena itulah, sejak awal menjalan amanat sebagai anggota legislatif dan Wakil Ketua DPR, ada tiga hal yang menjadi perhatian utama saya yaitu bagaimana membangun sektor pertanian, koperasi, dan UMKM. Ketiganya harus menjadi lahan utama gerakan pembangunan karena di sinilah saat ini sebagian besar rakyat dan umat Islam berada.

Bagi saya, tiga sektor ini harus menjadi besar karena di sinilah peluang terbesar umat untuk bisa mengejar ketertinggalan dan meraih kemajuan bersama elemen bangsa yang lain.

Dari sejumlah langkah yang saya coba lakukan, potensi membangun sinergi diantara pelaku sektor pertanian, koperasi, dan UMKM sangat besar. Ini terbukti dari beberapa uji coba di sejumlah *demplo* yang saya kembangkan bersama tim, yang mampu meningkatkan produktivitas.

Sebagai penutup, izinkan saya untuk mengingatkan kembali ajaran Tjokroaminoto yaitu sebagai umat kita harus selalu berupaya mengedepankan sikap rendah hati dan bersatu. Dengan sikap ini kita berharap, semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap langkah dan perjuangan kita bagi bangsa dalam semangat Sarekat Islam.

*Billaahi Fii Sabilil-Haq,  
Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi  
Wabarokaatuh*

Jakarta,  
21 April 2021/10 Ramadhan 1442

**Saya berbangga  
hati karena lahir  
dan besar dalam  
semangat dan  
darah Si. Ayah  
saya, Thayeb  
Mohammad Gobel  
adalah seorang  
yang lahir dari  
rahim organisasi ini  
dan Alhamdulillah  
semangat dan  
darah itu terus  
terpelihara pada  
diri saya hingga  
kini.**





# Tantangan dan Peluang Mendorong Generasi Milenial ke Sektor Pertanian

**P**eran dan prospek sektor pertanian ke depan akan semakin strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan. Salah satu agenda utama pembangunan global saat ini adalah bagaimana membangun ketahanan pangan yang kuat. Dalam hal ini, pembangunan sektor pertanian tidak bisa dipandang sebelah mata, harus ditempatkan pada skala prioritas kebijakan atau politik pembangunan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, secara *political will* perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian cukup menggembirakan. Namun masalahnya adalah, ketertinggalan kita selama ini cukup besar. Dalam hal produktivitas misalnya, laju pertumbuhan sektor pertanian tertinggal dibandingkan sektor ekonomi lainnya, termasuk terhadap sejumlah negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan China.

Mengutip penelitian Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), produktivitas faktor total atau *total factor productivity* (TFP) sektor pertanian selama kurun 1996-2017 cenderung lebih rendah dibandingkan TFP ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai dampaknya, Nilai Tukar Petani (NTP) relatif stagnan dan cenderung turun. Oleh karena itulah, dalam pembahasan RAPBN 2022, DPR RI minta kepada pemerintah untuk menargetkan peningkatan NTP jadi 105 dan rencana pemerintah semula 102-103.

Harus diakui, akibat selama puluhan tahun produktivitas dan NTP tidak berkembang, sektor pertanian menjadi tidak menarik bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Struktur kerja memperlihatkan hal ini. Hanya sekitar 11% dari petani kita yang berusia muda, umur 35 tahun ke bawah.

Dalam kaitan ini, langkah Kementerian Pertanian untuk menarik minat generasi muda atau kalangan milenial adalah langkah yang sangat tepat. Apalagi dikaitkan dengan tantangan ke depan yaitu menciptakan ketahanan pangan yang kuat. Saat ini, dibandingkan sejumlah negara Asia lainnya, indeks ketahanan pangan Indonesia belum begitu menggembirakan. Indonesia masih di bawah Thailand, Malaysia, Vietnam, apalagi Jepang, China dan Korea Selatan. Padahal kita mempunyai lahan pertanian lebih dari 25 juta ha.

### **Harus Menguntungkan**

Tantangan terbesar kita dalam bidang pertanian, bukanlah semata mengamankan pasokan pangan, tapi adalah bagaimana membuat sektor ini menguntungkan. Jika sektor ini menjanjikan keuntungan, saya yakin upaya mendorong generasi muda terjun ke pertanian akan lebih mudah. Akan semakin banyak kaum muda terjun ke sektor pertanian.

Secara pribadi ketertarikan saya ke sektor pertanian sudah tertanam dari sejak kecil. Sebelum masuk ke dunia elektronika, bidang usaha keluarga saya adalah alat-alat pertanian, seperti traktor. Karena itulah, dalam posisi saat ini sebagai anggota dewan, salah satu agenda utama saya adalah berupaya untuk mendorong pembangunan sektor pertanian ini.

Dari pengalaman kunjungan ke berbagai daerah, saya melihat banyak hal yang perlu dibenahi agar kita mampu membangun sektor pertanian yang kuat. Sektor ini sangat membutuhkan transformasi secara besar-besaran terutama terkait dengan penggunaan teknologi dan pengelolaan usaha.

**Harus diakui, akibat selama puluhan tahun produktivitas dan NTP tidak berkembang, sektor pertanian menjadi tidak menarik bagi sebagian besar rakyat Indonesia.**

Langkah ke arah itu terlihat sudah dilakukan, namun perlu lebih dipercepat. Sebagai gambaran, bekerjasama dengan berbagai pihak saya membangun *demplo*t komoditas pangan di berbagai daerah. Melalui intervensi penggunaan teknologi seperti kualitas pupuk yang lebih baik, penggunaan alat pertanian yang lebih modern, produktivitas bisa naik 50%-100%, sehingga petani merasa keuntungan yang memadai.

**Dari pengalaman kunjungan ke berbagai daerah, saya melihat banyak hal yang perlu dibenahi agar kita mampu membangun sektor pertanian yang kuat. Sektor ini sangat membutuhkan transformasi secara besar-besaran terutama terkait dengan penggunaan teknologi dan pengelolaan usaha.**

Mendorong modernisasi pertanian menjadi kunci. Inilah menurut saya menjadi tantangan besar Kementerian Pertanian dan juga Badan Pangan Nasional yang baru saja didirikan Presiden. Dan ini tentu membutuhkan sinergi dengan Kementerian terkait lainnya. Membangun agenda bersama perlu dilakukan karena transformasi sektor pertanian hanya bisa terjadi jika mendapat dukungan dari semua pihak.

Perlu disadari, sifat usaha pertanian sebetulnya berisiko tinggi, mulai dari perubahan iklim, pengelolaan pascapanen sampai jaminan kualitas dan keamanan produk di tingkat konsumen. Untuk itu, dukungan pembiayaan dan teknologi menjadi sangat penting dalam pengelolaan risiko usaha sektor pertanian.

Dalam sudut pandang ini, kita semua harus mendorong terciptanya iklim usaha yang menguntungkan di sektor ini. Perlu perubahan paradigma, termasuk dalam pengelolaan subsidi ke sektor ini yang nilainya cukup besar. Pengelolaan subsidi sektor pertanian perlu lebih diarahkan untuk meningkatkan modernisasi, sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi generasi milenial. (\*)

# Peran Parlemen Indonesia Mendorong Pencapaian Target SDGs

**T**erima kasih kepada Yang Mulia Tanzila Narbaeva dan panitia “*Inter-Parliamentary Global Cooperation in the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)*” atas undangan kepada saya untuk berpartisipasi dalam forum yang strategis ini.

Saya percaya, tugas mencapai target SDGs merupakan amanat suci kita bersama sebagai umat manusia, dimana setiap diri diminta untuk ikut bertanggung jawab menciptakan masyarakat dunia yang sejahtera, berkeadilan dalam tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup dan bumi (planet) dari generasi ke generasi. Bukankah manusia diciptakan atau dihadirkan untuk memelihara bumi ini dengan segala isinya?

Jalan untuk mencapai target SDGs bukan jalan yang menurun atau mudah, tapi jalan yang berat, jalan yang mendaki. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi pandemi Covid-19. Pandemi ini telah memaksa hampir semua negara untuk mendisain ulang kebijakan beserta implementasi pembangunan ekonomi, karena berbagai disain dan skenario kebijakan yang telah disiapkan selama ini, kini menjadi berantakan.

Indonesia sendiri telah mengeluarkan anggaran lebih dari US\$ 100 miliar untuk membiayai penanggulangan pandemi beserta dampak penurunan

Sambutan dalam “*Inter-Parliamentary Global Cooperation in the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)*” dengan tuan rumah Senat Uzbekistan (Senate of the Oliy Majlis of Republic of Uzbekistan)

ekonomi dan pendapatan masyarakat. Namun semua itu tidak akan mengurangi semangat Indonesia untuk mencapai berbagai target SDGs pada 2030. Bagi Indonesia, komitmen untuk mewujudkan 17 tujuan SDGs sudah menjadi bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dari waktu ke waktu.

Pencapaian target SDGs harus menjadi tanggung jawab semua negara, oleh karena itu kolaborasi dan kerjasama antar negara menjadi bagian penting. Berbagi pengalaman seperti melalui forum mempunyai arti strategis dan sangat penting.

**Jalan untuk mencapai target SDGs bukan jalan yang menurun atau mudah, tapi jalan yang berat, jalan yang mendaki. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi pandemi Covid-19.**

Di Indonesia, kami sangat menyadari, parlemen adalah bagian penting untuk mencapai target SDGs. Melalui fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting, parlemen mempunyai peran strategis sebagai konduktor dalam mendorong harmonisasi kebijakan lembaga eksekutif agar sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi *stakeholder*, baik masyarakat itu sendiri, pelaku usaha, NGO dan kalangan akademisi serta riset.

Menjalan fungsi tersebut, menurut hemat saya, anggota parlemen tidak bisa hanya mengandalkan data-data sekunder dari pemerintah atau lembaga eksekutif. Setiap anggota parlemen seyogyanya mendapatkan data primer atau langsung melihat fakta dan data di lapangan. Dalam hal ini, parlemen Indonesia telah menyediakan ruang yang luas dalam 5 kali masa reses dalam satu tahun sidang untuk melihat langsung berbagai fakta dan data serta menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat untuk kemudian menginisiasi berbagai alternatif solusi.

Tahun 2020, Parlemen Indonesia telah menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja (*omnibus law*). Persetujuan dan kehadiran UU ini antara lain dimaksudkan untuk mempercepat laju pembangunan yang akan berkontribusi pada upaya mencapai target SDGs.

UU ini adalah upaya untuk membangun perekonomian Indonesia yang lebih inklusif. Target SDGs tidak akan bisa tercapai hanya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga mensyaratkan bahwa dinamika pembangunan ekonomi harus bisa memastikan terciptanya kesempatan

kerja yang produktif secara menyeluruh dan pekerjaan yang layak bagi semua. Inilah inti dari perekonomian yang inklusif.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.499 pulau. Luas Indonesia mencapai 7,81 juta km<sup>2</sup>, dimana 2,01 juta km<sup>2</sup> berupa daratan dan 3,25 juta km<sup>2</sup> berupa lautan serta 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

Penduduk Indonesia sangat beragam, terdiri dari 1.340 suku bangsa dengan jumlah berdasarkan sensus terakhir 270,20 juta jiwa. Sebagian besar yaitu 70,72% berada dalam usia produktif sehingga Indonesia sedang berada dalam surplus demografi. Indonesia juga mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, termasuk keragaman hayati (*biodiversity*) yang luas dan merupakan rangking ke 2 dunia.

Dengan berbagai potensi tersebut, berbagai lembaga internasional dan multilateral memproyeksikan, pada 2030 mendatang perekonomian berpotensi menjadi 5 besar dunia. OCED memproyeksikan dengan GDP Indonesia pada 2030 bisa mencapai US\$ 5,1 triliun.

Bagi Indonesia, berbagai potensi itu merupakan modal utama untuk mencapai tujuan SDGs dan juga dalam berkontribusi untuk tataran regional dan global. Dalam hal ini, parlemen Indonesia akan terus mendorong kerjasama dengan negara-negara lain untuk bisa secara saling bantu mewujudkan tujuan SDGs.

Terkait struktur ekonomi, lebih dari 60% dari GDP Indonesia berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau dikenal dengan istilah *Small Medium Enterprise* (SME's) yang jumlahnya mencapai sekitar 64 juta unit. Mereka terutama bergerak di sektor *agriculture*, perdagangan, makanan, manufaktur.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, secara keseluruhan sektor *agriculture* memberi kontribusi terbesar 29,76%, kemudian perdagangan 19,23%, manufaktur 13,61%.

Oleh karena itu, sektor *agriculture* bersama SMEs memainkan peranan penting dan menjadi *leading sector* bagi Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs. Banyak hal yang bisa dicapai melalui pengembangan sektor

**Indonesia menargetkan, pada 2030 tingkat kemiskinan bisa diturunkan menjadi 4-4,5% dengan angka kemiskinan ekstrem 0%.**

ini, terutama dalam hal mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan.

Indonesia menargetkan, pada 2030 tingkat kemiskinan bisa diturunkan menjadi 4-4,5% dengan angka kemiskinan ekstrem 0%. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, akibat pandemi Covid-19 telah terjadi kenaikan sehingga saat ini angka kemiskinan menjadi 10,19%. Ini dihitung berdasarkan garis batas kemiskinan dengan konsumsi per kapita Rp 458.947 per per bulan atau setara dengan konsumsi 2.112 kilo kalori per kapita per hari.

Untuk ketahanan pangan, program utama Indonesia adalah menurunkan indek kerawanan pangan atau *Food Insecurity Experience Scala* (FIES) dari saat ini 5,79 menjadi 3,30.

Kami optimis, dengan meningkat produktivitas sektor *agriculture* dan SMEs, tujuan tersebut bisa tercapai. Hal ini antara lain dilandasi pengalaman saya pribadi sebagai anggota parlemen. Melalui *demonstration plot* (*Demplot*) yang saya kembangkan bersama masyarakat di sejumlah lokasi, kami berhasil meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura sekitar 50%-80%.

Melalui *Demplot*, kami menginisiasi perbaikan manajemen termasuk teknologi pemupukan dengan memakai pupuk berkualitas tinggi. Harganya memang lebih mahal dibandingkan pupuk bersubsidi dari pemerintah, namun hasil produksi yang diperoleh jauh lebih tinggi. Secara keseluruhan, pemakaian pupuk kualitas tinggi lebih menguntungkan.

Melalui parlemen saya tengah berupaya meyakinkan masyarakat petani agar mempunyai semangat mandiri, dan mendorong pemerintah mengalihkan subsidi untuk pertanian yang selama ini alokasi terbesarnya untuk pupuk ke bidang yang lebih produktif seperti pada peningkatan teknologi produksi, teknologi pembibitan, teknologi pengolahan pangan, perbaikan kelembagaan dan *financing*.

Saya optimis, melalui pengembangan sektor pertanian dan SMEs, Indonesia akan mampu mencapai tujuan SDGs dan berpelean pada upaya dunia menciptakan ketahanan pangan yang kuat dan pertanian berkelanjutan. (\*)

# Untuk Capai Target Pembangunan, APBN 2022 Harus Didukung Kebijakan Non-Fiskal Yang Lebih Efektif

**Jakarta:** Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menilai, APBN 2022 cukup realistis dan terlihat hati-hati seperti tercermin dari volume belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBN 2021 dan defisit anggaran 2022 yang juga jauh lebih rendah dibandingkan 2021.

“Dilihat dari struktur APBN 2022, daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak sekuat APBN 2021. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah, kuncinya adalah pelaksanaan APBN 2022 harus mendapat dukungan kebijakan non-fiskal yang lebih efektif,” kata Rachmat Gobel.

Seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Undang-undang APBN Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (16/08), Belanja Negara pada 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun atau 1,5% lebih rendah dibandingkan anggaran 2021 ini.

Belanja itu meliputi alokasi untuk Pemerintah Pusat Rp 1.983,3 triliun atau turun 0,83% dibandingkan tahun sebelumnya Rp 1.954,5 triliun. dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TDD) Rp 770,4 triliun atau turun 3,16% dibandingkan sebelumnya Rp 795,5 triliun.

Belanja Pemerintah pusat antara lain dialokasikan Rp 255,3 triliun, Perlindungan Sosial Rp 427,5 triliun, pendidikan Rp541,7 triliun dan infrastruktur 384,8 triliun.

Belanja tersebut akan dibiayai penerimaan pajak Rp 1.506,9 triliun atau naik 4,32% dibandingkan tahun sebelumnya 1.444,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 333,2 triliun atau naik 11,74% dibandingkan tahun sebelumnya Rp 298,2 triliun dan Pembiayaan Defisit sebesar Rp 868,0 triliun atau turun 13,75% dibanding anggaran sebelumnya 1.006,4 triliun.

Rachmat Gobel memaklumi, pemerintah mengerem belanja negara pada 2022 karena kebijakan fiskal tahun depan memang harus diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3% terhadap PDB pada tahun 2023.

**“Anggaran tahun 2022 memang harus lebih bersifat konsolidasi karena itu kebijakan nonfiskal menjadi sangat penting.”**

“Anggaran tahun 2022 memang harus lebih bersifat konsolidasi karena itu kebijakan nonfiskal menjadi sangat penting. Ini artinya kreatifitas dan kemampuan kementerian/lembaga melahirkan kebijakan untuk mendorong pergerakan ekonomi menjadi sangat penting. Ini tantangan besar, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar instansi atau kementerian agar sasaran pembangunan 2022 yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai,” katanya.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan, sasaran pembangunan pada 2022 adalah menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,5-6,3%. Kemudian tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem serta tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.

Meskipun berat, menurut Rachmat Gobel, ia cukup optimistis sasaran pembangunan bisa tercapai. Namun dengan catatan kementerian mampu lebih bekerja keras untuk menyusun program dan kebijakan agar bisa lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan tersebut.

“Dengan adanya UU Cipta Kerja, kementerian dan lembaga pemerintah sebetulnya mempunyai ruang gerak yang luas dalam mendorong dinamika ekonomi baik sektor perdagangan, industri, pariwisata dan investasi. Tinggal

bagaimana peluang ini bisa diefektifkan dengan koordinasi yang lebih baik dan menghilangkan ego sektoral,” katanya.

### **Prioritaskan TKDN dan UMKM**

Rachmat Gobel juga menekankan, untuk bisa mencapai sasaran pembangunan tersebut, kementerian dan daerah harus lebih memprioritas belanja negara pada produk dalam negeri yang sudah memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), dan menjauhi penggunaan produk impor. Penggunaan produk dalam negeri tidak hanya berdampak positif terhadap proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka peluang kerja yang sangat dibutuhkan menurunkan angka pengangguran.

“Semaksimal mungkin, belanja kementerian dan lembaga harus menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberi perhatian yang lebih besar terhadap upaya pemulihan sektor UMKM. Pemulihan sektor ini akan mempercepat pemulihan ekonomi secara keseluruhan karena faktanya kontribusi terbesar pada PDB dan penyerapan lapangan kerja selama ini ada pada sektor UMKM.

“Insentif yang lebih besar perlu dialokasi untuk UMKM agar mereka bisa kembali bergerak dari keterpurukan selama pandemi Covid-19,” katanya. (\*)

	2021	2022	
<b>BELANJA NEGARA</b>	<b>2.750,0</b>	<b>2.708,7</b>	<b>-1,50%</b>
Belanja Pemerintah Pusat	1.954,5	1.938,3	-0,83%
Transfer Daerah dan Dana Desa	795,5	770,4	-3,16%
<b>PENERIMAAN NEGARA</b>	<b>1.743,6</b>	<b>1.840,7</b>	<b>5,57%</b>
Penerimaan Perpajakan	1.444,5	1.506,9	4,32%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	298,2	333,2	11,74%
Hibah	0,9		-100,00%
<b>DEFISIT ANGGARAN</b>	<b>1.006,4</b>	<b>868,0</b>	<b>-13,75%</b>
<b>PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN</b>	<b>1.006,4</b>	<b>868,0</b>	<b>-13,75%</b>

# Rencana Kerja Pemerintah 2022 Harus Bisa Efektif Meningkatkan Produktivitas UMKM

**Jakarta:** Wakil Ketua DPR Korinbang Rachmat Gobel meminta agar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas perekonomian, terutama untuk sektor UMKM baik petani, nelayan dan pedagang dan pelaku industri kecil. Pasalnya, sektor inilah yang selama ini memberi kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional dan kini pelakunya tengah mengalami berbagai kesulitan dan penurunan daya beli yang tajam.

“Dari berbagai kunjungan ke lapangan, pelaku UMKM baik petani, nelayan, pedagang dan pelaku industri kecil, tengah mengalami kesulitan yang besar. Hal ini perlu segera diatasi agar penurunan kondisi ekonomi mereka bisa segera teratasi dan tingkat kemiskinan dan ketimpangan tidak mengalami lonjakan. RKP 2022 harus bisa efektif mengatasi kondisi ini,” kata Rachmat Gobel yang juga anggota Komisi XI DPR ini.

Menurut Rachmat Gobel, hal itu telah disampaikan ke pemerintah saat Komisi XI DPR melakukan rapat kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjito dan Menteri PPN/Ketua Bappenas Suaharso Manuara pada Selasa (7/6) di Ruang Sidang Komisi XI DPR. Raker digelar dalam rangka membahas dan mengambil keputusan

mengenai Asumsi Dasar dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022.

Menurut data Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM meliputi sekitar 99% pelaku usaha di Indonesia. Sektor ini memberi kontribusi sekitar 61% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyumbang 89% terhadap lapangan kerja.

“Pemerintah memang telah memberi perhatian pada sektor UMKM ini, namun masih harus lebih ditingkatkan. Dengan kontribusinya yang begitu besar, pemulihan ekonomi nasional hanya bisa tercapai secara efektif jika sektor UMKM bisa segera pulih. Pemerintah harus mendorong penguatan UMKM baik untuk pasar domestik maupun pasar global,” tegas Rachmat Gobel.

Untuk itu lanjut Rachmat Gobel, dalam raker pekan lalu, Komisi XI antara lain meminta pemerintah untuk menargetkan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang lebih tinggi pada 2022 mendatang. Semula pemerintah menargetkan, pada 2022 mendatang NTP berkisar 102-104, dan NTN 102-105. Namun setelah pembahasan yang alot akhirnya disepakati target NTP pada 2022 menjadi 103-105 dan NTN 104-106.

“Peningkatan nilai tukar petani dan nelayan sangat penting karena potensi sumber daya nasional di sektor ini sangat besar dan selama ini belum tergarap dengan secara optimal. Akibatnya kehidupan petani dan nelayan selalu tertinggal,” kata Rachmat Gobel.

Selain untuk meningkatkan taraf kehidupan, peningkatan produktivitas tani dan nelayan juga mempunyai arti strategis pada upaya meningkatkan ketahanan pangan yang akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia maupun berbagai negara di dunia. Ke depan, ketahanan pangan menjadi isu penting yang dihadapi dunia.

“Dengan potensi yang ada, Indonesia tidak hanya mempunyai kemampuan membangun ketahanan pangan yang kuat, sekaligus juga berpeluang untuk menjadikan sektor ini sebagai andalan ekspor. Ini yang harus perlu kita upayakan bersama,” kata Rachmat Gobel.

**Dengan kontribusinya yang begitu besar, pemulihan ekonomi nasional hanya bisa tercapai secara efektif jika sektor UMKM bisa segera pulih.**

Bahkan lanjutnya, di tengah arus dunia yang kian deras menggunakan produk *herbal pharmaceutical* dan *herbal food* seperti jamu, Indonesia kini berpeluang besar untuk mengisi pasar dunia. Indonesia kaya akan bahan baku produk herbal. Setidaknya Indonesia mempunyai 30.000-40.000 spesies tanaman obat, namun baru sekitar 1.000 spesies yang sudah dimanfaatkan.

Sejak pandemi Covid-19, permintaan dunia terhadap produk herbal naik tajam, dan saat ini diperkirakan sudah mencapai sekitar US\$ 138,350 miliar. Sekitar 55% diantaranya berasal dari permintaan terhadap obat-obatan herbal (*herbal pharmaceuticals*), sedangkan sisanya berupa produk *herbal functional foods*, *herbal dietary supplements* dan *herbal beauty products*.

Untuk UMKM yang bergerak di bidang industri pengolahan, Rachmat Gobel mengatakan, iklim usaha di sektor ini masih harus ditingkatkan sehingga lebih ramah dan menguntungkan produksi lokal. Saat ini, iklim usaha dan kebijakan pemerintah belum begitu berpihak terhadap produk lokal sehingga produk impor terus membanjir.

“Pelaku UMKM merasakan, keberpihakan terhadap produk lokal masih terlalu rendah, dan ini harus menjadi perhatian pemerintah, terutama pada instansi terkait,” katanya. (\*)



**Dengan potensi yang ada,  
Indonesia tidak hanya  
mempunyai kemampuan  
membangun ketahanan  
pangan yang kuat, sekaligus  
juga berpeluang untuk  
menjadikan sektor ini  
sebagai andalan ekspor.  
Ini yang harus perlu kita  
upayakan bersama.**

**(5)**

**MELAYANI  
ASPIRASI  
MASYARAKAT**

**“Kegiatan reses  
menjadi cermin  
keberpihakan kepada  
rakyat”**





Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel melihat penimbangan hasil panen cabe rawit di salah satu *demplo*t yang dikelola oleh kelompok tani di Kabupaten Gorontalo Utara.

# Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021

**(16-24 Oktober 2020)**

## **A. Ruang Lingkup Kunjungan**

Secara lebih spesifik kunjungan reses perorangan ke daerah pemilihan Provinsi Gorontalo kali ini memiliki tujuan diantaranya peyerapan Aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kecamatan dan Kelurahan, Kelompok Pengajian, pedagang, Akademisi, Pengurus Partai dll.

Kemudian melakukan silaturahmi dengan masyarakat dan warga serta konstituen di daerah pada umumnya dan di daerah pemilihan pada khususnya.

## **B. Kegiatan**

### **Sabtu (16/10), Kabupaten Gorontalo, Pukul 15.00**

Kegiatan penanaman *demplot* padi dan bantuan 1 Ton Pupuk dan bibit kepada kelompok tani serta penyaluran KUR kepada kelompok tani oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel di hadiri PT Pupuk Kaltim dan Pimpinan Bank BNI Kabupaten Gorontalo, dengan kelompok tani dan Pupuk Kaltim dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjawab persoalan yang terjadi dimasyarakat terkait pertanian.

Rachmat Gobel mengusung program *Argo Solution* yang merupakan program pendampingan intensif kepada petani baik hal pengelolaan tanah dan budidaya pertanian yang dilakukan secara berkelanjutan. Program *Demplot* yang ada di Desa Hurabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersiap-siap untuk melakukan panen di areal *demplot* padi milik salah satu kelompok tani Gorontalo.

Dalam sambutannya Rachmat Gobel menargetkan peningkatan panen padi dalam *demplot* tersebut yang semula hanya panen 5 ton menjadi 7-9 ton gabah. Program ini terwujud atas perjuangan Rachmat Gobel bekerja sama dengan PT Pupuk Kaltim dan Bank BNI yang mendukung dari aspek permodalan dan pendanaan yang di dampingi Koperasi Jaya Usaha Bersama.

#### **Minggu (17/10), Kota Gorontalo, Pukul 7.00**

Kunjungan Silaturahmi dengan pengurus DPD Kota Gorontalo dalam rangka memberikan pengarahan kepada pengurus baru yang di nahkodai ibu Lola Yunus. Dalam kesempatan ini, Rachmat Gobel juga mengajak para kader NasDem

#### **Minggu (17/10), Kota Gorontalo, Pukul 14.00**

Pertemuan dengan Tim Akademi Bela Negara di Rumah Tapa, dalam rangka mengevaluasi kegiatan Tim ABN di DPW Nasdem Gorontalo, DPD Kota Gorontalo, DPD Kabupaten Gorontalo, DPD Kabupaten Bone Bolango DPD Boalemo, DPD Pohuwato, DPD Gorontalo Utara tentang kegiatan *Inhouse Training* yang dilaksanakan selama 3 minggu. Bapak Racmat Gobel berharap



Rachmat Gobel membuka sekaligus menanam padi perdana pada pembukaan Demplot Padi dan Jagung didampingi oleh Dirut. PT. Pupuk Kaltim dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Desa Hurabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.

kepada pengurus dan kader partai untuk tetap solid memperjuangkan aspirasi masyarakat karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dan juga modal utama dalam NasDem. Partai NasDem harus hadir dan menjadi *problem solving* disetiap persoalan yang terjadi di masyarakat dan tetap berpegang teguh pada AD/ART partai NasDem.

### **Senin (18/10), Kabupaten Pohuwato, Pukul 9.00**

Pelatihan *Demplot* Jagung bekerjasama PT Pupuk Kaltim dan Petro Kimia Gresik dan memberikan 1 Ton pupuk kepada kelompok tani di Kabupaten Pohuwato. Bantuan ini dalam rangka mewujudkan hasil pertanian yang lebih bagus.

Rachmat Gobel bertemu dengan KUD yang dipimpin oleh Idris Kaji membahas fungsi KUD dan peran KUD di Kabupaten Pohuwato.

### **Senin (18/10), Kabupaten Pohuwato, Pukul 15.00**

Silaturahmi dan Dialog serap aspirasi dengan masyarakat Pohuwato di rumah Iwan Adam, dalam pertemuan tersebut Rachmat Gobel menyampaikan kinerjanya dalam 1 tahun untuk mewujudkan cita-citanya dari 5 termiskin menjadi 5 termakmur.

Ada beberapa masukan dari masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut, bahwa masyarakat menyampaikan aspirasi kelangkaan gas LPG bersubsidi, dan kelangkaan pupuk pada saat musim tanam. Maka dari itu Rachmat Gobel menggandeng perusahaan pupuk yakni Petrokimia Gresik dan Pupuk Kaltim untuk bekerjasama mengatasi masalah kelangkaan pupuk di Provinsi Gorontalo.

### **Selasa (19/10), Kabupaten Pohuwato, Pukul 15.00**

Silaturahmi dengan DPD NasDem Kabupaten Pohuwato. Pertemuan tersebut di hadiri oleh Ketua DPD NasDem Kabupaten Pohuwato Hong Yapanto.beserta jajarannya. Pada Pertemuan tersebut Rachmat Gobel mengkamnyekan pentingnya soliditas dalam rangka pengurus partai untuk mewujudkan cita-cita partai NasDem, serta mewujudkan cita-cita membangun Gorontalo dari 5 termiskin menjadi 5 termakmur di Indonesia.

### **Rabu (20/07), Kabupaten Pohuwato, Pukul 6.00-10.00**

Mengunjungi kampung nelayan, dan dilanjutkan mematau realisasi Program BSPS di Kecamatan Marisa. Pada kesempatan kali ini Rachmat Gobel mengecek langsung kondisi beberapa harga yang mendapat program bantuan Rumah malahayati (BSPS) yang sedang berlangsung proses pembangunan dan sudah pemasangan *peneng*.

### **Rabu (20/07), Kabupaten Pohuwato, Pukul 15.00**

Kunjungan Ke Gereja yang mendapat bantuan dari Bank Indonesia

### **Kamis (21/07), Kabupaten Gorontalo, Pukul 9.00**

Kunjungan ke calon penerima Program BSPS di Kabupaten Gorontalo. Rachmat Gobel ingin memastikan bahwa rogram BSPS benar-benar berjalan dengan baik dan tepat sasaran, karena program BSPS yang merupakan aspirasi Rachmat Gobel pada tahun 2020 saat ini sedang dalam proses pengerjaan dalam rangka memastika program tersebut tepat sasaran sesuai dengan apa yang harapan Presiden Joko Widodo dalam mengentaskan kemiskinan

### **Kamis (21/07), Kota Gorontalo, Pukul 12.00**

Pertemuan dengan LSM di Warkop JDS 35 Kota Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut Rachmat Gobel mengajak agar LSM ikut mengawal program pemerintah dengan tujuan untuk kemajuan Gorontalo dan untuk kesejahteraan rakyat LSM juga memberikan apresiasi apa yang di



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel meninjau Pelabuhan Ferry Gorontalo didampingi oleh Balai Perhubungan Gorontalo.

kerjakan oleh Rachmat Gobel dalam rangka membangun Gorontalo dan memperjuangkan anggaran maupun program dari pusat.

**Jumat (22/07), Kota Gorontalo, Pukul 9.00**

Pertemuan dengan Bank Indonesia dalam rangka membahas peran Bank Indonesia dalam rangka mensejahterakan rakyat.

**Jumat (22/07), Kota Gorontalo, Pukul 11.00**

Meninjau BPS di Biawau dan program Kotaku di Siendeng dalam rangka mengontrol pelaksanaan realisasi program kotaku tahun 2020.

Kunjungan BPS di Lekobalo melihat program BPS tahun 2020 dalam proses pelaksanaan.

**Jumat (22/07), Kota Gorontalo, Pukul 13.00**

Kunjungan Kepelabuhan Ferry di Kota Gorontalo dalam rangka melihat kondisi pelabuhan dalam rangka memastikan permasalahan yang ada di Pelabuhan Fery untuk meningkatkan perekonomian yang ada di provinsi Gorontalo serta meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi Bupati Gorontalo Utara mengunjungi salah satu desa yang terdampak banjir.

### **Sabtu (23/07), Kabupaten Gorontalo, Pukul 9.00**

Pertemuan dengan Balai Perhubungan Darat di kantor terminal Dungi. Kepala balai perhubungan menyampaikan usulan-usulan program tahun 2021 untuk provinsi Gorontalo

### **Minggu (24/07), Kabupaten Pohuwato, Pukul 9.00**

Silaturahmi dengan masyarakat nasrani di Gereja Kecamatan Karagetan Kabupaten Pohuwato, kemudian dilanjutkan meninjau Terminal Isimu bersama Balai Perhubungan Darat. Dari terminal Isimu langsung ke *airport* menuju Jakarta.

## **C. Rencana Tindak Lanjut**

### **1. Bidang Infrastruktur**

Tidak lanjut aspirasi infrastruktur perhubungan Rachmat Gobel bertemu Menteri Perhubungan RI Bapak Budi Karya Sumadi. Dalam pertemuan tersebut Rachmat Gobel berharap agar Menteri Perhubungan merespon aspirasi pembenahan infrastruktur seperti pelabuhan, terminal usulan-usulan dari Balai perhubungan Transportasi Darat XXI Provinsi Gorontalo



Pertemuan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Pengurus dan Kader Partai NasDem Gorontalo.

terkait infrastruktur transportasi seperti terminal tipe A Isimu dan terminal tipe A Dungi, terminal pelabuhan di kabupaten Gorontalo dan pelabuhan Marisa sudah di sampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk ditindak lanjuti.

## **2. Bidang Pertanian**

Mengajak masyarakat agar tidak terpacu pada pupuk bersubsidi Rachmat Gobel mengajak masyarakat apabila masyarakat berharap hasil pertaniannya bagus maka jangan terpacu kepada pupuk bersubsidi.

## **3. Bidang Pertamina**

Mengenai permasalahan gas elpiji agar Provinsi Gorontalo mendapat tambahan gas elpiji bersubsidi sebanyak 40 ton dan hal tersebut Rachmat Gobel menyampaikan hasil serap aspirasi ke Dirut Pertamina agar kelangkaan gas di Provinsi Gorontalo cepat teratasi.

## **4. Bidang Keptaraan**

Memberikan semangat kepada Seluruh Pengurus Partai NasDem ditingkat Daerah maupun sampai ketingkat DPRT agar bekerja keras dalam mamajukan Partai NasDem serta memenangkan para calon yang diusung oleh partai NasDem tanpa melihat individu calon itu sendiri.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berdiskusi bersama anggota masyarakat dan kelompok tani dalam rangka menyerap aspirasi dan membantu mencari solusi bagi berbagai masalah pembangunan di kawasan pedesaan.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel foto bersama dengan kelompok tani yang menerima bantuan Alsiantan.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel di depan paket bantuan sosial (bansos) yang akan dibagikan untuk masyarakat Gorontalo.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mengunjungi salah satu rumah yang mendapat bantuan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam salah satu kunjungan reses ke desa-desa di Provinsi Gorontalo.



Kelompok Tani Kab. Gorontalo yang mendapatkan bantuan pupuk non subsidi dari PT. Pupuk Kaltim.

# Kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021

**(20-28 Desember 2020)**

## **A. Ruang Lingkup Kunjungan Kerja**

Kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI/Korinbang sebagai Anggota DPR RI ke Provinsi Gorontalo dilakukan untuk melihat secara langsung permasalahan yang ada, baik melalui pertemuan dengan masyarakat, dialog, diskusi, audiensi dan tanya jawab serta kunjungan/ meninjau secara langsung ke daerah yang perlu mendapatkan perhatian di dapil Provinsi Gorontalo. Daerah yang dikunjungi pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo.

Dalam kunjungan Reses tersebut, Wakil Ketua DPR RI / Korinbang juga akan mengakomodir aspirasi masyarakat dari permasalahan yang terjadi di Provinsi Gorontalo yang merupakan daerah pemilihannya untuk dikaji, yang nantinya akan menjadi dasar acuan perbaikan kedepan.

Dalam kegiatan Reses di Provinsi Gorontalo ini, juga dilakukan kegiatan penyerahan bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian dan bus sekolah dari Kementerian Perhubungan. Meninjau program padat karya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2020 oleh Pemerintah (Kementerian PUPR) di kecamatan Dembe Kota Gorontalo.

## **B. Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, Rachmat Gobel sebagai Anggota DPR RI sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI Koodiantor Industri dan Pembangunan (Korinbang) melakukan reses ke daerah pemilihan Gorontalo selama 9 hari mulai tanggal 20-28 Desember 2020.



Sejumlah pengurus kelompok tani berfoto bersama setelah menerima bantuan Alsintan dari Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

## **Minggu (20/12) Pukul 13.30-15.30 di Desa Mauhudu Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo**

### ***Bentuk Kegiatan:***

1. Penyerahan Alsintan Aspirasi Rachmat Gobel dari Kementerian Pertanian berupa:
    - 2 Unit *Power Thresher*
    - 1 Unit *Power Thresher Multiguna*
    - 2 Unit *Power Thresher Multiguna Mobile*
    - 2 Unit *Corn Sheller mobile*
  2. Pemberian Bantuan Modal untuk Koperasi Jaya Usaha Maju Bersama senilai 500.000.000 nilai akan bertambah dana apabila ada keuntungan.
- Peserta:** Kepala Bidang Pertanian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Kelompok Tani dan anggota kelompok tani.

### ***Arahan Pak Rachmat Gobel***

1. Petani hanya tugasnya menanam nanti koperasi yang akan mengambil hasil pertanian dan para petani harus menabung di koperasi.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberi pengarahan dalam acara sosialisasi pembinaan badan usaha koperasi yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Koordinator Perekonomian.

2. Koperasi harus bisa menanggung kebutuhan keluarga petani, dan apabila ada keperluan kedepannya bisa pinjam ke koperasi.
3. Kita harus jadikan Gorontalo sebagai lumbung pangan.
4. Kalau dalam koperasi ini saya memberi 5000 dalam koperasi nilai akan bertambah terus apalagi ada untung dari hasil pertanian hasilnya dibeli oleh koperasi itu sendiri
5. Petani hanya tugasnya menanam, kalau panen koperasi yang akan mengambil hasil pertanian,
6. Petani juga harus menabung dikoperasi sehingga modalnya dari tahun ke tahun naik dan koperasi bisa membantu kebutuhan bapak ibu.
7. Koperasi milik petani saya hanya menjadi pendamping agar koperasi tumbuh dan berkembang lebih baik.

**Minggu (20/12) Pukul 15.00-17.000 di Desa Bongomeme, Kecamatan Dungaliyo, Kaupaten Gorontalo**

**Bentuk Kegiatan:** Penyerahan alat pertanian dari Dirjen Pangan Kementerian Pertanian berupa:

- 2 Unit *Power Thresher*
- 1 Unit *Power Thresher* Multiguna
- 2 Unit *Power Thresher* Multiguna *Mobile*
- 2 Unit *Corn Sheller mobile*

**Peserta:** Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, DPD NasDem Kabupaten Gorontalo, Kelompok Tani beserta Anggotanya

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Pemberian alat yang diberikan oleh Kementerian Pertanian digunakan untuk produktifitas pertanian
2. Gorontalo sebagai lumbung pangan
3. Peralatan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produkfititas pertanian dan ini diwujudkan karena Aspirasi masyarakat dan masih banyak peralatan pertanian yang akan diberikan ke masyarakat dalam rangka meningkatkan hasil pertanian.
4. *Maintenance* harus di persiapkan berupa bengkel untuk alat tersebut agar dapat dipersiapkan
5. Ini baru awal masih banyak lagi alat pertanian yang akan diberikan

**Senin (21/21) Pukul 15.00-17.00 di Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara**

**Bentuk Kegiatan:** Penyerahan Bantuan untuk Korban Bencana Banjir Bandang Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara

**Peserta:** Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Bupati Gorontalo Utara beserta jajarannya

**Isu:** Perlu peningkatan pelestarian lingkungan



Penyerahan Bantuan Sembako dari Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel kepada korban banjir bandang di Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara.



Penyerahan Alsinta dari Kementerian Pertanian oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel kepada kelompok Tani Mutiara di Desa Mauhudu Kecamatan Tabongo Kab. Gorontalo.



Pergelaran kesenian masyarakat Kampung Botol di depan rumah yang mendapat bantuan program BSPS, di Kecamatan Dembe, Kota Gorontalo saat menyambut kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel. Kampung ini mendapat perhatian dan dijadikan salah satu kluster wisata setelah atas inisiatif Rachmat Gobel menjadi kampung mural.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mendengar aspirasi masyarakat dalam kunjungan ke berbagai desa di Kabupaten Gorontalo Utara.



Pengarahan Rachmat Gobel kepada masyarakat penerima bantuan program BSPS di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

### **Senin (21/12) , Kabupaten Gorontalo Utara, Pukul 15.00**

**Bentuk Kegiatan:** Mengunjungi Rumah Aspirasi Program BSPS program 2020 yang sudah selesai di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

**Peserta:** Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Bupati Gorontalo Utara beserta jajarannya.

#### ***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Perlu menjaga lingkungan sekitar agar tetap rapi dan bersih.
2. Jalan yang ada di depan rumah penerima program BSPS di Kabupaten Gorontalo Utara akan diperjuangkan kepada Kementerian PUPR untuk di aspal.
3. Masyarakat harus saling menumbuhkan sikap gotong royong antar sesama.

### **Rabu (23/12) di Kabupaten Bone Bolango**

**Bentuk Kegiatan:** Penyerahan Bantuan Bus Sekolah Aspirasi Rachmat Gobel dari Kementerian Perhubungan di Kabupaten Bone Bolango



Penyerahan Bus Sekolah bantuan dari Kementerian Perhubungan oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi Bupati Bonebolango dan Anggota DPRD di Kab. Bonebolango.

***Peserta:*** Bupati Bone Bolango, Kepala Dinas Perhubungan, Anggota DPRD Provinsi dari Partai NasDem, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bone Bolango

***Isu:*** Mengatasi masalah transportasi untuk anak sekolah di Kabupaten Bone Bolango

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Bus sekolah bantuan dari Kementerian Perhubungan harus dimanfaatkan dan dirawat dengan baik.
2. Harus di data anak usia sekolah berapa jumlahnya sehingga kita bisa mengukur berapa keperluan bus yang dibutuhkan untuk keperluan transportasi anak sekolah.

**Kamis (24/12) di Kabupaten Bone Bolango, Pukul 16.00**

***Bentuk Kegiatan:*** Penyerahan Alsitan Aspirasi Rachmat Gobel dari Kementerian Pertanian berupa:

- 2 Unit *Power Thresher*
- 1 Unit *Power Thresher* Multiguna
- 2 Unit *Power Thresher* Multiguna *Mobile*
- 2 Unit *Corn Sheller* *mobile*



Penyerahan Alsinta dari Kementerian Pertanian kepada 7 kelompok tani oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel di Desa Bongomeme, Kecamatan. Dungaliyo, Kabupaten. Gorontalo.



Silaturahmi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Umat Kristiani di Café Community Haose, Kota Gorontalo.

**Peserta:** Bupati Bone Bolango, Kepala Dinas Perhubungan, Anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bone Bolango

**Isu:** Mengatasi kebutuhan alat pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Dengan bantuan alsintan yang sudah diterima oleh kelompok tani, diharapkan bisa meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Bone Bolango.
2. Menjaga dan merawat alsintan yang sudah diberikan dengan baik.

**Jumat (25/112), Kota Gorontalo, Pukul 19.00**

**Bentuk Kegiatan:** Silaturahmi dengan Umat Kristiani

**Peserta:** Masyarakat Kristiani Kota Gorontalo di *Cafe Community House*.

**Isu:** Menjaga Silaturahmi Antar umat beragama.

**Sabtu (26/12), Kabupaten Gorontalo Utara, Pukul 10.00**

**Bentuk Kegiatan:** Penyerahan Bus Sekolah untuk Kabupaten Gorontalo Utara

**Peserta:** Bupati Gorontalo Utara, Kepala Dinas Perhubungan, Anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Gorontalo Utara



Penyerahan Alsintan dari Kementerian Pertanian oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi Wali Kota Gorontalo, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Nasdem. Dengan bantuan ini Rachmat Gobel mengharapkan anggota kelompok tani bisa menggunakan dan merawatnya dengan baik dan hasil bisa menjadi 2 kali lipat. Bantuan Alsintan berupa 2 Unit *Power Tresher*, 1 Unit *Power Tresher Multiguna*, 2 Unit *Power Tresher Multiguna Mobile*, 2 Unit *Corn Sheller mobile*.

**Isu:** Mengatasi masalah transportasi untuk anak sekolah di Kabupaten Gorontalo Utara.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

Dengan adanya bantuan Bus Sekolah diharapkan dapat membantu dan mempermudah para siswa lebih semangat lagi pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu.

**Minggu (27/12), Kota Gorontalo, Pukul 10.00**

**Bentuk Kegiatan:** Penyerahan Alsintan usulan Rachmat Gobel di rumah tepi sawah oleh Kementerian Pertanian berupa:

- 2 Unit *Power Thresher*
- 1 Unit *Power Thresher* Multiguna
- 2 Unit *Power Thresher* Multiguna *Mobile*
- 2 Unit *Corn Sheller mobile*

**Peserta:** Wali Kota Gorontalo, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi NasDem dan Kelompok Tani

**Isu:** Hasil Panen yang sedikit menjadi keluhan oleh para petani.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Dengan alat yang diberikan oleh pemerintah, alat tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga hasil panen bisa menjadi 2 kali lipat dan ada pengarahan pengolahan tanah dari penyuluh dinas pertanian.
2. Alat-alat yang diberikan harus dirawat dengan baik oleh koperasi dan kelompok tani yang ada di Kota Gorontalo

**Senin (28/12), Kota Gorontalo, Pukul 08.00**

**Bentuk Kegiatan:** Meninjau program BSPS 2020 yang dijadikan Kluster Mural

**Peserta:** Kepala Dinas Pariwisata Kota Gorontalo, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan DPD Nasdem Kota Gorontalo

**Isu:** Menjadikan Kampung Botol sebagai tempat wisata

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

Rachmat Gobel ingin memanfaatkan sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah kota Gorontalo yang bangunannya tidak difungsikan agar bangunan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menjual *souvenir* khas Gorontalo. Karena Kampung Botol yang rumahnya di-mural baik rumah yang dapat program BSPS dan rumah yang sudah bagus semua di-mural oleh Tim Rachmat Gobel. Karena lokasi Kampung Botol ada di lintasan jalan menuju lokasi wisata Benteng Ontanaha, harapannya kedepan desa

ini menjadi kawasan wisata dan masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan untuk meningkatkan ekonominya.

## **C. Kesimpulan**

### **1. Bidang Transportasi**

Pengadaan Bus Sekolah bantuan dari Kementerian Perhubungan sebanyak 3 unit yang diberikan kepada Kecamatan Boalemo Kabupaten Gorontalo utara dan Kabupaten Bone Bolango diharapkan dapat memudahkan para siswa untuk pergi ke sekolah. Rachmat Gobel juga berpesan semoga dengan bantuan Bus ini dapat memberikan semangat kepada para siswa untuk lebih giat lagi menuntut ilmu di sekolah. Bus tersebut juga harus dirawat dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo harus bisa mengukur berapa jumlah bus yang diperlukan berdasarkan jumlah siswa yang memerlukan transportasi untuk pergi ke sekolah, sehingga Rachmat Gobel bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat dengan jelas, tidak hanya pengajuan yang banyak tapi tidak sesuai dengan keperluan yang ada.

### **2. Bidang Infrastruktur**

Menjadikan *cluster* program rumah BPS yang ada di kecamatan Dembe Kota Gorontalo dibuat mural dengan desain yang menarik sehingga lingkungan tersebut menjadi rapi, bersih dan nyaman. Untuk kedepannya rumah yang sudah di desain menarik dan ditata dengan rapi tersebut dapat dijadikan salah satu obyek wisata yang ada di Kota Gorontalo. Sehingga masyarakat sekitar pun bisa mendapatkan penghasilan dari obyek wisata tersebut.

### **3. Bidang Pertanian**

Penyerahan alat pertanian di Kota/Kabupaten di Provinsi Gorontalo berupa:

- 2 Unit *Power Thresher*
- 1 Unit *Power Thresher* Multiguna
- 2 Unit *Power Thresher* Multiguna *Mobile*
- 2 Unit *Corn Sheller mobile*

Alat-alat tersebut agar dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Rachmat Gobel berharap kedepannya setiap Kota/Kabupaten terdapat bengkel khusus untuk merawat alat-alat tersebut jika terjadi kerusakan. Sehingga alat-alat tersebut selalu siap digunakan kapanpun dengan kondisi yang baik.



Deretan sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan) yang merupakan bantuan dari Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel untuk masyarakat petani di sejumlah desa di Gorontalo.



Dua orang pengurus kelompok tani di depan alat dan mesin pertanian yang berasal dari bantuan Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel.

Wakil Ketua DPR RI/  
Korinbang Rachmat Gobel  
dalam kegiatan reses selalu  
meluangkan waktu untuk  
melihat dan terlibat dalam  
kegiatan petani seperti ikut  
menanam padi.





# Kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021

**(14 Februari-18 Februari)**

## **A. Ruang Lingkup Kunjungan Kerja**

Kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI/Korinbang sebagai Anggota DPR RI ke Provinsi Gorontalo dilakukan untuk melihat secara langsung permasalahan yang ada, baik melalui pertemuan dengan masyarakat, dialog/ diskusi, audensi dan tanya jawab serta kunjungan/meninjau secara langsung ke daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian di dapil Provinsi Gorontalo. Daerah yang dikunjungi pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Gorontalo antara lain Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato.

## **B. Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, Rachmat Gobel sebagai Anggota DPR RI sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang melakukan reses ke daerah pemilihan Gorontalo selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 11 sampai dengan 19 Februari 2021.

### **Minggu (14/02) di Kota Gorontalo, Pukul 19.00**

**Bentuk Kegiatan:** Mengadakan *Doorprize* di Café JDS Kota Gorontalo

**Peserta:** Garnita, Garda, Petani Partai NasDem

#### **Isu:**

1. Mengadakan ramah tamah dengan kader Partai NasDem dan sekaligus mengajak kader Partai NasDem untuk memaksimalkan Rumah Aspirasi Rachmat Gobel;
2. Memaksimalkan peran serta kader Partai NasDem untuk menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mendengar penjelasan Kepala BNN Provinsi Gorontalo tentang berbagai program dan tentang tantangan penanggulangan dan pencegahan peredaran serta pemakaian Narkoba di wilayah Gorontalo.

### ***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Mengajak kepada seluruh masyarakat dan kader Partai NasDem untuk tanggap dalam membantu permasalahan masyarakat khususnya di sektor pertanian;
2. Mengajak kader Partai NasDem untuk berperan aktif serta mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat yang nantinya akan di tindak lanjuti oleh Rachmat Gobel.

### **Senin (15/02) di Kota Gorontalo, Pukul 11.00**

**Bentuk Kegiatan:** Kunjungan ke Kantor BNN Provinsi Gorontalo/Kantor BNN Provinsi Kota Gorontalo

**Peserta:** Kepala BNN Provinsi Gorontalo, Kepala BNN Kota Gorontalo, Kepala BNN Kabupaten Gorontalo, Kepala BNN Kabupaten Boalemo, Kepala BNN Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala BNN Bone Bolango dan seluruh jajaran BNN Provinsi Gorontalo

### ***Isu:***

1. Kurang perhatiannya Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan pemberantasan narkoba;



Dalam setiap kunjungannya, Wakil Ketua DPR/Ri Rachmat Gobel selalu mengagendakan pertemuan dan berdialog dengan kader Partai NasDem Gorontalo.



Kunjungan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel ke Benteng Otahana didampingi Wali Kota Gorontalo dan berdialog dengan turis asal Jerman yang mengunjungi daerah wisata Benteng Otahana.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan cinderamata Replika Gedung DPR RI kepada Kepala BNN Provinsi Gorontalo.



Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel menerima penghargaan dari Pemerintah Kab. Pohuwato atas berbagai dukungan dan bantuan serta perhatian atas aspirasi masyarakat Pohuwato. Penghargaan di serahkan oleh Pj Bupati Pohuwato.

2. Kurangnya mobil operasional (mobil tahanan, mobil pengangkut alat bukti, mobil rehabilitasi, mobil operasional humas BNN);
3. Kurangnya fasilitasi Gedung untuk BNN Provinsi Gorontalo (Gedung untuk laboratorium, bangunan untuk rawat inap bagi pasien yang direhabilitasi, kebutuhan pembangunan kantor BNN Provinsi Gorontalo);
4. Khusus untuk Kabupaten Puhowato struktur BNN di kabupaten tersebut masih di bawah oleh Pemda, hal ini menyulitkan koordinasi yang dilakukan oleh BNN Provinsi karena secara struktur BNN Kabupaten Puhowato tidak di vertikal, hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri karena Kabupaten Puhowato merupakan perbatasan antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Masih terdapat beberapa oknum penegak hukum yang terlibat dalam pengedaran narkoba.

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Memberikan apresiasi kepada BNN Provinsi Gorontalo terkait dengan beberapa prestasi dalam hal penindakan bagi para bandar narkoba yang cukup efektif;
2. Akan menindak lanjuti pemberantasan narkoba di Provinsi Gorontalo dengan melakukan dialog dengan semua *stakeholder* (Kepolisian, Kejaksaan, Pemda, BNN se-Provinsi Gorontalo);
3. Dialog akan dilakukan pada saat kunjungan dapil yang akan datang;
4. Terkait dengan kebutuhan pembangunan Gedung dan mobil oprasional bagi BNN Provinsi Gorontalo, Rachmat Gobel akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada BNN Pusat, hal ini perlu dilakukan agar pemberantasan narkoba dapat berjalan secara maksimal;
5. Akan berkomunikasi dengan BNN Pusat agar segera membentuk BNN Kabupaten Puhowato yang *definitive*

**Selasa (16/02), Kota Gorontalo, Pukul 13.00**

**Bentuk Kegiatan:** Pertemuan dengan DPW, DPD, Anggota Legislatif Partai NasDem Provinsi Gorontalo/Kantor DPW NasDem Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo

**Peserta:** Ketua DPW, Ketua DPD, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan seluruh Kader Partai NasDem Provinsi Gorontalo

**Isu:**

1. Banyak program yang di turunkan oleh Rachmat Gobel (Pisew) menjadi bahan bancakan dalam pelaksanaannya;



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberi arahan pada pertemuan silaturahmi Ketua BAPILU Sulawesi DPP Partai Nasdem dan Pengurus DPW/DPD Partai NasDem Gorontalo.

2. Masih banyak kelompok tani yang membutuhkan bantuan Alsintan untuk memaksimalkan produksi pertaniannya.

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Akan membicarakan dengan BWS II Sulawesi Provinsi Gorontalo terkait dengan program Pisew yang menjadi bancakan dalam tahap pelaksanaan;
2. Akan memprioritaskan kelompok-kelompok tani yang belum mendapat bantuan Alsintan, untuk segera di berikan bantuan;
3. Perlunya memaksimalkan peran Rumah Aspirasi Rachmat Gobel sebagai penampung aspirasi dari masyarakat, untuk itu meminta peran dari seluruh kader Partai NasDem sebagai garda terdepan dalam melakukan pendataan.

**Senin (15/02), di Kabupaten Bone Bolango, Pukul 13.00**

***Bentuk Kegiatan:*** Kunjungan ke Sentra Produksi Pabrik Batako

***Peserta:*** Pelaku UMKM Pengolahan Batako

***Isu:***

1. Kebutuhan Batako di Provinsi Gorontalo di suplay sendiri oleh pengusaha UMKM batako Provinsi Gorontalo;



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel melihat secara langsung kegiatan pembuatan batako oleh UMKM Kabupaten Bone Bolango.

2. Pelaku UMKM batako meminta kepada Rachmat Gobel untuk dapat membuka pasar penjualan batako lebih luas lagi di luar dari Provinsi Gorontalo.

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Mendorong pelaku UMKM batako membuat koperasi dan sekaligus menjadi anggota dari koperasi tersebut, agar kebutuhan modal bagi pelaku UMKM batako dapat terbantu;
2. Meminta Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota serta Provinsi untuk dapat menjadi pembeli utama dari produk-produk batako.

**Selasa (16/02), di Rumah Adat Tapa, Kabupaten Bone Bolango Pukul 10.00**

**Bentuk Kegiatan:** Menerima audiensi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Provinsi Gorontalo/ Rumah adat Tapa, Kabupaten Bone Bolango.

**Peserta:** Ketua Pemuda Muhammadiyah, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah, anggota Pemuda Muhammadiyah Provinsi Gorontalo.

**Isu:**



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Pengurus Pemuda Muhammadiyah Gorontalo setelah menerima kunjungan organisasi kepemudaan ini di rumah pribadinya di Gorontalo.

1. Pemuda Muhammadiyah meminta kepada Rachmat Gobel agar memperhatikan UMKM binaan yang telah dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah;
2. Pemuda Muhammadiyah meminta kepada Rachmat Gobel agar melibatkan pemuda dalam setiap program-program untuk pembangunan yang disalurkan oleh Rachmat Gobel.

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Mengajak UMKM binaan Pemuda Muhammadiyah untuk bergabung ke dalam koperasi yang telah di bangun oleh Rachmat Gobel agar UMKM binaan Pemuda Muhammadiyah mendapat bantuan melalui koperasi yang didirikan oleh Rachmat Gobel;
2. Meminta Pemuda Muhammadiyah untuk membuat *pilot project* untuk konsep UMKM yang dibina oleh Pemuda Muhammadiyah.

**Selasa (16/02), Kota Gorontalo, Pukul 17.00**

**Bentuk Kegiatan:** Mengunjungi rumah warga yang mendapat bantuan program BSPS dan mengunjungi situs sejarah benteng Otanaha/ Kota Gorontalo

**Peserta:** Walikota Gorontalo dan masyarakat di sekitar benteng Otanaha



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Wali Kota Gorontalo meninjau rumah mural bantuan BSPS PUPR Kota Gorontalo.

**Isu:**

1. Masyarakat yang mendapat bantuan BSPS serta mural bagi setiap rumah berterima kasih kepada Rachmat Gobel, karena dengan adanya bantuan BSPS tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah layak huni;
2. Pemerintah Kota Gorontalo siap bekerjasama dengan Rachmat Gobel terkait dengan bantuan-bantuan BSPS dan bantuan untuk pembenahan benteng Otanaha.
3. Belum ada kepastian sejarah terkait dengan kapan didirikannya Benteng Otanaha, hal ini di karenakan terdapat perbedaan pendapat dari beberapa pakar.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Mendorong Pemerintah Daerah Kota Gorontalo untuk segera melakukan pencatatan terkait dengan sejarah berdirinya Benteng Otanah, dan Rachmat Gobel berharap Pemerintah Kota Gorontalo dapat menjadi mediator terkait dengan perbedaan pendapat para pakar tentang kapan berdirinya Benteng Otanaha.



Sambutan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam acara Peluncuran Buku Kinerja 1 Tahun sebagai anggota DPR RI dengan judul “Menyerap Aspirasi, Menciptakan Solusi” didampingi staf khusus Dra. Nining Indra Shaleh M.Si di Hotel Aston Gorontalo.

2. Program BSPS serta bantuan mural bagi setiap rumah yang di realisasikan oleh Rachmat Gobel bukan hanya melakukan pembenahan terhadap rumah warga, namun juga membantu untuk melakukan penataan lingkungan di sekitar rumah warga;
3. Akan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata untuk membenahi Benteng Otanaha sebagai objek wisata di Kota Gorontalo;
4. Dalam acara ini Rachmat Gobel menyerahkan bantuan kipas angin bagi warga.

### **Rabu (17/02) di Kota Gorontalo, Pukul 13.30**

**Bentuk Kegiatan:** Silaturahmi bersama tokoh Gorontalo serta kegiatan *launching* buku “Menyerap Aspirasi, Menciptakan Solusi Satu Tahun Kiprah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Dr. (H.C.) Rachmat Gobel” di Hotel Aston, Kota Gorontalo

**Peserta:** Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dandim Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Adat Provinsi Gorontalo, Perwakilan Perguruan Tinggi se Provinsi Gorontalo, perwakilan



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama para pakar, tokoh masyarakat, akademisi, Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem Gorontalo pada Peluncuran Buku Kinerja 1 Tahun sebagai anggota DPR RI dengan judul “Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi”.

ormas-ormas islam Provinsi Gorontalo, serta perwakilan organisasi kemahasiswaan/pemuda Provinsi Gorontalo.

**Isu:**

1. Buku Rachmat Gobel “Menyerap Aspirasi, Menciptakan Solusi” merupakan bentuk tanggung jawab Rachmat Gobel selama 1 tahun menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang bagi masyarakat Gorontalo dan Indonesia;
2. Perlu adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membawa Provinsi Gorontalo keluar dari zona Provinsi 5 termiskin di Indonesia;
3. Permasalahan pertanian di Indonesia harus di selesaikan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, agar Indonesia dapat mandiri dari sektor pertanian;
4. Perlu adanya pencatatan secara detail mengenai adat istiadat yang ada di Provinsi Gorontalo, hal ini perlu dilakukan karena saat ini nilai adat telah bergeser dan di tinggalkan khususnya oleh generasi milenial;

5. Masih terdapat masyarakat yang terdapat di pelosok-pelosok Provinsi Gorontalo yang belum tersentuh dunia Pendidikan;
6. Pelaku usaha Kopra meminta kepada Rachmat Gobel untuk memfasilitasi industri bahan olahan dari Kopra;
7. Pemerintah Daerah meminta kepada Rachmat Gobel untuk membantu mengkomunikasikan terkait dengan pembentukan armada tempur khususnya di perbatasan Provinsi Gorontalo dengan Republik Palau, hal ini perlu dilakukan demi keamanan.

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Membantu Lembaga adat terkait dengan penulisan buku data yang ada di Gorontalo;
2. Dalam waktu sisa 4 tahun jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang, Rachmat Gobel akan terus mendorong program Kementerian yang bersentuhan langsung untuk masyarakat, namun hal ini perlu adanya sinergi dari Pemerintah Daerah agar bantuan program-program tersebut dapat terealisasi tepat sasaran;
3. Terus melanjutkan pembangunan *Demplot* dan pemberian pupuk non-subsidi, bagi para petani agar sektor pertanian di Provinsi Gorontalo lebih produktif lagi;
4. Sektor Pendidikan harus menjadi perhatian dari semua pihak, Rachmat Gobel akan mendorong Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengajar di Gorontalo, melalui program-program yang ada di Kementerian Pendidikan;
5. Telah mengusulkan kepada Kementerian PUPR untuk membangun RUSUNAWA bagi orang tua/jompo yang tidak memiliki rumah;
6. Menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk bersinergis terkait dengan semua program-program yang telah terealisasi maupun akan di realisasikan oleh Rachmat Gobel untuk Provinsi Gorontalo.

**Kamis (18/02), di Kabupaten Boalemo, Pukul 09.00**

***Bentuk Kegiatan:*** Menghadiri sosialisasi OJK dengan tema “Pengelolaan dana UMKM Kabupaten Boalemo” di Hotel Grand Amalia, Kabupaten Boalemo.

***Peserta:*** Kepala perwakilan OJK Regional 6: Sulawesi, Maluku dan Papua, Perwakilan OJK Provinsi Gorontalo serta masyarakat pelaku UMKM Kabupaten Boalemo.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan sambutan dan arahan pada sosialisasi OJK di Kabupaten Boalemo.

**Isu:**

1. OJK telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke UMKM di Kabupaten Boalemo;
2. Pentingnya pengelolaan dana UMKM, khususnya pada saat kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Menyampaikan bahwa kondisi pandemi Covid-19 saat ini harus di jadikan momentum untuk perubahan kehidupan baru, dalam hal ini kondisi pandemi Covid-19 bukan menjadi suatu alasan untuk tidak berkembangnya ekonomi masyarakat;
2. Mengapresiasi kehadiran OJK dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu masyarakat melakukan pengembangan UMKM.

**Kamis (18/02), Kabupaten Pohuwato, Pukul 12.00**

**Bentuk Kegiatan:** Penyerahan Alsintan Pertanian bagi kelompok tani/ Marina Beach Resort, Kabupaten Pohuwato.

**Peserta:** PJ Bupati Kabupaten Pohuwato, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, kelompok tani penerima alsintan Kabupaten Pohuwato.

**Isu:**



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama kelompok tani penerima bantuan Alsintan di Kabupaten Pohuwato.

1. Dinas Pertanian dan kelompok tani berterima kasih kepada Rachmat Gobel terkait dengan Alsintan yang diberikan;
2. Dinas Pertanian berharap kepada Rachmat Gobel agar memberikan dukungan maksimal bagi para kelompok tani yang ada di Kabupaten Pohuwato;
3. PJ Bupati Kabupaten Pohuwato meminta kepada Rachmat Gobel untuk membantu mempromosikan Kabupaten Pohuwato dalam sektor Pariwisata, karena sektor Pariwisata di Kabupaten Pohuwato memiliki potensi yang luar biasa.

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Akan melakukan pendataan terkait dengan kebutuhan Alsintan bagi kelompok tani di Kabupaten Pohuwato;
2. Mendorong kelompok tani membentuk koperasi, hal ini penting dilakukan agar sektor pertanian di Kabupaten Pohuwato banyak mendapat dari Pemerintah Pusat baik berupa modal maupun bantuan-bantuan lainnya;
3. Koperasi yang akan di buat nantinya akan menyelesaikan persoalan-persoalan teknis bagi petani, agar petani dapat fokus bercocok tanam.



Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel memberikan pengarahannya dalam penyuluhan atau sosialisasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait dengan pembiayaan UMKM dan juga pencegahan investasi fiktif.

### **Kamis (18/02) di Kabupaten Pohuwato, Pukul 13.30**

**Bentuk Kegiatan:** Menghadiri sosialisasi OJK dengan tema “Waspada Pinjaman *Online* dan Investasi Ilegal” di Marina Beach Resort, Kabupaten Pohuwato.

**Peserta:** Perwakilan OJK Provinsi Gorontalo, Pelaku UMKM Kabupaten Pohuwato

#### **Isu:**

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap jerat pinjaman *online* yang sekarang marak di Indonesia;
2. Masyarakat harus lebih bisa melihat bagaimana pola investasi bodong yang sering terjadi di Indonesia, karena investasi bodong merupakan tindakan pidana pencucian uang (TPPU);
3. Pandemi Covid-19 sangat memiliki dampak yang signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat khususnya di kabupaten Pohuwato.

#### **Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Menginstruksikan kepada lembaga perbankan untuk memberikan bantuan serta fokus program kepada pengusaha kecil;
2. Menyarankan kepada pelaku UMKM untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar dapat mempertahankan usahanya serta mengembangkan usaha;
3. Akan lebih meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait agar Kabupaten Pohuwato lebih banyak mendapatkan bantuan atau stimulus untuk pelaku UMKM;
4. Meminta kepada OJK untuk memperhatikan tumbuh kembangnya UMKM, karena di tengah kondisi Covid-19 saat ini UMKM merupakan sektor usaha yang dapat menopang ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan arahan pada sosialisasi Stimulus Kebijakan OJK dengan tema "Waspada Pinjaman Online dan Investasi Ilegal" di Kabupaten Pohuwato.



### C. Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

#### • Identifikasi Permasalahan di Daerah

Dalam kunjungan kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), menyampaikan hasil kunjungannya ke Gorontalo, yang dilakukan ke 3 Kabupaten dan 1 Kota Madya, yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo.

Dari hasil kunjungan tersebut ada beberapa permasalahan yang perlu ditindak lanjuti, yaitu sebagai berikut: (1) bidang Infrastruktur sarana dan prasarana; (2) bidang pertanian, perkebunan dan perikanan; (3) bidang pendidikan dan peningkatan SDM; (4) bidang pariwisata; (5) bidang perekonomian.

#### • Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut

1. Akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian pertanian, PUPR, Pendidikan dan Pariwisata, untuk melakukan penyelesaian permasalahan di berbagai sektor;
2. Dalam kunjungan yang akan datang, akan lebih memfokuskan kepada koordinasi terkait dengan pemberantasan narkoba yang melibatkan semua unsur terkait di Provinsi Gorontalo;
3. Dalam kunjungan yang akan datang, akan melakukan pendataan khususnya pada sektor pertanian (Alsintan) di Kabupaten Pohuwato.

# Kegiatan Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021

**(28 April-5 Mei 2021)**

**D**alam Reses Masa Persidangan 1V Tahun Sidang 2020 -2021 sebagai Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel melakukan kunjungan kerja perorangan ke Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Gorontalo pada tanggal 28 April 2021 sampai dengan 5 Mei 2021 dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya ke daerah pemilihan .

## **A. Kegiatan Kunjungan**

**Kamis (29/04), Kota Gorontalo, Pukul 15.00**

**Bentuk Kegiatan:** Menjadi *Keynote Speaker* di kegiatan OJK dalam rangka Gebyar Ramadhan, dengan tema “Potensi Industri Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo”

**Peserta:** Masyarakat dan pelaku UMKM se-Provinsi Gorontalo

**Isu:**

1. Gorontalo merupakan Provinsi yang jumlah penduduk Islamnya dominan;
2. Kehadiran BSI (Bank Syariah Indonesia) di Indonesia sebagai Bank berbasis Syariah, diharapkan dapat berkembang di Provinsi Gorontalo.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Berharap melalui OJK, Provinsi Gorontalo harus mampu berkembang menjadi lebih baik;



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama jajaran OJK dan pelaku UMKM Provinsi Gorontalo.

2. Konsep Bank Syariah harus mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat, karena fakta yang dihadapi oleh masyarakat banyak petani yang terkena BI *checking* dan OJK *checking*;
3. Berharap dapat bekerja sama dengan BSI dalam membangun kawasan ekonomi halal di Provinsi Gorontalo;
4. Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang akan terus mendorong tumbuh kembangnya Bank Syariah di Indonesia

### **Jumat (30/04) di Kota Gorontalo, Pukul 10.00**

**Bentuk Kegiatan:** Penyerahan bantuan secara simbolis bantuan dari Bank Indonesia

**Peserta:** Perwakilan Masyarakat Kota Gorontalo

#### **Isu:**

1. Bank Indonesia memberikan bantuan bagi masyarakat di daerahnya terkena bencana
2. Bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui Yayasan Cahaya RG berupa bantuan paket sembako senilai Rp 248.750.000,-;



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama civitas akademika Universitas Gorontalo pada acara yang digelar Otoritas Jasa Keuangan.

3. Bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui Yayasan Insan (Inspirasi Sahabat Tani) berupa bantuan paket sembako senilai Rp. 150.000.000,-;
4. Total paket sembako yang diberikan Bank Indonesia melalui dua Yayasan diatas berjumlah 2.735 paket

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Mengapresiasi kepada Bank Indonesia atas bantuan yang telah disalurkan melalui dua Yayasan tersebut, bantuan yang diberikan sangat membantu masyarakat yang terdampak bencana;
2. Mengharapkan kepada Bank Indonesia untuk berkelanjutan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana khususnya di Provinsi Gorontalo.

**Jumat (30/04)di Kabupaten Gorontalo, Pukul 13.00**

***Bentuk Kegiatan:*** Penyuluhan OJK di Universitas Gorontalo, dengan tema “Literasi Keuangan Dan Berantas Investasi Fiktif Di Gorontalo”

***Peserta:*** Civitas Akademika Universitas Gorontalo

***Isu:***

1. Sosialisasi OJK dilakukan bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi serta akses keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

2. Maraknya investasi ilegal di Indonesia sangat merugikan masyarakat, sehingga masyarakat harus mendapat edukasi terkait dengan dunia sektor keuangan;
3. Di Indonesia terdapat kurang lebih Rp 105.81 triliun kerugian yang dialami masyarakat akibat banyaknya investasi ilegal.

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Sifat konsumtif masyarakat Indonesia harus dibatasi, karena akan berpengaruh pada tingkat-tingkat kesejahteraan masyarakat;
2. Kita harus memanfaatkan kekayaan yang berasal dari sumber kekayaan diri kita sendiri baik memanfaatkan SDA dan SDM;
3. Masyarakat harus berhati-hati terhadap investasi ilegal yang banyak beredar saat ini di Indonesia.

**Jumat (30/04), Kota Gorontalo, Pukul 16.30**

***Bentuk Kegiatan:*** Silaturahmi serta berbuka puasa bersama dengan Pengurus DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo di Kantor DPW Partai NasDem, Kota Gorontalo

***Peserta:*** Pengurus serta seluruh kader DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo

**Minggu (01/05), Kabupaten Gorontalo, Pukul 10.00**

***Bentuk Kegiatan:*** Penyerahan bibit di Desa Tabongo Timur, Kabupaten Gorontalo

***Peserta:*** Masyarakat serta kelompok tani di Desa Tabongo Timur

***Isu:***

1. Di Desa Tabongo Timur terdapat 21 kelompok tani, 300 petani serta kurang lebih 770 hektar lahan;
2. Masyarakat dan kelompok tani berterima kasih kepada Rachmat Gobel karena telah memberikan bantuan bibit;
3. Selain bantuan bibit yang telah di berikan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu benih jagung “Pioneer”.
4. Masyarakat meminta kepada Rachmat Gobel untuk memberikan bantuan pembangunan infrastruktur (penerangan jalan) di desa Tabongo Timur;
5. Masyarakat dan kelompok tani berharap Rachmat Gobel terus memberikan bantuan serta perhatian bagi petani di Desa Tabongo Timur khususnya terkait dengan produktifitas dari hasil pertanian.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama sejumlah petani di Desa Tabongo Timur, Kabupaten Gorontalo yang mendapat bantuan benih jagung Pioneer.

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Telah menuntaskan janji kampanyenya pada tahun 2019 untuk memberikan bantuan bagi pertanian di desa Tabongo Timur;
2. Mendorong agar para petani harus menjadi anggota koperasi yang telah di buat oleh Rachmat Gobel, agar Rachmat Gobel mudah memberikan bantuan lainnya melalui koperasi tersebut;
3. Akan mengupayakan bantuan mesin penggilingan bagi petani di desa Tabongo Timur;
4. Akan berupaya membangun system yang lebih terintegrasi di sector pertanian khususnya di Provinsi Gorontalo, dengan konsep membangun industry pertanian agar lebih meningkatkan produktivitas pertanian itu sendiri.

**Senin (02/05), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 10.00**

**Bentuk Kegiatan:** Silaturahmi dan bukapusa bersama dengan Pimpinan Ormas Islam (MUI, NU, Muhammadiyah, Serikat Islam) dan para Rektor PTS dan PTN, di rumah adat Rachmat Gobel, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menghadiri buka bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Rum Pagau.

**Peserta:** Pimpinan Ormas Islam (MUI, NU, Muhammadiyah, Serikat Islam), Rektor PTS dan PTN se-Provinsi Gorontalo.

**Isu:**

1. Peningkatan persatuan umat Islam di Provinsi Gorontalo;
2. Gorontalo sebagai provinsi yang berjuluk serambi Madinah harus menonjolkan persatuan antar umat beragama.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Rachmat Gobel mengajak seluruh tokoh organisasi masyarakat Islam untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat;
2. Rachmat Gobel akan memaksimalkan bantuan Pendidikan bea siswa bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo.

**Senin (02/05) di Kabupaten Boalemo, Waktu 16.30**

**Bentuk Kegiatan:** Silaturahmi dan buka puasa bersama dengan tokoh dan masyarakat Boalemo, di rumah Rumpa Gao, Kabupaten Boalemo

**Peserta:** Masyarakat serta kader Partai NasDem di Kabupaten Boalemo



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama pedagang pasar dalam kunjungan kerja reses ke daerah pemilihan Prov. Gorontalo.



Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel pada kegiatan sosialisasi kebijakan stimulus ekonomi dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 pada masyarakat Gorontalo yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).





Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel di area persawahan sesuai melihat kondisi infrastruktur irigasi.

# Kegiatan Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021

**(23 Juli-31 Juli 2021)**

## **A. Ruang Lingkup Lingkungan Kerja**

Kunjungan kerja reses perorangan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang sebagai Anggota DPR RI ke Dapil Gorontalo dilakukan untuk melihat secara langsung permasalahan yang ada, baik melalui pertemuan dengan masyarakat, dialog/diskusi, audensi dan tanya jawab serta kunjungan/meninjau secara langsung ke daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian di dapil Provinsi Gorontalo. Adapun daerah yang dikunjungi pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Gorontalo antara lain Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato.

### **Sabtu (24/07), Kabupaten Gorontalo, pukul 19.00**

**Bentuk Kegiatan:** Pertemuan Internal Tim Reses Rachmat Gobel untuk koordinasi kunjungan Reses Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel di Tapa, Kabupaten Gorontalo

**Peserta:** Staf Khusus, TA dan Tim Reses Gorontalo

#### **Isu:**

1. Banyaknya aspirasi masyarakat Gorontalo yang belum tertangani
2. Masyarakat Gorontalo masa pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan, khususnya pedagang, buruh bangunan dan yang lainnya;
3. Banyaknya anak-anak yang membutuhkan asupan gizi dan kesehatan.
4. Rumah Sakit perlu obat-obatan dan alat ventilator untuk membantu masyarakat yang terkena Covid-19.

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang membutuhkan bantuan berdasarkan skala prioritas;
2. Menyusun Rencana Kegiatan Reses Wakil Ketua DPR/Korinbang Rachmat Gobel yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021;
3. Memaksimalkan peran serta kader Partai NasDem untuk menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi;
4. Melalui rumah aspirasi Rachmat Gobel mengajak kader Partai NasDem untuk berperan aktif serta mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Rachmat Gobel.

**Minggu (25/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 06.00**

***Bentuk Kegiatan:*** Olah Raga Jalan Pagi sambil melihat masyarakat sekitar pada saat pandemi Covid-19 yang sekiranya perlu bantuan di Kabupaten Bone Bolango.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel olah raga jalan pagi bersama Bupati Bone Bolango.

**Peserta:** Dibatasi dikarenakan pandemi Covid-19 yaitu Bupati Bone Bolango, Staf Khusus dan kader Partai NasDem

**Isu:**

1. Banyaknya sampah-sampah di jalan dikarenakan masyarakat kurang peduli terhadap kebersihan;
2. Kurang disiplinnya masyarakat terhadap lingkungan.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Perlu adanya komunikasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan kepedulian untuk membuang sampah pada tempatnya;
2. Rachmat Gobel ingin memberikan edukasi terhadap masyarakat, agar sampah-sampah plastik dapat dijadikan *added value* untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Akan membicarakan dengan Jajaran Pemda setempat untuk dapat diberikan bantuan bak sampah di jalan-jalan.

**Minggu (25/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 07.00**

**Bentuk Kegiatan:** Meninjau pembangunan Gelanggan Olahraga (GOR) Kabupaten Bone Bolango didampingi oleh Bupati Bone Bolango, Kabupaten Bone Bolango

**Peserta:** Ketua DPW, Ketua DPD, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan seluruh Kader Partai NasDem Provinsi Gorontalo

**Isu:**

1. Masyarakat Bone Bolango perlu fasilitas Olah Raga, untuk membangun dan mengkader para atlit dari Gorontalo, khususnya Bone Bolango;
2. Belum adanya Gelanggang Olah Raga yang memadai untuk pelaksanaan pertandingan Olah Raga;
3. Bangunan GOR terbengkelai.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Mendukung tindak lanjut pembangunan GOR di Kabupaten Bone Bolango;
2. Dapat dijadikan motivasi untuk para atlit dan pecinta olah raga dalam meningkatkan prestasi;
3. Akan membantu menyampaikan kepada Instansi terkait, apa sebab terkendala dan terhentinya pembangunan GOR Bone Bolango tersebut;



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berdialog dengan pekerja UMKM Kelapa Hibrida Kering UD. Bumi Agro Gorontalo (UMKM) didampingi oleh Bupati Bone Bolango.

### **Minggu (25/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 8.00**

**Bentuk Kegiatan:** Mengunjungi UKM kemiri gabah kering, kelapa hibrida kering, kelapa biasa kering/mengel UD. Bumi Agro Gorontalo didampingi oleh Bupati Bone Bolango di Desa Bulotalangi Timur, Bone Bolango

**Peserta:** Didampingi oleh Bupati Bone Bolango, Staf. Khusus, Anggota DPRD dan Kader-kader Partai NasDem, Pemilik UD Bumi Agro Gorontalo, serta kelompok UKM

#### **Isu:**

1. Berkurangnya penjualan kelapa di masa pandemi Covid-19, yang berakibat pengurangan modal untuk pengembangan hasil produksi;
2. Butuh penambahan modal melalui kredit lunak Bank;
3. Pemasaran kurang menjangkau keseluruhan nasional;
4. Kurangnya koordinasi dengan Koperasi terkait.

#### **Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Perlu adanya terobosan-terobosan baru, untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19, melalui inovasi-inovasi bekerja sama dengan koperasi;
2. Akan mengkoordinasikan dengan pihak perbankan agar dapat kredit lunak;



Penanaman Pohon Durian oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi Bupati Bone Bolango Hamim Pou di Asmara Garden, Desa Bulotalangi Timur, Kabupaten Bone Bolango.

3. Perlunya terobosan baru melalui media sosial untuk mengembangkan hasil produksinya;

### **Minggu (25/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 09.00**

**Bentuk Kegiatan:** Penanaman pohon durian oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel di Asmara Garden didampingi oleh Bupati Bone Bolango dan Pengurus Garnita Partai NasDem di Desa Bulotalangi Timur, Kabupaten Bone Bolango

**Peserta:** Bupati Bone Bolango, Staf. Khusus, Anggota DPRD dan Garnita Partai NasDem serta Kader-kader Partai NasDem

**Isu:**

1. Masih banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan;
2. Kurangnya penghijauan

**Tanggapan dan Arahkan Rachmat Gobel:**

1. Lahan kosong perlu ditanami pohon yang bermanfaat bagi masyarakat;
2. Memberi bantuan tanaman Durian untuk dapat dikembangkan di Gorontalo.

**Senin (26/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 10.00**

**Bentuk Kegiatan:** Penyerahan Simbolis Beras Fortivit dari Bulog oleh Wakil Ketua DPR RI ke Masyarakat didampingi Direktur Bisnis Bulog Ibu Febby dan Bupati Bone Bolango Hamim Pho dan Anggota DPRD di Rumah Dinas, Kabupaten Bone Bolango

**Peserta:** Bupati Bone Bolango dan Wakil Bupati, Direktur Bisnis Bulog, Staf Khusus, Anggota DPRD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Kapolsek, TA dan Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem.

**Isu:**

1. Penuntasan masalah *stunting* bagi masyarakat di Kabupaten maupun Kota;
2. Masih adanya gizi buruk bagi balita yang belum dituntaskan;
3. Masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi Covid-19;
4. Banyak keluarga yang masih kekurangan.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Penanganan *stunting* perlu diberikan bantuan obat, makanan bergizi sebagian menggunakan dana desa;
2. Membantu memberikan bantuan beras Fortivit (beras mengandung vitamin) bagus untuk anak balita dan ibu hamil, penambahan gizi dan meningkatkan imun tubuh, serta cocok diberikan saat pandemi Covid-19 bagi masyarakat;
3. Dalam menangani program *stunting* Rachmat Gobel akan memprogramkan memberi bantuan beras Fortivit secara bertahap pada reses kepada masyarakat;
4. Pemberian bantuan *stunting* beras Fortivit untuk masyarakat perlu didata, agar terdistribusi dengan tertib.

**Senin (26/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 13.00**

**Bentuk Kegiatan:** Pertemuan dengan Jajaran PLN Wilayah Gorontalo di Tapa, Kabupaten Bone Bolango

**Peserta:** Kepala Wilayah PLN dan Staf, Staf.Khusus, Anggota DPRD

**Isu:**

1. Gorontalo butuh energi, dan perlu ditingkatkan terutama yang ramah lingkungan;
2. Belum diberikannya ijin untuk penanganan terkait dengan penanaman;
3. Dibutuhkan CSR atau investor dalam meningkatkan energi;



Wakil Ketua DPR RI/Korinbanng Rachmat Gobel bersama dengan jajaran PLN Kanwil Gorontalo di Tapa, Kabupaten Bone Bolango.

4. Kurangnya kebersihan lingkungan terutama sampah plastik, botol bekas dan sampah-sampah lainnya.

***Tanggapan dan Arahannya Rachmat Gobel:***

1. Perlu meningkatkan kebutuhan energi yang ramah lingkungan, melalui vendor untuk meminta kepada PLN;
2. Perlu adanya konsep untuk mengolah sampah yang nantinya mempunyai *added value* bagi masyarakat;
3. Penanaman enceng gondok agar melindungi lingkungan.

**Senin (26/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 16.00**

**Bentuk Kegiatan:** Pertemuan dengan Kepala Balai Perumahan Sulawesi I, juga dihadiri oleh Anggota DPRD, Staf Khusus dan TA di Tapa, Kabupaten Bone Bolango.

**Peserta:** Kepala Balai Perumahan Sulawesi I, juga dihadiri oleh Anggota DPRD, Staf Khusus dan tenaga ahli (TA).

**Isu:**

1. Banyak Masyarakat Gorontalo yang masih membutuhkan tempat tinggal yang layak;
2. Masih perlu bantuan dari pemerintah pusat (PUPR) untuk pemberian BSPS ke masyarakat Gorontalo;
3. Dibutuhkan tempat tinggal bagi para medis agar dapat melayani masyarakat dengan cepat apalagi di masa pandemi Covid-19;
4. Banyaknya lansia yang terlantar dikarenakan tidak terurus;
5. Banyak sekolah rusak dan terbengkelai dikarenakan keterbatasan anggaran;
6. Perlunya revitalisasi pesantren di Gorontalo

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Perlu diinventarisir masyarakat yang akan diberi bantuan tempat tinggal;
2. Akan meminta kepada PUPR untuk dapat diberikan bantuan BSPS kepada kabupaten/Kota Gorontalo;
3. Telah diusulkan kepada PUPR dan rencana akan dibangun Rusunawa untuk para medis di Gorontalo;
4. Untuk membantu para lansia yang kurang terurus, maka akan direncanakan membangun rumah lansia yang akan dikelola oleh yayasan agar dapat dipertanggung jawabkan;
5. Akan mengusulkan perbaikan/renovasi untuk sekolah-sekolah yang rusak kepada Mendikbud dan PUPR;
6. Telah diusulkan untuk pembangunan Pondok Pesantren di Boalemo dikarenakan santri/wati sangat banyak dan belum terfasilitasi.

**Senin (26/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 17.00**

***Bentuk Kegiatan:*** Pertemuan dengan Tim Pakar dari Akademisi dan para Tokoh dari Gorontalo di Tapa, Kabupaten Bone Bolango

***Peserta:*** Rektor UNG, Dosen, Pakar Sejarah, Staf Khusus dan tenaga ahli

***Isu:***

1. Gorontalo rencana akan mengusulkan nama-nama yang berasal dari Gorontalo yang berjasa bagi nusa dan bangsa sebagai pahlawan;
2. Belum adanya Pusat Pengembangan untuk SDM di Gorontalo;
3. Masyarakat kurang peduli terhadap sejarah Gorontalo untuk dapat dilestarikan;
4. Sulitnya bea siswa bagi masyarakat Gorontalo untuk pendidikan.

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Perlunya dibentuk Tim dari Tokoh Masyarakat/Adat dan pakar/Akademisi untuk menyusun kajian terkait Pahlawan Nasional;
2. Menginventarisir Tokoh-tokoh Gorontalo yang memberikan keteladanan dan mengusulkan kepada Menteri Sosial agar dapat diproses sesuai ketentuan;
3. Perlunya dirintis membuat Lembaga Unggulan di Gorontalo untuk mengembangkan SDM ke depan;
4. Akan meminta kepada BUMN agar dapat memberikan bantuan beasiswa pada masyarakat Gorontalo untuk meningkatkan SDM ke depan;
5. Perlu sosialisasi wawasan kebangsaan dan pembangunan museum.

**Selasa (27/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 10.00**

**Bentuk Kegiatan:** Memberikan sambutan dalam acara “Opening Ceremony Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) Tahun 2021” tema “Strategi dan Kebijakan Pembiayaan Syariah untuk Pemulihan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia dan Diseminasi Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia”

**Peserta:** Wakil Gubernur Gorontalo, Bupati Bone Bolango, Kakanwil BI Gorontalo, Staf Khusus, Anggota DPRD dan Undangan.

***Isu:***

1. Belum tersosialisasikan pengembangan ekonomi syariah kepada masyarakat;
2. Perlu adanya program strategis terutama UMKM agar dapat meningkatkan hasil produksinya ke nasional maupun internasional;
3. Kurangnya SDM yang memahami teknologi untuk meningkatkan perekonomian;

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. Agar peran Bank Indonesia (BI) Gorontalo dapat melakukan sinergi dengan baik dengan Pemprov maupun masyarakat Gorontalo;
2. Para pelaku ekonomi dalam berbagai program pengembangan ekonomi dipandang perlu untuk mengajak para UKM untuk berpartisipasi dalam menjaga tingkat inflasi sehingga dapat mendukung program TPPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah).

**Selasa (27/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 12.00**

**Bentuk Kegiatan:** Meninjau pembangunan TPA Talumelito di Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberi sambutan pada acara “Opening Ceremony Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) Tahun 2021.

**Peserta:** Bupati Bone Bolango, Dinas terkait, Anggota DPRD, Staf Khusus dan TA

**Isu:**

1. Banyaknya sampah dan limbah yang tidak tertampung di lokasi pembuangan sampah;
2. Kurang adanya pengolahan limbah;
3. Pembuangan sampah masih belum terkoordinir dan tertata.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Rencana pembangunan sampah yang dapat menampung kapasitas yang memadai, yang juga dapat untuk mengolah limbah;
2. Pengelolaan TPA direncanakan agar dapat memilah jenis sampah, yang nantinya dapat dikelola untuk daur ulang;
3. Akan dibuat tempat pengelolaan sampah yang nantinya bisa menjadi *added value* bagi masyarakat setempat
4. Dibuat mekanisme dan prosedur untuk pembuangan sampah ke TPA

**Selasa (27/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 13.00**

**Bentuk Kegiatan:** Penyerahan Simbolis *stunting* Beras Fortivit dari Bulog dan Alsintan dari Kementerian Pertanian RI oleh Wakil Ketua DPR RI kepada Masyarakat Tani didampingi oleh Bupati Bone Bolango, Ketua

DPRD Kabupaten dan Ketua PKK Kabupaten Bone Bolango di Desa Meranti, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

**Peserta:** Bupati Bone Bolango dan Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Kabupaten Bone Bolango, Direktorat Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RI, Pimpinan DPD, Ketua PKK Kabupaten Bone Bolango dan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten serta Masyarakat yang akan diberi bantuan.

**Isu:**

1. Penuntasan masalah *stunting* bagi masyarakat di Kabupaten maupun Kota;
2. Masih adanya gizi buruk bagi balita yang belum dituntaskan;
3. Masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi Covid-19;
4. Banyak keluarga yang masih kekurangan
5. Kurangnya alat pertanian untuk mengelola lahan pertanian untuk menaikkan hasil panen/produksi;
6. Banyak lahan pertanian yang belum bisa dikelola dengan baik.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. *Stunting* merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara sungguh-sungguh, dan butuh peran aktif semua pihak;
2. Membantu memberikan bantuan beras Fortivit, beras yang mengandung vitamin bagus untuk anak balita dan ibu hamil, penambahan gizi dan meningkatkan imun tubuh, serta cocok diberika disaat pandemi Covid-19 bagi masyarakat;
3. Program *stunting* akan dilaksanakan secara bertahap setiap reses oleh Rachmat Gobel untuk meningkatkan kesejahteraan;
4. Dalam pemberian bantuan *stunting* perlu adanya pendataan, khususnya pemberian bantuan beras Fortivit untuk masyarakat;
5. Akan memberikan bantuan alat pertanian berupa penggiling beras/ *power thresher* multiguna yang telah diusahakan melalui Kementerian Pertanian RI, agar dapat membantu para kelompok tani untuk meningkatkan hasilnya;
6. Dalam perawatan alat pertanian tersebut, sebaiknya bekerjasama dengan UKM untuk dikoordinir dan peralatan tersebut dapat terawat dengan baik;
7. Perlu adanya koordinasi untuk penggunaan alat pertanian tersebut agar dapat bergiliran.

**Selasa (27/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 14.000**

**Bentuk Kegiatan:** Pertemuan dengan Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem, Pengurus Garnita Kabupaten Bone Bolango dan Kader-kader Partai NasDem

**Peserta:** Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem, Pengurus Garnita Kabupaten Bone Bolango dan Kader-kader Partai NasDem

**Isu:**

1. Kurangnya solidaritas kader dari akar rumput dan jajaran Partai;
2. Belum maksimalnya koordinasi DPW dan DPD;
3. Memaksimalkan target e-KTA baik DPW maupun DPD;
4. Suara kader perlu diperhatikan

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Perlu ditingkatkan koordinasi kader Partai mulai dari akar rumput, jajaran s.d. tingkat tinggi;
2. Para Pengurus DPW maupun DPD perlu mendengar aspirasi kader untuk membangun Partai NasDem agar tetap maju dan besar;
3. Perlu adanya koordinasi antara DPW dan DPD Partai NasDem terkait dengan program-program yang diberikan harus di-*connecting* dengan DPRT.

**Selasa (27/07), Kabupaten Bone Bolango, Pukul 17.00**

**Bentuk Kegiatan:** Meninjau dalam rangka pengawasan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango didampingi Bupati Bone Bolango dan Anggota DPRD dan PUPR

**Peserta:** Bupati Bone Bolango, Jajaran PUPR, Pemda terkait, Kapolsek setempat, Para Pejabat dan Guru SDN 6

**Isu:**

1. Gedung sekolah yang rusak berat, dan kurangnya anggaran untuk renovasi;
2. Kelas banyak yang bocor;
3. Peralatan sekolah untuk siswa/i kurang memadai;
4. Tempat olah raga untuk siswa banyak yang rusak

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Akan menyampaikan kepada Dinas terkait dan PUPR untuk dapat bantuan perbaikan renovasi atau membangun kelas SDN 6 dan pengecatan;
2. Sedangkan kelas yang bocor agar dapat dibantu untuk diperbaiki;



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel meninjau SDN 6 yang rusak parah, didampingi oleh Bupati Bone Bolango dan jajaran Pemda serta PUPR serta Para Guru SDN 6 Kab. Bone Bolango.

3. Meminta PUPR agar dapat merencanakan anggaran renovasi untuk SDN 6;
4. Agar Dinas terkait mengusulkan kepada Pemda untuk dapat dianggarkan.

**Rabu (28/07), Kota Gorontalo, Pukul 10.00**

**Bentuk Kegiatan:** Penyerahan Beras *stunting* Fortivit dari Bulog dan Alsintan (*Power Thresher* Multiguna) dari Kementerian Pertanian RI oleh Rachmat Gobel kepada masyarakat dan Kelompok Tani didampingi Walikota Gorontalo,

**Peserta:** Walikota Gorontalo, Staf. Khusus, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kesehatan, Anggota DPRD, Kementerian Pertanian RI, Pengurus DPD Partai NasDem Kota Gorontalo dan Ketua Garnita Partai NasDem

**Isu:**

1. Pencegahan *stunting* bagi masyarakat di Kota Gorontalo;
2. Masih terdapat gizi buruk bagi balita yang belum diselesaikan;
3. Masyarakat banyak kehilangan pekerjaan pada masa pandemi Covid-19;
4. Banyak keluarga yang masih kekurangan, terutama petani kecil di kota Bara

5. Banyak ibu hamil yang perlu asupan gizi;
6. Angka kematian tahun 2018 sangat tinggi, sekarang sudah menurun;
7. Kurangnya alat pertanian untuk menaikkan hasil panen/produksi, dan para petani sangat membutuhkan peralatan tersebut;
8. Banyak lahan pertanian yang belum bisa dikelola dengan baik;

***Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:***

1. *Stunting* harus diselesaikan secara sungguh-sungguh, dan bertahap;
2. Membantu memberikan bantuan beras Fortivit, beras yang mengandung vitamin bagus untuk anak balita dan ibu hamil, penambahan gizi dan meningkatkan imun tubuh, diberikan pada saat pandemi Covid-19;
3. Para petani sangat membutuhkan bantuan beras bervitamin untuk menurunkan angka *stunting*;
4. Bantuan untuk *stunting* akan dilaksanakan secara bertahap oleh Rachmat Gobel pada reses berikutnya untuk meningkatkan kesejahteraan;
5. Dalam pemberian bantuan *stunting* khususnya beras Fortivit perlu adanya pendataan untuk masyarakat;
6. Akan memberikan bantuan alat pertanian (*Power Thresher* Multiguna) yang telah diusahakan melalui Kementerian Pertanian RI, agar hasil panen petani dapat diolah langsung secara optimal;
7. Dalam perawatan alat pertanian tersebut, sebaiknya bekerjasama dengan UKM agar dapat terkoordinir dengan baik dan peralatan tersebut dapat terawat dengan baik;
8. Perlu adanya koordinasi untuk penggunaan alat pertanian tersebut agar dapat bergiliran.

**Rabu (28/07), Kota Gorontalo, Pukul 11.00**

***Bentuk Kegiatan:*** Memberikan bantuan Ventilator dari Rachmat Gobel (sumbangan pribadi) untuk masyarakat Kota Gorontalo yang terkena Covid-19 kepada Walikota Gorontalo.

***Peserta:*** Walikota Gorontalo, Staf. Khusus, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, Anggota DPRD, Kementerian Pertanian, Pengurus DPD Partai NasDem Kota Gorontalo dan Ketua Garnita Partai NasDem dan TA.

***Isu:***

1. Pada masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang terdampak, dan Rumah Sakit sangat membutuhkan ventilator dan alat medis lainnya;
2. Kurangnya vitamin dan obat-obatan bagi masyarakat yang terdampak dan sedang dirawat di rumah sakit;



Walikota Gorontalo menerima bantuan pribadi dari Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berupa Ventilator yang sangat dibutuhkan pasien Covid-19.

3. Kurangnya disiplin masyarakat dalam menjalankan prokes pada saat keluar rumah atau di tempat keramaian.

***Tanggapan dan Arahannya Rachmat Gobel:***

1. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel membantu secara pribadi Alat Kesehatan Ventilator untuk Rumah Sakit Kota Gorontalo yang menangani Covid-19 sebanyak 3 Unit
2. Memberikan bantuan obat-obatan, vitamin dan alat swab kepada masyarakat dan rumah sakit;
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mentaati Prokes dan berdisiplin memakai masker, serta menjauhi kerumunan.

**Rabu (28/07), Kota Gorontalo, Pukul 12.00**

**Bentuk Kegiatan:** Pertemuan Wakil Ketua DPR RI dengan Walikota Gorontalo, Staf Khusus, Pimpinan OPD Kota Gorontalo, Dinas terkait Kota Gorontalo dan Kementerian Pertanian RI

**Peserta:** Walikota Gorontalo, Staf Khusus, Pimpinan OPD Kota Gorontalo, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Pimpinan OKKP, Direktorat Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI dan Garnita Kabupaten Gorontalo

**Isu:**

1. Memerangi Covid-19 untuk masyarakat Gorontalo;
2. Kurangnya vaksin dan *Swab* PCR serta APD di daerah-daerah;
3. Kurang APD di Kota Gorontalo untuk membangun dan mengembangkan Kota Gorontalo;
4. Kendala dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia Timur;
5. Belum adanya pemikiran untuk meningkatkan produk organik dan hidroponik contohnya minyak kutus-kutus;
6. Kurangnya informasi pemberian bea siswa bagi masyarakat Gorontalo.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Mengkampanyekan untuk hidup sehat taat prokes dalam memerangi covid;
2. Memberikan bantuan Alat Kesehatan kepada Rumah Sakit;
3. Memberikan bantuan obat-obatan dan APD kepada Rumah Sakit Gorontalo;
4. Untuk memajukan sektor pertanian/pangan perlu adanya kerjasama dengan Perusahaan Pupuk;
5. Perlu disampaikan kepada Dinas terkait atau Kementerian untuk dapat membantu membuat *Green House* untuk membangun produk hidroponik yang nantinya akan membantu meningkatkan perekonomian;
6. Bekerjasama dengan Koperasi agar pemasarannya lebih luas dan terkoordinir dengan baik;
7. Koperasi dapat bekerjasama dengan Bulog dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
8. Mengusahakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi.

**Kamis (29/07), Kabupaten Puhowato, Pukul 11.00**

**Bentuk Kegiatan:** Penyerahan Bantuan *stunting* Beras Fortivit dari Bulog dan Bantuan Alsintan (Traktor dan *Power Thresher* Multiguna) dari Kementerian Pertanian RI oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel kepada Kelompok Tani didampingi oleh Kementan RI dan Dinas Pertanian Kabupaten Puhowato serta Bupati Bone Bolango.

**Peserta:** Bupati Bone Bolango, Anggota DPRD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Kementerian Pertanian RI, Kelompok Tani dan Masyarakat penerima *stunting* beras.

**Isu:**

1. Pencegahan *stunting* bagi masyarakat di Kota Gorontalo;
2. Masih terdapat gizi buruk bagi balita yang belum diselesaikan dan untuk mengentaskan kemiskinan;
3. Masyarakat banyak kehilangan pekerjaan pada masa pandemi Covid-19;
4. Banyak keluarga yang masih kekurangan, terutama petani kecil;
5. Kurangnya alat pertanian untuk menaikkan hasil panen/produksi, dan para petani sangat membutuhkan peralatan tersebut.
6. Kurang pengelolaan lahan pertanian yang belum tertangani dengan baik;

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Memberikan bantuan beras Fortivit (beras bervitamin dan untuk penambahan gizi) untuk meningkatkan imun tubuh, diberikan pada saat pandemi Covid-19;
2. Para petani sangat membutuhkan bantuan beras, agar angka *stunting* menjadi turun di Kabupaten Pohuwato;
3. Bantuan untuk *stunting* berupa beras Fortivit akan dilakukan secara bertahap oleh Rachmat Gobel pada reses berikutnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
4. Pemberian bantuan *stunting* khususnya beras Fortivit perlu adanya pendataan untuk masyarakat, agar semua mendapatkan bantuan;
5. Memberikan bantuan Alsintan (Traktor dan *Power Thresher* Multiguna) yang diusahakan oleh Rachmat Gobel melalui Kementerian Pertanian RI;
6. Setelah diberikan bantuan alat pertanian tersebut maka untuk perawatan sebaiknya dapat bekerjasama dengan Koperasi agar dapat dikelola dgn baik;
7. Perlu adanya koordinasi untuk penggunaan alat pertanian tersebut agar dapat bergiliran.

**Kamis (29/07), Kabupaten Boalemo, Pukul 13.00**

**Bentuk Kegiatan:** Silaturahmi dengan Keluarga Pondok Pesantren Alkhairaat Tilamuta, Kabupaten Boalemo dihadiri oleh Plt. Bupati Boalemo dan Bupati Bone Bolango serta Kepala Balai Perumahan.

**Peserta:** Plt. Bupati Boalemo, Bupati Bone Bolango, Anggota DPRD, Staf Khusus, Pimpinan Ponpes Alkhairaat Tilamuta, Ustad, Para Santri/wati,



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan Sambutan pada acara Silaturahmi dengan Keluarga Besar Asatiz dan Santri Pondok Pesantren Alkhairaat Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Kepala Kanwil Perumahan Sulawesi I, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Direktorat Sarana dan Prasarana Kementan, dan Tenaga Ahli

**Isu:**

1. Pondok Pesantren Alkhairaat Tilamuta, selama 53 tahun belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah
2. Tempat pendidikan/kelas maupun asrama Pesantren kurang memadai, dikarenakan banyaknya Santri/wati yang belum tertampung;
3. Untuk tempat ibadah untuk santri/wati/guru/pengurus masih kurang;
4. Sarana dan prasarana kurang tertata rapi dan kurang memadai misalkan toilet, sarana olah raga, ruang guru dan lain-lain;
5. Kondisi keuangan PemKabupaten Boalemo tidak mencukupi untuk membantu.

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. Mendesak agar PUPR dapat membantu untuk membangun gedung sekolah dan asrama Pondok Pesantren Alkhairaat atau rumah susun;
2. Telah terealisasi pembangunan gedung sekolah dan asrama pondok Pesantren Alkhairaat dengan kapasitas untuk 56 siswa, dan dilakukan peletakan batu pertama oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel;



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel meletakkan batu pertama sebagai penanda dimulainya pembangunan asrama Pondok Pesantren Al-Akhirat Tilamuta yang pengerjaannya mendapat bantuan Rachmat Gobel senilai Rp 2,5 miliar.

3. Pemberian bantuan tempat tidur susun, kasur, lemari, dan juga sarana belajar untuk di sekolahdan juga perlu adanya master plan untuk Pondok Pesantren;
4. Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel memberikan arahan agar menyusun *masterplan* dalam perencanaan dan pengembangan Ponpes. Alkhairaat;
5. Membangun SDM Gorontalo ke depan, agar menjadi bangsa yang tangguh di kancah nasional dan internasional.

**Kamis (29/07), Kabupaten Boalemo, Pukul 14.00**

**Bentuk Kegiatan:** Peletakan Batu Pertama Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Alkhairaat Tilamuta oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel didampingi oleh Plt. Bupati Boalemo dan Bupati Bone Bolango serta Kepala Balai Perumahan (PUPR) dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alkhairaat.

**Peserta:** Plt. Bupati Boalemo, Bupati Bone Bolango, Anggota DPRD, Staf Khusus, Pimpinan Ponpes Alkhairaat Tilamuta, Ustad, Para Santri/wati,

Kepala Kanwil Perumahan Sulawesi I (PUPR), Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Direktorat Sarana dan Prasarana Kementan, dan Tenaga Ahli.

**Isu:**

1. Pencegahan *stunting* bagi masyarakat di kabupaten Boalemo;
2. Masih terdapat gizi buruk bagi balita yang belum diselesaikan;
3. Masyarakat kehilangan pekerjaan pada masa pandemi Covid-19;
4. Kondisi Keuangan Daerah tidak memungkinkan
5. Banyak keluarga yang masih kekurangan, terutama petani kecil;
6. Kurangnya alat pertanian untuk menaikkan hasil produksi bagi petani;
7. Perlunya bantuan alat pertanian untuk kelompok Tani

**Tanggapan dan Arahan Rachmat Gobel:**

1. *Stunting* harus diselesaikan secara sungguh-sungguh, dan bertahap;
2. Bantuan untuk *stunting* akan dilaksanakan secara bertahap, dengan memberikan bantuan beras Fortivit, beras bervitamin yang akan diprogramkan setiap masa reses oleh Rachmat Gobel;
3. Membangun anak sehat dan keluarga bahagia merupakan cita-cita Rachmat Gobel dalam membangun Gorontalo;
4. Para petani sangat membutuhkan bantuan beras untuk menurunkan angka *stunting* dan pemberian bantuan tersebut perlu adanya pendataan bagi masyarakat yang akan diberikan bantuan;
5. Untuk meningkatkan hasil pertanian para petani Gorontalo, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel memberikan bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian RI berupa Traktor Roda Empat dan *Thresher* Multiguna kepada Kelompok Tani;
6. Pemberian bantuan perlu adanya pendataan masyarakat yang akan diberikan;
7. Dalam perawatan alat pertanian tersebut, sebaiknya bekerjasama dengan Koperasi agar dapat terkoordinir baik dan peralatan tersebut dapat terawat dengan baik;
8. Perlu adanya koordinasi untuk penggunaan alat pertanian tersebut agar dapat bergiliran.

**Jumat (30/07), Kota Gorontalo, Pukul 14.00**

**Bentuk Kegiatan:** Pelantikan Pengurus DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo oleh Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sulawesi Partai NasDem Rachmat Gobel

**Peserta:** Pengurus DPW Gorontalo yang akan dilantik, Pengurus DPD Kabupaten Partai NasDem



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Pengurus Baru DPW Partai NasDem Gorontalo.

### **Jumat (30/07), Kota Gorontalo, Pukul 17.00**

**Bentuk Kegiatan:** Silaturahmi dengan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, Bapeda, Dinas-Dinas, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Peserta:** Walikota Gorontalo, Wakil Walikota Gorontalo, Sekda Kota Gorontalo, Kepala Dinas, Bapeda, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Staf Khusus, dan TA.

## **B. Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat**

### **1. Bidang Kesehatan**

- a. Penuntasan masalah *stunting* bukan hanya tanggung jawab BKKBN, juga butuh peran aktif Kementerian dan Pemerintah Daerah harus saling membantu untuk menurunkan *stunting*, khususnya 5 Kabupaten dan 1 Kota di Gorontalo;
- b. Dalam penurunan *stunting* perlu melibatkan sektor swasta dan peran serta *stakeholder* dan masyarakat Gorontalo;
- c. Dalam pemberian bantuan di kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo perlu menginventarisir terlebih dahulu masyarakatnya yang akan menerima bantuan, agar tidak ada yang terlewatkan.

## **2. Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan**

- a. Di Kabupaten Bone Bolango (desa Suwawa) terdapat area persawahan 3.000 ha yang belum dimaksimalkan, dan perlu bantuan untuk menambah produksi dalam musim tanam; Perlunya bantuan pupuk untuk para petani, dalam meningkatkan produksi tanam padi di Kabupaten Gorontalo;
- b. Kurangnya Alsintan yang digunakan oleh kelompok tani untuk menggarap sawah;
- c. Petani kurang mengetahui begitu besarnya arti koperasi yang dapat memasarkan hasil produksi pertanian/peternakan/perikanan/perkebunan ke tingkat nasional bahkan internasional.

## **3. Bidang Pendidikan dan Peningkatan SDM**

- a. Kondisi saat ini kualitas SDM di Gorontalo sangat memprihatinkan, ditambah lagi presentase angka putus sekolah di Gorontalo cukup tinggi;
- b. Kurangnya bantuan bea siswa bagi siswa Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi;
- c. Sosialisasi untuk peningkatan pendidikan pada masyarakat Gorontalo.

## **4. Bidang Infrastruktur Sarana dan Prasarana.**

- a. Masyarakat Gorontalo banyak yang mempunyai tempat tinggal yang kurang layak, mereka memerlukan bantuan BSPS dari Pemerintah di Kabupaten dan Kota;
- b. Dengan banyaknya siswa santri/wati di Kabupaten Boalemo, perlu pengembangan pembangunan pondok pesantren;
- c. Perlunya sarana pengembangan pelabuhan khususnya di Gorontalo Utara yang selama ini akan dijadikan pelabuhan internasional;
- d. Sarana Gelora Olah Raga di Kabupaten Bone Bolango yang sedang dalam proses pembangunan terhenti dan belum adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah setempat.

## **5. Bidang UKM dan Koperasi**

- a. Belum adanya pengelolaan koperasi yang sifatnya untuk pemeliharaan terkait dengan bantuan Alsintan dari Pemerintah berupa Traktor, Mesin Air, Mesin *Thresher* Multiguna, *Demplot*, dan sebagainya;
- b. Sosialisasi perlu diberikan kepada para petani untuk dapat meningkatkan hasil pertanian melalui Koperasi dan UMKM;



Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel mendengar penjelasan teknis penggunaan traktor yang merupakan bantuan untuk sejumlah kelompok tani di Provinsi Gorontalo.

- c. Kurangnya bantuan modal untuk para kelompok tani, dan perlunya ada sosialisasi untuk para pelaku UKM dan Koperasi.

## **6. Perekonomian dan Perbankan**

Kawasan Indonesia Timur, dalam konteks pengembangan ekonomi syariah, masih perlu upaya keras dan serius. Per April 2021, pembiayaan syariah untuk modal kerja di kawasan ini hanya 5,66% dari total nasional untuk konsumsi 21,17%. Ketimpangan antara modal kerja dan konsumsi ini tentu memprihatinkan. Karena pembiayaan untuk sektor produktif sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ternyata jika dilihat lebih dalam, salah satu faktornya adalah karena masih relatif rendahnya infrastruktur kantor lembaga keuangan syariah di Kawasan Timur Indonesia.

### C. Solusi dan Tindak Lanjut

1. Memenuhi aspirasi masyarakat dalam mengurangi angka *stunting* di Gorontalo Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menyampaikan kepada Bulog agar diberikan bantuan beras. Bulog menyambut baik dan akan memberikan bantuan 12 ton beras Fortivit (beras bervitamin) yang telah dipaket untuk 2.400 KK setiap paket berisi 5 kg beras yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota di Gorontalo.

Menurut Rachmat Gobel, untuk mempersiapkan SDM kedepan harus dimulai sejak dini, dari ibu mengandung dan masyarakat yang sehat. Program bantuan beras Fortivit akan terus berkelanjutan dengan jumlah diusahakan bertambah.

Untuk bidang kesehatan, Rachmat Gobel juga memberikan bantuan 6 (enam) unit Ventilator di RSUD Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango untuk membantu pasien Covid-19. Ventilator ini merupakan sumbangan pribadi Rachmat Gobel.

2. Dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan menaikkan hasil produksi, Rachmat Gobel memberikan bantuan alsintan dan bibit jagung untuk 6 Kabupaten/Kota. Bantuan berupa traktor roda empat, mesin *thresher* multiguna /penggiling padi. Selain itu Rachmat Gobel juga memberikan bantuan bibit jagung untuk lahan seluas 54.000 ha lahan di enam Kabupaten/Kota. Ini merupakan hasil aspirasi masyarakat Gorontalo yang disampaikannya ke Kementerian Pertanian.

Untuk perawatan peralatan seharga Rp 400 juta itu, ia menyarankan agar Kelompok Tani dan Koperasi berkerjasama. Rachmat Gobel menyampaikan akan membangun Provinsi Gorontalo melalui 3 sektor yaitu pertanian, perkebunan dan perikanan. Jika ketiganya bisa dikelola dengan baik, kemiskinan Gorontalo akan teratasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Menurut data Dinas Pendidikan Gorontalo dari total 50.831 murid SMA, SMK, SLB di Gorontalo, tercatat 500 orang tidak lagi melanjutkan sekolah. Rachmat Gobel ingin mengajak semua pihak baik tokoh pendidikan dan tokoh agama untuk saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas SDM di Gorontalo.

Rachmat Gobel juga telah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar beasiswa di Gorontalo dapat ditingkatkan. Tidak hanya itu para guru dan dosen juga akan diusahakan mendapatkan program beasiswa dari Kemendikbud.

Kualitas pendidikan di Gorontalo harus diperbaiki, agar bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional dalam menghadapi era globalisasi.

4. Untuk membantu mengentaskan kemiskinan Rachmat Gobel juga memberikan bantuan BSPS melalui Kementerian PUPR RI sebanyak 2.000 unit rumah untuk ke seluruh Kabupaten/ Kota di Gorontalo. Selain itu ia juga melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan rumah susun untuk Asrama Santri Pondok Pesantren Al Khairaat di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Pesantren yang berdiri 53 tahun yang lalu, program ini merupakan aspirasi masyarakat yang telah diatampung Rachmat Gobel untuk diteruskan kepada Kementerian PUPR.

Berkat perjuangannya pembangunan Asrama Dua lantai untuk santri dapat terwujud. Asrama ini memiliki kapasitas 56 santri yang akan dilengkapi dengan tempat tidur susun beserta kasur, dan lemari pakaian. Anggaran pembangunan Rp 2,3 miliar dan rencana selesai dalam 5 bulan.

Dalam pertemuan dengan AlKhairaat, Rachmat Gobel mengatakan, membangun SDM sangat penting. Ada filosofi bahwa sebelum memproduksi sesuatu, SDM-nya harus disiapkan terlebih dahulu.

5. Sebagai Wakil Rakyat, Rachmat Gobel mengharapkan pemda memacu bangkitnya UMKM. Harus ada insentif, dan hal ini harus menjadi pemikiran pemerintah ke depan. Sektor pangan dan fesyen didominasi oleh pelaku UMKM. Karena itu Rachmat Gobel mendorong dua sektor ini menjadi produk unggulan berarti akan menyejahterakan rakyat banyak, akan menyerap tenaga kerja yang sangat besar, dan yang terpenting akan membangun rasa percaya diri bangsa, khususnya masyarakat Gorontalo..

6. Di tengah masih kecilnya kontribusi ekonomi syariah secara umum, ternyata kita mendapati bahwa jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah justru sangat besar, yaitu 35,09%, sedangkan lembaga keuangan mikro konvensional adalah 64,91 persen. Data tahun 2020 ini juga menunjukkan bahwa nilai aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah 40,48%. Proporsi ini tentu sangat membanggakan. Ini menunjukkan bahwa pelaku ekonomi syariah berada di garda depan dalam memihak dan membela ekonomi mikro. Rachmat Gobel mendorong agar Bank Indonesia dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat Gorontalo serta memberikan bimbingan teknis agar pelaku ekonomi mikro dapat memahami dan berkontribusi terhadap perbankan syariah.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel meninjau pelaksanaan proyek pengendalian banjir Sungai Bone oleh Kementerian PUPR.

Sebagai wakil rakyat dari Gorontalo meminta dengan khusus agar lembaga-lembaga keuangan syariah untuk lebih proaktif membuka kantornya sebanyak yang bisa dilakukan. Tunjukkan pemihakan dan pembelaannya terhadap yang lemah. Salah satu pemihakan dan pembelaan itu adalah dengan membuka kantor-kantor baru di Kawasan Timur Indonesia. Namun kita harus mengakui bahwa kontribusi ekonomi syariah masih harus terus ditingkatkan lagi.



Plakat ucapan terima kasih dari salah satu keluarga penerima program BSPS kepada Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel.

# LAMPIRAN



Penghargaan dari "Kordinatori  
Wartawan Parlemen DPR RI"  
(KWP) kepada "Rachmat Gobel"  
sebagai pimpinan DPR RI yang  
dinilai aspiratif.



BUPATI GORONTALO UTARA

## UCAPAN TERIMA KASIH

ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH & MASYARAKAT GORONTALO UTARA,  
DENGAN RASA BANGGA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA BAPAK :

**DR. RACHMAD GOBEL**  
WAKIL KETUA DPR - RI

ATAS PERJUANGAN DAN DUKUNGANNYA MENGALOKASIKAN ANGGARAN  
UNTUK BERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN TAHUN 2020  
DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

KWANDANG, 28 DESEMBER 2020



**Dr. INDRA YASIN, SH.,MH**

Ucapan terima kasih dari Bupati Gorontalo Utara kepada "Rachmat Gobel" atas perjuangan dan dukungan mengalokasikan anggaran untuk sektor pembangunan tahun 2020 untuk Kabupaten Gorontalo Utara.

# Ucapan Terima Kasih

Koperasi (KSU)

**"JAYA USAHA BERSAMA"**

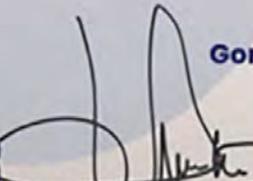
Desa Limehe Timur Kec. Tabongo

Kepada

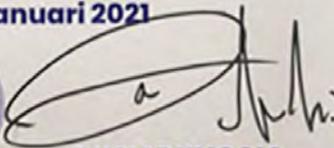
**BANK INDONESIA**

Atas bantuan berupa mesin pertanian  
olah lahan komoditas jagung  
melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI)

Gorontalo, 04 Januari 2021

  
**MOH. YAMIN MOONTI**  
Ketua Koperasi



  
**RUSLI DUNGGIO**  
Sekretaris Koperasi

Penghargaan dari Koperasi "JAYA USAHA BERSAMA" kepada "BANK INDONESIA", yang disampaikan melalui Rachmat Gobel pada saat kegiatan Reses di Gorontalo.

Ucapan Terima Kasih

Kelompok Tani

**"ANGKAGETA"**

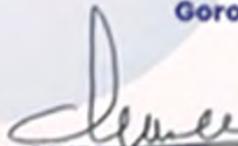
Desa Hunthulohulawa Kec. Bongomeme

Kepada

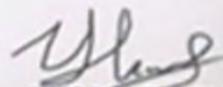
**BANK INDONESIA**

Atas bantuan berupa mesin pertanian  
olah lahan komoditas jagung  
melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI)

Gorontalo, 04 Januari 2021

  
**MURTIN DEHI**  
Ketua Kelompok



  
**HUSAIN SALEH**  
Sekretaris Kelompok

Penghargaan dari Kelompok Tani "ANGKAGETA" kepada "BANK INDONESIA", yang disampaikan melalui Rachmat Gobel pada saat kegiatan Reses di Gorontalo.

# Tentang Penulis

## Dra. Hj. Nining Indra Shaleh, M.Si



Dra. Hj. Nining Indra Shaleh, M.Si, lahir di Cirebon, alumnus UGM ini semasa kuliah merupakan salah satu aktivis mahasiswa yang aktif dalam Gerakan Himpunan Mahasiswa Indonesia dan dipercaya untuk memimpin HMI-WATI Cabag Yogyakarta periode 1978-1980. Pengalamannya sebagai aktivis kampus ini, merupakan modal dasar bagi pengembangan kapasitas pribadinya.

Dalam kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara. Nining Indra Shaleh pernah menjabat sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) DPR RI periode 2008-2013. Tidak hanya di birokrasi Nining Indra Shaleh pernah menjabat sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai NasDem 2015-2017 dan Kepala Sekolah Legislatif Partai NasDem (2014-2019). Saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPP Partai NasDem. Dengan berbekal segudang pengalaman Nining Indra Shaleh juga di percaya oleh Partai NasDem untuk menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel 2019-sekarang.



## Nasihin Masha

Nasihin Masha lahir Cirebon dan kini tinggal di Jakarta. Selama 25 tahun berkarier sebagai wartawan di Republika, dengan posisi terakhir sebagai pemimpin redaksi. Setelah itu menjadi Staf Ahli Direksi BPJS Kesehatan. Sarjana Sisiologi Unsoed Purwokerto itu kini Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang.



## **Drs. Budi Jatnika, M.Si.**

Drs. Budi Jatnika, M.Si. lahir di Jakarta, 25 November 1969. Menyelesaikan Strata-1 tahun 1993 di Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dan Tahun 2005 menyelesaikan Strata-2 program studi Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Saat ini sebagai Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

Mempunyai pengalaman sebagai tim pendukung penyusunan dan pembahasan UU diantaranya UU tentang Kementerian Negara; UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden; UU tentang Resi Gudang; UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; UU tentang Perkoperasian; UU tentang Lembaga Keuangan Mikro; UU tentang Perindustrian; UU tentang Perdagangan.

Membantu penyusunan buku berjudul “Pengembangan dan Pengelolaan Panas Bumi di Indonesia: Kondisi Terkini, Tantangan dan Alternatif Solusi; Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Skala Kecil: Alternatif Solusi di Indonesia; Kendaraan Bermotor Listrik Nasional: Pokok-Pokok Pemikiran Dr. Agus Hermanto; dan Menyerap Aspirasi Menciptaka Solusi : Satu Tahun Kiprah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Dr. (H.C.) Rachmat Gobel.

## Dra. Rini Koentarti, M.Si,



Dra. Rini Koentarti, M.Si, Lahir di Kota Kediri, Jawa Timur. Lulus S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) tahun 1987, lulus S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) tahun 2004, dan S3 Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta (masih desertasi). Saat ini adalah sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

Sebelum menjadi tenaga ahli pernah menjadi Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI tahun 2004, Kepala Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebuah Alat Kelengkapan Dewan yang bertugas menyusun Arah Kebijakan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai Tim Teknis penyusunan awal terbentuknya Rencana Strategis (Renstra) DPR RI tahun 2010. Pada tahun 2014 sebagai Kepala Sekretariat Komisi VII DPR RI yang membidangi Energidan Lingkungan Hidup, yang sekarang menjadi Energi dan Perindustrian. Tahun 2016 di Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* tugas Dewan dalam bidang keahlian perancangan undang-undang, analisa kebijakan APBN, pemantauan peraturan perundangan dan akuntabilitas keuangan negara untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan. Tim Penyusun Buku Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi Satu Tahun Kiprah Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel.

## Himawan Basuki



Himawan Basuki lahir di Yogyakarta. Dia menyelesaikan pendidikan dasar sampai sekolah lanjutan atas di Yogyakarta. Pendidikan Strata 1 (S1) diperoleh di Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Strata 2 (S2) di Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada. Memulai karier profesional di sebuah bank swasta nasional di Jakarta dan sejak 1994 dia bergabung dengan kelompok usaha Panasonic-Gobel. Sejak bergabung dengan kelompok usaha ini, dia telah ditempatkan (*tour of duty*) di berbagai anak perusahaan dan sampai

saat ini masih aktif di kelompok usaha ini.

## Andreas Ambesa



Andreas Ambesa, lahir di kota Ende, Flores. Meraih gelar S1 dari Fakultas Sastra Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Mengawali karirnya sebagai jurnalis dan pernah sebagai koresponden Kantor Berita Jepang, Kyodo News Service, Biro Jakarta, 1990. Lebih banyak mengamati masalah hubungan internasional, komunikasi politik dan hubungan masyarakat.

Sebelum memasuki dunia politik, terakhir menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk

(Perusahaan Induk Indosiar Visual Mandiri) 2010.

Karirnya di bidang politik menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan DPP Partai NasDem 2013-2019 dan Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI 2015-2019. Kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

## Mulyadin Permana



Mulyadin Permana, lahir di Bima NTB, 07 Juli 1987. Menyelesaikan pendidikan Magister (S2) di Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2015 dan sedang merampungkan Program Doktorat (S3) di Departemen yang sama. Bekerja sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem yang bertugas di Komisi IV DPR RI.

Pernah bergelut di kajian akademik sebagai Direktur Monas English Club (MEC), Direktur Kajian Interpretasi Sosial (KIS), dan Direktur Kajian Kosmologi Strategis (KKS) tahun 2011-2018. Aktif menulis banyak artikel yang dimuat di berbagai media cetak dan elektronik sejak di bangku kuliah hingga sekarang. Pernah menulis beberapa buku hasil kolaraborasi dengan kawan-kawan peneliti FISIP UI dan beberapa kementerian.

Selain bekerja, menulis, dan bergelut di dunia akademik, juga aktif berorganisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Pernah menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DKI Jakarta, masih memegang posisi sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) PWNUI DKI Jakarta dan Wakil Ketua Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta.

## Hafizurrahman



Hafizurrahman lahir di Binjai Sumatera Utara, pada 1987, Menyelesaikan Pendidikan Magister (S2) pada 2013 di departemen Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Bekerja sebagai Tenaga Ahli anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem 2014-2019 dan sekarang sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI/Korinbang. Tim Penyusun Buku Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi Satu Tahun Kiprah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

## Ajeng Kusumaning Ayu



Ajeng Kusumaning Ayu, Lahir di Lumajang 06-06-1992. Telah menyelesaikan Program Magister (S2) di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada tahun 2019, dan sekarang sedang menyelesaikan Program Doktorat (S3) di Universitas Diponegoro.

Bekerja sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR-RI Bidang Korinbang, yang bertugas untuk melakukan serapan aspirasi masyarakat diluar daerah Pemilihan. Selain bekerja sebagai tenaga ahli juga aktif berorganisasi sebagai

wakil bendahara umum pengurus DPP KNPI. Ajeng bergelut di dunia organisasi semenjak masih duduk di bangku kuliah S1, bermula karir di HMI tingkat komisariat hingga pernah menjadi pengurus besar PB HMI. Selain itu di kampus pernah menjadi ketua umum badan legislatif tingkat fakultas, untuk hal terkait politik bukan hal yang baru untuk saya tekuni.

## Muh. Ardiansah Laitte



Muh. Ardiansah Laitte, lahir di Makassar 19 Januari 1987 menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin (Unhas) pada tahun 2011 dan melanjutkan Program Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2017. Saat ini tengah bekerja sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem yang bertugas pada Badan Anggaran.

Selain itu, penulis aktif di dalam aktivitas riset dan kemasyarakatan. Sampai saat ini penulis tercatat menjadi peneliti di Suropati Syndicate. Penulis juga aktif menulis di berbagai media baik itu cetak maupun elektronik bahkan menjadi founder dari Locita.co yang merupakan platform digital bagi para penulis pemula.

Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi intra maupun ekstra kampus. Pernah menjadi Ketua I Ikatan Mahasiswa Akuntansi dan Direktur Ekonomi Pusat Studi Demokrasi Unhas . pada organisasi eksternal penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan pernah menjabat sebagai Direktur Badan Pengelola Pelatihan HMI cabang Makassar Timur dan Ketua Balitbang PB HMI periode 2015-2017.

# Editor

## Herman Effendi



Herman Effendi lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Padang, Sumatera Barat, dan menamatkan sekolah lanjutan atas di Bogor, Jawa Barat. Pendidikan strata 1 (S1) diperoleh di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mengawali karir sebagai wartawan Harian Ekonomi Neraca pada 1990, dipercaya mengasuh rubrik wawancara khusus dengan pejabat, pengusaha dan akademisi pada masa itu. Dalam perjalanannya kemudian, pemegang sertifikat Fund Manager dari Masyarakat

Pasar Modal Indonesia ini, diminta untuk menggawangi rubrik Ekonomi Makro dan Finansial ini lebih dari 10 tahun. Pada saat bersamaan juga aktif sebagai penulis di Jurnal Pasar Modal yang diterbitkan Economic Financial Research (ECFIN), dan jurnal Strategic Intelligence, buletin bulanan yang diterbitkan lembaga asing yang bergerak di bidang konsultan investasi.

Pada 2005, mengundurkan diri dari Harian Ekonomi Neraca, untuk mendirikan dan mengelola lembaga yang bergerak di bidang strategic communication bersama sejumlah teman. Lembaga ini sampai sekarang bermitra dengan sejumlah klien, perusahaan dalam negeri maupun multinasional, serta lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Sejak tahun 2019 dia juga tercatat sebagai salah seorang Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) D.R. (H.C.) Rachmat Gobel. (\*)

**MENYERAP ASPIRASI  
MENCiptAKAN SOLUSI**

# **KEPENTINGAN NASIONAL DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2**

KIPRAH TAHUN KE-2  
WAKIL KETUA DPR RI/KORINBANG  
**DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL**

Buku Kepentingan Nasional dan Agenda Pembangunan ini merupakan laporan kegiatan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel sepanjang periode Oktober 2020-September 2021. Frasa Kepentingan Nasional dan Agenda Pembangunan merupakan wujud dari tema “Menyerap Aspirasi, Mencari Solusi” yang merupakan semangat yang selalu ada, baik saat memimpin perusahaan, berbagai organisasi maupun sebagai wakil rakyat dari Fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Gorontalo yang diembannya saat ini.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif, Rachmat Gobel selalu mengedepankan kepentingan nasional, dan ini sudah menjadi landasannya sejak masih aktif sebagai pengusaha dan berbagai organisasi sosial dan dunia usaha.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif seperti diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UUU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, Rachmat Gobel selalu mengacu pada kepentingan nasional.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dan juga anggota Komisi IX, pasal 33 UUD menjadi dasar Rachmat Gobel dalam menjalankan fungsi tersebut. Berupaya memastikan berbagai program kerja dan agenda pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak berseberangan dengan kepentingan nasional yang diamanatkan konstitusi.

Ruang lingkup buku ini meliputi kegiatan Rachmat Gobel sebagai anggota dewan asal daerah pemilihan Gorontalo, dan juga berbagai kegiatan sebagai pimpinan DPR RI. Solusi dan gagasan telah diperjuangkan untuk menjaga kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya ekonomi nasional agar dirasakan semua lapisan masyarakat. Rachmat Gobel juga aktif memperkuat diplomasi kerjasama ekonomi. Ia juga diamanatkan menjadi Ketua Tim Pengawas Pembangunan Wilayah Perbatasan dan sebagai penasehat Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

**BAGIAN PENERBITAN  
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN  
SETJEN DPR RI**

Gedung Nusantara II Lt.3  
Jl. Jend. Gatot Subroto-Senayan  
Jakarta-10270  
Tel.021-571 5687 Fax 021-571 5421  
Email: bag\_penerbitan@dpr.go.id